

**KEWIRAUSAHAAN
INDUSTRI**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI

Edy Dwi Kurniati





deepublish | **publisher**

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kurniati, Edy Dwi

Kewirausahaan Industri/oleh Edy Dwi Kurniati.--Ed.1, Cet. 3--
Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018.

xii, 354 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN **978-602-401-096-6**

1. Kewirausahaan

I. Judul

338.04

Hak Cipta 2018, Pada Penulis
Cetakan Pertama, November 2015
Cetakan Kedua, Februari 2017

Desain cover : Unggul Pebri Hastanto
Penata letak : Invalindiant Candrawinata

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Copyright © 2018 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul "*Kewirausahaan Industri*" karya Edy Dwi Kurniati ini dapat terselesaikan dan kami terbitkan.

Buku ini mengkaji kewirausahaan industri yang merupakan bagian atau ranah teori kewirausahaan yang dikembangkan melalui ilmu ekonomi pembangunan. Pembahasan meliputi: pendidikan kewirausahaan, kewirausahaan dan kewiraswastaan, kewirausahaan industri, karakteristik dan pengembangan wirausaha dalam kewirausahaan industri, etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, industrialisasi pertanian di Indonesia, paradigma transformasi industri pertanian, serta pemberdayaan wirausaha sektor pertanian dan industri di pedesaan. Melalui buku ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai kewirausahaan secara teoretis, namun juga pengaplikasiannya dalam sektor industri, terkhusus di sektor pertanian Indonesia.

Akhirnya, dengan diterbitkannya buku ajar ini, diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman komprehensif mengenai kewirausahaan industri, terutama bagi mahasiswa atau pun yang berkecimpung di dalamnya demi keberlanjutan industrialisasi di Indonesia yang lebih baik. Selamat menikmati buku ini.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

1.	Sifat dan Karakteristik Wirausaha.....	130
2.	Tipe Wirausaha.....	140
3.	Keuntungan dan Risiko Wirausaha.....	146
B.	Pengembangan Wirausaha.....	150
1.	Kegiatan Kewirausahaan	150
2.	Hambatan Wirausaha.....	153
3.	Kiat-Kiat Wirausaha pada Saat Memasuki Dunia Usaha Baru	164
C.	Bentuk dan Kepemilikan Usaha.....	170
1.	Bentuk Kepemilikan Usaha.....	170
2.	Tempat Usaha yang Akan Dipilih.....	171
3.	Organisasi Usaha dan Usaha Kecil.....	172

BAB V ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG

JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN..... 185

A.	Definisi Etika Bisnis	185
1.	Prinsip otonomi.....	186
2.	Prinsip kejujuran.....	187
3.	Prinsip tidak berniat jahat.....	187
4.	Prinsip keadilan	187
5.	Prinsip hormat pada diri sendiri	188
B.	Tanggung Jawab Sosial.....	188
1.	Tanggung jawab terhadap konsumen	188

2.	Tanggung jawab terhadap karyawan.....	191
3.	Tanggung jawab terhadap pemegang saham.....	192
4.	Tanggung jawab terhadap kreditor.....	193
5.	Tanggung jawab terhadap lingkungan.....	194
6.	Tanggungjawab terhadap masyarakat.....	195
C.	Penerapan Tanggung Jawab Sosial.....	196
D.	Entrepreneur dan Etika Bisnis.....	198

BAB VI	INDUSTRIALISASI PERTANIAN DI INDONESIA.....	201
A.	Sektor Pertanian di Indonesia.....	202
B.	Bentuk dan Pengelompokan Hasil-Hasil Pertanian di Indonesia.....	204
1.	Bentuk-Bentuk Pertanian.....	204
2.	Pengelompokan Hasil-Hasil Pertanian.....	206
C.	Pembagian Pertanian.....	206
1.	Pertanian tradisional.....	206
2.	Pertanian modern.....	208
D.	Industrialisasi Pertanian.....	215

E.	Permasalahan dan Strategi Sektor Pertanian di Indonesia	217
1.	Permasalahan Sektor Pertanian di Indonesia	217
2.	Strategi Pengembangan Sektor Pertanian.....	222
F.	Agroindustri dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Petani	226
G.	Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Kewirausahaan Industri Pertanian	230
BAB VII	PARADIGMA TRANSFORMASI INDUSTRI PERTANIAN.....	237
A.	Transformasi Sektor Pertanian ke Sektor Industri Selain Pertanian.....	238
B.	Faktor Pendorong Transformasi Sektor Pertanian ke Sektor Industri.....	245
C.	An Eclectic Theory of Entrepreneurship	253
1.	Konsep Dasar An Eclectic Theory of Entrepreneurship.....	253
2.	Pasar Wirausaha	257
3.	Teori Keputusan Wirausaha	266
4.	Aspek Permintaan (<i>Demand Side</i>)	273

D.	Alasan Partisipasi Rumah Tangga Pertanian dalam Aktivitas Industri	279
1.	Faktor Personal	280
2.	Faktor Ekonomi.....	281
3.	Faktor Agrikultural.....	285
4.	Faktor Posisi Politik Petani	287
5.	Faktor Risiko dan Inovasi	293

**BAB VIII PEMBERDAYAAN WIRUSAHA
SEKTOR PERTANIAN DAN
INDUSTRI DI PEDESAAN..... 302**

A.	Arah Pengembangan Sektor Pertanian dan Industri	303
B.	Konsep dan Model Pemberdayaan.....	310
1.	Konsep Pemberdayaan.....	310
2.	Model Pemberdayaan.....	320
C.	Pemberdayaan Wirausaha di Sektor Pertanian dan Industri di Pedesaan.....	329
1.	Kerangka Pemberdayaan Wirausaha di Sektor Pertanian dan Industri di Pedesaan	329
2.	Studi Kasus di Kabupaten Semarang Jawa Tengah.....	335

BAB I

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Kompetensi Inti

Mampu memahami peranan pendidikan kewirausahaan dalam jenjang pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal, khususnya di perguruan tinggi.

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kedudukan ilmu kewirausahaan sebagai bagian dari disiplin ilmu tersendiri.
2. Menganalisis hakikat pendidikan kewirausahaan.
3. Menjelaskan praktek pendidikan kewirausahaan di berbagai jenjang pendidikan formal.
4. Menjelaskan praktek pendidikan kewirausahaan di pendidikan tinggi.
5. Menjelaskan hubungan pendidikan kewirausahaan dalam pendidikan formal, informal dan non formal

A. Ilmu Kewirausahaan

Pendidikan kewirausahaan tidak hanya terbatas pada satu disiplin ilmu, tetapi telah banyak dikaji dalam berbagai disiplin ilmu. Studi psikologi lebih fokus pada motivasi dan karakter wirausaha, studi sosiologi lebih memfokuskan pada lingkungan sosial kewirausahaan atau kelompok wirausaha, studi ilmu ekonomi mencakup dampak dari lingkungan ekonomi, biaya kesempatan, kelangkaan sumberdaya dan hasil, serta perkembangan teknologi terhadap aktivitas wirausaha. Perspektif demografi lebih memusatkan dampak dari komposisi demografis terhadap kewirausahaan. Dari perspektif regulator, pemerintah dapat mempengaruhi kewirausahaan secara langsung melalui perundang-undangan atau kebijakan pendukung dan secara tidak langsung melalui kebijakan untuk mempengaruhi kewirausahaan (Audretsch dkk., 2002).

Faktor –faktor yang mempengaruhi kewirausahaan dapat dipelajari sesuai dengan analisis yang dapat dilakukan pada tingkat mikro, meso dan makro kewirausahaan. Pada tingkat ini menganalisis wirausaha dari tingkat individu, tingkat perusahaan dan analisis pada tingkat industri dan ekonomi secara keseluruhan. Studi di tingkat mikro fokus pada proses pembuatan keputusan oleh individu dan motivasi orang untuk menjadi wiraswasta. Teori kewirausahaan pada level keputusan

individu fokus pada upah atau faktor-faktor personal, seperti ciri-ciri psikologis, pendidikan formal dan keterampilan, aset keuangan, latar belakang keluarga dan pengalaman kerja sebelumnya. Studi kewirausahaan di tingkat meso fokus pada persepektif organisasi (perusahaan) yang meliputi kapasitas sumberdaya (akses pasar, keuangan, manajerial, teknologi, *networking*) dan lingkungan bisnis. Perspektif makro mencoba untuk mengumpulkan argumen di tingkat mikro dan meso serta fokus pada berbagai faktor lingkungan, seperti variabel teknologi, ekonomi dan budaya. Studi kewirausahaan di tingkat makro juga fokus pada perbedaan pasar kewirausahaan, seperti peluang keuntungan, kesempatan masuk dan keluar kewirausahaan pada sektor industri tertentu. Penelitian level makro fokus terutama pada analisis tingkat negara, tetapi secara eksplisit mencoba untuk menghubungkan tingkat negara dengan tingkat individu (Blanchflower, 2000).

Analisis kewirausahaan pada level makro secara umum dapat dijelaskan dengan membuat perbedaan antara sisi pasokan (perspektif pasar tenaga kerja) dan sisi permintaan (perspektif pasar produk, daya dukung pasar) kewirausahaan. Perbedaan ini kadang-kadang disebut sebagai faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*) (Vivarelli, 1991). Sisi permintaan kewirausahaan merupakan peluang untuk berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari perspektif konsumen dan

perspektif perusahaan. Dalam perspektif konsumen, keragaman permintaan konsumen adalah penting. Semakin besar keragaman, lebih banyak ruang diciptakan untuk (calon) wirausaha. Dalam perspektif perusahaan yang fokus pada struktur industri (struktur sektor, *out sourcing*, *networking*), peluang wirausaha dipengaruhi perkembangan teknologi dan peraturan pemerintah. Sisi penawaran kewirausahaan didominasi oleh penduduk dan komposisi penduduk. Demografi adalah kemampuan individu dan sikap mereka terhadap kewirausahaan ('preferensi'). Sisi penawaran kewirausahaan dipengaruhi oleh lingkungan budaya dan kelembagaan.

Studi dampak perbedaan faktor kewirausahaan penting untuk membedakan antara rata-rata aktual kewirausahaan yang dihasilkan dari keseimbangan jangka pendek pasokan dan permintaan, dan tingkat keseimbangan jangka panjang keadaan perkembangan, yaitu teknologi dan struktur pasar. Faktor-faktor penentu kewirausahaan dapat dipelajari dari perspektif yang berbeda, kerangka untuk menjelaskan peran pemerintah tersebut disajikan dengan menggabungkan pendekatan interdisipliner yang berbeda, tingkat analisis, perbedaan antara sisi permintaan dan sisi pasokan serta tingkat 'keseimbangan' kewirausahaan (Audretsch dkk., 2002).

Menurut Prawirokusumo (1997), pendidikan kewirausahaan harus menjadi bagian disiplin ilmu

tersendiri yang independen (*independent academic dicipline*), karena:

- a. Kewirausahaan berisi *body of knowledge* yang utuh dan nyata (*distinctive*), yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap.
- b. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu sebagai *venture start-up* dan *venture-growth*. Hal ini jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum (*frame work general management courses*) yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha (*business ownership*).
- c. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create new and different things*).
- d. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan (*wealth creation process an entrepreneurial endeavor by its own night, nation's prosperity, individual self-reliance*) atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

B. Pendidikan Kewirausahaan

1. Tujuan Pendidikan Kewirausahaan

Menurut Solomon dan Fernald (1991) serta Hisrich dan Peters (2002) sebagaimana dikutip Bell (2008), pendidikan kewirausahaan tradisional memfokuskan pada

penyusunan rencana bisnis, bagaimana mendapatkan pembiayaan, proses pengembangan usaha dan manajemen usaha kecil. Pendidikan tersebut juga memberikan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan dan keterampilan teknis bagaimana menjalankan bisnis. Namun demikian, peserta didik yang mengetahui prinsip-prinsip kewirausahaan dan pengelolaan bisnis tersebut belum tentu menjadi wirausaha yang sukses (Bell, 2008).

Mereka perlu dibekali dengan berbagai atribut, keterampilan dan perilaku yang dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan mereka, artinya pendidikan kewirausahaan perlu dirancang secara khusus untuk dapat mengembangkan karakteristik kewirausahaan, seperti kreativitas, pengambilan keputusan, kepemimpinan, jejaring sosial, manajemen waktu, kerjasama tim, dll. Untuk itu diperlukan perubahan sistem pendidikan kewirausahaan yang tadinya difokuskan pada orientasi pengendalian fungsional seperti, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan operasi menjadi fokus pada mengembangkan jiwa kewirausahaan pada peserta didik. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana sistem pembelajaran yang dapat mengembangkan diri peserta didik mereka dalam hal keterampilan, atribut dan sekaligus karakteristik perilaku seorang wirausaha (Bell, 2008).

Brown (2000) menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan harus dipandang secara luas dalam

terminologi keterampilan yang dapat diajarkan dan karakteristik yang dapat membangkitkan motivasi para siswa atau mahasiswa, sehingga dapat menolong mereka untuk menangkap peluang usaha. Sejalan dengan pendapat Brown (2000) dan perkembangan zaman yang semakin pesat, dalam dunia pendidikan terdapat perubahan paradigma, khususnya dengan adanya arus globalisasi saat ini. Banyak kegiatan usaha yang menuntut adanya keunggulan, pemerataan, dan persaingan, sehingga perubahan paradigma tersebut juga harus diantisipasi oleh pendidikan, khususnya bidang pendidikan kewirausahaan. Menurut laporan dari *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) terdapat korelasi yang tinggi antara pendidikan, termasuk dalam hal ini adalah pembelajaran kewirausahaan dengan kepercayaan dan motivasi individu untuk terlibat dalam aktivitas kewirausahaan (Reynolds dkk., 2003). Dalam hal ini, pendidikan turut mendukung dan berperan penting dalam pengembangan kewirausahaan di seluruh dunia. Oleh karena itu, berbagai pihak mendorong lulusan universitas untuk belajar kewirausahaan dan mendorong mereka untuk dilibatkan dalam perusahaan.

Menurut Garavan dan Barra (1994) wirausaha dan inovator memiliki tiga karakteristik utama, yang terdiri dari: pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pengetahuan adalah seperti pengetahuan industri, produk, teknik atau

proses. Keterampilan tersebut meliputi: *networking*, manajemen, keuangan, komunikasi, pengambilan keputusan, personal (seperti ketekunan dan kerja keras). Menurut Hisrich dan Peter (1998) ketiganya sama pentingnya bagi wirausaha. Sikap adalah sikap terhadap pengambilan risiko (*risk-taking*), seperti halnya kekuatan *psycho-social* individu dan kontek budaya, mempengaruhi perilaku bersifat wirausaha (Ferreira dan Raposo, 2008). Sebagai konsekwensi, Pembelajaran kewirausahaan perlu memusatkan perhatian pada: (a) Penyebarluasan pengetahuan tentang manfaat kewirausahaan, (b) Memperoleh alat untuk menganalisis dan membaca lingkungan bisnis dalam mengembangkan perencanaan bisnis, (c) Mengembangkan keterampilan wirausaha, pengelolaan dan bakat, (d) Motivasi individu untuk mendukung kewirausahaan, (e) Stimulasi Pemikiran kreatif, (f) Mengembangkan sikap yang positif dan keinginan untuk berubah, (g) Memberi harapan dan mendukung wirausaha baru (Garavan dan Barra, 1994; Ferreira dan Raposo, 2008).

Uraian di atas menggambarkan disiplin multi aspek pendidikan kewirausahaan, komitmennya untuk mempromosikan secara kreatif dan berpikir *cross-functional* melalui pendekatan holistik dan integratif diperlukan terhadap pencapaian tujuan dari pembelajaran kewirausahaan. Lebih dari itu, pembelajaran

kewirausahaan diarahkan pada individu dari berbagai disiplin: ilmuwan, teknologi dan perencana spesialis, para profesional dalam industri kreatif, para manajer dalam organisasi kecil maupun besar. Pendidikan kewirausahaan harus menjadi disiplin ilmu tersendiri yang utuh dan menjadi salah satu mata pelajaran yang diberikan sejak siswa duduk di bangku sekolah dasar. Ilmu kewirausahaan dapat melatih anak lebih mandiri, jeli melihat peluang, serta mendorong daya imajinasi yang lebih tinggi. Di negara-negara maju, khususnya di negara barat, telah berkembang konsep *micro-entrepreneur*. Pada saat Amerika mengalami resesi, semangat kewirausahaan ditanamkan sehingga tumbuh wirausaha yang mampu menangkap peluang untuk mengatasi tekanan resesi tersebut. Perkembangan ekonomi di negara berkembang seperti Taiwan dan Korea saat ini sangat pesat karena masyarakat meningkatkan semangat kewirausahaannya (Tan dan Ng, 2006).

Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan menjadi salah satu indikator yang harus ditumbuhkan bagi masyarakat dalam menunjang perkembangan suatu negara. Jiwa kewirausahaan di Indonesia sebenarnya merupakan salah satu budaya nenek moyang bangsa yang sudah dikembangkan sejak lama. Pada saat itu, masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah sudah berhasil mengembangkan usahanya sampai ke

Madagaskar, tetapi jiwa kewirausahaan ini sempat dimatikan oleh penjajah yang menguasai bangsa Indonesia selama ratusan tahun dan jiwa kewirausahaan akhirnya diganti dengan jiwa “amtenar” atau jiwa pegawai, yaitu jiwa pengabdian pada penguasa, dalam istilah pendidikan kewirausahaan disebut dengan *job seeker*. Jiwa amtenar (*job seeker*) yang terjadi pada zaman penjajahan cukup lama dan sudah dirasakan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi budaya dalam kehidupannya. Pada saat itu, orang yang memiliki pendidikan atau keterampilan, kaum priayi, pamong praja, pegawai pemerintah, dipersepsikan lebih baik kedudukannya dan kaum pedagang dipersepsikan sebagai kelas menengah.

Mengubah pandangan masyarakat Indonesia dari *job seeker* ke arah *job innovation* sebagaimana yang diamanatkan dalam pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia tidaklah mudah, artinya menumbuhkan semangat kewirausahaan kembali bagi masyarakat Indonesia diperlukan kerja keras dan usaha yang optimal. Hal tersebut diperlukan karena dunia semakin kompetitif dan hanya negara yang memiliki masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu menunjukkan keadidayaanya di masa globalisasi ini. Jiwa kewirausahaan sangat diperlukan dalam kehidupan di era global yang penuh persaingan ketat yang memerlukan sikap-sikap seperti: ulet, tangguh, kreatif, inovatif, dinamis,

produktif, beretos kerja tinggi, efisien, disiplin, visioner, antisipatif, mampu menciptakan peluang baru, berani mengambil keputusan yang tepat sehingga memperkecil risiko, jujur, dan terpercaya. Untuk itu, diperlukan pendidikan untuk memupuk jiwa kewirausahaan melalui jalur formal. Pendidikan kewirausahaan di Indonesia perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran/mata kuliah tersendiri. Freire (2006) menjelaskan bahwa mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan perlu diberikan kepada semua peserta didik dari TK sampai perguruan tinggi. Pelajaran kewirausahaan harus disajikan secara sistematis dan terstruktur, serta disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan usia peserta didik. Mata pelajaran/mata kuliah kewirausahaan harus dikemas dengan bahasa dan paket yang menarik minat peserta didik, dan bukan sekadar hafalan yang diperlukan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan.

Semangat kerja dan kegigihan dalam meraih sukses merupakan teladan untuk memacu kerja keras dan mengeliminasi budaya santai yang masih lekat menghinggapi mayoritas masyarakat. Kegiatan magang kerja di suatu usaha sangatlah penting untuk mengerti dunia riil wirausaha. Para peserta didik bisa melihat langsung bagaimana praktik dari teori-teori yang telah diperolehnya (mulai dari aspek produksi, akuntansi,

pemasaran, dan sumber daya manusia) bisa diterapkan dalam kegiatan nyata.

Kesenjangan antara teori dan praktik merupakan kekayaan yang tidak ternilai, sehingga pendidikan kewirausahaan perlu ditindaklanjuti dengan praktik di tempat-tempat usaha untuk mengembangkan intelektual dan kematangan memasuki dunia kerja. Para peserta didik secara bergantian mendapat tugas praktik di berbagai tempat penjualan makanan, lembaga simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing, dan sebagainya, dengan target-target yang telah ditentukan. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pendidikan kewirausahaan ini, pihak pemerintah, swasta, dan dunia perbankan perlu ikut memberikan sumbangan pemikirannya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia agar masyarakat menjadi semakin cerdas.

2. Pro dan Kontra Efektivitas Pendidikan Kewirausahaan

Beberapa penelitian masih memberikan hasil yang belum konsisten yaitu apakah kewirausahaan dapat diajarkan atau tidak. Beberapa studi menemukan bahwa kewirausahaan tidak mudah diajarkan (seperti dilakukan oleh: Audet, 2004; Shen dan Chai, 2006; Lee dan Wong, 2003; Audretsch dkk., 2002). Kewirausahaan hanya dapat dilakukan melalui pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir, sehingga

kewirausahaan tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Dalam hal lain, dampak pembelajaran kewirausahaan seperti melalui *experiential learning* terhadap minat untuk berwirausaha sebagai pilihan karir tidak dapat diukur hanya melalui persepsi jangka pendek tetapi melalui periode yang lama dan fluktuatif (Audet, 2004), disamping itu pembelajaran kewirausahaan perlu dukungan faktor penarik (*opportunity*) seperti peluang pasar dan dukungan pemerintah (Shen dan Chai, 2006; Lee dan Wong, 2003; Audretsch dkk., 2002).

Beberapa studi empiris lain menemukan sejumlah bukti bahwa kewirausahaan dapat diajarkan (seperti dilakukan oleh: Lepoutre *et. al*, 2005; Naomi, 2000; Ahmad *et. al*, 2010; Pihie, 2009; Douglas dan Shepherd, 2002; Rasmussen dan Sørheimb, 2006; Fregetto, 2002; Atherton, 2007). Raichaudhuri (2005) menemukan bahwa lebih dari 50 persen para mahasiswa yang mengambil kelas kewirausahaan di Universitas Harvard telah memulai usaha sendiri. Wang dan Wong (2004) dalam penelitian di Singapura, menemukan bahwa sebelum mengenal pendidikan kewirausahaan, mahasiswa mempunyai persepsi dan pengetahuan yang rendah tentang kewirausahaan. Setelah mengambil mata kuliah kewirausahaan persepsi mahasiswa mengalami peningkatan. Leedan Wong (2003) dalam studinya menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan pada

perguruan tinggi mempunyai hubungan langsung dalam membentuk sikap siswa dalam mengambil risiko untuk pendirian usaha baru. Penelitian Lee dan Wong (2003) menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap persepsi wirausaha disamping juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dan dukungan kewirausahaan oleh pemerintah.

Hamer (2000) mencatat bahwa hal penting dalam penerapan pengajaran kewirausahaan lebih berkaitan tentang metoda yang berdasar pada praktek (*field-based*) (seperti melalui pelatihan keterampilan dan keahlian) dan sedikit dukungan metoda pengajaran kelas (*classroom-based*) (seperti metode permainan peran dan simulasi). Teknik pembelajaran eksperimen dilakukan melalui pendekatan ceramah tradisional dengan membandingkan pada kelompok siswa yang bekerja berdasarkan pengalaman untuk melakukan riset pemasaran secara riil sebelum melakukan magang *full-time* sebagai wirausaha (Aronsson, 2004).

Minat berwirausaha (*entrepreneurial intention*) dapat dilihat sebagai niat untuk menciptakan suatu organisasi atau usaha baru atau sebagai perilaku yang berani mengambil resiko untuk memulai suatu bisnis baru. Minat dapat dilihat sebagai penyebab suatu perilaku. Beberapa studi terdahulu telah menemukan suatu mata rantai yang

kuat antara minat dan perilaku kewirausahaan dalam berbagai situasi (Douglas dan Shepherd, 2002).

Pendidikan kewirausahaan berbeda dengan pendidikan manajemen. Pendidikan kewirausahaan harus dimulai dengan bekerja pada berbagai situasi untuk mengatasi banyak permasalahan. Fayolle *et. al* (2006) berpendapat bahwa kewirausahaan adalah tak beraturan, tidak linier, dan tak dapat diramalkan. Fayolle *et. al* (2006) berpendapat bahwa pendidikan kewirausahaan yang efektif harus dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dapat menciptakan tindakan untuk dapat keluar dari kerancuan, kekacauan, dan ketidakpastian. Fayolle *et. al* (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan dan lingkungan sosial terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha. Dalam model penelitian tersebut, pembelajaran *experiential* dalam *Entrepreneur Teaching Programmes* (ETP) dapat mempengaruhi sikap, norma subyektif dan perilaku yang akhirnya dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk berwirausaha (*entrepreneurial intention*). Penelitian dilakukan melalui seminar selama 3 hari dan melalui penyebaran kuesioner terhadap 275 mahasiswa tentang program pembelajaran *experiential*. Diskusi dilakukan dalam kelompok kecil 4-5 orang tentang pembelajaran yang dilakukan. Kuesioner dilakukan untuk mengukur sikap mahasiswa terhadap

minat mereka dalam berwirausaha (*entrepreneurial intention*). Kuesioner dilakukan dengan menggunakan 47 item skala likert serta 23 item personal mahasiswa (seperti: umur, jenis kelamin, pengalaman). Kuesioner diberikan setelah program pembelajaran *experiential* selesai dilakukan. Hasil penelitian menemukan bahwa pembelajaran *experiential* menurunkan sikap dan norma subyektif meningkatkan minat dan perilaku mahasiswa untuk berwirausaha. Hasil penelitian menemukan hubungan positif antara pembelajaran *experiential* dalam *Entrepreneur Teaching Programmes* (ETP) dengan minat berwirausaha, artinya pembelajaran *experiential* dalam *Entrepreneur Teaching Programmes* (ETP) dapat meningkatkan atau menurunkan minat berwirausaha.

Penelitian Lepoutre *et. al* (2005) bertujuan untuk mengetahui dampak pendidikan kewirausahaan pada siswa sekolah menengah. Penggunaan kombinasi metode penerimaan diri (*self perceived*) dan *pretest-posttest* digunakan untuk menaksir perubahan dari tujuan wirausaha, sikap dan kreativitas usahawan. Penelitian dilakukan pada pendidikan kewirausahaan terhadap 3130 siswa sekolah menengah atas di FlandersBelgia. Metode utama pembelajaran kewirausahaan diterapkan berbeda-beda pada tiap sekolah seperti dengan metode ceramah, seminar, simulasi, magang ke industri. Model diuji terhadap dampak dan kecenderungan serta keinginan

untuk berperilaku. Hasil penelitian menemukan bahwa program pendidikan kewirausahaan sangat diperlukan dalam membentuk sikap dan kompetensi kewirausahaan. Mahasiswa mempunyai respon berbeda-beda terhadap program pendidikan kewirausahaan yang dilakukan tiap sekolah. Penelitian menemukan perbedaan yang signifikan antara *pre-test* dan kontrol pada beberapa faktor seperti: minat untuk memulai usaha sendiri, kreativitas dan sikap kewirausahaan. Pengalaman juga mempengaruhi minat siswa untuk memulai suatu usaha.

Naomi (2000) melakukan penelitian untuk mengevaluasi program pembelajaran *Student Placements for Entrepreneurs in Education* (SPEED) yang berbasis *experiential learning* terhadap minat siswa untuk memulai usaha sebagai pilihan karir. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap siswa setelah program pembelajaran. Hasil penelitian menemukan bahwa program pembelajaran *Student Placements for Entrepreneurs in Education* (SPEED) yang berbasis *experiential learning* memberikan pengalaman, kepercayaan dan pengetahuan pada siswa terhadap suatu bisnis atau menggunakan pengalaman baru yang mereka temukan untuk memulai usaha sebagai pilihan karir setelah mereka lulus.

Ahmad *et. al* (2010) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan implementasi dari pembelajaran kewirausahaan berbasis konsultasi (*consultation-based*) yang

diadopsi oleh Universitas Nasional Malaysia dan untuk mengevaluasi gaya pembelajaran yang berdasar pada teori *experiential learning*. Penelitian ini juga mengamati faktor yang berperan terhadap keberhasilan program tersebut. Program pelajaran berbasis konsultasi (*consultation-based*) sesuai dengan teori belajar Kolb dan *Lewin Field Theory*. Program diarahkan pada kelompok mahasiswa melalui kasus *real-business*, sehingga memungkinkan praktek dan aplikasi pengetahuan yang mereka peroleh dari kelas. Tahap pertama, program menjangring 50 mahasiswa melalui wawancara untuk menyaring kualifikasi mereka dalam mengikuti program. Sebanyak 50 siswa tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 10 kelompok dan diberi modal untuk memulai suatu bisnis. Mahasiswa tersebut dapat melakukan konsultasi bisnis dan pendampingan selama 5 bulan. Pada bulan keenam mereka diminta memberikan laporan berkaitan dengan kendala, peluang, kekuatan, formulasi strategi serta kinerja usaha dan penerimaan mereka terhadap program. Penelitian ini bersifat evaluasi implementasi *experiential learning* di negara sedang berkembang (Malaysia) dan menyediakan argumentasi kritis teori *experiential learning*.

Pihie (2009) melakukan penelitian untuk menentukan persepsi mahasiswa terhadap minat untuk memulai usaha baru sebagai pilihan karir. Data dikumpulkan melalui pembagian daftar pertanyaan terhadap mahasiswa. Studi

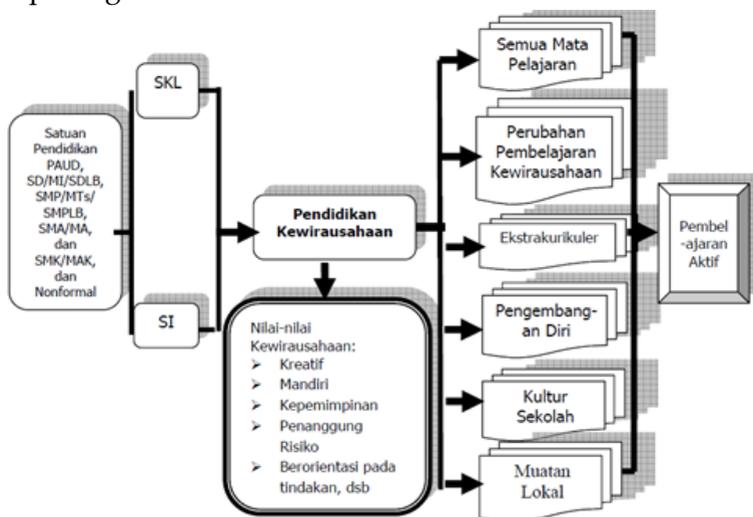
dilakukan dengan menggunakan pendekatan riset deskriptif terhadap 1.554 mahasiswa. Setiap butir kuesioner mempunyai keandalan antara 0,74 dan 0,96. Hasil penelitian menemukan bahwa mahasiswa mempunyai prestasi sedang pada semua aspek yang berhubungan dengan minat untuk memulai usaha baru sebagai pilihan karir seperti dalam aspek manajemen, keuangan dan pemasaran. Minat mahasiswa untuk memulai usaha baru berbeda signifikan antara mereka yang mempunyai/tidak mempunyai cita-cita yang positif. Penemuan juga menunjukkan bahwa mereka berpendapat bahwa kewirausahaan perlu untuk diajarkan pada universitas untuk mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap karir kewirausahaan. Temuan studi tersebut merekomendasikan untuk menerapkan strategi pengajaran yang memasukkan aspek kemampuan manajemen, keuangan dan pemasaran dalam mendukung minat mahasiswa untuk memulai usaha baru sebagai pilihan karir.

3. Jalur Pendidikan Kewirausahaan di Indonesia

a. Pendidikan Pra-kerja

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Integrasi pendidikan kewirausahaan yang dilakukan saat ini merupakan

momentum untuk revitalisasi kebijakan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Pendidikan yang berwawasan kewirausahaan ditandai dengan proses pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (*life skill*) pada peserta didiknya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Framework pendidikan kewirausahaan di setiap satuan pendidikan dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut.



Gambar 1.1. *Framework* Pendidikan Kewirausahaan Pada Setiap Satuan Pendidikan (Sumber: Kemendiknas, 2010)

Program pendidikan kewirausahaan di sekolah antara lain bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku saat ini (*the existing curriculum*) di setiap satuan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan sekolah menengah atas.
- 2) Mengkaji Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan kurikulum mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas serta pendidikan non formal dalam rangka pemetaan ruang lingkup kompetensi lulusan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan.
- 3) Merumuskan rancangan pendidikan kewirausahaan di setiap satuan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas.

Berikut prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di sekolah:

- 1) Proses pengembangan nilai-nilai kewirausahaan merupakan sebuah proses panjang dan berkelanjutan dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan.
- 2) Materi nilai-nilai kewirausahaan bukanlah bahan ajar biasa. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep,

teori, prosedur, atau pun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, dan sebagainya. Nilai kewirausahaan diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran. Pengintegrasian ke dalam mata pelajaran bisa melalui materi, metode, maupun penilaian.

- 3) Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan. Demikian juga, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai.
- 4) Digunakan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan.

Sistem Pendidikan Formal di Indonesia terdiri dari enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tahun SMA, dan empat tahun kuliah. Siswa lulusan SMP dapat mendaftarkan diri di Sekolah Menengah Kejuruan yang membekali mereka dengan keterampilan. Siswa SMA yang mengejar posisi pekerjaan sebagai teknisi dapat mendaftarkan diri di program vokasidengan lama pendidikan tiga tahun.

Sistem pendidikan kejuruan di Indonesia mendasari sistem link ke "dunia kerja" berdasarkan strategi *plan, do, check, dan action* (siklus PDCA). Tahap *plan* (rencana)

digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja. Tahap *do* (pelaksanaan) adalah pelaksanaan program sekolah kejuruan. Tahap *check* (monitoring) dilakukan oleh lembaga profesi (misalnya, praktisi medis, akuntan, arsitek, apoteker), pemerintah daerah, dan organisasi lokal (misalnya, koki, guru taman kanak-kanak), dan asosiasi industri (misalnya, agen *real estate*, agen perjalanan, dll) melakukan monitoring keterampilan profesional. Tahap ini dimaksudkan untuk menutup kesenjangan antara kualifikasi pekerja dan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar, terutama pembentukan karakter termasuk karakter wirausaha peserta didik sesuai tujuan pendidikan dapat dicapai. Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter termasuk karakter wirausaha dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan

minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.

Di samping itu pendidikan kewirausahaan dapat juga diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran yang berwawasan pendidikan kewirausahaan tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.

b. Praktek Pendidikan Kewirausahaan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Didasari kesadaran penuh atas adanya kesenjangan antara teori yang diperoleh mahasiswa dengan realita kebutuhan masyarakat dan munculnya tuntutan masyarakat atas mutu lulusan perguruan tinggi yang mandiri dan siap mengantisipasi arah pengembangan bangsa, pada tahun 1997 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DITLITABMAS) merealisasikan Program Pengembangan Budaya

Kewirausahaan di Perguruan Tinggi (PBKPT). Salah satu komponen program kunci di dalamnya adalah Program Karya Alternatif Mahasiswa (KAM). Program ini hanya dapat diakses dan dilaksanakan mahasiswa sedangkan program lainnya seperti Kuliah Kewirausahaan (KWU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Magang Kewirausahaan (MKU), Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (KBPK) dan Inkubator Wirausaha Baru (INWUB), proposal diajukan kelompok dosen namun wajib menyertakan mahasiswa sebagai pelaku lapangan. KAM merupakan wahana kreasi bagi mahasiswa dalam menciptakan produk (barang atau jasa) yang akan menjadi komoditas usahanya kelak. Sedangkan pematangan sebagai *entrepreneur* dilakukan pada program INWUB. Dengan demikian, PBKPT merupakan satu kesatuan program pendorong Perguruan Tinggi (PT) dalam menghasilkan *enter-* ataupun teknopreneur dari kampus. Berdasarkan uraian diatas, Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi dirancang meliputi 5 (lima) kegiatan saling terkait sebagai wahana diwujudkan wirausahawan lulusan perguruan tinggi, yaitu: Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang Kewirausahaan (MKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (KBPK), dan Inkubator Wirausaha Baru (INWUB) (Dikti, 2014).

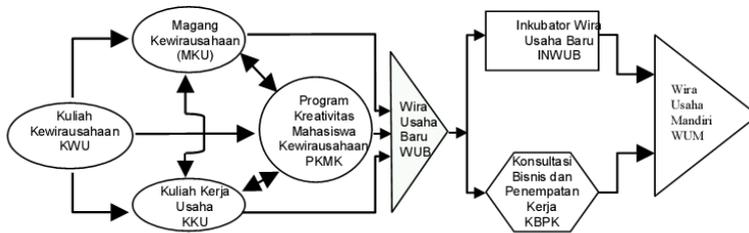
Dalam perkembangannya, KAM terasa sangat membatasi ruang kreasi mahasiswa yang memiliki minat, bakat dan intelektual beragam. Pada tahun 2001, DITLITABMAS kemudian mengembangkan KAM menjadi Program Kreativitas Mahasiswa yang membuka peluang mahasiswa dalam berkarya seluas para dosennya. Sejak saat itu dikenal berbagai jenis Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), yaitu: PKM-Penelitian (PKMP), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) dan PKM-Penulisan Artikel Ilmiah (PKM-I). Pada tahun 2002, PKM bergabung dengan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) ke dalam program Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) di Surabaya. Atas kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, sejak tahun 2009 pelaksanaan Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTm) yang dahulunya bernama LKTM diintegrasikan pengelolaannya ke dalam PKM. Mengingat sifatnya yang identik dengan PKM-I, maka program KKTm dikelompokkan bersama PKM-I ke dalam PKM-Karya Tulis (PKM- KT). Untuk membedakannya, PKM-I diberi nama baru PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan KKTm menjadi PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT) sesuai dengan sumber bahan penulisannya. Sesuai dengan sifat artikel yang dihasilkan, maka PKM-AI akan bermuara pada Jurnal Kreativitas

Mahasiswa sedangkan PKM-GT menggantikan posisi PKM-AI di PIMNAS (Dikti, 2014).

Bagi seorang mahasiswa pemula dalam wirausaha, keikutsertaan dalam KWU akan merupakan inisiasi penumbuhan dan pemahaman jiwa kewirausahaan. Pada kegiatan MKU, mahasiswa dapat mempelajari kewirausahaan secara nyata di mitra industri/pengusaha, sedangkan kegiatan KKU dilaksanakan untuk mendalami kewirausahaan sambil berperan serta membantu mitra usaha rumah tangga, baik dalam proses produksi maupun dalam pemasaran dan penjualannya. Kegiatan Karya Alternatif Mahasiswa (KAM) yang dulu tercakup dalam Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan (KBPK), mulai tahun 2002 dilaksanakan dalam lingkup Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK). Kegiatan KBPK dilaksanakan untuk membantu masyarakat pengusaha kecil dan menengah serta alumni dalam berwirausaha dan memperoleh akses pasar dan modal(Dikti, 2014).

Penempatan kerja memberikan peluang kepada alumni untuk memilih industri atau perusahaan yang dapat dijadikan tempat belajar berwirausaha sesuai dengan bidang keilmuannya, sebelum mengelola industri atau perusahaannya sendiri. Kegiatan INWUB merupakan ajang terakhir pembentukan jiwa kewirausahaan mahasiswa dan lulusan baru, sebelum terjun ke dalam dunia nyata

berwirausaha sebagai wirausahawan mandiri. Tidak semua mahasiswa harus memulai kegiatan belajar kewirausahaan dengan mengikuti KWU. Setiap mahasiswa dapat menentukan akan memulai dari wahana yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan peluang yang tersedia. Namun demikian, secara ideal seluruh wahana hendaknya dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengikuti bagan alir seperti tersaji dalam Gambar 1.2.



Gambar 2. Bagan Alir Keterkaitan Berbagai Kegiatan Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan Mahasiswa di Indonesia (Sumber: Kemendiknas, 2010)

c. Pelatihan dan Pendidikan Pasca Kerja

Sejumlah lembaga pelatihan memungkinkan siswa yang *drop out* dari sistem pendidikan formal dapat memperoleh keterampilan yang lebih khusus. Lembaga pelatihan tersebut dapat merupakan lembaga pelatihan swasta atau milik pemerintah seperti melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan sarana

pemerintah untuk mengatasi pengangguran melalui optimalisasi peran BLK dengan pelatihan berbasis kewirausahaan. Pemerintah menawarkan para pengangguran berusia muda untuk memanfaatkan fasilitas pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki beberapa fasilitas *workshop* antara lain: *workshop* teknologi mekanik, *workshop* jahit, *workshop* otomotif, *workshop* las, *workshop* komputer dan bahasa, *workshop* perkayuan, dan *workshop* umum lainnya. Tugas dan fungsi BLK yang ada di setiap kabupaten/kota untuk memberikan bekal keahlian dan kompetensi kerja di samping sebagai pusat informasi pelatihan kerja. Selain itu BLK juga berfungsi sebagai pusat peningkatan standar pelatihan kerja, pusat standarisasi dan sertifikasi, dan sebagai tempat pembekalan akhir pemberangkatan transmigrasi dan calon tenaga kerja Indonesia

Program pengembangan kapasitas dan pelatihan kewirausahaan di UMKM Indonesia banyak dilakukan lembaga pemerintah maupun swasta. Bentuk kegiatan meliputi: penguatan modal (*capital assistance*), pelatihan (*training*), pendampingan (*facilitation*), informasi (*information*), sarana (*facilities*), promosi (*promotion*), diseminasi (*dissemination*), bimbingan (*guidelines*). Penguatan UMKM tersebut dilakukan oleh berbagai institusi: lembaga pemerintah perbankan, perusahaan

swasta, lembaga donor, LSM dan lembaga lainnya (SMERU, 2004: 6).

Dukungan terhadap pengembangan kapasitas UMKM diantaranya adalah melalui (UNDP, 2004: 33-34):

- 1) Layanan keuangan (*financial service*), meliputi layanan keuangan dari: bank komersial, *development banks*, *joint venture*, tabungan koperasi, pinjaman koperasi, dan lembaga pinjaman informal.
- 2) Layanan publikasi (*advisory service*), seperti: *business centers*, *service centers*, *research services*, konsultan, pusat informasi perdagangan.
- 3) Teknologi (*technology*), *equipment leasing*, *raw material procurement*, *environmental services*.
- 4) *Human resource development*, meliputi: bantuan manajemen, pengembangan perusahaan, kerjasama universitas, pelatihan keahlian, pendidikan, kursus, *mobile/on-the-job training*.
- 5) Akses pasar (*market access*), meliputi kegiatan: promosi, government procurement, sub kontraktor, *joint ventures*, *franchising*.
- 6) Infrastruktur (*infrastructure*), meliputi: teknologi, *export processing zone*, kawasan industri, *growth triangle*, kawasan bisnis, *business incubator*;
- 7) Jaringan dan kelembagaan (*networks & associations*), meliputi: asosiasi perdagangan,

kerjasama, *professional society*, informasi perdagangan, *entrepreneurial club*, *electronic mail*, riset & development, proteksi lingkungan.

Secara total, jenis kegiatan yang paling banyak dilakukan adalah dalam bentuk pemberian pelatihan (22,9%), bantuan modal (17,3%), pendampingan (16,1%), dan pengenalan teknologi baru (15,2%) (Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Penguatan UMKM Berdasarkan Jenis Kegiatan dan Lembaga Pelaksana (%)

Type of Activity/ Jenis Kegiatan	Government Institutions/ Lembaga Pemerintah	Banking Institutions/ Bank	Private Companies/ Perusahaan	Donor Agencies/ Donor	NGOs/ Ornop	Other Institutions/ Lembaga Lain	Total
Capital assistance/ Modal	5.3	52.9	25.0	21.0	29.6	28.6	17.3
Training/ Pelatihan	21.1	13.7	22.2	19.0	29.0	21.4	22.9
Facilitation/ Pendampingan	11.3	9.8	19.4	7.6	28.7	0.0	16.1
Information/ Informasi	1.9	7.8	2.8	3.8	1.6	21.4	2.6
Facilities/ Sarana	16.2	2.0	5.6	8.6	1.0	0.0	9.7
Promotion/ Promosi	3.0	3.9	13.9	6.7	1.0	7.1	3.3
Dissemination/ Diseminasi	27.9	0.0	0.0	6.7	1.3	0.0	15.2
Guidelines/ Pedoman	4.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	2.4
Other/ Lainnya	9.0	9.8	11.1	26.7	7.2	21.4	10.5
N (types of activities)/ N (jenis kegiatan)	531	51	36	105	307	14	1044

Sumber: SMERU (2010: 6)

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada UMKM meliputi: a) Penguatan organisasi: proses pengembangan kelembagaan, b) Perbaikan prosedural: perubahan fungsional umum atau reformasi system, c)

Peningkatan keterampilan: pendidikan umum, *on job training*, dan pendalaman profesi. kualitas manajemen sangat penting untuk usaha kecil dan menengah (UMKM), yang harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan pasar perubahan lingkungan, namun sering memiliki sumber daya yang terbatas. Kendala tersebut juga memberi batas pada kemampuan mereka untuk terlibat dalam pelatihan, meskipun penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat pelatihan manajemen dan kinerja dari UMKM. Ada bukti awal bahwa pelatihan manajemen formal dapat mengurangi tingkat kegagalan perusahaan kecil, yang jauh lebih mungkin untuk gagal daripada perusahaan besar, terutama di tahun-tahun awal.

Harvie (2004: 11) mencatat bahwa kegagalan praktek pengembangan kapasitas bagi UMKM yang selama ini terjadi belum mengedepankan aspek yang lebih terintegrasi. Sebagai contoh, ketika sebuah lembaga atau perusahaan menitikberatkan pada program yang bersifat ekonomi seperti pemberian modal kepada UMKM, lembaga atau perusahaan tersebut belum memperhatikan aspek-aspek lain seperti lingkungan dan kapasitas masyarakat tersebut. Secara finansial masyarakat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan, namun di sisi lain ada dampak yang harus diwaspadai yaitu apakah masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengelola uang yang telah diperoleh. Menurut Harvie (2004:16),

pengembangan sumber daya manusia untuk UMKM memerlukan pendekatan komprehensif termasuk: struktur dan sistem sosial seperti reformasi pendidikan yang luas, dorongan kewirausahaan, akuisisi bisnis keterampilan dan inovasi dalam masyarakat, mekanisme untuk pembelajaran diri dan pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah yang tepat program. Peningkatan kemampuan akan memungkinkan manajemen usaha yang lebih efisien, memungkinkan berbagi beban kerja dan pengembangan peluang pasar yang lebih luas.

Pendalaman dan Pengayaan Materi

1. Pendalaman Materi

- a. Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas.
- b. Soal
 - 1) Jelaskan kedudukan ilmu kewirausahaan sebagai bagian dari pendidikan kewirausahaan.
 - 2) Bagaimanahakikat pendidikan kewirausahaan?
 - 3) Bagaimanapraktek pendidikan kewirausahaan di berbagai jenjang pendidikan formal?
 - 4) Bagaimana praktek pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi?

- 5) Bagaimana hubungan pendidikan kewirausahaan dalam pendidikan formal, informal dan non formal?

2. Pengayaan Materi

- a. Jumlah pengangguran di Indonesia sangat banyak, dan 10% nya adalah kaum intelektual. Sebenarnya mereka sudah menyanggah gelar sarjana, tetapi tidak mendapat pekerjaan yang layak. Apa sebenarnya yang terjadi, dan bagaimana solusinya menurut Anda?
- b. Diskusikan dengan teman Anda, apa yang telah dilakukan pendidikan kewirausahaan saat ini? apa kelemahan praktek pendidikan kewirausahaan saat ini? Apa yang perlu diperbaiki dalam praktek pendidikan kewirausahaan saat ini?

Daftar Pustaka

- Ahmad, R. C. O., Suraiya, I. dan Rahid, M. R. 2010. "Consultation-based entrepreneurial/business learning: Malaysia experience". *African Journal of Business Management* 4(12), 2508-2513
- Aronsson, M. 2004. "Education Matters--But Does Entrepreneurship Education? An interview with David Birch". *Academy of Management Learning & Education*, 3(3), 289-292.

- Audet. 2004. "A Longitudinal Study of the Entrepreneurial Intentions of University Students". *Academy of Entrepreneurship Journal*, Vol. 6(1): 57-63.
- Audretsch, D., Thurik, R., Verheul, I., and Wennekers, S. 2002. "An Eclectic Theory of Entrepreneurship". *EIM Business and Policy Research*. <http://papers.tinbergen.nl/01030.pdf> , 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Bell, Joseph R. 2008. "Utilization of Problem Based-Learning in an Entrepreneurship Business Planning Course", *New England Journal of Entrepreneurship*, Spring, 53
- Blanchflower, D.G. 2000. "Self-employment in OECD countries", *Labour Economics* 7, 471-505
- Brown, C. 2000. "*Entrepreneurial Education Teaching Guide*". CELCEE Digest 00-7. Los Angeles, CA: Adjunct ERIC Clearinghouse on Entrepreneurship Education. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED452430.pdf>, 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Dikti. 2014. "Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)". <http://dikti.go.id/mahasiswa/pekan-ilmiah-mahasiswa-nasional-pimnas/program-kreativitas-mahasiswa-pkm/> , 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Douglas, E. J., & Shepherd, D. A. 2002. "Self-Employment as a Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization". *Entrepreneurship: Theory & Practice*, 26(3), 81-90

- Fayolle, A., Gailly, B. dan Lassas, C.N. 2006. "Effect and Counter-effect of Entrepreneurship Education and Social Context on Student's Intentions". *Journal. Estudios De Economia Aplicada*.24(2), 509- 523
- Ferreira, J.J. and Raposo, M.L. 2008. "Entrepreneurial Intention: a model with psychological and behavioural approaches", *Conference Proceedings, 31st Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference on International Entrepreneurship, 5-7 November, 2008, Belfast.*
- Freire, P. 2006. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Garavan, T. N. and Barra, OCinneide 1994. "Entrepreneurship education and training programmes: a review and evaluation - Part 1". *Journal of European Industrial Training*, 18(8), 3-10.
- Hamer, L. O. 2000. "The Additive Effects of Semistructured Classroom Activities on Student Learning: An Application of Classroom-Based Experiential Learning Techniques". *Journal of Marketing Education*, 22(1), 25-34
- Hisrich RD & Peters, MP. 1998. *Entrepreneurship*, 4th edn. New York: Prentice Hall.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang *Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan*

- , Kepmendiknas. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya saing bangsa. Pendidikan Kewirausahaan*. Jakarta: Pusat Kurikulum
- Lee, L., & Wong, P.-K. 2003. "Attitude towards Entrepreneurship Education and New Venture Creation". *Journal of Enterprising Culture*, 11(4), 339-357.
- Lepoutre, J., Van Den Berghe, W., Tilleuil, O. dan Crijns, H. 2005. "A new approach to testing the effects of entrepreneurship: Education among secondary school pupils". *Entrepreneurship Theory and Practice*, 29(5): 577-598.
- Naomi, R. W. H. 2000. "Evaluating the impact of SPEED on students' career choices: a pilot study". *Education Training* 52 (6/7), 463-476.
- Pihie, Z. A.L. 2009. "Entrepreneurship as a Career Choice: An Analysis of Entrepreneurial Self-Efficacy and Intention of University Students". *European Journal of Social Sciences* – 9(2): 338-349.
- Prawirakusumo, S. 1997. "Peranan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Wirausaha-Wirausaha Tangguh". *Makalah Seminar. Jatinangor: PIBI-IKOPIN dan FNSt*.
- Raichaudhuri, A. 2005. Issues in Entrepreneurship Education. *Decision* 32(2), 73-84.
- Reynolds, P.D., Bygrave, W.D., Auti, E. 2003. *Global Entrepreneurship Monitor: Executive Report*. Kansas

- City, MO, USA : Kauffman Foundation.
<http://www.gemconsortium.org/docs/download/259>
 , 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Shen, C dan Chai, L. 2006. "Changing Entrepreneurial Perceptions and Developing Entrepreneurial Competencies through Experiential Learning: Evidence From Entrepreneurship Education in Singapore's Tertiary Education Institutions". *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*2(2): 162-191
- SMERU. 2004. Promoting Entrepreneurship and Innovative SMES In A Global Economy. Desember, www.smeru.or.id , 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Tan, Siok San and C. K. Frank Ng. 2006. "A problem-based learning approach to entrepreneurship education", *Education & Training*, 48 (6), 416.
- UNDP. 2004. "Capacity Assessment and Development in a Systems and Strategic Management Context". *Technical Advisory Paper No. 3, Management Development and Governance Division*).<http://www.cbd.int/doc/pa/tools/Capacity%20assessment%20and%20development.pdf>, 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Vivarelli, M. 1991. "The birth of new enterprises". *Small Business Economics* 3, (3), 215-223.
- Wang, C. K., & Wong, P.-K. 2004. "Entrepreneurial interest of university students in Singapore". *Technovation*, 24(2), 163-172.

BAB II

KEWIRAUSAHAAN DAN KEWIRASWASTAAN

Kompetensi Inti

Mampu membandingkan konsep dasar yang berkaitan dengan kewirausahaan dan kewiraswastaan.

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan.
2. Menjelaskan perkembangan teori kewirausahaan dalam pendekatan teori ekonomi.
3. Menjelaskan perkembangan teori kewirausahaan dalam pendekatan teori non ekonomi.
4. Membandingkan konsep kewirausahaan dengan kewiraswastaan.
5. Menjelaskan faktor-faktor yang memberikan motivasi berwirausaha.
6. Mengidentifikasi tantangan kewirausahaan pada era globalisasi.

7. Memberikan solusi peran mahasiswa dalam persaingan global.

A. Pengertian Kewirausahaan

Istilah kewirausahaan pertama kali digunakan oleh Cantillon (1755) dalam *Essai sur la nature du commerce*, yaitu sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Schumpeter (1934) menjelaskan kewirausahaan sebagai penggerak sistem berbasis pasar melalui inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis dan mengombinasikan dengan sumber daya. Wirausaha merupakan pengusaha yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru dalam bidang teknik dan komersial ke dalam bentuk praktik. Fungsi pengusaha bukan pencipta atau penemu kombinasi-kombinasi baru (kecuali kalau kebetulan), tetapi lebih merupakan pelaksana dari kombinasi-kombinasi yang kreatif. Pengusaha tersebut biasanya memiliki sikap yang khusus seperti sikap pedagang, pemilik industri, dan bentuk-bentuk usaha lainnya yang sejenis. Schumpeter (1934) mengemukakan dua tipe sikap subjek ekonomi, yaitu sikap pengusaha kecil biasa dan sikap pengusaha yang sesungguhnya. Sikap pengusaha yang sesungguhnya ini kemudian berkembang lebih cepat.

Schumpeter (1934) memberikan definisi wirausaha sebagai seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk (1) memperkenalkan produk baru dengan kualitas baru, (2) memperkenalkan metode produksi baru, (3) membuka pasar baru (*new market*), (4) memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter (1934) menjelaskan bahwa agen manusia merupakan pusat dari proses pembangunan ekonomi dan menegaskan peran penting kewirausahaan di dalam "Teori Pembangunan ekonomi".

Menurut Schumpeter (1934), kegiatan atau metode tersebut ditegaskan dengan istilah *inovasi*. Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, secara tidak langsung mampu dengan mudah mempengaruhi struktur pasar dan kinerja industri. Pengembangan teknologi mencakup *improvement* dalam bidang ilmu yang menjadi basis teknologi dan inovasi teknologi baru yang memberikan peluang dan hambatan bagi bisnis industri. Perubahan teknologi berdampak terhadap kegiatan operasional dan produk/jasa yang dihasilkan oleh bisnis usaha tersebut. Perubahan teknologi dapat terjadi di luar industri yang akhirnya terkena dampak perubahan tersebut. Perubahan teknologi menuntut manajer wirausaha industri di negara

berkembang untuk berhati-hati dalam memutuskan teknologi yang tepat dengan tetap memperhatikan penyesuaian dengan lingkungan bisnis.

Kirzner (1973) menjelaskan wirausaha mengenali dan bertindak sesuai dengan peluang pasar, sedangkan kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovasi, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses inovasi adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Dubrin (2010) memberikan pengertian wirausaha adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan usaha inovatif (*entrepreneur is a person who founds and operates an innovative business*). Steinhoff dan Burgess (1993) menjelaskan bahwa "*entrepreneur is a person who organizes, manages, and assumes the risk of a business or enterprise is an entrepreneur. Entrepreneur is individual who risks financial, material, and human resources a new way to create a new business concept or opportunities within an existing firm* (pengusaha merupakan orang yang mengatur, mengelola, dan mengasumsikan risiko bisnis atau wirausaha adalah seorang pengusaha. Pengusaha adalah individu yang mengambil risiko keuangan, material, dan sumber daya manusia dengan cara baru untuk menciptakan sebuah

konsep bisnis baru atau peluang dalam sebuah perusahaan).

Knight (2002) menjelaskan, wirausaha mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan dasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausaha dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Wirausaha diharapkan juga dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti menyusun perencanaan, membuat struktur organisasi, memberikan pengarahan, dan melakukan pengawasan.

Wirausaha adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang dimiliki. (Zimmerer & Scarborough, 2005). Menurut Zimmerer dan Scarborough (2005: 20), wirausaha adalah orang atau individu yang melakukan proses penciptaan bisnis baru dengan menghadapi risiko-risiko dan ketidakpastian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan bisnisnya melalui identifikasi peluang yang signifikan dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan.

Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah suatu kemampuan (*ability*) dalam berpikir kreatif

dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki keberanian mengambil risiko dalam ketidakpastian dengan cara menggabungkan sumber daya yang ada, sehingga dapat menghasilkan nilai yang lebih besar dari sebelumnya serta memiliki ide inovatif sebagai peluang bisnis yang belum ada menjadi ada.

B. Perkembangan Teori Kewirausahaan

Teori dan penelitian kewirausahaan berperan penting dalam pengembangan bidang kewirausahaan. Teori-teori tersebut berasal dari disiplin ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan manajemen.

a. Kewirausahaan dalam Disiplin Ilmu Ekonomi

Teori kewirausahaan dalam disiplin ilmu ekonomi memiliki akar dari teori klasik dan neo klasik, dan proses pasar Austria atau yang dikenal dengan *Austrian Market Process* (AMP). Teori ini mengeksplorasi faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku kewirausahaan. Teori klasik mendukung manfaat perdagangan bebas, spesialisasi, dan kompetisi (Ricardo, 1817; Smith, 1776). Teori ini muncul dari revolusi industri di Inggris yang berlangsung pada pertengahan tahun 1700-an sampai dengan tahun 1830-an yang diawali dengan

penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan lain-lain. Teori Klasik menjelaskan peran pengusaha dalam konteks produksi dan distribusi barang di pasar yang kompetitif. Teori klasik merumuskan model produksi yaitu produksi dipengaruhi oleh faktor sumber daya tanah, modal dan tenaga kerja, namun teori klasik tersebut gagal menjelaskan pergolakan dinamis yang dihasilkan oleh pengusaha dari era industri (Murphy, Liao and Welsch, 2006).

Teori Neo-klasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada pasar. Model neo-klasik menjelaskan peran wirausaha dalam proses pertukaran (transaksi) dalam rantai pasokan dari produsen sampai ke konsumen akhir dan mempengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran. Teori Neo-klasik diantaranya diungkapkan oleh Cantillon (1755), yang melihat pengusaha tidak hanya sebagai faktor produksi, tapi sebagai agen yang mengambil risiko dan dengan demikian menyeimbangkan penawaran dan permintaan dalam perekonomian. Dalam kerangka teori neo-klasik, fungsi tersebut seperti mengoptimalkan residual, misalnya, pemilik bisnis yang menyewa tenaga kerja dan modal dari pekerja dan pemilik lahan dalam ketidakpastian

permintaan produksi. Cantillon (1755) menyatakan wirausaha melakukan seperangkat kegiatan ekonomi dalam ketidakpastian, sehingga selalu dihadapkan pada untung dan rugi.

Model neo-klasik muncul sebagai kritik terhadap model klasik dan menunjukkan bahwa fenomena ekonomi dapat diturunkan dari kasus pertukaran yang optimal (efisien) dan terjadi dalam sistem ekonomi yang tertutup. Sistem ekonomi terdiri dari peserta pertukaran, kejadian pertukaran, dan dampak dari hasil pertukaran pada pelaku pasar lainnya. Pentingnya transaksi dengan menambah dan mengurangi utilitas marginal memberikan dorongan untuk berwirausaha dalam gerakan neo klasik (Murphy, Liao dan Welsch, 2006). Namun demikian, teori neo-klasik mempunyai beberapa kelamahan. *Pertama*, permintaan agregat mengabaikan keunikan aktivitas kewirausahaan di tingkat individu. *Kedua*, tidak menggunakan atau mencerminkan nilai tukar sebagai nilai masa depan dari hasil inovasi. *Ketiga*, alokasi sumber daya tidak menangkap kompleksitas sistem berbasis pasar. *Keempat*, kinerja berbasis efisiensi belum mempertimbangkan inovasi dan output yang tidak seragam, sehingga informasi yang tidak sempurna menggambarkan ketidakpastian. Selain itu, persaingan sempurna tidak memungkinkan inovasi dan aktivitas kewirausahaan. *Kelima*, tidak mungkin untuk melacak semua input dan output dalam sistem pasar, yang

pada akhirnya kewirausahaan dapat merusak tatanan sistem ekonomi.

Knight (1921) menjelaskan bahwa wirausaha disiapkan untuk menanggung risiko dalam dunia ketidakpastian. Wirausaha harus dihargai sebagai penanggung risiko yang diperhitungkan. Knight memandang seorang pengusaha dalam hal risiko, ketidakpastian dan keuntungan. Knight mengakui perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian tidak dapat diasuransikan karena berkaitan dengan peristiwa yang unik, misalnya, pergeseran selera konsumen.

Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari gerakan neo-klasik menyebabkan gerakan baru yang dikenal sebagai *Austrian Market Process* (AMP). Model AMP dipengaruhi oleh Schumpeter (1934) yang berkonsentrasi pada tindakan manusia dalam konteks ekonomi pengetahuan. Schumpeter (1934) menjelaskan fakta penting tentang perusahaan modern yaitu manajer tidak dapat mengisi peran sosial yang kuat yang dimainkan oleh wirausaha. (Schumpeter, 1942:134). Schumpeter (1934) menjelaskan kewirausahaan sebagai penggerak sistem berbasis pasar. Dengan kata lain, fungsi penting dari suatu perusahaan adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru yang mengakibatkan proses yang berfungsi sebagai impuls untuk gerakan ekonomi pasar. Ketika pasar statis,

wirausaha melalui proses inovasi memperkenalkan produk baru, metode produksi, pasar, sumber pasokan, atau kombinasi industri yang mempengaruhi ekonomi keluar dari ekuilibrium sebelumnya (Schumpeter, 1934). Selanjutnya, wirausaha menemukan peluang untuk memenuhi permintaan untuk mencapai keseimbangan baru (Kirzner, 1973). Teori Schumpeter (1934) mengatakan wirausaha mengganggu ekuilibrium untuk menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi melalui inovasi. Melalui pendekatan teori ini, wirausaha masuk ke sektor industri untuk memproduksi barang dan jasa karena kemampuannya dalam menciptakan inovasi untuk membuka peluang-peluang baru dan menikmati pertumbuhan. Pasar yang dalam kondisi keseimbangan tidak menarik bagi wirausaha, sehingga diperlukan aktivitas inovasi untuk meningkatkan permintaan. Wirausaha melihat masalah sebagai kesempatan melakukan berbagai perubahan dan bila perlu mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. Schumpeter (1934) menyatakan bahwa *entrepreneur* adalah '*an active agent of economic progress* (agen aktif kemajuan ekonomi)'. Teori tentang peran dinamis dari para *entrepreneur* disebutnya sebagai 'proses destruksi kreatif' (*the process of creative destruction*) (Ekelund dan Hebert, 1990). Proses ini oleh Schumpeter (1934) terjadi karena 'monopoli keuntungan' yang memberikan insentif pada 'pengambilan risiko' untuk

menginvestasikan uangnya melalui '*inventions and innovations*'. Proses menggantikan suatu monopoli dengan monopoli lainnya melalui '*... invention of new product or new production techniques called as the process of creative destruction* [penemuan produk baru atau teknik produksi baru yang disebut sebagai proses destruksi kreatif]' (Ekelund dan Hebert, 1990). Schumpeter (1934) melihat para wirausaha sebagai kekuatan yang selalu memperbaharui keseimbangan pasar (*disequilibrium force*) yang mendorong pembangunan melalui destruksi keseimbangan pasar melalui proses kreatif atau yang kemudian disebut sebagai "*creative destruction*" dimana usaha baru akan memperbaharui usaha yang sudah tua.

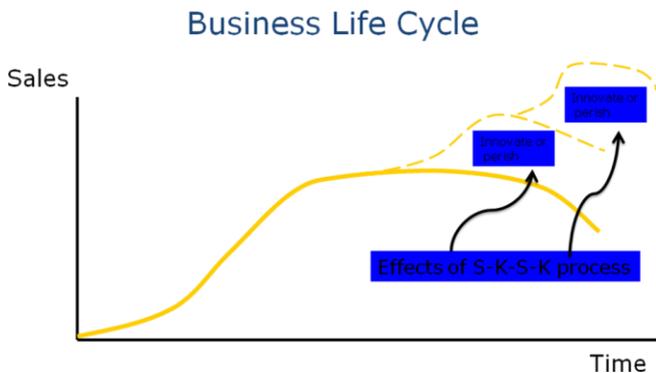
Menurut Marshall (1961), seorang wirausaha menciptakan keseimbangan. Teori "Marshallian" mencoba menjelaskan kondisi keseimbangan di pasar bawah asumsi pengetahuan dan informasi yang sempurna, persaingan sempurna (adanya banyak perusahaan), keberadaan barang homogen, dan bebas masuk dan keluar. Keprihatinan utama Marshall pada tujuan untuk menunjukkan bahwa pasar di bawah asumsi persaingan sempurna dan tidak ada peluang keuntungan berlebih dan karenanya tidak ada eksploitasi tenaga kerja dalam proses produksi karena semua orang mendapatkan kontribusi marjinal untuk produksi dan pendapatan nasional. Marshall menggunakan perubahan kecil (inovasi) dalam proses pasar dengan

sedikit pesaing dan menunjukkan bahwa produksi skala besar sangat penting bagi kemajuan ekonomi dan inovasi ekonomi (Schumpeter, 1934). Marshall mencoba untuk membuat keseimbangan dengan memiliki banyak pemain di pasar, persaingan sempurna dan tidak dalam pasar monopoli.

Pendekatan Schultz (1975) menyatakan bahwa kewirausahaan sangat terkait dengan situasi disequilibrium dan kewirausahaan yang adalah kemampuan untuk menghadapi situasi tersebut. Dalam situasi disequilibrium (ketidakseimbangan), agen bertindak mengoptimalkan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tingkat yang kepuasan lebih tinggi. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengalokasikan sumberdaya secara efisien, sedangkan agen memiliki tingkat kemampuan kewirausahaan yang berbeda. Schultz berpendapat bahwa dalam dis-equilibrium, orang mengetahui adanya peluang untuk meningkatkan kepuasan, namun proses realokasi membutuhkan waktu. Sebuah perbaikan alokasi sumber daya dapat dicapai baik dengan melakukan percobaan (*trial and error*) atau dengan berinvestasi dalam modal manusia. Schultz (1975) berpendapat bahwa kewirausahaan ada di semua aspek kehidupan.

Teori Schumpeter mengatakan wirausaha mengganggu ekuilibrium, sedangkan teori Kirzner mengatakan sebaliknya yaitu keduanya sebenarnya saling

melengkapi, dialektika dan bahkan sinergi. Jadi teori Schumpeter melihat pengusaha sebagai inovator. Inovator bertindak dalam kesetimbangan, mengganggu dengan inovasi dan menciptakan peluang. Teori Kirznerian mengambil alih ketika disequilibrium dibuat, sedangkan persaingan berperan untuk kematangan wirausaha (melalui kompetisi kualitas) dalam memasuki pertumbuhan. Seorang wirausaha menangkap disequilibrium dan bertindak di dalam arah mengembalikannya. Menurut Bwisa (2010), Teori *Schumpeter-Kirzner-Schumpeter-Kirzner* (S-K-S-K) merupakan suatu proses keberlanjutan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Peran Wiausaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Sumber: diadaptasi dari Bwisa (2010))

Murphy, Liao dan Welsch (2006) berpendapat bahwa gerakan ekonomi pasar tersebut menawarkan logika realitas yang dinamis. Dalam menjelaskan hal ini, mereka menunjukkan fakta bahwa pengetahuan dikomunikasikan secara sistem pasar (misalnya melalui informasi harga), inovasi, pengusaha memenuhi kebutuhan pasar, dan tingkat perubahan sistem terjadi. Jika seorang pengusaha tahu cara membuat barang atau jasa baru, atau tahu cara yang lebih baik untuk melakukannya, manfaat dapat diperoleh melalui pengetahuan tersebut. Pengusaha menyelenggarakan pengetahuan ketika mereka percaya hal itu akan mendapatkan beberapa manfaat individual.

Kerangka neoklasik sebelumnya tidak menjelaskan kegiatan tersebut. Kerangka neoklasik diasumsikan dalam kondisi persaingan sempurna, membawa asumsi sistem tertutup. Dengan demikian, AMP didasarkan pada tiga konseptualisasi utama (Kirzner, 1973). Pertama, adalah pasar tidak efisien. Kedua adalah wirausaha memanfaatkan inefisien pasar sebagai peluang untuk mengembalikan pasar ke arah keseimbangan. Peluang pasar yang ditemukan pengusaha merupakan keunggulan kewirausahaan. Ketiga, setelah Schumpeter (1934), adalah peran kewirausahaan juga berbeda dengan pemilik modal, manajer dan profesional. Kewirausahaan tidak memerlukan kepemilikan sumber daya, sebuah ide yang menambahkan konteks ketidakpastian dan risiko (Knight,

1921). Sebaliknya, fungsi pengusaha adalah menciptakan peluang dan memanfaatkan peluang dengan sejumlah *return* dan risiko. Dibandingkan dengan pemilik modal, wirausaha tidak perlu modal sendiri. Manajer mengawasi efisiensi proses, bertanggung jawab atas aktivitas rutin. Profesional menggunakan pengetahuan mereka untuk memfasilitasi transaksi ekonomi, sedangkan wirausaha menyediakan peluang ekonomi dengan ide-ide baru, produk dan cara melakukan sesuatu (Iyigun dan Owen, 1998).

Model AMP menjelaskan peran penting wirausaha dalam pertumbuhan ekonomi, namun model ini mempunyai beberapa kelemahan. Kritik pertama adalah bahwa sistem pasar tidak murni kompetitif tetapi dapat melibatkan kerjasama antagonis. Kedua adalah bahwa monopoli sumber daya dapat menghambat persaingan dan kewirausahaan. Ketiga adalah bahwa kontrol pajak juga berkontribusi terhadap aktivitas sistem pasar. Keempat adalah bahwa perusahaan-perusahaan milik swasta dan milik negara keduanya dapat terlibat dalam aktivitas kewirausahaan. Kelima, kewirausahaan dapat terjadi pada tanpa kompetisi. Studi empiris oleh Acs dan Audretsch (1987) telah menolak argumen Schumpeter bahwa skala ekonomi diperlukan untuk aktivitas inovasi. Kritik dari AMP telah memberikan dorongan untuk penjelasan terbaru

dari penjelasan kewirausahaan dari perspektif perilaku yaitu dari pendekatan psikologi dan sosiologi.

b. Kewirausahaan dalam Disiplin Ilmu Non-Ekonomi

Istilah “manusia ekonomi” atau *homo economicus* pertama kali digunakan pada abad ke-19 akhir (Kahneman dan Tversky, 1979). Studi awal perilaku menganggap manusia sepenuhnya rasional yaitu membuat keputusan berdasarkan kemampuan untuk memaksimalkan utilitas dengan pengeluaran minimum. Perilaku wirausaha dalam pendekatan rasionalitas ekonomi yaitu untuk berperilaku rasional dalam ekonomi, harus menyadari semua pilihan (peluang dan risiko) yang tersedia, memberikan bobot setiap alternatif yang tersedia untuk memilih tindakan yang optimal. Konsep rasionalitas tidak lagi realistis, ketika wirausaha tidak memiliki informasi yang memadai, tidak memiliki waktu untuk membuat keputusan yang “sempurna” dan sering bertindak atas pengaruh kurang rasional seperti hubungan sosial dan nilai-nilai. Perilaku wirausaha tidak hanya dipengaruhi faktor rasional, namun juga faktor personal, sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Kewirausahaan dalam pendekatan teori personal (*personality traits*), mengungkapkan kepribadian merupakan "kualitas stabil seseorang dalam berbagai situasi", sehingga para ahli teori sifat menjelaskan bahwa kualitas bawaan yang merupakan bakat yang dibawa sejak lahir atau potensi individu yang secara alami dapat

membuat seorang menjadi pengusaha (Coon, 2004). Beberapa karakteristik atau perilaku yang berhubungan dengan wirausaha adalah: tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi, tingkat keterampilan manajemen dan bisnis yang tinggi, kerja keras, optimis, memiliki emosional dan mental yang tangguh, menunjukkan komitmen dan ketekunan yang kuat, mempunyai keinginan tinggi terhadap keunggulan dan memenangkan persaingan, cenderung tidak puas dengan *status quo*, mempunyai visi, menjadi pengalaman seumur hidup dan menggunakan kegagalan sebagai alat dan batu loncatan.

Teori sifat kewirausahaan (*trait theory*) lebih fokus pada ciri personal (kepribadian) wirausaha sebagai faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Karakter dasar seseorang memang relevan untuk kewirausahaan, namun sifat kepribadian saja tidak cukup untuk menjelaskan atau memahami sifat dasar kewirausahaan. Rotter (1966) mengemukakan pentingnya *locus of control* sebagai persepsi individu tentang penyebab utama yang mendasari peristiwa dalam/hidupnya. Dengan kata lain, *locus of control* adalah keyakinan tentang apakah hasil dari tindakan kita bergantung pada apa yang kita lakukan (orientasi kontrol internal) atau pada acara di luar kendali pribadi kita (orientasi kontrol eksternal). Dalam konteks tersebut, keberhasilan wirausaha berasal dari/kemampuannya sendiri dan juga dukungan dari luar.

Pendekatan sosial (*social theory*) menjelaskan bahwa sukses tidaknya suatu kewirausahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang lebih penting adalah dipengaruhi oleh konteks lingkungan sosial. Reynolds (1991) mengidentifikasi empat konteks sosial yang berhubungan dengan peluang kewirausahaan, yaitu. *Pertama*, jaringan sosial. Fokusnya adalah pada membangun hubungan sosial, mempromosikan kepercayaan dan tidak oportunistis. Dengan kata lain, wirausaha seharusnya tidak mengambil keuntungan yang tidak semestinya untuk menjadi sukses. *Kedua*, konteks tahap perjalanan hidup yang menganalisis situasi kehidupan dan karakteristik individu yang memutuskan untuk menjadi wirausaha. Pengalaman orang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka sehingga mereka ingin melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup mereka. *Ketiga*, identifikasi etnis. Seseorang berlatar belakang sosiologis adalah salah satu faktor pendorong (*push factor*) seseorang untuk menjadi wirausaha. Misalnya, latar belakang sosial seseorang menentukan seberapa jauh ia dapat menjadi wirausaha yang sukses. Kelompok marginal didorong oleh latar belakang yang kurang beruntung untuk membuat hidup lebih baik. *Keempat*, ekologi populasi yaitu faktor lingkungan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup bisnis. Faktor

lingkungan tersebut meliputi. sistem politik, regulasi dan peraturan pemerintahan, pelanggan, karyawan dan persaingan adalah beberapa faktor lingkungan yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup usaha baru atau keberhasilan pengusaha.

Keberhasilan wirausaha dan bagaimana kewirausahaan bekerja tidak cukup hanya mengamati sifat-sifat, atau perilaku saja, atau hanya konteks situasi. Dalam memahami sifat dasar kewirausahaan, ketiga bidang sifat, perilaku dan situasi (konteks) perlu diuji secara bersamaan. Perilaku-perilaku yang diperlukan bagi kewirausahaan yang efektif bukan sekadar keterampilan-keterampilan, namun perilaku-perilaku tersebut ditentukan secara bersama oleh karakter wirausaha dan konteks situasional. Para psikolog yang berfokus pada faktor individu cenderung melihat kebanyakan perilaku kewirausahaan berhubungan dengan kepribadian seseorang. Psikolog sosial berkonsentrasi pada faktor interpersonal dan kelompok dalam kewirausahaan. Psikolog sosial lebih memilih sudut pandang keorganisasian memusatkan studinya pada bagaimana konteks organisasi menentukan tindakan-tindakan para wirausaha. Teori kontingensi (*contingency theory*) menjelaskan bahwa, betapapun wirausaha telah memiliki sifat-sifat kewirausahaan yang baik dan dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota kelompok, sukses tidaknya kewirausahaan masih

ditentukan pula oleh situasi yang selalu berubah yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan lingkungan. Dalam kenyataannya, ketiga sudut pandang itu penting karena melekat satu sama lain tanpa bisa dipisahkan.

Psikologi Kognitif benar-benar muncul sebagai bidang utama dan berguna dalam studi dengan pengembangan model *Stimulus-Organism-Response* oleh Hebb pada tahun 1950 (Cziko, 2000). Beberapa cabang psikologi kognitif mempunyai fokus berbeda-beda, namun semua fokus pada niat dalam mengeksplorasi dan memahami struktur mental dan proses yang memediasi antara stimulus dan respon. Seperti halnya ilmu manajemen yang awalnya berkembang di bidang industri, kemudian diterapkan diberbagai bidang lainnya, disiplin ilmu kewirausahaan juga mengalami evolusi yang pesat. Pada awalnya kewirausahaan berkembang dalam bidang ekonomi, tetapi kemudian diterapkan di berbagai bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan institusi-institusi lain seperti lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya lainnya. Dalam bidang-bidang tertentu, kewirausahaan telah dijadikan kompetensi inti (*core competency*) dalam menciptakan perubahan, pembaruan, dan kemajuan.

Kewirausahaan tidak hanya digunakan sebagai upaya menangkap peluang jangka pendek, tetapi juga sebagai kiat untuk memperbaiki usaha dan kehidupan

secara umum dalam menciptakan peluang. Di bidang bisnis misalnya, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memperoleh peluang besar dalam usahanya, karena memiliki kreativitas dan inovasi. Melalui proses ini wirausaha menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Nilai tambah barang dan jasa yang diciptakan melalui proses kreativitas dan inovasi akan menciptakan berbagai keunggulan, termasuk untuk bersaing (*competitive advantage*). Perusahaan seperti Microsoft, Sony, dan Toyota Motor merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam melakukan inovasi produk, khususnya di bidang teknologi. Di bidang jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, orang-orang dapat mencapai kemajuan untuk menangkap peluang usaha dengan memiliki semangat, jiwa kreatif, dan inovatif.

Osborne dan Gaebler (2007) dalam bukunya "*Reinventing Government*" mengemukakan bahwa dalam perkembangan dunia dewasa ini pemerintah dituntut untuk mengembangkan kewirausahaan (*entrepreneurial government*). Dengan memiliki kewirausahaan, birokrasi pada institusi akan lebih efektif melalui pegawai yang memiliki motivasi, optimisme, serta berlomba-lomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, dan adaptif dalam melakukan pelayanan publik.

C. Kewirausahaan dan Kewiraswastaan

Istilah wirausaha dan wiraswasta sering digunakan secara bergantian, namun kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan. Berdasarkan definisi Schumpeter (1934) dan Kirzner (1973) pada bab sebelumnya, secara umum dapat diketahui bahwa wirausaha membutuhkan kreativitas, inovasi, serta keterampilan manajemen tingkat tinggi dan bisnis *know-how*. Wirausaha adalah orang-orang yang terus-menerus mencari, memanfaatkan peluang atau kebutuhan untuk mengembangkan usaha baru, sering dapat meningkatkan daya saing dan inovasi sektor atau wilayah. Knight (1921) menjelaskan bahwa wirausaha akan selalu mencoba memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausaha dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Wirausaha disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar, seperti pengarahan dan pengawasan. Wirausaha juga sering identik dengan pendiri usaha. Istilah wirausaha berlaku untuk seseorang yang menciptakan nilai dengan menawarkan produk barang atau jasa, dengan menciptakan dan memanfaatkan pasar yang ada. Wirausaha cenderung untuk mengidentifikasi peluang pasar dan memanfaatkannya melalui pengadaan dan pengelolaan sumber daya secara efektif dalam sektor tertentu. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan individu, sendiri, dalam tim, di dalam dan di luar

organisasi yang ada untuk memahami dan menciptakan peluang baru ekonomi (produk baru, metode produksi baru, organisasi baru skema dan kombinasi produk-pasar yang baru), dan untuk memperkenalkan ide-ide mereka di pasar, menghadapi ketidakpastian dan hambatan lain, dengan membuat keputusan tentang lokasi, bentuk dan penggunaan sumber daya (Wennekers dan Thurik, 1999).

Wiraswasta dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*self employment*" yaitu orang-orang yang mendapatkan penghasilan langsung dari pelanggan, klien atau organisasi lainnya. Pendapatan mereka tidak ditentukan oleh gaji atau upah dari majikan dengan menjadi karyawan dari bisnis (atau usaha orang lain). Wiraswasta menunjuk pada seseorang yang memperoleh penghasilan sendiri dengan usaha sendiri, praktek profesi atau berusaha di sektor pertanian (Fairlie, 2005). Wiraswasta berarti seseorang yang dapat menggaji dirinya, bukan orang yang mendapat gaji. Wiraswasta merupakan orang yang bekerja sendiri tetapi tidak memiliki usaha serta orang-orang yang bekerja tanpa dibayar dalam bisnis keluarga (Fairlie, 2005). Aktivitas wiraswasta meliputi berbagai aktivitas ekonomi, seperti: usaha pertanian, *sales real estate*, agen asuransi, dokter, arsitek, *craftsmen*, *entertainers*, olahragawan, programmer dan analisis computer (Blanchflower, 2000).

Berbeda dengan wiraswasta, wirausaha tidak tertarik dalam melakukan pekerjaan, namun lebih tertarik untuk

membuat cara perusahaan beroperasi (Gerber, 2004). Kewiraswastaan menekankan pada kemampuan untuk memanfaatkan tantangan dan peluang, lalu menggunakannya untuk meraih keuntungan, sedangkan kewirausahaan menekankan pada kemampuan untuk memanfaatkan tantangan dan peluang dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Carreea dan Thurik, 2000). Wirausaha selalu mengamati lingkungannya, bekerja dengan metode yang bervariasi dalam rangka mengidentifikasi peluang-peluang yang potensial. Wiraswasta berharap agar kejadian-kejadian tak terduga pada bisnis mereka, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, merupakan tanda-tanda dari peluang. Semua orang tidak menyukai krisis, tetapi ada orang tertentu yang menyukai krisis karena krisis dapat memberi kesempatan bagi orang-orang tertentu untuk tampil sebagai pemenang.

Seorang wirausaha tidak hanya menyediakan diri dengan pekerjaan, namun juga mempekerjakan orang lain. Hal ini menciptakan pertumbuhan ekonomi. Wirausaha dan wiraswasta dalam jumlah yang lebih besar dari akan meningkatkan persaingan dan efisiensi serta meningkatkan pendapatan riil dalam masyarakat (Carreea dan Thurik, 2000).

Tabel 2.1 Tipe Wirausaha

	Wiraswasta	Pekerja Upahan
Wirausaha	Pengusaha Schumpeterian	Intrapreneur
Manajer	Manajer-Pemilik Usaha	Manajer Eksekutif

Sumber: Wennekers dan Thurik(1999)

Pengusaha Schumpeterian banyak ditemukan di perusahaan-perusahaan kecil. Wirausaha Schumpeterian tersebut melakukan aktivitas inovatif dan kreatif menghancurkan struktur pasar yang ada. Kewirausahaan tidak identik dengan usaha kecil, namun perusahaan kecil merupakan sarana bagi individu untuk menyalurkan kewirausahaan. Kewirausahaan tidak hanya terbatas untuk orang yang memulai atau mengoperasikan sebuah perusahaan kecil. Pengusaha di perusahaan besar, yang disebut 'intrapreneur' juga melakukan tindakan kewirausahaan. Dalam hal ini ada kecenderungan dari 'meniru perilaku usaha kecil', misalnya menggunakan unit bisnis, anak perusahaan atau perusahaan patungan untuk inovasi dan fleksibilitas pengembangan. Intrapreneur atau kewirausahaan manajer juga termasuk inti kewirausahaan. Manajer yang wirausaha mempertaruhkan waktu, reputasi dan kadang-kadang pekerjaan adalah perwujudan kepemimpinan dan mengakibatkan usaha kewirausahaan dalam perusahaan besar. Seorang yang bekerja sendiri (*self*

employment) belum tentu wirausaha, sebaliknya karyawan (pekerja upahan) juga dapat memiliki semangat kewirausahaan, baik sendiri atau dalam tim memulai usaha baru dan menjadi pengusaha Schumpeter. Manajer sekaligus pemilik usaha dapat ditemukan di sebagian besar perusahaan kecil. Mereka termasuk banyak waralaba, pemilik toko dan orang-orang dalam pekerjaan profesional. (Carreea dan Thurik, 2000).

D. Motivasi Berwirausaha

Motivasi seseorang untuk berwirausaha di sektor usaha tertentu dapat dikaji melalui teori motivasi (Audretsch dkk., 2002) dan teori perilaku (Ajzen, 1988; Segal *et. al*, 2005). Berdasarkan teori motivasi, seseorang untuk berwirausaha perlu faktor-faktor pendorong (*push factors*) dan faktor-faktor penarik (*pull factors*). Faktor-faktor penarik individu untuk menjadi wirausaha lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan risiko yang harus ditanggung (*risk-reward profile*). Jika bekerja pada orang lain lebih menguntungkan maka seseorang akan memilih meninggalkan usaha sendiri dan memilih bekerja dengan pendapatan berupa gaji. Sebaliknya jika usaha sendiri lebih menguntungkan wirausaha memilih masuk ke sektor usaha dibanding bekerja pada orang lain. Faktor luar yang ikut berperan terhadap pengembangan kewirausahaan

adalah perkembangan teknologi, kehadiran lembaga keuangan penyedia modal dan jaringan hubungan antar individu (modal sosial). Faktor-faktor penarik individu untuk menjadi wirausaha juga dapat disebabkan oleh lingkungan yang bersifat negatif, misalnya ketidakpuasan pada pekerjaan, kesulitan mencari pekerjaan, ketidakfleksibilitasnya jam kerja atau gaji yang tidak cukup (Audretsch dkk., 2002).

Faktor-faktor pendorong individu untuk menjadi wirausaha dipengaruhi faktor internal individu yaitu berkaitan dengan karakteristik wirausaha itu sendiri yang mempengaruhi kewirausahaan antara lain kemampuan, sifat individu, preferensi, sistem nilai dan sikap mental. Kapasitas (keahlian, keterampilan), sifat individu, preferensi, sistem nilai dan sikap mental individu menjadi sangat penting ketika memutuskan masuk menjadi wiraswasta (*self employment*) sebagai pilihan karir (Audretsch dkk., 2002). Kasmir (2007) misalnya menjelaskan faktor-faktor yang dapat memberikan dorongan internal individu untuk berwirausaha antara lain sebagai berikut.

- a. Memiliki Visi dan Tujuan yang Jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak ke mana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh wirausaha tersebut.

- b. Memiliki Inisiatif dan Selalu Proaktif. Ini merupakan ciri mendasar karena pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan.
- c. Berorientasi pada Prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik dari pada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu, segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dari pada sebelumnya.
- d. Berani Mengambil Risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha, kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu.
- e. Kerja Keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang, di situ dia datang. Seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Ia selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorong untuk bekerja keras merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan.

- f. Tanggung Jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga pada segi moral kepada berbagai pihak.
- g. Komitmen terhadap Berbagai Pihak. Ini merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban yang harus segera ditepati dan direalisasi.
- h. Mengembangkan Jejaring. Pengusaha harus mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dipelihara dan dikembangkan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas.

Menurut Audretsch dkk. (2002), pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan kemampuan personal dalam mengelola sumberdaya untuk keberhasilan usaha. Pendidikan kewirausahaan dapat merubah sikap dan perilaku seseorang untuk tertarik (*entry*) menjadi wirausaha di sektor usaha tertentu, namun semua itu tidak mudah dilakukan dan memerlukan faktor penarik (*pull*

factor) yaitu faktor yang disebabkan oleh kesempatan (*opportunity*). Pengetahuan, keterampilan, keahlian kewirausahaan perlu didukung oleh peluang pasar, kondisi lingkungan ekonomi, persaingan industri yang mendukung. Pendidikan kewirausahaan perlu dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif terhadap tumbuh kembangnya kewirausahaan.

Selain dapat ditinjau dari teori motivasi, seseorang untuk berwirausaha di sektor usaha tertentu juga dapat didekati dengan teori sosial dan psikologi kognitif. Dalam pendekatan teori sosial dan psikologi, minat seseorang terhadap suatu obyek diawali dari perhatian seseorang terhadap obyek tersebut. Minat merupakan sesuatu hal yang sangat menentukan dalam setiap usaha, maka minat perlu ditumbuhkembangkan pada diri setiap mahasiswa. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Minat pada dasarnya adalah penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri pribadi sehingga kedudukan minat tidaklah stabil karena dalam kondisi-kondisi tertentu, minat dapat berubah-ubah, tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Minat bertalian erat dengan perhatian, maka faktor-faktor tersebut adalah pembawaan, suasana hati atau perasaan, keadaan lingkungan, perangsang dan kemauan (Chandrashekar, *et. al*, 2000).

Teori yang paling sering dipakai dalam memperkirakan suatu dorongan perilaku adalah teori *reasoned action* (Ajzen and Fishbein, 1980) dan teori *planned behavior* (Ajzen, 1988; Segal *et. al*, 2005). Teori *Planned Behavior* (TPB) adalah kelanjutan dari Teori *Reasoned Action* (TRA) yang memasukkan pengukuran dalam *control belief* dan *perceived behavioral control*. Teori *planned behavior* dikembangkan untuk melihat proses dimana individu memutuskan, terikat pada tindakan tertentu. Kolvereid (Segal, *et. al*, 2005) menjelaskan bahwa kerangka yang dibangun Ajzen adalah model yang solid untuk memprediksi motivasi berwirausaha. Ajzen (1991) menyatakan bahwa motivasi adalah anteseden dari perilaku, dimana terkandung tiga variabel, yaitu: (1) *Attitude toward the behavior*, merujuk pada derajat sejauh mana individu tertarik ada perilaku yang dimaksud. Secara umum, orang yang meyakini bahwa melakukan perilaku tertentu dengan probabilitas yang tinggi, dapat memberikan hasil yang paling positif, maka orang itu akan memiliki sikap yang mendukung perilaku tersebut, (2) *Subjective norm*, merujuk pada tekanan sosial yang diterima (*perceived social norm*) untuk melakukan perilaku yang dimaksud. *Perceived social norms* adalah pengukuran dukungan sosial terhadap perilaku dari orang lain yang penting seperti keluarga, teman, *rolemodel* atau mentor, (3) *Perceived behavioral control* (misalnya evaluasi diri atas

kompetensi seseorang terkait dengan tugas atau perilaku).

Izquierdo dan Buelens (2008) mengembangkan model menguji dalam Teori *Planned Behavior* dan menemukan bahwa *attitudes toward the behavior, entrepreneurial acts dan students' antecedents* mempengaruhi *entrepreneurial intention*, sedangkan *perceived competencies* mempengaruhi minat berwirausaha (*entrepreneurial intention*) melalui *Entrepreneurial self-efficacy*. *Entrepreneurial Intentions* meningkat pada periode sebelum (*pre-test*) dan sesudah pembelajaran (*post-test*) kewirausahaan.

Liñán dan Chen (2006) menguji Teori *Planned Behavior* dengan melakukan penelitian kewirausahaan pada 533 responden negara yang berbeda yaitu di Eropa (Spanyol) dan di Asia Selatan (Taiwan). Liñán dan Chen (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa minat berwirausaha (*Entrepreneurial Intention*) dipengaruhi oleh *Personal Attraction, Perceived Social, Norms Self-efficacy*, sedangkan *Personal Attraction, Perceived Social, Norms Self-efficacy* dipengaruhi oleh faktor demografi. Segal, *et. al* (2005) menyatakan bahwa hampir sama dengan model Ajzen di atas, model kewirausahaan memiliki dua faktor utama, yaitu *perceived credibility (perceived feasibility)* dan *perceived desirability*. Douglas dan Shepherd (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa aktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha ditinjau dari sikap terhadap pendapatan, kebebasan, risiko, dan berusaha.

Wirausaha sering dijelaskan dalam terminologi kekuatan atau kelemahan sikap mereka dalam dimensi ini. Penelitian ini juga meneliti pengaruh sikap terhadap minat untuk memulai suatu bisnis. Hasil penelitian menemukan hubungan penting antara manfaat yang diharapkan dari suatu pekerjaan, kebebasan, pendapatan dan resiko terhadap kewirausahaan sebagai pilihan karir.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi minat secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor-faktor intrinsik sebagai pendorong minat berwirausaha antara lain karena adanya kebutuhan akan pendapatan, harga diri, dan perasaan senang. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik berupa uang maupun barang. Berwirausaha dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk memperoleh pendapatan itulah yang dapat menimbulkan minatnya untuk berwirausaha. Harga diri menyebabkan manusia merasa butuh dihargai dan dihormati orang lain. Berwirausaha digunakan untuk meningkatkan harga diri seseorang, karena dengan usaha tersebut seseorang akan memperoleh popularitas, menjaga gengsi, dan menghindari ketergantungannya terhadap orang lain. Keinginan untuk

meningkatkan harga diri tersebut akan menimbulkan minat seseorang untuk berwirausaha. Perasaan senang adalah suatu keadaan hati atau peristiwa kejiwaan seseorang, baik perasaan senang atau tidak senang. Perasaan erat hubungannya dengan pribadi seseorang, maka tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu hal yang sama tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain. Rasa senang akan diwujudkan dengan perhatian, kemauan, dan kepuasan berwirausaha.

Faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar. Faktor-faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat berwirausaha antara lain lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, peluang pendidikan/pengetahuan. Lingkungan keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lain. Keluarga merupakan peletak dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, disinilah yang memberikan pengaruh awal terhadap terbentuknya kepribadian. Rasa tanggung jawab dan kreativitas dapat ditumbuhkan sedini mungkin sejak anak mulai berinteraksi dengan orang dewasa. Minat berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan pengaruh positif terhadap minat tersebut, karena sikap dan aktifitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan masyarakat

merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga di sekitar tempat tinggalnya maupun di luar tempat tinggalnya. Masyarakat yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha antara lain; tetangga, saudara, teman, kenalan, dan orang lain. Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan apa yang dinginkannya atau menjadi harapannya. Suatu daerah yang memberikan peluang usaha akan menimbulkan minat seseorang untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sebenarnya banyak kesempatan yang dapat memberikan keuntungan di lingkungan kita. Kesempatan ini dapat diperoleh orang yang berkemampuan dan berkeinginan kuat untuk meraih sukses. Pengetahuan yang di dapat selama kuliah merupakan modal dasar yang digunakan untuk berwirausaha, juga keterampilan dan keahlian yang di dapat selama di perkuliahan menjadi modal dasar mahasiswa untuk mulai usaha baru.

E. Tantangan Kewirausahaan dalam Konsep Global

Dalam perkembangan tahapan industrialisasi global, dunia tengah memasuki era industri gelombang ke empat, industri ekonomi kreatif (*creative economic industry*). Usaha industri ekonomi kreatif diprediksi akan menjadi industri masa depan sebagai *fourth wave industry* (industri gelombang keempat). Industri gelombang ke empat sangat menekankan pada gagasan dan ide kreatif, dengan

intensifitas informasi dan kreativitas, mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. (Suci, 2014)

Dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka seperti sekarang ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap negara harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber daya masing-masing. Negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan mencapai banyak kemajuan. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara-negara yang dapat memberdayakan sumber daya ekonominya (*empowering of economic resource*) dan memberdayakan sumber daya manusianya (*empowering of human resources*) secara nyata. Sumber-sumber ekonomi dapat diberdayakan apabila sumber daya manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Di Indonesia, sumber daya manusia betul-betul menghadapi tantangan dan persaingan yang kompleks.

Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global. Semua itu merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang

kreatif. Para wirausaha telah berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan karakteristik berani mengambil risiko, memimpin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa dorongan, energi, dan dedikasi para wirausaha, pembentukan (formasi) investasi pada perusahaan-perusahaan baru tidak akan pernah terjadi.

Tantangan persaingan global, tantangan pertumbuhan penduduk, tantangan pengangguran, tantangan tanggung jawab sosial, keanekaragaman ketenagakerjaan, tantangan etika, tantangan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan tantangan gaya hidup beserta kecenderungan-kecenderungannya merupakan tantangan yang saling terkait satu sama lain. Dalam persaingan global, semua sumber daya antar negara akan bergerak bebas tanpa batas. Sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan gaya hidup akan bergerak melewati batas-batas negara. Hanya sumber daya yang memiliki keunggulan yang dapat bertahan dalam persaingan. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang cepat disertai persaingan yang tinggi akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan menimbulkan pengangguran bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan sumber daya yang berkualitas yang

dapat menciptakan berbagai keunggulan, baik keunggulan komparatif (*comparative advantages*) maupun keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), di antaranya melalui proses kreatif dan inovatif wirausaha.

Dalam rangka meningkatkan persaingan di pasar global diperlukan: (1) barang dan jasa yang berkualitas, (2) barang dan jasa yang memiliki keunggulan-keunggulan komparatif, (3) proses produksi dengan memperhatikan efisiensi yang tinggi, (4) kualitas sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang profesional dan terampil yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan baru, (5) sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, wirausaha harus mampu menciptakan keunggulan bersaing melalui kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create the new and different*).

Pendalaman dan Pengayaan Materi

1. Pendalaman Materi

a. Petunjuk:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.

b. Soal:

- 1) Jelaskan konsep dasar kewirausahaan!
- 2) Jelaskan perkembangan teori kewirausahaan dalam pendekatan teori ekonomi!

- 3) Jelaskan perkembangan teori kewirausahaan dalam pendekatan teori non ekonomi!
- 4) Apa perbedaan kewirausahaan dengan kewiraswastaan?
- 5) Faktor-faktor apakah yang memberikan motivasi berwirausaha?
- 6) Jelaskan tantangan-tantanganyang dihadapi kewirausahaan dalam menghadapi globalisasi!
- 7) Menurut Anda, apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk mengantisipasi persaingan global?

2. Pengayaan Materi

Untuk memenuhi penguasaan Materi bab II, mahasiswa diminta mencari profil orang Indonesia yang sudah sukses menjadi pengusaha. Setelah itu, lakukanlah analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Faktor apa yang membuat usahanya sukses?
- b. Dimana peranan kewirausahaan dan kewiraswastaan dalam diri pengusaha tersebut?

Daftar Pustaka

Acs, Z.J. and D.B. Audretsch, 1987. "Innovation, market structure, and firm size". *Review of Economics and Statistics* 69, 4., 567-574.

- Ajzen, I. 1988, *Attitudes, Personalities and Behaviour*, Open University Press, Buckingham.
- Ajzen, I. & Fishbein, M. 1980, *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,NJ.
- Audretsch, D., Thurik, R., Verheul, I., and Wennekers, S. 2002. "An Eclectic Theory of Entrepreneurship". *EIM Business and Policy Research*. <http://papers.tinbergen.nl/01030.pdf> , 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Blanchflower, D.G., 2000, "Self-employment in OECD countries", *Labour Economics* 7, 471-505
- Bwisa. H.M. 2010. "Economics and Entrepreneurship May Be Twins But They Are Not Identical Twins". <http://www.professorbwisa.com/>, 22 Juni 2014 pk. 10.02.
- Chandrashekar, M., McNeilly, K., Russ, F. A., & Marinova, D. 2000. From Uncertain Intentions to Actual Behavior: A Threshold Model of Whether and When Salespeople Quit. *Journal of Marketing Research*, 374, 463-479
- Cantillon, R.. 1755. *An Essay on Economic Theory*. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute.
- Carree, M.A. and A.R. Thurik. 2000. "The life cycle of the U.S. tireindustry", *Southern Economic Journal* 67, forthcoming.

- Coon, D. 2004. *Introduction to Psychology* (9th Ed) Minneapolis: West Publishing Company.
- Cziko, G. 2000. *"The Things We Do: Using the Lessons of Bernard and Darwin to Understand the What, How, and Why of Our Behavior"*. Massachusetts: MIT Press.
- Douglas, E. J., & Shepherd, D. A. 2002. "Self-Employment as a Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization". *Entrepreneurship: Theory & Practice*, 26(3): 81-90
- Dubrin, A.J. 2010. *Leadership*. Edisi ke-6. Australia: John Wiley & Sons.
- Ekelund, R.B. & R.F. Hebert. 1990. *A History of Economic Theory and Method* (third edition), McGraw-Hill, New York
- Fairlie, Robert W. 2005. "Self-Employment, Entrepreneurship and the National Longitudinal Survey of Youth," *Monthly Labor Review*, Special Issue Commemorating the 25 th Anniversary of the NLSY79 , 128(2): 40-47.
- Izquierdo & Buelens. 2008. Competing Models of Entrepreneurial Intentions: The Influence Of Entrepreneurial Self-Efficacy and Attitudes. *Presentado en Internationalizing Entrepreneurship Education and Training, IntEnt Conference, 17-20 Juli, Oxford, Ohio, USA*

- Iyigun, M.F. and A.L. Owen. 1988. "Risk, entrepreneurship, and human-capital accumulation", *AEA Papers and Proceedings* 88 ,2., 454-457.
- Kahneman , D, and Tversky. A. 1991. "Prospect Theory: An analysis of Decision Under Risk", *Econometrica*, 47. 263-292.
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*, Edisi 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.
- Kirzner, I.M. 1973. *Competition and Entrepreneurship*.Chicago, IL: University of Chicago
- Knight, F.H. 1921. "Risk, uncertainty, and profit, *Library of Economics and Liberty*".
www.econlib.org/library/Knight/knRUP1.html22
 Juni 2014 pk. 10.02.
- Liñán. F. & Chen. Y.W. 2006. "Testing The Entrepreneurial Intention Model On A Two-Country Sample", diakses dari <http://selene.uab.es/dep-economia-empresa/recerca/>22 Juni 2014 pk. 10.02.
- Marshall, Alfred; Guillebaud, C. W. 1961. *Principles of Economics*. 9th (variorum) Ed. Macmillan.
- Murphy, J.P, Liao, J & Welsch, P.H. (2006). "A Conceptual history of entrepreneurial thought", *Journal of Management History*. 12, 9-24.
- Osborne, D. dan Gaebler T. 2007. *Reinventing Government*. Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government 26-29 June 2007, Vienna, Austria,

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan025253.pdf> 22 Juni 2014 pk. 10.02.

- Ricardo, D. 1817. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
- Rotter, J. 1966. "Generalised expectancies for internal versus external control reinforcements", *Psychological Monographs*, 80, Whole No.609.
- Schumpeter, J.A. 1934. *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Segal, G., Borgia, & Schoenfeld, J. 2005. "The motivation to become an entrepreneur, *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*", 11 1: 42-57
- Smith, A. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Methuen Publishers
- Steinhoff, D. and Burgess, J.F. 1993. *Small Business Management Fundamental*. Edisi ke-6. New York: Mc Graw Hill Inc.
- Schultz, T.W. 1975. "The Value of the Ability to Deal with Disequilibria." *J. Econ. Lit.* 13(3): 8277-46
- Suciu. 2014. "The Creative Economy". <https://www.creativekorea.or.kr/attach/common/1048.pdf> 22 Juni 2014 pk. 10.02.
- Zimmerer, T. Z., and Scarborough, N. M. 2005. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, 4th ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Wennekers, A. R. M., and A. R. Thurik. 1999. "Linking entrepreneurship and economic growth", *Small Business Economics* 13, 27-55.

BAB III

KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI

Kompetensi Inti

Mampu membandingkan konsep dasar kewirausahaan industri dengan kewirausahaan individu serta kewirausahaan korporasi.

Kompetensi dasar

1. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
2. Menjelaskan perkembangan analisis kewirausahaan
3. Membandingkan konsep kewirausahaan individu, korporasi, dan industri.
4. Menjelaskan peran kewirausahaan terhadap perkembangan industrialisasi
5. Menjelaskan peran kewirausahaan terhadap pertumbuhan ekonomi
6. Menjelaskan peran pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan
7. Menjelaskan peran modal kewirausahaan terhadap fungsi produksi dan pendapatan
8. Menjelaskan peran kewirausahaan terhadap Keseimbangan Pasar

A. Perkembangan Analisis Kewirausahaan

Menurut Audretsch dkk. (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan dan keberhasilan kewirausahaan dapat dianalisis pada tingkat mikro, meso dan makro kewirausahaan. Analisis tingkat mikro menganalisis pengusaha dari karakteristik personal wirausaha (*personal entrepreneurial characteristics*). Analisis tingkat meso menganalisis pengusaha dari karakteristik perusahaan (*corporate entrepreneurial system*). Analisis tingkat makro menganalisis pengusaha pada tingkat industri dan ekonomi secara keseluruhan (*industrial entrepreneurship*).

Analisis tingkat personal. Analisis tingkat personal merupakan kondisi yang memungkinkan individu untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Hal ini juga melibatkan pembentukan kondisi yang akan memungkinkan individu untuk terlibat dalam "proses belajar dan beradaptasi dengan perubahan". Ditinjau dari karakteristik personal (*personal entrepreneurial characteristics*), kesuksesan usaha sering digambarkan secara dominan dengan karakteristik wirausaha secara individu, antara lain inovasi, motivasi, pengambilan risiko, kemampuan menangkap peluang usaha, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas pada tingkat individu yaitu keterampilan dan kualifikasi individu, pengetahuan, sikap,

etika kerja dan motivasi dari orang yang bekerja dalam organisasi.

Analisis tingkat organisasi/perusahaan. Selain berfokus pada peranan manusia, kegiatan kewirausahaan juga lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh masyarakat dan para pengambil keputusan yang akan memengaruhi proses kewirausahaan tersebut. Hasil-hasil penelitian yang termasuk dalam kategori kewirausahaan korporasi antara lain Solomon dkk. (2001) yang mengembangkan teori kewirausahaan Mc. Clelland (1961) dengan variabel iklim usaha dengan menggunakan model Dr. Winslow, yang hasilnya adalah iklim organisasi mendukung perilaku inovatif. Schumpeter (1934) yang menemukan bahwa keberhasilan industri kecil lebih didasarkan pada komitmennya terhadap misi dalam menentukan target atau kinerja usahanya dengan mengutamakan nilai sosial dan etika di masyarakat. Ditinjau dari karakteristik organisasi, factor-faktor seperti akses informasi dan pasar, akses keuangan, akses sumberdaya manusia, akses inovasi dan teknologi, kapasitas networking mempengaruhi kesuksesan wirasusahadipengaruhi oleh. Pengembangan kapasitas wirausaha pada tingkat (atau entitas) organisasi, yaitu karakteristik organisasi, pengaturan struktur, proses, sumberdaya, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen

manajemen, hubungan dan jaringan antar organisasi. Individu membentuk jaringan organisasi dan lembaga, berbagi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai di antara individu dalam kelompok atau menerjemahkan organisasi, dari waktu ke waktu, dalam kapasitas organisasi, yang terdiri dari prosedur, sistem, kebijakan dan budaya. Namun, sementara set kolektif kapasitas individu pada akhirnya diterjemahkan ke dalam kapasitas organisasi dan kelembagaan, yang terakhir jauh melebihi jumlah kapasitas anggotanya. Mengembangkan organisasi atau kapasitas lembaga 'berarti mendorong perubahan dalam sistem kebijakan yang kompleks, sistem, prosedur, peraturan dan budaya organisasi, proses, yang terakhir, endogen dan sukarela, sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi dan lembaga yang melakukan perubahan.

Tabel 3.1. Perbandingan Konsep Kewirausahaan Individu, Kewirausahaan Korporasi, dan Kewirausahaan Industri

FOKUS	PERBANDINGAN KONSEP	KELEMAHAN
<i>Kewirausahaan personal</i>	Fokus keberhasilan usaha dianalisis dari sifat-sifat dan ciri-ciri, serta kemampuan yang melekat pada diri seorang wirausaha atau	Faktor internal dan eksternal organisasi, faktor lingkungan industri seperti peranan kebijakan makroekonomi,

FOKUS	PERBANDINGAN KONSEP	KELEMAHAN
<i>Kewirausahaan korporasi</i>	<p>karakteristik individu.</p> <p>Fokus keberhasilan usaha dianalisis berdasarkan karakteristik wirausaha dihubungkan dengan keadaan sekitar organisasi, seperti iklim organisasi, misi yang diemban organisasi, dan budaya organisasi.</p>	<p>posisi politik wirausaha, dan daya beli masyarakat kurang dipertimbangkan.</p> <p>Lingkup Personal Entrepreneurial kurang fokus.</p> <p>Faktor lingkungan industri seperti peranan kebijakan makroekonomi, posisi politik wirausaha, dan daya beli masyarakat kurang dipertimbangkan.</p>
<i>Kewirausahaan industri</i>	<p>Fokus keberhasilan usaha dianalisis secara integral antara kewirausahaan dan struktur lingkungan industri yang berpengaruh baik secara internal seperti manajemen, maupun eksternal seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan</p>	<p>Lingkup <i>Personal Entrepreneurial</i> kurang dianalisis secara detail.</p>

FOKUS	PERBANDINGAN KONSEP	KELEMAHAN
	kebijakan pemerintah di tempat berlangsungnya industri tersebut.	

Sumber : Edy Dwi Kurniati (2012)

Analisis Tingkat Sistem. Pada tingkat sistem (atau institusional), faktor-faktor pendukung keberhasilan wirausaha adalah seperti misalnya kerangka regulasi, kebijakan dan kondisi kerangka yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan tertentu, koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal; aturan dan perundang-undangan, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran; dan lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja. Ditinjau dari *industrial entrepreneurship* (kewirausahaan bidang industri), keberhasilan usaha diukur berdasarkan karakteristik industri dengan struktur lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian kategori ini dilakukan oleh Mittal (2003), Patric (2004), dan Dutta (2004). Kewirausahaan industri menganalisis konsep kewirausahaan dengan melihat profil

kawasan industri serta faktor lingkungan di tempat berlangsungnya kegiatan industri tersebut. Kinerja kewirausahaan industri dianalisis dari sisi pertumbuhan dan perluasan industri. Shane dkk. (2003) menjelaskan penelitian kewirausahaan saat ini lebih menitikberatkan pada peranan lingkungan makro seperti yang dilakukan oleh Aldrich (2000) dalam *the characteristics of entrepreneurial opportunities*.

1. Kewirausahaan Personal

Kewirausahaan ditinjau dari aspek personal (individu) membahas karakteristik individu atau ciri-ciri personal wirausaha untuk menganalisis keberhasilan atau kesuksesan suatu usaha. Berdasarkan sejarah kewirausahaan, analisis terhadap karakteristik wirausaha (kewirausahaan individu) tersebut antara lain dikembangkan oleh para ahli seperti Schumpeter (1934) dengan hasil karyanya "*Innovative Drive*", Mc Clelland (1961) dengan hasil karyanya "*Need for Achievement*", Rotter (1971) dengan bukunya "*Locus of Control*", dan Cantillon (1755) dengan hasil karyanya "*Risk Taking*" dan Zimmerer dan Scarborough (2005). Analisis tersebut dikelompokkan dalam kajian dengan penekanan pada *personal entrepreneurial characteristics* selanjutnya disebut kewirausahaan individu.

Schumpeter (1934) menjelaskan tentang karakteristik seseorang yang melakukan kewirausahaan dengan

mengatakan bahwa seseorang dikatakan mempunyai perilaku kewirausahaan hanya ketika ia melakukan inovasi. Karakteristik kewirausahaan menurut Mc. Clelland (1961) yaitu: 1) kebutuhan untuk berprestasi, 2) ketrampilan mengambil keputusan dan risiko yang moderat dan bukan atas kebetulan semata, 3) energik khususnya dalam berbagai kegiatan inovatif, 4) tanggung jawab individual, 5) mengetahui hasil-hasil dari berbagai keputusan yang diambilnya, 6) mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa akan datang, 7) memiliki kemampuan organisasi meliputi kemampuan kepemimpinan dan manajerial. Cantillon (1755) menyatakan wirausaha sebagai orang yang menanggung resiko yang berbeda dengan orang yang memberi modal.

Untuk mempelajari kewirausahaan individu ini, disiplin ilmu sosial berusaha membantu menjelaskan kasus-kasus kewirausahaan dengan pertanyaan "*what?*", mereka tidak memiliki kontribusi dalam memahami perilaku kewirausahaan, sehingga perlu mengembangkan perilaku kewirausahaan dengan pertanyaan "*how?*" (Duta, 2004). Saat ini, analisis dan kajian terhadap perilaku kewirausahaan mengalami perubahan dari "*what entrepreneurs are*" menjadi "*what entrepreneurs do*". Pada bidang ekonomi modern, sebagian besar tulisan serta analisis kewirausahaan mengacu pada hasil pemikiran Schumpeter (1934). Dalam tulisannya, Schumpeter (1934)

menjelaskan wirausaha adalah inovator produksi. Kunci penting dalam membangun kepribadian adalah semangat inovasi dan kreativitas. Para wirausaha memiliki dasar-dasar nilai inovasi dalam kegiatannya karena merupakan karakteristik utama dari usaha-usaha kewirausahaan dan kreativitas merupakan hakikat dari tindakan-tindakan kewirausahaan tersebut.

2. Kewirausahaan Korporasi

Berdasarkan beberapa analisis terhadap kewirausahaan, ditemukan kajian yang menganalisis kesuksesan usaha bukan dari ciri-ciri personal wirausaha atau karakteristik wirausaha sukses melainkan dari analisis kewirausahaan dengan memakai pendekatan lingkungan organisasi dan hasil analisis tersebut menemukan bahwa lingkungan organisasi wirausaha ikut berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha. Analisis ini sering dikelompokkan dalam kategori *corporate entrepreneurial system* yang selanjutnya disebut kewirausahaan korporasi. Sebagai gambaran dan dasar dalam menganalisis kewirausahaan korporasi, ada beberapa definisi kewirausahaan korporasi, yaitu sebagai berikut (Karim, 2007).

- a. Kuratko dkk. (2005) menjelaskan bahwa kewirausahaan korporasi adalah perilaku kewirausahaan di dalam organisasi yang sudah ada (*established firm*).

- b. Lumpkin & Dess (1996) mendefinisikan kewirausahaan korporasi sebagai proses, pengerjaan, dan aktivitas pengambilan keputusan (berorientasi pada *entrepreneurial orientation* yang terdiri dari tiga dimensi yakni inovasi (*innovativeness*), proaktif (*proactiveness*), dan pengambilan risiko (*risktaking*) dalam mencapai kinerja perusahaan.
- c. Menurut Covin & Slevin (1999), kewirausahaan korporasi (*corporate entrepreneurship*) adalah bentuk dari inovasi dengan tujuan memberikan napas atau nuansa baru kepada organisasi, pemasaran atau industri untuk menciptakan keunggulan bersaing, memperluas kemampuan perusahaan dengan memanfaatkan peluang internal yang ada melalui sumber-sumber baru yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- d. Zahra dkk. (2000) menjelaskan bahwa kewirausahaan korporasi adalah jumlah inovasi dari perusahaan atau firma, dan usaha pembaruan.
- e. Stoner (2004) mengemukakan bahwa kewirausahaan korporasi dalam prosesnya memiliki tiga dimensi yang sudah mapan atau diakui, yaitu inovasi, proaktif, dan pengambilan risiko.

Kewirausahaan korporasi merupakan kewirausahaan yang analisisnya dihubungkan dengan organisasi dalam memperluas usaha untuk menjajaki peluang baru melalui

kombinasi terkini dari sumber daya yang sudah ada. Saat ini, kewirausahaan korporasi sangat berperan karena hasil analisisnya dapat menjadi dasar strategi memimpin persaingan bisnis yang ditangani para wirausaha. *Entrepreneurship* merupakan salah satu pendekatan yang berkaitan juga dengan kewirausahaan korporasi karena membahas kebiasaan memulai dan mengembangkan bisnis baru dalam struktur organisasi yang sudah ada (Stoner, 2004). Sesuai dengan tujuan dan kemampuan bersaingnya, fungsi kewirausahaan korporasi adalah melakukan proses penciptaan kekayaan (kemakmuran) dan meningkatkan nilai tambah usahanya melalui gagasan-gagasan, meramu sumber-sumber, dan membuat segala sesuatu menjadi kenyataan (Karim, 2007).

Beberapa hasil analisis dengan pendekatan *corporate entrepreneurial system* atau kewirausahaan korporasi antara lain dilakukan Shane dkk. (2003) yang menyatakan bahwa kewirausahaan saat ini menitikberatkan pada analisis lingkungan makro seperti halnya yang dilakukan oleh Aldrich (2000). Hasil penelitian Shane dkk. (2003) menunjukkan bahwa meskipun kegiatan kewirausahaan dipahami sebagai kegiatan yang fokus pada peranan sumber daya manusianya, dalam kegiatan kewirausahaan lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh masyarakatnya dan tanggapan yang dibuat oleh para

pengambil keputusan untuk memengaruhi proses kewirausahaan tersebut.

3. Kewirausahaan Industri

Kajian *industrial entrepreneurship* selanjutnya disebut kewirausahaan industri yang merupakan bagian atau ranah teori kewirausahaan yang dikembangkan melalui ilmu ekonomi pembangunan. Dalam penelitian kewirausahaan bidang industri, keberhasilan usaha dianalisis dari profil industri yang dihubungkan dengan variabel struktur lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Lingkungan internal seperti manajemen, lingkungan eksternal meliputi faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya (Mittal, 2003). Hasil analisis menunjukkan bahwa kewirausahaan industri merupakan variabel dependen dari suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mendukung.

Gunnar Mirdal dalam Mittal (2004) menggambarkan hubungan industrialisasi dan pembangunan ekonomi sebagai dua kegiatan yang memiliki tujuan sama yaitu meningkatkan kegiatan produksi negara melalui pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan industri memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Kewirausahaan merupakan faktor penggerak dalam pembangunan industri. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pada masa globalisasi seperti saat ini, semua negara di dunia berusaha mengembangkan sektor

industri dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di negaraberkembang. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa produktivitas industri cenderung lebih maju dibandingkan dengan kegiatan pertanian yang bersifat tradisional (Mittal, 2004).

Hasil temuan dalam menganalisis kewirausahaan industri antara lain dikemukakan Sharma dan Singh (1994) berdasarkan *determinant analysis* yang menjelaskan bahwa lingkungan usaha di tempat industri itu beroperasi di sekitar wirausaha lebih berpengaruh terhadap kinerja usaha industri dibandingkan komitmen dan prestasi kewirausahaannya. Menurut studi ini, prestasi yang rendah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan faktor ekonomi serta budaya yang tidak baik di antara para pekerja, selain karena kekurangan bahan baku serta modal. Temuan sebaliknya dikemukakan M.U. Desphande yang justru melihat munculnya kewirausahaan industri karena faktor psikologis atau faktor sosiopsikologi yang tinggi, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, politik, dan administrasi serta komitmennya terhadap pembangunan ekonomi.

Temuan lain menjelaskan pula bahwa kewirausahaan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan pengalaman sebagai kelompok atau organisasi tertentu yang keseluruhannya mencerminkan

kondisi yang mendasari kemandirian seseorang. Faktor ekonomi dan budaya, seperti latar belakang keluarga dan norma-norma dari lingkungan seperti yang diuraikan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam menumbuhkan kewirausahaan di bidang industri (Dutta, 2004). Hasil analisis menemukan perbedaan dalam penggunaan variabel penelitian yang mengakibatkan hasil kajiannya menunjukkan perbedaan faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kepemilikan kewirausahaan industri.

Mittal (2003) mengkaji kewirausahaan industri dengan variabel profil ekonomi dan perkembangan industri seperti produksi, investasi, penggunaan kapasitas, dan ekspor yang dihubungkan dengan variabel profil sosial ekonomi usahawan dan lingkungan internal industri, seperti manajemen. Berdasarkan analisis *chi square* dan *determinant analysis*, Mittal (2003) memasukkan faktor penyusun *human capital and nonhuman capital* seperti latar belakang wirausaha, kasta atau agama, pendidikan, pengalaman dalam bidang yang sama, pendapatan, dan motivasi ke dalam variabel sosial ekonomi. Hasilnya, faktor penyusun *human capital and nonhuman capital* memainkan peranan penting dalam kontribusinya menunjang kemajuan atau promosi kewirausahaan.

Patrick (2004) menemukan perbedaan dari Mittal (2003) dalam penelitian kewirausahaan industri pada

industri sektor informal. Variabel yang dipergunakan adalah latar belakang profil industri dihubungkan dengan faktor lingkungan ekonomi dan nonekonomi (sosial budaya), serta lingkungan bisnis (strategi dan kebijakan). Beliau juga mengkaji perbedaan kewirausahaan antardaerah dalam menganalisis keberhasilan industri kecil. Dalam temuannya tersebut, Martin (2004) menjelaskan dengan analisis determinasi bahwa variabel latar belakang profil industri dan faktor penyusun *human capital* seperti pendidikan dan umur wirausaha tidak valid untuk mengukur investasi. Sebaliknya, *nonhuman capital* seperti jumlah pekerja dan jumlah unit industri ditemukan lebih valid untuk mengukur investasi.

Hasil penelitian Sonfield dkk. (2001) menunjukkan perbedaan gender dalam inovasi dan risiko situasi usaha tidak signifikan dalam pilihan strategi dari pemilik usaha. Responden laki-laki mengindikasikan kepuasan lebih tinggi terhadap kinerja usahanya dibanding responden perempuan. Mazzarol dkk. (2002) menemukan hasil yang berbeda dalam penelitiannya. Dalam sektor publik, tenaga kerja wanita pada industri kecil lebih menghemat dan gajinya lebih sedikit, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari peneliti akademis dan pembuat kebijakan dalam industri kecil untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaannya.

Berkaitan dengan hasil empiris dari penelitian kinerja usaha dengan tujuan mengukur keberhasilan usaha industri, menurut temuan Rasiah (2001), ukuran kinerja industri kecil memiliki perbedaan dengan industri besar. Perbedaan tersebut tidak hanya terkait dengan skala usahanya saja, tetapi berkaitan juga dengan sistem manajemennya. Perbedaan yang paling penting adalah bahwa industri kecil memiliki "ide kewirausahaan". Ide kewirausahaan inilah yang menjadikan industri kecil memiliki daya tarik yang kuat dalam kontribusinya mengembangkan proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Beberapa argumentasi yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan belum adanya gambaran yang jelas terkait dengan peran kepemilikan kewirausahaan industriatas kinerja kewirausahaan, baik dari variabel, faktor penyusun, maupun faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kinerja usaha. Martin (2004) menyarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut mengenai persepsi yang berhubungan dengan keberhasilan industri kecil yang dikaji berdasarkan peran yang dimainkan oleh industri kecil dan kinerja kewirausahaan usaha tersebut dengan pendekatan kewirausahaan industri. Dengan mengadopsi pendapat Martin (2004) bahwa secara konseptual kewirausahaan industri belum ditemukan, tetapi dari beberapa hasil analisisnya dapat menjelaskan bahwa

kewirausahaan industri mengkaji teori kewirausahaan dari konteks interdisipliner, yakni menganalisis konsep kewirausahaan dengan melihat profil industri serta faktor lingkungan berlangsungnya kegiatan industri tersebut. Kewirausahaan industri dalam perkembangannya didasarkan pada teori kewirausahaan yang dikaitkan dengan berbagai lingkungan berlangsungnya industri. Kinerja kewirausahaan industri kecil dianalisis dari sisi pertumbuhan dan perluasan industri itu sendiri. Saya sebagai salah satu penulis yang menganalisis kewirausahaan industri ini berusaha untuk mempertegas pengertian kewirausahaan industri tersebut.

B. Kewirausahaan Industri

1. Kewirausahaan dan Perkembangan Industrialisasi

Sejak perang Dunia II, pentingnya kewirausahaan dan usaha skala kecil dan menengah belum banyak dipertimbangkan. Tenaga kerja dan kapital menjadi faktor masukan yang penting dalam proses produksi besar-besaran yang mendominasi ekonomi dunia melalui bisnis yang dikembangkan secara modern sampai akhir tahun 1980-an. Hal tersebut meningkatkan biaya-biaya transaksi dalam produksi besar-besaran yang mempengaruhi peningkatan ukuran perusahaan dari waktu ke waktu memberikan efisiensi dari skala ekonomi. Hal ini diiringi dengan pengembangan teknologi, pilihan konsumen, dan

pengadaan sumber daya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peningkatan peran perusahaan besar pada periode tersebut (Brock dan Evans, 1989). Pengembangan ke arah aktivitas produksi skala besar terlihat dalam ekonomi dikembangkan secara modern. Pada periode ini, pentingnya *self-employment* dan *small business* mulai kurang mendapat perhatian. Walaupun sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sering dilindungi, namun hanya dengan mempertimbangkan aspek sosial dan politis, dan sedikit kasus berkaitan dengan efisiensi ekonomi (Audretsch dan Keilbach, 2010).

Kecenderungan tersebut telah berubah pada separuh abad terakhir. Banyak perusahaan Eropa dan Amerika mengatur kembali proses produksi mereka dengan mengganti tenaga kerja dengan teknologi dan modal, serta memindahkan produksinya ke negara-negara dengan biaya rendah dan tenaga kerja murah seperti Eropa Timur, Asia atau Amerika Latin dalam rangka memelihara daya saingnya. Kecenderungan ini telah mendorong suatu penurunan penyerapan tenagakerja domestik. Hal tersebut memberikan kesadaran semakin pentingnya ekonomi dengan *knowledge-based* yang bertentangan dengan banyak teori inovasi yang konvensional (Arrow, 1962).

Audretsch dan Thurik (2001) membantah bahwa industri besar telah menjadi memberikan peran penting seperti dalam menggeser kegiatan ekonomi dari

keuntungan komparatif ke arah *knowledge-based*. Namun industri manufaktur besar telah kehilangan daya saingnya dalam proses produksi karena biaya produksi domestik yang tinggi. Ketika perusahaan tumbuh menjadi besar, kerumitannya yang semakin besar memaksa perusahaan untuk mengganti pada usahawan pendirinya dengan manajer profesional yang biasanya tidak dikenal dengan penemuan-penemuan serta perilakunya dalam mengambil resiko. Inovasi pada perusahaan besar dilakukan pada divisi Riset dan Pengembangan (R & D), namun karena struktur organisasinya yang besar sehingga perusahaan besar mempunyai fleksibilitas rendah dalam adaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha. Sedangkan, perusahaan dengan skala kecil dan menengah di negara maju menerima arti penting dan nilai baru dalam ekonomi dengan *knowledge-based*. Meskipun kondisi tersebut berbeda pada negara berkembang. Pada negara berkembang usaha kecil dan menengah masih banyak dikelaola secara tradisonal dengan inovasi yang rendah (Audretsch dan Keilbach, 2010).

Pada tahapan selanjutnya, peran sektor UKM di negara maju seperti Amerika, Eropa, Jepang ataupun Korea atau negara-negara maju (*New Industrial Countries disingkat NICs*) mempunyai kontribusi terhadap peningkatan ekspor dan sebagai sub kontraktor yang menyediakan berbagai input bagi industri berskala besar sekaligus sumber inovasi.

Di dalam disertasinya Piper (1997), misalnya, dikatakan bahwa sebanyak 12 juta orang atau sekitar 63,2 persen dari jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) bekerja di 350.000 perusahaan yang mengerjakan kurang dari 500 orang, yang di negara tersebut dianggap sebagai UKM. Jumlah UKM sedikit di atas 99% dari jumlah unit usaha di negara adidaya tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan inti dari basis industri di AS (Piper, 1997). UKM juga sangat penting di banyak negara di Eropa, khususnya Eropa Barat. Di Belanda, misalnya, jumlah UKM sekitar 95% dari jumlah perusahaan di negara kecil angin tersebut (Bijmolt dan Zwart, 1994). Seperti di AS, juga di negara-negara industri majulainnya yang tergabung dalam OECD seperti Jepang, Jerman, Perancis dan Kanada, UKM merupakan motor penting dari pertumbuhan ekonomi dan progres teknologi (Audretsch dan Keilbach, 2010).

Hal ini tentu mendukung teori ekonomi modern yang memandang pentingnya eksistensi serta perkembangan UKM berkaitan dengan spesialisasi dan fleksibilitas dalam memproduksi dan ekspor. Peran sektor UKM di negara maju bergeser dari keunggulan komparative menjadi keunggulan kompetitif melalui inovasi dan produktivitas. Peran UKM sangat penting dalam proses produksi dengan kemampuannya melakukan spesialisasi. Dengan kemampuannya melakukan spesialisasi maka terjadi *linkages* antara sektor UKM dengan industri besar. Hal ini

sangat penting bagi UKM dan menengah serta industri besar maupun perekonomian secara keseluruhan (Audretsch dan Keilbach, 2010).

2. Peran *Entrepreneur* dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah

Peran *entrepreneur* dalam pembangunan suatu wilayah sebenarnya sudah disadari sejak lama. Schumpeter (1934) adalah ahli pembangunan yang memberi perhatian khusus terhadap kegiatan para *entrepreneur* dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Para *entrepreneur* adalah agen yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui penemuan dan kombinasi baru. Wilayah yang mampu mendorong penemuan baru, teknologi baru, bentuk organisasi baru, pasar baru, dan bahan baku baru akan lebih maju secara ekonomi di banding wilayah yang tidak memenuhi kriteria di atas. Dengan demikian peran para *entrepreneur* dalam pembangunan tidak dapat diabaikan. Banyak negara Eropa mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama setelah abad ke 18, karena mempunyai kelas *entrepreneur* yang kuat.

Melalui penemuan baru seorang *entrepreneur* menikmati monopoli untuk sementara waktu. Situasi monopoli inilah yang akan memberi kesempatan *entrepreneur* menikmati keuntungan yang nantinya dipakai untuk melakukan inovasi. Inovasi ini pada akhirnya menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi suatu

wilayah. Menurut Schumpeter (1934), jika suatu wilayah mempunyai kelas *entrepreneur* yang kuat, wilayah tersebut dapat berperan sebagai pemimpin terhadap wilayah lain dari sisi ekonomi. Namun perlu diingat keunggulan sebagai pemimpin hanya bersifat sementara karena para pesaing akan masuk dengan produk yang sama dan membuat inovasi yang lain. Para *entrepreneur* dilihat sebagai kekuatan kreatif. Mereka selalu punya imajinasidan menciptakan kesempatan atau memecahkan masalah dengan cara baru, atau seseorang yang menciptakan nice market atau membangun strategi memenuhi kebutuhan pasar. Di sini para *entrepreneur* tidak hanya berhentisekedar mengidentifikasi pasar, tapi harus mencipta. Dengan demikian *entrepreneur* adalah sumber perubahan ekonomi dan sumber dinamika dalam masyarakat. Para *entrepreneur* layaknya orang yang revolusioner dan sekaligus visioner dalam bidang pembangunan ekonomi. Keputusan yang mereka buat tidak hanya didasarkan pada signal pasar semata tapi juga insting untuk melihat trend pasar di masa depan. Para *entrepreneur* sering digambarkan sebagai seorang yang rasional, utiliterian, atau hedonis yang menghamburkan uang untuk kesenangan.

Kizner (1973) melihat para *entrepreneur* mempunyai peran penting menjadi kekuatan pengimbang dengan memperbaiki pasar agar tetap seimbang (*equilibrium*) melalui proses penyesuaian harga. Schumpeter sebaliknya

melihat para *entrepreneur* sebagai kekuatan yang selalu mendistorsi pasar (*disequilibrium force*) yang mendorong pembangunan. Ini yang oleh Schumpeter di sebut sebagai "*creative destruction*" dimana usaha baru akan menghancurkan usaha yang sudah tua.

Tentu gambaran ini tidak selamanya benar, lebih dari itu mereka adalah pemimpinyang berhasil membangun kerajaan bisnis, dan selalu bertekad menang dalam medan perang bisnis (Schumpeter, 1934). Enterprenur perlu dibedakan dengan manager. Seorang *entrepreneur* tidak pernah merasa terganggu ketika menghadapi masalah atau kendala. Bahkan mereka melihat masalah sebagai kesempatan melakukan berbagai perubahan dan bila perlu mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. Dalam kaitan dengan inovasi, peraturan pemerintah bisa merupakan pisau bermata dua. Di satu pihak bisa mendorong inovasi tapi di lain pihak bisa mematikan inovasi.

Entrepreneruship dipandang sebagai suatu kegiatan yang mempunyai potensi menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja. Masih banyak daerah yang belum menyadari tentang pentingnya sektor *entrepreneur* menciptakan lapangan kerja. Di berbagai negara peranan sektor *entrepreneur* menciptakan lapangan kerja sudah mendapat pengakuan. Penelitian di Amerika menunjukkan 25 perusahaan mampu menciptakan 1,4 juta lapangan kerja

(McQuaid, 2003). Banyak negara menyadari bahwa jumlah perusahaan yang tumbuh cepat menjadi kunci penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu sektor *entrepreneurial* perlu diberi perhatian dan dilindungi.

Sektor *entrepreneur* menjadi sangat penting karena keterbatasan pemerintah menyediakan lapangan kerja kepada masyarakatnya. Anggaran pemerintah terbatas membuka lapangan kerja baru sedangkan di lain pihak angkatan kerja terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk. Pertumbuhan angkatan kerja memberi tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja di suatu daerah. Jika daerah tidak mampu menyediakan lapangan kerja maka akan terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Jika sektor *entrepreneurial* berkembang maka tingkat pengangguran dapat ditekan lebih kecil.

Keterkaitan antara pengangguran dengan kewirausahaan sudah diamati para ahli sejak lama. Tingkat pengangguran suatu wilayah mempunyai korelasi negatif dengan perkembangan *entrepreneurship* di wilayah tersebut. Wilayah yang mempunyai tingkat pengangguran rendah mempunyai tingkat *entrepreneurship* yang tinggi. Mereka mendapati bahwa jika individu menganggur dan prospek masuk lapangan kerja sulit maka mereka cenderung membangun usaha sendiri.

Hal ini berarti *entrepreneurship* suatu wilayah berkembang karena seseorang tidak ingin menjadi

penganggur. Ada dua tipe *entrepreneur* yang memberi kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Tipe *entrepreneur* pertama adalah para investor yang membangun usaha besar. Jelas tipe *entrepreneur* seperti ini akan memberi kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian daerah. Perusahaan yang mereka dirikan pada umumnya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah daerah berharap jenis *entrepreneur* semacam ini ikut berperan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah mereka.

Tipe *entrepreneur* yang kedua adalah mereka yang berusaha sendiri (*self employment*). Para *entrepreneur* jenis ini pada umumnya memiliki usaha dalam skala kecil. Mereka menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan sering dikenal sebagai "*routine entrepreneurs*." Para *entrepreneur* kecil disebut sebagai *entrepreneur* rutin karena tujuan utama usaha mereka sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Biasanya jenis pengusaha seperti ini menggeluti suatu bidang usaha selama jangka waktu tertentu tanpa mempunyai visi pengembangan ke depan. Mereka tetap mempertahankan jenis usaha dan irama usaha yang sama selama bertahun-tahun.

Ada pengecualian untuk beberapa *entrepreneur* yang memulai usaha sebagai *entrepreneur* rutin dan kemudian berkembang menjadi *entrepreneur* dengan berbagai macam usaha. Para *entrepreneur* semacam ini pada awalnya

berusaha sebagai pengusaha kecil dan kemudian berkembang menjadi pengusaha menengah dan besar. Jumlah mereka tidak terlalu banyak, namun kehadiran mereka dapat menjadi inspirasi bagi *entrepreneur* lain. Agar pengusaha kecil dapat bergeser menjadi pengusaha menengah dan besar dibutuhkan perhatian dan kebijakan pemerintah yang intensif.

Dilihat dari ruang lingkungannya, wirausaha memiliki dua fungsi, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara tersebut menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Secara kualitatif, peranan wirausaha melalui usaha kecilnya tidak diragukan lagi. Berikut beberapa di antaranya (Drucker dalam Suryana, 2007).

- a. Usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan maupun ke belakang (*forward and backward linkages*).

- b. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja lokal, sumber daya lokal, dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi wirausaha yang tangguh.
- c. Usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan usaha, dan pemerataan pendapatan (*wealth creation process*) karena jumlahnya tersebar, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Secara mikro, peran wirausaha adalah sebagai penanggung risiko dan ketidakpastian dengan mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Suryana (2007), secara umum wirausaha memiliki dua peran berikut.
- d. Sebagai penemu (*innovator*). Sebagai *innovator*, wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan (1) produk baru (*the new product*), (2) teknologi baru (*the new technology*), (3) ide-ide baru (*the new image*), (4) organisasi usaha baru (*the new organization*).
- e. Sebagai planner, wirausaha berperan dalam merancang (1) *Corporate Plan* (Perencanaan

Perusahaan), (2) *Corporate Strategy* (Strategi Perusahaan), (3) Ide-ide dalam perusahaan (*Corporate Image*), (4) *Corporate Organization* (Organisasi Perusahaan).

Menurut Zimmererdan Scarborough (2005), fungsi wirausaha adalah menciptakan nilai barang dan jasa di pasar melalui proses kombinasi sumber daya dengan cara-cara baru yang berbeda untuk dapat bersaing. Nilai tambah tersebut diciptakan melalui:

- f. Pengembangan teknologi baru (*developing new technology*).
- g. Penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowladge*).
- h. Perbaikan produk dan jasa yang ada (*improving existing products or services*).
- i. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah lebih banyak dengan menggunakan sumber daya lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*).

3. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewirausahaan

Dalam kaitan dengan proses inovasi, ada beberapa tahap yang perlu diketahuipengambil kebijakan (McQuaid, 2003). Tahap pertama, munculnya perilaku inovative *entrepreneur*. Tahap kedua adalah mengidentifikasi peluang

yang ada dan membuat keputusan tentang alokasi sumber sumber yang ada. Tahap terakhir adalah tahap perusahaan berhenti melakukan inovasi sehingga perusahaan hanya fokus pada memperbaiki efisiensi dan fokus pada persaingan harga dengan pesaingnya.

Setiap tahap membutuhkan kebijakan pemerintah yang berbeda. Misalnya, pada tahap pertama pemerintah perlu mengembangkan penelitian dasar dan mendorong budaya *entrepreneur*. Pada tahap kedua, pemerintah harus menjamin akses pada infrastruktur information and communication technology (ICT) atau membantu menciptakan pasar dan kebijakan aras mikro yang lain. Pada tahap terakhir peranan pemerintah adalah menjamin kestabilan lingkungan makro ekonomi dan beroperasinya pasar secara efektif.

Tingkat *entrepreneurship* di suatu wilayah dapat dilihat dari sisi penawaran (perspektif pasar tenaga kerja) dan sisi permintaan (perspektif pasar barang/daya dukung pasar). Perbedaan tersebut sering juga disebut sebagai faktor pendorong (*push*) dan faktor penarik (*pull*).

Dari sisi permintaan, *entrepreneur* di wilayah tertentu ditunjukkan oleh kesempatan yang tersedia untuk berwirausaha. Khusus untuk permintaan bisa dilihat dari perspektif konsumen dan perspektif dunia usaha. Dari perspektif konsumen, keragaman permintaan konsumen mendorong kesempatan wirausaha.

Semakin tinggi keragaman semakin besar ruang terbuka bagi wirausaha. Sedangkan dari perspektif dunia usaha, struktur industri (*outsourcing* dan *networking*) menjadi pendorong berkembangnya *entrepreneur*. Misalnya, perkembangan teknologi digital memungkinkan pengusaha membuka usaha di mana saja karena koordinasi manajemen menjadi sangat mudah. Ada juga orang yang tertarik memilih memindahkan operasi perusahaan ke wilayah tertentu karena peraturan pemerintah yang mendukung.

Dari sisi pasokan, *entrepreneurship* ditentukan oleh kondisi makro sosial ekonomi seperti: komposisi demografi, sikap masyarakat setempat terhadap pengusaha, lingkungan budaya dan lingkungan kelembagaan yang ada di wilayah tersebut. Wilayah dengan tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) tinggi mungkin tidak menarik sebagai tempat berusaha karena daya beli masyarakatnya rendah. Begitu pula jika di tempat tertentu sebagian masyarakat memandang rendah terhadap profesi *entrepreneur* maka ada kecenderungan *entrepreneurship* tidak berkembang di wilayah tersebut sehingga yang dominan adalah *entrepreneur* migran (pendatang). Selama ini teori ekonomi neoklasik lebih banyak memberi perhatian pada peran individu dalam kegiatan ekonomi dan mengabaikan peran organisasi atau kelembagaan. Para *entrepreneur* beroperasi

melalui perusahaan yang mempunyai aturan main tersendiri. Sebagai suatu organisasi, dunia usaha terdiri atas berbagai struktur yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Teori ekonomi organisasi mencoba menjelaskan hal ini melalui suatu pendekatan evolusioner. Organisasi merupakan elemen krusial dalam struktur ekonomi. Pada dasarnya pembuatan keputusan dilakukan secara bersama baik di dunia swasta dan publik. Hal ini berlangsung dalam organisasi. Organisasi memainkan peranan penting dalam pembuatan keputusan. Ekonomi tradisional mengabaikan organisasi karena mereka percaya bahwa general equilibrium terjadi melalui interaksi antar individu. Peran organisasi ditiadakan atau dengan kata lain dianggap netral; individu dianggap paling dominan berinteraksi di pasar. Setiap organisasi punya sejarah, kompleks, adaptif, stabil, kaku, menghimpun individu dan dibentuk oleh individu. Karakteristik dan dinamika organisasi mempengaruhi pola perubahan pada aras makroAudretsch dkk. (2002)..

Peranan organisasi ini semakin penting mengingat berkembangnya teknologi transportasi dan telekomunikasi telah menyebabkan jarak bukan lagi masalah utama baik dari sisi waktu dan biaya. Semakin lama kualitas transportasi makin baik dengan biaya yang makin murah. Perkembangan teknologi digital saat ini menyebabkan pengelolaan industri berubah. Banyak usaha dikelola

pemiliknya dari jarak jauh dan tidak selalu hadir secara fisik di lokasi usaha. Daerah yang berhasil menyiapkan berbagai fasilitas usaha akan dilirik banyak pengusaha. Tentu setiap wilayah perlu juga menyiapkan infrastruktur sosial seperti keamanan berusaha sehingga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra. Para *entrepreneur* layaknya petualang yang membangun usaha baru dan tidak selamanya menjadi pengelola seterusnya. Mereka membangun perusahaan dan setelah itu mereka berada di luar organisasi itu. Peran *entrepreneur* hanya terbatas pada pembentukan organisasi. Organisasi tersebut mungkin saja terus jalan (tumbuh, dewasa dan menurun), tetapi *entrepreneur* yang tadi membangun sekarang menjalani peran yang lain. Dia berpindah dari seorang inovator menjadi pemilik usaha kecil, atau manajer senior pada perusahaan tersebut jika perusahaan tersebut berkembang (Stimson, 2002).

4. Peran Modal Kewirausahaan terhadap Fungsi Produksi dan Pendapatan

Cantillon (1755) menekankan pada mekanisme otomatis dalam pasar yakni penawaran dan permintaan, peran vital dari kewirausahaan, dan analisis inflasi moneter “pra-Austrian” yang canggih yakni tentang bagaimana inflasi bukan hanya menaikkan harga tetapi juga mengubah pola pengeluaran. Richard Cantillon mulai menekankan faktor kewirausahaan (*entrepreneur*) sebagai

salah satu faktor produksi. Schumpeter (1934) menjelaskan peran penting kewirausahaan di dalam "Teori Pembangunan ekonomi". Schumpeter (1934) menjelaskan pentingnya salah satu faktor produksi yaitu peran *entrepreneur* dalam kepengusahaan faktor produksi. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah pada inovator atau *entrepreneur*. Kewirausahaan adalah aktivitas inovasi dan kreatifitas. Inovasi dan kreatifitas berarti kemampuan industri untuk memperkenalkan sesuatu yang baru dalam bidang ekonomi. Metoda produksi yang belum diuji, suatu pengalaman baru seseorang dalam menganalisa sesuatu yang dihasilkan, suatu produksi dimana konsumen belum banyak mengenal sumber bahan baku baru atau pasar baru yang sampai sekarang belum dimanfaatkan, menurut Schumpeter kegiatan atau metode tersebut ditegaskan dengan istilah *inovasi*.

Menurut Schumpeter (1934) Kewirausahaan adalah Kemampuan untuk melakukan kombinasi-kombinasi baru berdasarkan faktor produksi yang ada yang kemudian disebut inovasi. Walaupun kewirausahaan merupakan *human resources* seperti tenaga kerja, namun dalam pembahasan faktor produksi dipisahkan karena menurut Schumpeter (1934) dalam diri seorang pengusaha yang berperan sebagai wirausaha mempunyai kemampuan

mengembangkan kreatifitas dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi sehingga menghasilkan produk inovatif. Jackson dan Mc Connell (dalam Kuncoro, 2003) menyatakan seorang wirausaha: (1) mengambil inisiatif mengkombinasikan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa, baik dalam perannya sebagai pembakar semangat karyawan atau sebagai katalisator. (2) memiliki pekerjaan membuat keputusan yang berhubungan dengan kebijakan dasar usaha, yakni keputusan tidak rutin yang menjadi acuan jalannya usaha. (3) merupakan inovator, berupaya mengenalkan dasar-dasar bisnis sebuah produk baru, teknik produksi baru, bahkan format baru organisasi industri kecil. (4) berani menanggung risiko meliputi: waktu, usaha, reputasi bisnisnya, investasi dana dan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pemegang saham. Fungsi produksi setelah memasukkan faktor kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah sebagai berikut (Jackson dan Mc Connell dikutip Kuncoro, 2003):

$$Q = Q(K, L, E) = AK^\alpha L^{1-\alpha} \dots\dots\dots (2.1)$$

Di mana :

- Q = tingkat produksi yang dihasilkan (output),
- L = tenaga kerja,
- K = jumlah modal,
- E = kewirausahaan

Seorang wirausaha adalah orang yang mengelola sumberdaya sebagai faktor produksi untuk menghasilkan *output* berupa produk/jasa. Kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup pengelolaan sumberdaya untuk menjamin timbulnya kegiatan produksi. Pengelolaan sumberdaya tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. Seorang wirausaha selalu diharuskan menghadapi risiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan inovatif.

Peran wirausaha dalam peningkatan pendapatan adalah dalam meningkatkan penjualan (transaksi) di pasar dengan harga maksimal. Transaksi terjadi sebagai hasil interaksi antara dua kelompok pelaku pasar, yaitu pembeli potensial (non-pemilik) pada sisi permintaan, dan penjual potensial (pemilik) pada sisi penawaran (Fisher *et al.*, 2006:7). Di pasar bebas, penjual berupaya untuk menjaga barang yang dijual pada harga tertinggi. Selanjutnya, transaksi terjadi jika harga reservasi pembeli melebihi harga reservasi penjual. Harga transaksi terjadi tergantung pada negosiasi, strategi dan daya tawar dari kedua belah pihak. Transaksi terjadi pada satu titik yang ditunjukkan melalui perpotongan kurva penawaran dan permintaan yang disebut dengan titik ekuilibrium (Fisher *et al.*, 2006:12). Dalam kondisi ekuilibrium tersebut kuantitas barang yang ingin dan dapat dibeli pembeli tepat sama

dengan kuantitas barang yang ingin dan dapat dijual oleh penjual (Mankiw, 2008: 80).

5. Peran Kewirausahaan terhadap Keseimbangan Pasar

Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Pembeli adalah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk, sedangkan penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk (Mankiw, 2008: 65). Setiap transaksi pasar melibatkan pertukaran, sehingga melibatkan dua sisi permintaan dan penawaran (Frank dan Bernanke, 2009:56), Penawaran dan permintaan adalah kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja (Mankiw, 2008: 66).

Permintaan adalah istilah ekonomi yang menggambarkan keinginan konsumen, kemauan dan kemampuan untuk membayar harga untuk barang atau jasa tertentu. Permintaan mengacu pada berapa banyak jumlah/kuantitas dari suatu produk atau jasa yang diinginkan oleh pembeli, dimana kuantitas yang diminta adalah jumlah produk yang akan dibeli pada harga tertentu (Sullivan, dan Sheffrin, 2003:73).

Menurut Baye (2003:39) fungsi permintaan terhadap komoditas x digambarkan sebagai seberapa banyak x yang akan dibeli pada alternatif pada harga x (P_x), alternatif harga barang substitusi (P_y), alternatif tingkat pendapatan

(Y) dan alternatif variabel lainnya yang dapat mempengaruhi permintaan (H), sehingga fungsi permintaan dituliskan sebagai berikut:

$$Q^d_x = f(P_x, P_y, Y, H) \dots\dots\dots(2.2)$$

Penawaran adalah jumlah yang ditawarkan untuk setiap barang atau jasa atau jumlah yang tersedia dan dapat dijual oleh para penjual (Mankiw, 2008: 75). Fungsi penawaran terhadap komoditas x digambarkan sebagai seberapa banyak barang x yang akan dijual pada alternatif pada harga x (Px), alternatif teknologi mengolah input (Pr), alternatif harga input seperti upah dan harga material (W) dan alternatif variabel lainnya yang dapat mempengaruhi penawaran, seperti persaingan, ekspektasi konsumen, dan lain-lain (H). Baye (2003:58) menuliskan fungsi penawaran sebagai berikut:

$$Q^s_x = f(P_x, P_r, W, H) \dots\dots\dots(2.3)$$

Peran kewirausahaan dalam pemberdayaan lingkungan berbeda dengan pemilik modal, manajer dan profesional. Manajer mengawasi efisiensi proses, bertanggung jawab atas aktivitas rutin. Sebaliknya, fungsi pengusaha adalah menciptakan peluang dan memanfaatkan peluang dengan sejumlah *return* dan risiko. Dibandingkan dengan pemilik modal, wirausaha tidak perlu modal sendiri. Dibandingkan profesional, profesional menggunakan pengetahuan mereka untuk memfasilitasi

transaksi ekonomi, sedangkan wirausaha menyediakan peluang ekonomi dengan ide-ide baru, produk dan cara melakukan sesuatu (Iyigun dan Owen, 1998).

Ketika pasar statis, wirausaha melalui proses inovasi memperkenalkan produk baru, metode produksi, pasar, sumber pasokan, atau kombinasi industri yang mempengaruhi ekonomi keluar dari ekuilibrium sebelumnya (Schumpeter, 1934), Selanjutnya, wirausaha menemukan peluang untuk memenuhi permintaan untuk mencapai keseimbangan baru (Kirzner, 1973). Dalam pendekatan Pandangan berbasis sumber daya (*Resource Based View/RBV*), wirausaha menciptakan '*core competence*', kemampuan dinamis terhadap perubahan (*Dinamic Capability*), menciptakan produk yang bernilai, unik, tidak mudah ditiru, '*capability lifecycle*'), dan mengutamakan keahlian dibanding keahlian rutin (Tokuda, 2005).

Peran wirausaha dalam memaksimalkan surplus dalam bentuk keuntungan dan pendapatan dan meminimalkan risiko. Pendapatan dari aspek permintaan dipengaruhi oleh tingkat permintaan barang dan jasa, sedangkan dari aspek produksi dipengaruhi oleh efisiensi pengelolaan sumberdaya. Dalam aspek permintaan wirausaha (*entrepreneur*) mempunyai peran untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa yang setinggi-tingginya. Dalam aspek produksi wirausaha (*entrepreneur*) mempunyai peran untuk mengelola sumberdaya (input

produksi) yang serendah-rendahnya untuk menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Nilai tambah merupakan selisih antara pendapatan (*output*) dengan biaya (*input*). Peningkatan permintaan produk akan meningkatkan sisi pendapatan (*output*) dan memberikan peningkatan nilai tambah baik kepada industri maupun pekerja. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan antara *output* dan *input*.

Schumpeter (1934) menjelaskan peran penting kewirausahaan di dalam "Teori Pembangunan ekonomi". Kewirausahaan adalah aktivitas inovasi dan kreatifitas. Inovasi dan kreatifitas berarti kemampuan industri untuk memperkenalkan sesuatu yang baru dalam bidang ekonomi. Metoda produksi yang belum diuji, suatu pengalaman baru seseorang dalam menganalisa sesuatu yang dihasilkan, suatu produksi dimana konsumen belum banyak mengenal sumber bahan baku baru atau pasar baru yang sampai sekarang belum dimanfaatkan, menurut Schumpeter kegiatan atau metode tersebut ditegaskan dengan istilah *inovasi*.

Wirausaha masuk kesektor industri untuk memproduksi barang dan jasa dipengaruhi oleh peluang-peluang ekonomi. Pengusaha akan masuk ke sektor industri dan membuat produk lebih banyak jika harga melebihi biaya marjinal produk. Oleh karena itu, pasokan jangka panjang adalah elastis sempurna pada tingkat harga yang sama dengan biaya marjinal. Kitzner (1979) melihat

para wirausaha mempunyai peran penting menjadi kekuatan untuk memperbaiki pasar agar tetap seimbang (*equilibrium*) melalui proses penyesuaian harga dalam jangka panjang.

Pendalaman dan Pengayaan Materi

1. Pendalaman Materi

a. Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, jelas, dan benar.

b. Soal:

- 1) Tuliskan secara singkat tingkat analisis kewirausahaan yang Anda ketahui.
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan individu.
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan korporasi.
- 4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan industri.
- 5) Jelaskan peran kewirausahaan terhadap perkembangan industrialisasi
- 6) Jelaskan peran kewirausahaan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 7) Jelaskan peran pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan.

- 8) Jelaskan peran modal kewirausahaan terhadap fungsi produksi dan pendapatan.
- 9) Jelaskan peran kewirausahaan terhadap Keseimbangan Pasar.

2. Pengayaan Materi

- 1) Mahasiswa mengidentifikasi industri yang berkembang, kemudian menganalisis faktor-faktor keberhasilan industri tersebut.
- 2) Mahasiswa memberikan analisis keberhasilan industri yang sudah teridentifikasi berkaitan dengan konsep kewirausahaan individu, korporasi, dan industri.

Daftar Pustaka

- Aldrich, S.E. 2000. "Customer.com Quality of Experience Benchmark: What Kind of Total Customer Experience Does Your E-Business Deliver?". Patricia Seybold Group, E-Business Consultants & Thought Leaders. Boston.
- Arrow, K. 1962. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. dalam R. Nelson (Ed.), *The Rate and Direction of Inventive Activity*. Princeton: Princeton University Press.
- Audretsch, D. and Thurik, R. 2001. "What's new about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies". *Industrial and Corporate Change*, 10, 267-315.

- Audretsch, D., Thurik, R., Verheul, I., and Wennekers, S. 2002. "An Eclectic Theory of Entrepreneurship". *EIM Business and Policy Research*. <http://papers.tinbergen.nl/01030.pdf> , 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Audretsch, D.B. dan Keilbach, M. 2010. "Entrepreneurship Capital – Determinants and Impact on Regional Economic Performance". *Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy 2004-37*, Max Planck Institute of Economics, Entrepreneurship, Growth and Public Policy Group. https://www.aeaweb.org/assa/2006/0107_1430_0301.pdf
- Baye, M.R. 2003. *Managerial Economic and Business Strategy*. Edisi Keempat. Singapore: Mc Graw Hill.
- Brock, W. and Evans, D. 1989. "Small Business Economics". *Small Business Economics*, 1, 7-20.
- Cantillon, R. 1755. *An Essay on Economic Theory*. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute.
- Covin, J.G. dan Dennis P. Slevin. 1991. "A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behaviour". *Entrepreneurship Theory and Practice*. Vol.16.
- Dutta, S. 2004 "Rural Industrial Entrepreneurship: The Case in Bardhaman District in Bengal". Disertasi. Netherland: Wihaningen University.
- Edy Dwi Kurniati. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Petani Berwirausaha di Sektor Industri di Luar Sketor*

Pertanian pada Pedesaan di Kabupaten Semarang.
Disertasi UNDIP Semarang

- Fisher, J. Geltner, D. & Pollakowski, H. 2006. "A Quarterly Transactions-Based Index of Institutional Real Estate Investment Performance and Movements in Supply and Demand". *Prepared for submission to the 6 Cambridge-Maastricht Real Estate Finance and Investment Symposium, University of Cambridge, June*
- Karim, S. 2007. "Analisis Pengaruh Kewirausahaan Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Pabrik Pengolahan Crumb Rubber Di Palembang". *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. Vol. 5/Nomor 9/Juni 2007.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. "Formasi Keterkaitan, Pola Kluster Dan Orientasi Pasar : Studi Kasus Sentra Industri Keramik Di Kasongan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta", *Jurnal Empirika* 16(1):1-20
- Kuratko, D. F. 2005. "The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges". *Entrepreneurship: Theory & Practice*, 295, 577-597.
- Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. 1996. "Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance". *Academy of Management Review*, 21(1), 135-172
- Mankiw. 2000. *Microeconomic Theory*. Fourth Edition, Yale University.

- Mazzarol, T., Volery, T, Doss, N dan Thein, V. 1999. Factors Influencing small business start-ups. *International Journal Entrepreneurship behaviour and Research*. 5(2):
- Mc Clelland. 1961. Achievement Motivation can be Developed, *Harvard Business Review*, 41 (November-December): 6-24
- McQuaid, Ronald W. 2002. "Entrepreneurship and regional development policies," *ERSA conference papers ersa02p187*, *European Regional Science Association*.
- Mittal, K.C. 2003. *Industrial Entrepreneurship*. New Delhi: DEEP & DEEP Publications.
- Patrick, M. 2004. "Informal Sector: Seedbed of Industrial entrepreneurship". *Discussion Paper No. 79*. Thiruvananthapuram.
- Piper, Randy P. 1997. *The Performance Determinants of Small and Medium-Sized Manufacturing Firms*, Disertasi tidak dipublikasikan, University of South Caroline.
- Rasiah Rajah. 2001. *Government – Business Coordination and Small Business Performance in the Machine Tools Sector in Malaysia*, World Bank Institute
- Rotter, J. 1966. "Generalised expectancies for internal versus external control reinforcements", *Psychological Monographs*, 80, Whole No.609.
- Schumpeter, J.A. 1934. *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Shane, S. dan Bruce R. 2003. "Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation In The Work Place". *Academy of Management Journal*. 3.,580–670
- Sharma. R.C & Singh. A.K. 1994. "Determination of Entrepreneurship in Agriculture", *Productivity*, 35(3), October-December
- Solomon, T George dkk. 2000. "The Role of Climate in Fostering Innovative Behavior in Entrepreneurial SMEs". *Journal of Small Business Management*.
- Sonfield, M. dkk. 2001. "Gender Comparison in Strategic Decision – Making: An Empirical Analysis of the Entrepreneurial Strategi Matrix". *Journal of Small Business Management*. 2001 39 (2), 165–173.
- Stimson, R. 2002. The Retirement Village Industry in Applied Geography for the Entrepreneurial University, *Economica*, 7-38.
- Stoner, J.A.F. Freeman, R.E and Gilbert Jr. 1996. *Management*. Edisi Bahasa Indonesia. Terjemahan: Alexander Sudiri. Jakarta: Prenhalindo.
- Sullivan, A., Sheffrin, S.M. 2003. *Economics: Principles in action: Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall*.
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tokuda, A. 2005. *The Critical Assessment of the Resource-Based View of Strategic Management: The Source of*

Heterogeneity of the Firm. Institute of International Relations and Area Studies, Ritsumeikan University

Zahra, S. A., & Garvis, D. M. 2000. "Entrepreneurship and Firm performance: The moderating effect of international environmental hostility". *Journal of Business Venturing*, 15(5), 469–492

Zimmerer, T. Z., and Scarborough, N. M. 2005. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, 4th ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

BAB IV

KARAKTERISTIK DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA DALAM KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI

Kompetensi Inti

Mampu memahami konsep dasar yang berkaitan dengan profil dan karakteristik wirausaha dalam kewirausahaan industri, sehingga mempunyai kemampuan mengidentifikasi peluang usaha sesuai dengan potensi dirinya sendiri dengan benar, terutama dalam sektor pertanian.

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan sifat dan karakteristik wirausaha.
2. Menjelaskan tipe wirausaha.
3. Menjelaskan keuntungan dan risiko wirausaha.
4. Menjelaskan aktivitas kewirausahaan.
5. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha.

6. Menjelaskan kiat-kiat untuk menjadi wirausaha sukses.
7. Menjelaskan pengertian usaha kecil.
8. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan usaha kecil.

A. Karakteristik Wirausaha

1. Sifat dan Karakteristik Wirausaha

Patrick (2004) menjelaskan bahwa profil industri dapat dikaji melalui latar belakang wirausaha yang meliputi latar belakang pribadi seperti agama, umur, status perkawinan, dan pendidikan, latar belakang keluarga atau latar belakang sosial dan ekonomi seperti pengalaman kerja sebelumnya, motivasi, serta kepribadian dan kemajuan kewirausahaan. Faktor latar belakang pribadi seperti agama, umur, status perkawinan, dan pendidikan biasanya digolongkan ke dalam profil dan karakteristik wirausaha, sedangkan latar belakang keluarga atau latar belakang sosial dan ekonomi menunjukkan latar belakang pribadi. Agama, suku bangsa, dan latar belakang pekerjaan menjelaskan latar belakang keluarga. Semua variabel ini membantu untuk menganalisis latar belakang sosial wirausaha.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, latar belakang pekerjaan memberi gambaran tentang status ekonomi keluarga yang secara tidak langsung diperhitungkan sebagai indikator latar belakang ekonomi.

Profil industri ini oleh Mittal (2003) diperluas dengan pengalaman usaha dalam bidang yang sama, motivasi, kepribadian, dan kemajuan kewirausahaan. Profil keluarga juga dipakai sebagai data untuk menunjang profil industri karena faktor ini juga berperan dalam mendukung kesuksesan wirausaha.

Menurut Schumpeter (1934), wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan mengombinasikan cara-cara baru untuk menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Inovasi merupakan salah satu dimensi yang mendasari kewirausahaan. Inovasi adalah fungsi kunci dalam proses kewirausahaan. Tanpa inovasi, seorang wirausaha tidak bisabertahan diduniabisnis modern yang kompetitif. Kewirausahaan adalah respon kreatif dan inovatif untuk lingkungan dan kemampuan untuk mengenali, memulai dan memanfaatkan kesempatan ekonomi. Sebuah entrepreneur adalah seorang inovator yang memperkenalkan yang memperkenalkan sesuatu yang baru dalam perekonomian. Sesuai pandangan Schumpeter, seseorang menjadi seorang wirausaha hanya ketika seorang terlibat dalam inovasi. Inovasi adalah sama dengan keunggulan kompetitif. Wirausaha menyadari kebutuhan untuk inovasi. Inovasi menambah nilai produk. Hanya

melalui inovasi, organisasi dapat bertahan kompetisi meningkat di pasar (Sreevidya & Venugopalan, 2011).

Secara sederhana, arti wirausaha (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti (Kasmir, 2007). Dari berbagai pendapat, dapat dijelaskan unsur-unsur pokok yang ada dalam pengertian wirausaha, yaitu (1) orang yang menanggung risiko; (2) orang yang mengurus perusahaan; (3) orang yang memobilisasi dan mengalokasikan modal; dan (4) orang yang menciptakan barang baru.

Menurut Zimmerer dan Scarborough (2005), karakteristik kewirausahaan adalah:

- a. *Desire for responsibility*, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu mawas diri.
- b. *Preference for moderate risk*, yaitu lebih memilih resiko yang moderat, artinya ia selalu menghindari risiko yang rendah dan menghindari risiki yang tinggi
- c. *Confidence in their ability to success*, yaitu percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil
- d. *Desire for immediate feedback*, yaitu selalu menghendaki umpan balik yang segera

- e. *High level of energy*, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik
- f. *Future orientation*, yaitu berorientasi ke masa depan, perspektif, dan berwawasan jauh ke depan
- g. *Value of achievement over money*, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah
- h. *Skill at organizing*, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah

Menurut Sreevidya & Venugopalan (2011), seorang wirausaha sangat berorientasi berprestasi, merupakan individu yang antusias dan energik, serta pemimpin bisnis. Menurut Sreevidya & Venugopalan (2011), wirausaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Seorang wirausaha membawa perubahan di masyarakat. Wirausaha adalah katalis perubahan.
- b. Wirausaha merupakan individu yang berorientasi tindakan, mempunyai motivasi tinggi serta berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan.
- c. Wirausaha memiliki tanggung jawab, semangat dan daya tahan.
- d. Wirausaha adalah pemikir dan pelaku, perencana dan pekerja.

- e. Wirausaha dapat meramalkan masa depan, merebut pasar dengan kemampuan mempengaruhi orang lain seperti pemasar, mengelola dana dengan kemampuan keuangan.
- f. Wirausaha melakukan usaha bukan untuk keuntungan pribadinya saja tetapi untuk kepentingan konsumen, pemerintah dan masyarakat.
- g. Wirausaha yang membangun usaha baru memiliki tekad dan keinginan untuk mengatasi rintangan dan memecahkan masalah dan menyelesaikan pekerjaan.
- h. Wirausaha menemukan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang.
- i. Wirausaha melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai fungsi penglihatan, kerja keras, dan semangat.
- j. Meskipun banyak orang datang dengan ide-ide bisnis yang besar dan mengimplementasikan ide-ide tersebut.

Sifat kewirausahaan adalah sebagai berikut (Sreevidya & Venugopalan, 2011):

- a. Wirausaha adalah fungsi dari inovasi.
- b. Wirausaha adalah fungsi kepemimpinan.
- c. Wirausaha adalah fungsi bangunan organisasi.
- d. Wirausaha adalah fungsi dari pencapaian prestasi yang tinggi.
- e. Wirausaha melibatkan penciptaan dan pengoperasian suatu perusahaan.

- f. Wirausaha berkaitan dengan kombinasi unik dari sumber daya dengan membuat metode atau produk baru.
- g. Wirausaha berkaitan dengan aktivitas mempekerjakan, mengelola, dan mengembangkan faktor-faktor produksi.
- h. Wirausaha adalah proses menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memanfaatkan peluang yang belum dimanfaatkan.
- i. Wirausaha adalah orientasi yang kuat dan positif terhadap pertumbuhan penjualan, pendapatan, aset, dan kerja.

Selain profil sebagai perwujudan dari ciri dan watak, maka wirausaha juga harus mempunyai sifat/karakteristik yang dikemukakan oleh Schermerhorn (1999) sebagai berikut.

- a. Locus kontrol internal.
- b. Tingkat energi tinggi.
- c. Kebutuhan tinggi akan prestasi.
- d. Toleransi terhadap ambiguitas.
- e. Kepercayaan diri.
- f. Berorientasi pada *action*.
- g. Menurut Wiratmo (2008), dalam meraih kesuksesan wirausaha juga harus memiliki karakteristik sebagai berikut.
- h. Keinginan untuk berprestasi.

- i. Keinginan untuk bertanggung jawab.
- j. Preferensi kepada risiko.
- k. Persepsi kepada kemungkinan untuk berhasil.
- l. Rangsangan untuk umpan balik.
- m. Aktivitas energik.
- n. Orientasi ke masa depan.
- o. Keterampilan dalam pengorganisasian.
- p. Sikap terhadap uang.

Wirausaha yang berhasil mempunyai standar prestasi (*n Ach*) tinggi. Potensi kewirausahaannya dapat dilihat dari karakteristik (Wiratmo, 2008) sebagai berikut.

- a. Kemampuan inovatif.
- b. Memiliki toleransi terhadap perbedaan (*ambiguity*).
- c. Memiliki keinginan untuk berprestasi.
- d. Memiliki kemampuan merumuskan perencanaan yang realistis.
- e. Memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan.
- f. Memiliki pemikiran yang objektif.
- g. Memiliki tanggung jawab pribadi.
- h. Memiliki kemampuan beradaptasi (*flexibility*).
- i. Memiliki kemampuan sebagai organisator dan administrator.
- j. Memiliki tingkat komitmen yang tinggi (*survival*).

Delapan cara menuju puncak karir berwirausaha yang dikemukakan oleh Alma (2007) antara lain sebagai berikut.

- a. *Capacity for hard work* (mau bekerja keras).
- b. *Getting things done with and through people* (bekerja sama dengan orang lain).
- c. *Good appearance* (penampilan yang baik).
- d. *Self confidence* (yakin pada diri sendiri).
- e. *Making sound decision* (pandai membuat keputusan).
- f. *College education* (mau menambah ilmu pengetahuan).
- g. *Ambition drive* (ambisi untuk maju).
- h. *Ability to communicate* (pandai berkomunikasi).

Menurut Suryana (2003) wirausaha adalah inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru seperti dalam bentuk sebagai berikut.

- a. Memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, memperkenalkan metode produksi baru.
- b. Membuka pasar yang baru.
- c. Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru.
- d. Menjalankan organisasi baru pada suatu industri.

Menurut Kasmir (2007), ada enam hakikat penting yang perlu dicermati dari pengertian kewirausahaan, yaitu.

- a. Kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku, dijadikan dasar untuk mengelola sumber

- daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis.
- b. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha.
 - c. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usahadan mengembangkan usaha.
 - d. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru—*creative*, dan sesuatu yang berbeda—*innovative*—yang bermanfaat memberikan nilai lebih.
 - e. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
 - f. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

Berdasarkan keenam hakikat kewirausahaan tersebut, kewirausahaan dapat didefinisikan secara ringkas sebagai kemampuan menangkap peluang usaha dengan cara yang kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Dari definisi kewirausahaan tersebut, ada empat tema penting yang dapat diidentifikasi sebagai berikut (Steinhoff dan Burgess dalam Wirasasmita, 2004).

- a. *The pursue of opportunities*, bahwa kewirausahaan merupakan kegiatan untuk mengejar peluang dan pertumbuhan kearah peningkatan usaha dengan memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan yang tidak dilihat dan tidak diperhatikan oleh orang lain.
- b. *Creativity and innovation*, bahwa kewirausahaan juga mencakup pengembangan ide-ide baru yang kemudian dijadikan dasar melakukan perubahan/perombakan, pergantian bentuk, dan memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru termasuk produk baru atau cara baru dalam melakukan usaha.
- c. *Value added*, bahwa kewirausahaan merupakan usaha kreatif dan inovatif, tetapi produk yang dihasilkan

harus memiliki nilai tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau konsumen.

- d. *Growth*, bahwa kewirausahaan merupakan kegiatan yang bertahap. Setelah berada pada tahap pertumbuhan (karakteristik usaha umumnya masih berskala kecil), tahap selanjutnya adalah tahap inovasi dan mengejar pertumbuhan dengan bekerja keras sambil secara berkelanjutan mencari kecenderungan dan terus melakukan inovasi produk dan pendekatan baru.

2. Tipe Wirausaha

Berbagai ahli mengemukakan profil wirausaha dengan pengelompokan yang berbeda-beda, ada yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan kegiatan usahanya, maupun berdasarkan sifat wirausahanya. Ropke yang dikutip Suryana (2003) mengelompokkan wirausaha berdasarkan peranannya sebagai berikut.

- a. Wirausaha rutin (*earth*), yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan

teknologi, misalnya seorang pegawai atau manajer. Wirausaha rutin dibayar dalam bentuk gaji.

- b. Wirausaha arbitrase, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan (pengetahuan) dan pemanfaatan (pembukaan). Misalnya, dalam penawaran dan permintaan pasartidak terjadi ekuilibrium, maka wirausaha ini akan membeli barang dengan murah dan menjualnya dengan harga mahal. Kegiatan kewirausahaan arbitrase tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi wirausaha. Kegiatannya melibatkan spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli.
- c. Wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Wirausaha mengadakan proses dinamis pada produk, proses, hasil, sumber pengadaan, dan organisasi yang baru.

Berdasarkan jenis usaha, wirausaha dapat diklasifikasikan ke dalam jenis sebagai berikut (Sreevidya& Venugopalan, 2011).

- a. Wirausaha Bisnis: adalah seorang individu yang menemukan ide untuk memulai bisnis dan kemudian membangun bisnis untuk melahirkan ide.
- b. Wirausaha Pedagang: adalah seorang wirausaha yang melakukan kegiatan perdagangan yaitu; jual beli barang-barang manufaktur dan pertanian.
- c. Wirausaha Industri: adalah seorang wirausaha yang melakukan pembuatan kegiatan.
- d. Wirausaha aPerusahaan: adalah orang yang menunjukkan keterampilan yang inovatif dalam mengatur dan mengelola suatu usaha perusahaan.
- e. Wirausaha Pertanian: adalah wirausaha yang melakukan kegiatan pertanian seperti pemasaran tanaman, pupuk dan input pertanian lainnya.

Menurut Zimmerer dan Scarborough (2005), profil wirausaha berdasarkan kegiatan usahanya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

- a. *Part time entrepreneur*, yaitu wirausaha yang melakukan usaha tidak secara penuh dalam kehidupannya, tetapi hanya sebagian waktu saja yang digunakan untuk menangkap peluang usaha yang ada. Biasanya wirausaha melakukan kegiatan ini hanya sekedar sebagai hobi.
- b. *Homebased new ventures*, yaitu wirausaha yang menangkap peluang usaha dengan jalan merintis usaha dari bisnis rumahan (rumah tangga).

- c. *Family owned business*, yaitu usaha yang dimiliki dan dirintis oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun.
- d. *Copreneurs*, yaitu usaha yang dilakukan oleh dua orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usaha bersama-sama.

Berdasarkan penggunaan teknologi, wirausaha dapat diklasifikasikan ke dalam jenis sebagai berikut (Sreevidya & Venugopalan, 2011).

- a. Wirausaha Teknis: Wirausaha jenis ini sangat berorientasi tugas. Wirausaha tersebut merupakan tipe pengrajin. Wirausaha tersebut mengembangkan kualitas barang baru lebih baik karena keahlian mereka. Mereka berkonsentrasi lebih pada produksi dibandingkan pada pemasaran.
- b. Wirausaha Non-Teknis: wirausaha ini tidak peduli dengan aspek teknis produk. Mereka mengembangkan teknik pemasaran dan strategi distribusi untuk mempromosikan bisnis mereka. Dengan demikian mereka lebih berkonsentrasi pada aspek pemasaran.

Berdasarkan motivasi, wirausaha dapat diklasifikasikan ke dalam jenis sebagai berikut (Sreevidya & Venugopalan, 2011).

- a. Wirausaha Murni. Wirausaha murni percaya pada kinerja mereka sendiri saat melakukan kegiatan

- bisnis. Wirausaha murni melakukan usaha bisnis untuk kepuasan, status, dan ego pribadi mereka. Wirausaha tersebut didorong oleh motif keuntungan.
- b. Wirausaha Induksi: Wirausaha didorong untuk mengambil suatu kegiatan kewirausahaan melalui pemanfaatan program dari pemerintah, seperti: dalam bentuk bantuan, insentif, subsidi, dan prasarana.
 - c. Wirausaha Termotivasi: wirausaha ini termotivasi oleh keinginan untuk memanfaatkan keahlian dan keterampilan teknis profesional mereka. Mereka termotivasi oleh keinginan untuk pemenuhan diri.
 - d. Wirausaha spontan: wirausaha jenis ini termotivasi oleh keinginan mereka untuk kerja mandiri, mencapai atau membuktikan keunggulan mereka dalam prestasi kerja. Mereka adalah wirausaha alami.

Menurut Danhof (1949), jenis-jenis kewirausahaan adalah sebagai berikut.

- a. Wirausaha inovatif: pengusaha inovatif umumnya agresif dan memiliki terampil mempraktikkan transformasi atraktif. Seorang pengusaha inovatif adalah orang yang memperkenalkan barang baru, metode produksi baru, menemukan pasar baru dan pengaturan ulang perusahaan. Pengusaha Schumpeterian adalah jenis ini. Pengusaha itu milik bangsa yang memiliki lebar dasar industri, fasilitas

perbankan modern, infrastruktur kaya, sampai dengan teknologi terkini dan sejenisnya.

- b. Wirausaha Imitatif: pengusaha imitatif ditandai dengan kesiapan untuk mengadopsi inovasi yang berhasil dikembangkan oleh pengusaha yang berhasil dalam inovasi. Pengusaha imitatif tidak meniru perubahan itu sendiri, mereka hanya meniru teknik dan teknologi inovasi orang lain. Pengusaha lebih memilih untuk meniru teknologi yang sudah ada di suatu tempat di dunia.
- c. Wirausaha Fabian: pengusaha Fabian berhati-hati dan skeptis dalam bereksperimen terhadap perubahan dalam perusahaan mereka. Pengusaha hanya melakukan adopsi inovasi jika benar-benar dibutuhkan jika tidak akan mengakibatkan hilangnya posisi relatif perusahaan.
- d. Wirausaha Drone: pengusaha Drone ditandai dengan penolakan untuk mengadopsi kesempatan untuk membuat perubahan dalam formula produksi bahkan pada biaya yang sangat rendah. Mereka dapat menderita kerugian, tetapi tidak siap untuk membuat perubahan dalam metode produksi. Ketika persaingan meningkat, mereka didorong keluar dari pasar karena tidak ekonomis untuk eksis dan beroperasi di pasar yang kompetitif.

Selain wirausaha, istilah lain yang juga dikenal adalah konsep “*intrapreneur*”, yaitu orang yang tidak menemukan sesuatu (produk) yang baru, tetapi menggunakan temuan orang lain dan dipakai pada unit usaha yang bersangkutan (Usman, 2004), misalnya dalam membuat desain/rancangan suatu produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Fungsi *intrapreneur* adalah *duplicating new product, and imitating new technology*. Berbeda dengan *benchmarking* yang berkembang pada kalangan para manajemen dan wirausaha di Jepang dan Australia. Pada *benchmarking*, selain meniru juga mengembangkan produk melalui pengembangan teknologi baru (*imitating and differentiating product*) atau *imitation with modification* (Winardi, 1998).

3. Keuntungan dan Risiko Wirausaha

Wirausaha mempunyai beberapa keuntungan dan risiko. Menurut Zimmerer & Scarborough (2005), keuntungan wirausaha adalah sebagai berikut.

- a. Peluang untuk mengendalikan nasib sendiri. Memiliki suatu bisnis memberikan kebebasan dan peluang pada wirausahawan untuk mencapai sasaran penting baginya. Wirausahawan ingin menjadi “pemberi aba-aba” dalam hidup mereka dan menggunakan bisnisnya untuk mewujudkan keianginan hidup.

- b. Kesempatan untuk meraup lebih banyak keuntungan (misalnya Bill Gates, M. Dell). Meskipun uang bukan daya dirng utama kewirausahaan, keuntungan dari bisnis mereka penting sebagai sebagai factor motivasi dalam memutuskan pendirian bsinis.
- c. Kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat - kepercayaan dan rasa hormat.
- d. Kesempatan untuk melakukan perubahan. Wirausaha mempunyai kesempatan untuk membuat perubahan yang mereka anggap penting, seperti penyediaan rumah yang layak di perkotaan, melestarikan sumberdaya bumi yang terbatas dan keprihatinan masalah sosial.
- e. Peluang untuk menggunakan potensi sepenuhnya. Bisnis-bisnis yang dimiliki wirausaha merupakan pernyataan dan aktualiasi diri.

Lambing dan Kuehl (2000) mengemukakan keuntungan kewirausahaan sebagai berikut.

- a. Otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha menjadi seorang “bos” yang penuh kepuasan.
- b. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat

menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha.

- c. Kontrol finansial. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasakan kekayaan sebagai milik sendiri (Lambing dan Kuehl, 2000).

Selain beberapa keuntungan yang sudah disebutkan, berwirausaha juga memiliki beberapa kerugian berikut(Lambing dan Kuehl, 2000).

- a. Pengorbanan personal. Pada awalnya, wirausaha harus bekerja dengan waktu lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga dan rekreasi. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis.
- b. Beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personel, maupun pengadaan dan pelatihan.
- c. Kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Hal ini disebabkan wirausaha menggunakan keuangan yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin laba/keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga ada.

Kewirausahaan melibatkan jenis berikut risiko (Sreevidya& Venugopalan, 2011).

- a. Risiko keuangan. Wirausaha harus menginvestasikan uang di perusahaan dengan harapan mendapatkan imbalan keuntungan yang cukup bersama dengan

investasi. Namun investasi memberikan risiko seperti pendapatan yang terbatas atau justru menimbulkan kerugian.

- b. Risiko Pribadi. Wirausaha yang memulai usaha baru memerlukan banyak energi dan waktu pribadinya.
- c. Risiko Karir. Risiko ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti meninggalkan potensi karir yang sukses menjadi karyawan dan memulai bisnis baru atau potensi kegagalan karir wirausaha.
- d. Risiko Psikologi. Risiko Psikologis adalah risiko mental yang dialami seorang wirausaha jika mengalami kegagalan dalam mengatur dan menjalankan wirausaha beranibisnis serta tidak mampu untuk bangkit kembali.

Risiko Kewirausahaan menurut Zimmerer & Scarborough (2005):

- a. Ketidakpastian pendapatan
- b. Risiko kehilangan seluruh investasi Anda
- c. Jam kerja yang panjang dan kerja keras
- d. Tingkat stres yang tinggi
- e. tanggung jawab penuh
- f. Keputusan dan kekecewaan

B. Pengembangan Wirausaha

1. Kegiatan Kewirausahaan

Menurut Zimmerer & Scarborough (2005), ada beberapa tahapan pokok dalam melakukan kewirausahaan, yaitu sebagai berikut.

- a. Tahap imitasi dan duplikasi (*imitating and duplicating*). Pada tahap pertama, yaitu proses imitasi dan duplikasi, para wirausaha mulai meniru ide-ide orang lain, misalnya untuk memulai atau merintis usaha barunya diawali dengan meniru usaha orang lain, dalam menciptakan jenis barang yang akan dihasilkan meniru yang sudah ada. Teknik produksi, desain, pemrosesan, organisasi usaha, dan pola pemasarannya meniru yang sudah ada. Beberapa keterampilan tertentu diperoleh melalui magang atau pengalaman, baik dari lingkungan keluarga maupun orang lain. Akan tetapi, tidak sedikit wirausaha yang berhasil karena proses pengamatan.
- b. Tahap duplikasi dan pengembangan (*duplicating and developing*). Selanjutnya, pada tahap duplikasi dan pengembangan, para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya. Dalam tahap duplikasi produk misalnya, wirausaha mulai mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan desain sendiri. Selain itu, dalam organisasi usaha dan pemasaran juga mulai

dikembangkan model-model pemasaran sendiri. Meskipun perkembangan pada tahap ini lambat dan cenderung kurang dinamis, tetapi sudah ada sedikit perubahan. Misalnya, desain dan teknik yang cenderung monoton, mungkin berubah tiga sampai lima tahun sekali, pemasaran cenderung dikuasai oleh bentuk-bentuk monopsoni oleh para pedagang pengumpul, seperti usaha kecil pada umumnya. Beberapa wirausaha mengikuti model pemasaran dan cenderung berperan sebagai *market follower*, sedangkan yang lain mengikuti kehendak pedagang pengumpul.

- c. Tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda (*creating the new and different*). Setelah tahap duplikasi dan pengembangan, wirausaha memasuki tahap menciptakan sendiri sesuatu yang baru dan berbeda melalui ide-ide sendiri sampai terus berkembang. Pada tahap ini, wirausaha biasanya mulai bosan dengan produksi yang ada. Keingintahuan dan ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah ada mulai timbul, sehinggamuncul keinginan untuk mencapai hasil yang lebih unggul secara menggebu-gebu. Pada tahap ini, organisasi usaha mulai ditingkatkan melalui skala yang lebih luas dan produk mulai diciptakan sendiri berdasarkan pengamatan pasar dan kebutuhan

konsumen. Selain itu, keinginan untuk menjadi penantang pasar—*market challenger*, bahkan pemimpin pasar *market leader* mulai timbul. Produk-produk unik yang digerakkan oleh pasar *market driven* mulai diciptakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknik yang ada. Beberapa industri kecil, seperti industri sepatu dan konveksi, sekarang sudah mulai menjadi penantang pasar—*market challenger*, sedangkan industri lainnya yang menggunakan teknik produksi tradisional dan semimodern masih menjadi pengikut pasar *market follower*.

Secara ringkas, model proses kewirausahaan juga banyak dibahas oleh Alma (2007) yang mencakup tahap-tahap kewirausahaan sebagai berikut.

- a. Proses inovasi.
- b. Proses pemicu.
- c. Proses pelaksanaan.
- d. Proses pertumbuhan.

Berdasarkan analisis pustaka terkait kewirausahaan, diketahui bahwa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan kewirausahaan (Alma, 2007) adalah sebagai berikut.

- a. Mencari peluang usaha baru yang meliputi: lamanya usaha dilakukan dan jenis usaha yang pernah dilakukan.

- b. Pembiayaan dan pendanaan, yaitu jumlah dan sumber-sumber dana.
- c. Sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang dipergunakan.
- d. Kepemilikan, yang meliputi peran-peran dalam pelaksanaan usaha.
- e. Organisasi, yang meliputi pembagian kerja diantara tenaga kerja.
- f. Kepemimpinan, yang meliputi kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, dan proses manajerial yang meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian.
- g. Pemasaran, yang meliputi lokasi dan tempat usaha.

2. Hambatan Wirausaha

Hambatan wirausaha menurut Sreevidya & Venugopalan (2011) adalah sebagai berikut.

a. Hambatan Kemampuan

Robbins (2003) menjelaskan kemampuan merupakan modal utama manusia untuk melaksanakan berbagai tugas atau pekerjaan. Kemampuan adalah keserasian antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang meliputi kemampuan hasil pembelajaran dan kemampuan yang dimiliki dari lahir/bakat. Wirausaha memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan. Pengetahuan dan keterampilan manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran dapat

dikembangkan melalui pengalaman. Wirausaha memerlukan kemampuan menilai masa depannya sendiri serta mengambil risiko terhadap kesempatan/peluang berwirausaha. Hal ini diperlukan karena wirausaha sering berada pada kondisi ketidakpastian, kondisi pasar yang selalu berubah. Kemampuan untuk belajar dari kesalahan atau pengalaman baru sangat penting untuk tetap survive dalam mengelola usaha. Kemampuan dapat dibentuk melalui pengalaman langsung atau pengalaman yang menarik sehingga tersedia kesempatan bagi wirausaha untuk mempraktikannya, memperoleh umpan balik, dan mengembangkan keterampilan yang mengarah pada harapan untuk memperoleh hasil yang memuaskan (Farzier & Niehm, 2008).

Pengaruh keluarga, pendidikan, dan pengalaman kerja pertama menjadi faktor penting dalam pengembangan kewirausahaan (Segal, Borgia, & Schoenfeld, 2005). Orang tua memberikan pengaruh yang kuat pada pembentukan wirausaha. Hasil penelitian menunjukkan para wirausaha biasanya memiliki orang tua yang juga seorang wirausaha (Farzier & Niehm, 2008). Pendidikan dan pengalaman kerja dapat memengaruhi pilihan karir dengan mengenalkan ide-ide baru, membangun keterampilan yang diperlukan, dan menyediakan akses informasi yang lebih luas (Farzier & Niehm, 2008). Zimmerer dan Scarborough (2005)

mengemukakan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya.

- 1) Tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama perusahaan kurang berhasil. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu kurangnya pengalaman, baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan.
- 2) Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar.
- 3) Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan.

- 4) Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien.
- 5) Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif.
- 6) Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar.
- 7) Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu.

b. Hambatan Personal

Keinginan seseorang secara individu/personal untuk menjadi wirausaha tergantung pada karakteristik personal dan kepribadian wirausaha. Ciri-ciri kepribadian jika

dihubungkan dengan keberhasilan wirausaha antara lain kreativitas, prakarsa, kemampuan mencari peluang, ketekunan, dan kendali internal. Karakteristik personal sebagian merupakan pembawaan sejak lahir tetapi sebagian dapat ditingkatkan untuk menjadi *self-employment* (Douglas dan Shepherd, 2002) seperti melalui pendidikan dan pelatihan, meskipun hanya dalam tahap awal (Kuip, 1998). Zimmerer dan Scarborough (2005) mengemukakan bahwa sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu.

c. Hambatan Sumberdaya

Sumber daya merupakan faktor yang diperlukan untuk menangkap peluang usaha. Sumber daya tersebut meliputi modal fisik dan finansial, seperti potensi informasi dan bantuan dari orang lain yang terdiri atas keluarga, teman, organisasi kelompok, dan pemerintah. Sumber daya finansial merupakan modal dalam wujud uang kas,

tabungan, warisan, dan hadiah. Keterkaitan sumber daya keuangan sebagai faktor penentu kegiatan wirausaha telah diujikan secara empiris pada riset terdahulu (seperti dilakukan oleh Blanchflower dan Oswald, 2000). Sumber daya dalam hal ini berasal dari dalam dan dari luar individu. Berikut ini adalah hambatan sumberdaya yang penting untuk berwirausaha:

- 1) Ketersediaan Bahan Baku. Tidak tersedianya bahan baku adalah salah satu kendala yang menghambat kewirausahaan. Hal ini menyebabkan persaingan untuk bahan baku.
- 2) Kurangnya Keterampilan Kerja. Keterampilan Kerja adalah sumber daya yang paling penting dalam setiap organisasi. Namun, tenaga kerja yang diinginkan berpotensi tidak tersedia dalam suatu organisasi. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya tenaga kerja terampil atau karena kurangnya komitmen atau loyalitas karyawan dalam organisasi.
- 3) Kurangnya Mesin. Mesin baik diperlukan untuk produksi barang, karena perkembangan teknologi yang cepat, mesin menjadi usang. Wirausaha kecil merasa sulit untuk mendapatkan sejumlah besar uang tunai untuk mengupgrade mesin modern.

- 4) Kurangnya Infra struktur. Kurangnya fasilitas infra struktur merupakan hambatan utama terhadap pertumbuhan kewirausahaan khususnya di Negara maju dan negara berkembang. Infra struktur termasuk tanah dan bangunan, listrik yang memadai dan murah, air bersih, transportasi, fasilitas drainase dll.
- 5) Kurangnya Dana. Ada berbagai metode yang seorang wirausaha mengatur dana, misalnya, tabungan sendiri, pinjaman dari teman dan kerabat, bank dan lembaga keuangan lainnya. Banyak orang tidak masuk ke dalam kegiatan kewirausahaan karena kurangnya dana.
- 6) Hambatan Lingkungan lain. Kurangnya pendidikan bisnis, kurangnya dukungan dari pemerintah, biaya produksi yang tinggi dan lain lain. adalah hambatan lingkungan lainnya yang menghambat pertumbuhan kewirausahaan di negara-negara berkembang.

d. Hambatan Preferensi

Preferensi merupakan salah satu indikator pengembangan kewirausahaan selain sumber daya, kemampuan, dan karakteristik personal. Preferensi dapat memengaruhi keputusan individu untuk memilih profesi tertentu. Faktor preferensi mendorong keinginan atau kemauan individu/personal untuk memilih profesi

wirausaha atau profesi lainnya. Individu bisa memutuskan pilihan profesinya sesuai dengan kesempatan atau berdasarkan pada referensi-referensi yang diperoleh. Pilihan individu untuk menjadi wirausaha tidak hanya karena aspek keuangan, namun juga aspek yang lainnya, seperti kebebasan, otonomi, dan sikap terhadap risiko (Wennekers dan Thurik, 1999).

e. Hambatan Sosial Budaya

Sikap sosial menghambat banyak orang bahkan dari memikirkan memulai bisnis. Hambatan sosial yang penting adalah sebagai berikut (Hofstede, 1991).

- 1) Status Low. Sikap masyarakat terhadap wirausaha tidak positif, seperti masyarakat yang menilai pengusaha adalah orang-orang yang mengeksploitasi masyarakat.
- 2) Tradisi. Kebanyakan orang ingin pekerjaan nyata. Bahkan orang tua yang wirausaha tidak ingin anak-anak mereka untuk menjadi wirausaha. Jadi kurangnya dukungan dari masyarakat dan keluarga menghambat pertumbuhan wirausaha.

Hofstede (1991) mendefinisikan budaya sebagai hasil pemikiran bersama dalam suatu kelompok masyarakat yang memberikan ciri/karakteristik tertentu terhadap anggota suatu kelompok dengan anggota kelompok yang lainnya. Definisi ini memungkinkan digunakan dalam

berbagai tingkat analisis, seperti keluarga, suku, organisasi atau masyarakat, dan negara. Budaya sebagai hasil pemikiran masyarakat, sebagian besar tidak bisa diamati, namun dapat dipelajari melalui berbagai manifestasi verbal dan nonverbal yang dibangun. Budaya dapat diukur dari rituals, symbols, heroes, dan values. Ada perbedaan konsep antara budaya dan institusi sosial dan psikologis. Budaya bersifat kolektif, normatif, dan mental program. Budaya tidak dapat di observasi, sedangkan institusi sosial dapat diobservasi. Budaya bersifat kolektif, sedangkan aspek psikologis lebih melihat dari sudut personal (Wennekers dan Thurik, 1999).

Zimmerer & Scarborough (2005) mengemukakan beberapa potensi yang membuat seseorang mundur dari kewirausahaan.

- 1) Pendapatan yang tidak menentu. Baik pada tahap awal maupun tahap pertumbuhan, dalam bisnis tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. Dalam kewirausahaan, sewaktu-waktu bisa rugi dan sewaktu-waktu juga bisa untung. Kondisi yang tidak menentu dapat membuat seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha.
- 2) Kerugian akibat hilangnya modal investasi. Tingkat kegagalan bagi usaha baru sangatlah

tinggi. Menurut Wirasmita (2004), tingkat mortalitas/kegagalan usaha kecil di Indonesia mencapai 78 persen. Kegagalan investasi mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Bagi seorang wirausaha, kegagalan sebaiknya dipandang sebagai pelajaran berharga.

- 3) Perlu kerja keras dan waktu yang lama. Wirausaha biasanya bekerja sendiri mulai dari pembelian, pengolahan, penjualan, dan pembukuan. Waktu yang lama dan keharusan bekerja keras dalam berwirausaha mengakibatkan orang yang ingin menjadi wirausaha menjadi terbiasa dalam menghadapi tantangan. Wirausaha yang berhasil pada umumnya menjadikan tantangan sebagai peluang yang harus dihadapi dan ditekuni.
- 4) Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Kualitas kehidupan yang tidak segera meningkat dalam usaha akan mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Misalnya, pedagang yang kualitas kehidupannya tidak meningkat, maka akan mundur dari usaha dagangnya dan masuk ke usaha lain.

Zimmerer & Scarborough (2005) mengidentifikasi 10 Kesalahan yang menyebabkan kegagalan kewirausahaan

- a. Kesalahan Manajemen, seperti: kapasitas, kemampuan kepemimpinan dan pengetahuan.
- b. Kurangnya pengalaman, seperti kurang pengalaman berkaitan dengan: profesionalisma, ekonomi, organisasi, berurusan dengan sumber daya manusia.
- c. Kontrol keuangan yang buruk, seperti dalam bentuk *under capitalization* yang menyebabkan dampak pada perusahaan yaitu perusahaan kehabisan modal sebelum mampu menghasilkan arus kas positif.
- d. Upaya lemah pemasaran. Wirausaha memimpikan pelanggan secara otomatis untuk datang dan bukannya memberikan pelanggan nilai, kualitas produk dan layanan.
- e. Kegagalan untuk mengembangkan rencana strategis. Wirausaha tidak mempunyai waktu untuk mengembangkan rencana strategis.
- f. Tidak mampu mengontrol pertumbuhan. Ekspansi harus dibiayai oleh keuntungan yang mereka hasilkan atau dengan kontribusi modal dari pemilik.
- g. Lokasi yang buruk. Wirausaha salah memperhitungkan lokasi, seperti lokasi yang

tidak sesuai dengan segmen pasar, banyak pesaing.

- h. Pengendalian persediaan yang tidak benar-diabaikan dalam banyak kasus, masalah: terlalu banyak atau terlalu sedikit persediaan, dan bahkan terlalu banyak salah jenis persediaan
- i. Salah harga. Wirausahasalah memperhitungkan biaya, tujuan dan metode penetapan harga.
- j. Ketidakmampuan untuk membuat "transisi kewirausahaan". Wirausaha setelah memulai usaha serta mengalami pertumbuhan biasanya membutuhkan perubahan radikal dalam beberapa bidang .

3. Kiat-Kiat Wirausaha pada Saat Memasuki Dunia Usaha Baru

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk memulai atau memasuki dunia usaha baru, yaitu merintis usaha baru, membeli perusahaan orang lain, dan kerja sama dalam manajemen perusahaan.

a. Merintis Usaha Baru

Merintis usaha baru (*starting*), yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Ada tiga bentuk usaha baru yang dapat dirintis, antara lain (a) perusahaan milik sendiri (*proprietorship*), yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang; (b)

persekutuan (*partnership*), yaitu suatu kerja sama (asosiasi) antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama, dan (c) perusahaan berbadan hukum (*corporation*), yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham.

Wirausaha adalah orang yang mengorganisasi, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi risiko. Sebagai pengelola dan pemilik usaha (*business owner manager*) atau pelaksana usaha kecil (*small business operator*), wirausaha harus memiliki kecakapan bekerja, kemampuan mengorganisasi, kreatif, dan lebih menyukai tantangan.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Lambing dan Kuehl (2003), sekitar 43 persen responden (wirausaha) mendapatkan ide bisnis dari pengalaman yang diperoleh ketika bekerja di beberapa perusahaan atau tempat profesional lainnya. Mereka mengetahui cara mengoperasikan perusahaan dari pengalaman tersebut. Sebanyak 15 persen responden telah mencoba dan mereka mampu mengerjakannya dengan lebih baik. Sebanyak 1 dari 10 responden (11%) dari wirausaha yang disurvei memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar, sedangkan sebanyak 46 persen lagi karena hobi.

Menurut Lambing, ada dua pendekatan utama yang digunakan wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru. Pertama, pendekatan "*inside-out*" atau disebut dengan "*idea generation*", yaitu pendekatan

berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Mereka melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang, dan sebagainya yang menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Kedua, pendekatan "*the outside-in*" yang juga disebut "*opportunity recognition*", yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa suatu perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan suatu kebutuhan di pasar. *Opportunity recognition* adalah pengamatan lingkungan (*environment scanning*) yang merupakan alat untuk pengembangan yang akan ditransfer menjadi peluang-peluang ekonomi. Berita-berita peluang tersebut menurut Lambing dan Kuehl (2003) bersumber dari hal-hal berikut.

- 1) Surat kabar.
- 2) Laporan periodik tentang perubahan ekonomi.
- 3) Jurnal perdagangan dan pameran dagang.
- 4) Publikasi pemerintah.
- 5) Informasi lisensi produk yang disediakan oleh broker, universitas, dan perusahaan lainnya.

Menurut Lambing, keunggulan dari pendatang baru di pasar adalah dapat mengidentifikasi "kebutuhan pelanggan" dan "kemampuan pesaing". Berdasarkan pendekatan "*inside-out*", untuk memulai usaha, seorang calon wirausaha harus memiliki kompetensi usaha. Menurut Norman Scarborough, kompetensi usaha yang diperlukan meliputi hal-hal berikut.

- 1) Kemampuan teknik, yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa, serta cara menyajikannya.
- 2) Kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat.
- 3) Kemampuan finansial, yaitu kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya.
- 4) Kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara dan mengembangkan relasi, dan kemampuan komunikasi serta negosiasi.

Dalam memasuki arena bisnis atau memulai usaha baru, seseorang dituntut tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga harus memiliki ide dan kemauan. Seperti yang telah disinggung, ide dan kemauan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa yang laku di pasar. Artinya, untuk memulai usaha harus diawali dengan ide. Setelah ada ide, langkah berikutnya adalah mencari sumber dana dan fasilitas, baik barang, uang, maupun orang. Sumber dana tersebut berasal dari badan-badan keuangan, seperti bank dalam bentuk kredit atau orang yang bersedia menjadi penyandang dana. Tentu saja, barang dan jasa yang akan dijadikan objek bisnis tersebut harus memiliki pasar. Oleh karena itu, mengamati peluang

pasar merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum produk barang dan jasa diciptakan. Apabila peluang pasar untuk barang dan jasa sudah tersedia, maka barang dan jasa akan mudah laku dan segera mendatangkan keuntungan. Dalam merintis usaha baru, harus diperhatikan beberapa hal berikut.

- 1) Bidang dan jenis usaha yang dimasuki.
 - a) Bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih.
 - b) Tempat usaha yang akan dipilih.
 - c) Organisasi usaha yang akan digunakan.
 - d) Jaminan usaha yang mungkin diperoleh.
 - e) Lingkungan usaha yang akan berpengaruh.
- 2) Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki.
 - a) Bidang usaha pertanian (*agriculture*), meliputi usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan.
 - b) Bidang usaha pertambangan (*mining*), meliputi usaha galian pasir, galian tanah, batu, dan bata.
 - c) Bidang usaha pabrikasi (*manufacturing*), meliputi usaha industri, perakitan, dan sintesis.
 - d) Bidang usaha konstruksi (*construction*), meliputi usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, dan jalan raya.

- e) Bidang usaha perdagangan (*trade*), meliputi usaha perdagangan kecil (*retailer*), grosir, agen, dan ekspor-impor.
- f) Bidang usaha jasa keuangan (*financial service*), meliputi usaha perbankan, asuransi, dan koperasi.
- g) Bidang usaha jasa perorangan (*personal service*), meliputi usaha potong rambut, salon, *laundry*, dan *catering*.
- h) Bidang jasa-jasa umum (*public service*), meliputi usaha pengangkutan, pergudangan, wartel, dan distribusi.

b. Membeli Perusahaan Orang Lain

Membeli perusahaan orang lain (*buying*) yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisasi oleh orang lain dengan nama baik (*good will*) dan organisasi usaha yang sudah ada.

c. Kerja Sama Manajemen

Kerja sama manajemen (*franchising*), yaitu suatu kerja sama antara wirausaha (*franchisee*) dengan perusahaan besar (*franchisor/parent company*) dalam mengadakan persetujuan jual-beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha (waralaba). Dalam kerja sama ini biasanya terdapat dukungan awal, seperti pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, pembukuan, pencatatan dan akuntansi,

konsultasi, penetapan standar, promosi, pengendalian kualitas, riset, nasihat hukum, dan sumber-sumber permodalan.

C. Bentuk dan Kepemilikan Usaha

1. Bentuk Kepemilikan Usaha

Setelah menentukan bidang dan jenis usaha yang akan dipilih, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk kepemilikan usaha. Ada beberapa bentuk kepemilikan usaha yang bisa dipilih, antara lain sebagai berikut.

- a. **Perusahaan Perorangan (*soleproprietorship*)**, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Kelebihan dari bentuk perusahaan ini adalah mudah untuk didirikan, biaya operasional rendah, bebas dalam pengelolaan, dan memiliki daya rangsang yang lebih tinggi.
- b. **Persekutuan (*partnership*)**, yaitu suatu asosiasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. Dalam persekutuan ada ikatan dan ada dua macam anggota, antara lain (a) Sekutu umum (*general partner*), yaitu anggota yang aktif dan duduk sebagai pengurus persekutuan, (b) Sekutu terbatas (*limitedpartner*), yaitu anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap utang perusahaan sebesar

modal yang disetorkannya dan orang tersebut tidak aktif dalam perusahaan.

- c. **Perseroan (*corporation*)**, yaitu suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham (*persero/stockholder*) yang mempunyai tanggung jawab perbankan yang terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal disetor.
- d. **Firma**, yaitu suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Bila memperoleh keuntungan, maka keuntungan dibagi bersama. Sebaliknya, bila rugi juga ditanggung bersama. Dalam firma terdapat tanggung jawab renteng antaranggota.

2. Tempat Usaha yang Akan Dipilih

Dalam menentukan tempat usaha harus dipertimbangkan beberapa hal berikut.

- a. Apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan atau pasar?
- b. Bagaimana akses pasarnya?
- c. Apakah tempat usaha dekat ke sumber tenaga kerja?
- d. Apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya, seperti alat pengangkut dan jalan raya?

Dalam menentukan tempat usaha, perlu dipertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitasnya. Lokasi

perusahaan harus mudah dijangkau dan efisien, baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Untuk menentukan lokasi atau tempat usaha, beberapa alternatif berikut bisa dipilih.

- a. Membangun bila ada tempat yang strategis.
- b. Membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan.
- c. Kerja sama bagi hasil, bila memungkinkan.

3. Organisasi Usaha dan Usaha Kecil

Kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cakupan usaha yang akan dimasuki. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Sebaliknya, semakin kecil lingkup usaha, maka semakin sederhana organisasinya. Pada lingkup atau skala usaha kecil, organisasi usaha pada umumnya dikelola sendiri. Pengusaha kecil pada umumnya berperan sebagai *small business owner manager* atau *small business operator*. Meskipun pengusaha usaha kecil identik dengan *owner business manager*, jika skala dan lingkup usahanya semakin besar, maka pengelolaannya tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus melibatkan orang lain. Bagian-bagian kegiatan bisnis tertentu seperti bagian penjualan, bagian pembelian, bagian administrasi, dan bagian keuangan masing-masing memerlukan tenaga tersendiri dan perlu bantuan orang lain.

Dalam perusahaan yang lebih besar seperti Perseroan Terbatas (PT) dan CV, organisasi perusahaan lebih kompleks lagi. Secara hierarkis, organisasi perusahaan terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dan tim manajer. Rapat umum pemegang saham dalam perusahaan besar adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang bertugas mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi. Tugas dewan komisaris adalah mengawasi tindak tanduk direksi dalam menjalankan perusahaannya. Untuk menjamin kelancaran perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya direksi mengangkat beberapa orang manajer.

Dilihat dari fungsi kewirausahaan dan fungsi manajemen, dalam perusahaan kecil fungsi manajemen relatif tidak begitu besar, sedangkan fungsi kewirausahaan sangat besar peranannya karena dasarnya adalah kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, dalam perusahaan besar fungsi kewirausahaan relatif tidak begitu besar, sedangkan fungsi manajemen sangat besar, karena dasarnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Oleh sebab itu, semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula fungsi manajerial, karena dasarnya adalah fungsi-fungsi manajemen dan kemampuan. Sebaliknya, semakin kecil perusahaan, maka semakin besar fungsi kewirausahaan karena yang mendasarinya adalah motivasi dan kemauan.

a. Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil

Sampai saat ini, batasan usaha kecil masih berbeda-beda, tergantung pada fokus perusahaannya masing-masing. Seperti dikemukakan oleh Steinhoff dan Burgess (1993) bahwa *“small business has been defined in different ways by different organization and agencies.”* Usaha kecil telah didefinisikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada kepentingan organisasi. Di Indonesia sendiri belum ada batasan dan kriteria yang baku mengenai usaha kecil. Berbagai instansi menggunakan batasan dan kriteria menurut fokus permasalahan yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 9/1995 Pasal 5 tentang usaha kecil. Beberapa kriteria usaha kecil tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (1988) mendefinisikan usaha kecil dengan ukuran tenaga kerja, yaitu 5–19 orang yang terdiri atas pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga.

Perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga (*home industry*). Komisi untuk perkembangan

ekonomi (*Committee for Economic Development—CED*) mengemukakan kriteria usaha kecil sebagai berikut.

- 1) Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik.
- 2) Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil orang.
- 3) Daerah operasi bersifat lokal.
- 4) Ukuran secara keseluruhan relatif kecil.

Karakteristik penting dari usaha kecil adalah sebagai berikut (Sreevidya & Venugopalan, 2011):

- 1) Umumnya diatur dan dijalankan oleh wirausaha perorangan.
- 2) Mempunyai modal terbatas.
- 3) Unit padat karya, melibatkan penggunaan teknologi sederhana, pemanfaatan intensif keterampilan individu mengarah ke spesialisasi profesional.
- 4) Memenuhi selera individu dan mode dan memberikan pelayanan pribadi untuk konsumen.
- 5) Industri lokal, menggunakan sumber daya lokal yang terdesentralisasi dan tersebar ke daerah pedesaan.
- 6) Mereka berhak untuk pemerintah. bantuan dan dukungan dan untuk pembiayaan lunak oleh bank, lembaga keuangan dll

- 7) Sebagain besar usaha kecil sangat fleksibel. Mereka lebih rentan terhadap perubahan dan sangatreaktif dan menerima kondisi sosial-ekonomi.
- 8) Bebas dari cacat birokrasi.

b. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Kecil

Dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif UMKM mempunyai kelebihan dalam fleksibilitas serta sebagai agen perubahan (Audretsch dan Thurik, 2009: 14). Di negara berkembang seperti Indonesia, UMKM mempunyai peran komplementer dengan industri besar dalam penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi serta pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat (SMERU, 2004:4). Dalam kegiatan operasionalnya, usaha kecil memiliki beberapa kekuatan usaha berikut.

- 1) Memiliki kebebasan untuk bertindak. Bila ada perubahan dalam produk baru, teknologi baru, dan perubahan mesin, usaha kecil dapat bertindak dengan cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan.
- 2) Fleksibel. Perusahaan menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran produk usaha kecil.

- 3) Tidak mudah goncang. Bahan baku dan sumberdaya didapatkan secara lokal, sehingga perusahaan tidak rentan terhadap fluktuasi.

Disamping perannya yang besar dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan, UMKM menghadapi banyak permasalahan. Lemahnya akses pasar, keterbatasan akses pemodal, kapasitas teknologi dan lemahnya jaringan usaha merupakan permasalahan klasik yang dialami oleh UMKM di Indonesia (Tambunan, 2008: 5). Kemampuan manajerial, pengalaman pemilik atau pengelola, kemampuan untuk mengakses pasar input dan output, teknologi produksi, dan sumber-sumber permodalan merupakan permasalahan dalam pengembangan UMKM di Indonesia (Kadin Indonesia, 2007:12).

Kapasitas pemilik usaha dalam kepemimpinan dan manajemen merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Menurut Kuncoro (2007:24) kelemahan pada bidang organisasi dan manajemen diantaranya adalah berkaitan dengan kelemahan dalam memperoleh akses (peluang) pasar dan memperbesar pangsa pasar. Keterbatasan jaringan kerjasama usaha antara wirausaha industri kecil dan iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan juga menjadi permasalahan. Disadari bahwa kondisi UMKM lemah dalam hal kewirausahaan,

ketrampilan/keahlian dan kurang memiliki akses pada sumber-sumber modal, produksi dan pasar, sehingga menyebabkan kurang mampu melihat dan memanfaatkan peluang pasar (Harvie, 2004:1).

Kelemahan perusahaan kecil di dalam usaha kecil antara lain sebagai berikut.

- 1) Kelemahan struktural dalam perusahaan, antara lain kelemahan dalam bidang manajemen dan organisasi, kelemahan dalam pengendalian mutu, kelemahan dalam mengadopsi dan penguasaan teknologi, kesulitan mencari permodalan, tenaga kerja, dan terbatasnya akses pasar.
- 2) Kelemahan kultural. Kelemahan ini mengakibatkan kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan guna memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku seperti informasi peluang dan cara memasarkan produk.
- 3) Kelemahan mengakses jaringan (informasi dan komunikasi).
 - a. Informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah, dan mudah didapat.
 - b. Informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin

hubungan kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran.

- c. Informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas, maupun kemasannya.
- d. Informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan yang terjangkau.

c. Pengembangan Usaha Kecil

Dalam konteks persaingan bebas yang semakin dinamis seperti sekarang ini, menurut D'Aveni (1987), perusahaan harus menekankan pada strategi pengembangan kompetensi inti (*building core competency*), yaitu pengetahuan dan keunikan untuk menciptakan keunggulan seperti yang telah dikemukakan. Keunggulan tersebut menurutnya diciptakan melalui "*The New 7-S Strategy*".

- 1) *Superior stakeholder satisfaction*, yaitu mengutamakan kepuasan *stakeholder*.
- 2) *Strategic soothsaying*, yaitu merancang strategi yang membuat kejutan atau yang mencengangkan.
- 3) *Position for speed*, yaitu posisi untuk mengutamakan kecepatan.
- 4) *Position for surprise*, yaitu posisi untuk membuat kejutan.

- 5) *Shifting the role of the game*, yaitu strategi untuk mengadakan perubahan/pergeseran peran yang dimainkan.
- 6) *Signaling strategic intent*, yaitu mengindikasikan tujuan dan strategi.
- 7) *Simultaneous and sequential strategic thrusts*, yaitu membuat rangkaian penggerak/pendorong strategi secara simultan dan berurutan.

Pendalaman dan Pengayaan

Pendalaman Materi

- a. Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat, jelas, dan benar.
- b. Soal.
 - 1) Jelaskan sifat dan karakteristik wirausaha.
 - 2) Jelaskan tipe wirausaha.
 - 3) Jelaskan keuntungan dan risiko wirausaha.
 - 4) Jelaskan aktivitas kewirausahaan.
 - 5) Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha.
 - 6) Jelaskan kiat-kiat yang harus diperhatikan untuk menjadi wirausaha sukses.
 - 7) Mengapa wirausaha yang sudah menekuni usahanya, pada akhirnya mundur dari perannya sebagai wirausaha? Berikan alasannya.
 - 8) Jelaskan pengertian usaha kecil.

- 9) Sebutkan dan jelaskan kekuatan dan kelemahan usaha kecil.

Pengayaan Materi

- 1) Cobalah untuk mewawancarai dua orang yang pernah mempunyai usaha agrobisnis, tetapi saat ini satu orang sukses dalam usahanya, dan satu orang sudah tidak melakukan usaha lagi. Identifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesuksesan dan kegagalan kedua orang tersebut.
- 2) Bagaimana tanggapan Anda mengenai hasil penelitian ini? Jelaskan tanggapan Anda.

Daftar Pustaka

- Alma, B. 2007. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Blanchflower, D.G. 2000. "Self-employment in OECD countries", *Labour Economics* 7, 471-505
- Danhof, C.H. 1949. *Observation of Entrepreneurship in Agriculture*. In *Change and Entrepreneur* Harvard University Research Center in Entrepreneurial, Cmabridge, MA: Harvard University Press
- Douglas, E. J., & Shepherd, D. A. 2002. "Self-Employment as a Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization". *Entrepreneurship: Theory & Practice*, 26(3), 81-90

- Farzier Barbara and Linda S Niehm. 2008. "FCS Students attitudes and intentions toward entrepreneurial careers", *Journal of Family and Consumer Sciences*, (1-2), 1-7
- Hofstede G. 1991. *Cultures and organizations — software of the mind*. New York:McGraw Hill
- Kadin Indonesia. 2007. *Visi 2030 & Roadmap 2010 Industri Nasional*. www.kadin-indonesia.or.id, 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Lambing & Kuehl. 2003. "Cultural Dimension at the Individual Level of Analysis the Cultural Orientation Framework", *International Journal of Cultural Management*,2(3):275-296.
- Mittal, K.C. 2003. *Industrial Entrepreneurship*. New Delhi: DEEP & DEEP Publications.
- Patrick, M. 2004. "Informal Sector: Seedbed of Industrial entrepreneurship". *Discussion Paper No. 79*. Thiruvananthapuram.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku organisasi*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Schumpeter, J.A. 1934. *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Schermerhorn, J.R. 1999. *Management*, 6thed., John Wiley & Sons, New York, NewYork.

- Segal, Gerry, Borgia, Dan and Jerry Schoenfeld. 2005. "The motivation to become an entrepreneur", *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 11(1), 42-57
- SMERU. 2004. *Promoting Entrepreneurship and Innovative SMES In A Global Economy*. Desember, www.Smeru.or.id.12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sreevidya, U. & Venugopalan, K. 2011. *Entrepreneurship Development*. Universitas Kalkuta India. <http://www.universityofcalicut.info/syl/EntrepreneurshipDevelopment279.pdf>, 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Undang-Undang No. 9/1995 Pasal 5 tentang *Usaha Kecil*
- Wennekers, A. R. M., and A. R.Thurik. 1999. "Linking entrepreneurship and economic growth", *Small Business Economics*13, 27-55.
- Winardi. 2007. *Motivasi dan Pemotivasian*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Wiratmo, M, dkk. 2006. *Kewirausahaan:Seri Diktat Kuliah*. Jakarta: Gunadarma.
- Wirasasmita, Y. 2004. "Sistematika Pembahasan Pemecahan/Solusi Masalah", Kumpulan Makalah Penulisan Tesis/Disertasi, Program Doktorat Manajemen Bisnis, Unpad.

Zimmerer, T. Z., and Scarborough, N. M. 2005. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, 4th ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

BAB V

ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

A. Definisi Etika Bisnis

Sesuai dengan fungsinya baik secara mikro maupun makro, sebuah bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Nantinya, jika sebuah perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang baik, bukan hanya lingkungan makro dan mikronya saja yang akan menikmati keuntungan, tetapi juga perusahaan itu sendiri.

Kata 'etika' berasal dari kata Yunani *ethos* yang mengandung arti cukup luas yaitu, tempat yang biasa ditinggali, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamak *ethos* adalah *to etha* yang berarti adat kebiasaan. Arti jamak inilah yang digunakan Aristoteles (384–322 SM) untuk menunjuk pada etika sebagai filsafat moral. Kata 'moral' sendiri berasal dari kata Latin *mos* (jamaknya *mores*) yang juga berarti kebiasaan atau adat. Kata 'moralitas' dari kata Latin '*moralis*' dan merupakan abstraksi dari kata 'moral' yang menunjuk kepada baik buruknya suatu

perbuatan. Dari asal katanya bisa dikatakan etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang apa yang biasa dilakukan. Pendeknya, etika adalah ilmu yang secara khusus menyoroti perilaku manusia dari segi moral, bukan dari fisik, etnis dan sebagainya.

Definisi etika bisnis sendiri sangat beraneka ragam tetapi memiliki satu pengertian yang sama, yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis (Muslich,1998:4). Ada juga yang mendefinisikan etika bisnis sebagai batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya (Amirullah & Imam Hardjanto, 2005).

Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh perusahaan. untuk mencapai tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi perusahaan. Muslich (1998: 31-33) mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan

secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya.

2. Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut.

3. Prinsip tidak berniat jahat

Prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat perusahaan itu.

4. Prinsip keadilan

Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain.

5. Prinsip hormat pada diri sendiri

Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan.

B. Tanggung Jawab Sosial

Dalam membuat dan memasarkan produk, sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, sebagai pengetahuan perusahaan mengenai bagaimana keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat (Madura, 2006). Tanggung jawab perusahaan meliputi:

- 1) Tanggung jawab kepada konsumen.
- 2) Tanggung jawab kepada karyawan.
- 3) Tanggung jawab kepada pemegang saham.
- 4) Tanggung jawab kepada kreditor.
- 5) Tanggung jawab kepada lingkungan.
- 6) Tanggung jawab kepada masyarakat.

1. Tanggung jawab terhadap konsumen

Dalam hal tanggung jawab kepada konsumen, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Madura, 2006):

a. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Produksi

Produk yang dibuat harus memberikan jaminan keselamatan kepada konsumen. Produk yang dibuat harus menyertakan label peringatan untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi akibat salah dalam

penggunaan produk.

b. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Penjualan

Sebuah perusahaan harus menyediakan petunjuk pelaksanaan bagi karyawan bagian penjualannya, agar tidak terlalu agresif atau melakukan promosi yang tidak benar. Bahkan perusahaan juga bisa melakukan survey untuk memastikan bahwa konsumen mendapat perlakuan yang baik oleh tenaga penjualan dan produk yang dibeli memberikan manfaat sesuai yang dikatakan oleh tenaga penjualan.

c. Peranan Konsumerisme

Konsumerisme adalah kumpulan permintaan oleh konsumen dimana perusahaan memuaskan kebutuhannya. Sekumpulan orang yang peka dengan hal ini telah memotivasi perusahaan untuk memenuhi tanggungjawabnya terhadap konsumen.

d. Peranan Pemerintah

Pemerintah juga bisa sangat peduli terhadap kepentingan konsumen untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen.

Aturan-aturan yang mungkin dikeluarkan pemerintah dalam hal ini adalah:

- Aturan pemerintah dalam keamanan produk
Sebagai contoh, BPOM dan FDA (USA) sebagai

lembaga yang menguji apakah sebuah produk telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

- Aturan pemerintah dalam hal periklanan
Pemerintah bisa saja menerapkan hal ini untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari iklan yang tidak benar, menipu, atau memanipulasi informasi.
- Aturan pemerintah dalam persaingan industri
Pemerintah mencegah agar tidak terjadi monopoli yang dapat merugikan konsumen. Karena perusahaan monopoli cenderung memainkan harga dan kualitas produk, sehingga bisa saja konsumen harus mendapatkan produk dengan kualitas yang rendah dengan harga tinggi karena tidak ada pilihan produk sejenis dari perusahaan pesaing.

Perusahaan dapat menjamin tanggung jawabnya terhadap konsumen dengan cara:

- Membuat *code of responsibility*, seperti Pledge of Bristol-MyersSquibb Company, semacam sumpah atau janji Bristol-Myers pada *stakeholders* melalui komitmen yang dimiliki setiap elemen dalam perusahaan mengenai bagaimana perusahaan ini dijalankan.
- Memonitor keluhan konsumen.
- Mendapatkan dan memanfaatkan *feedback* dari konsumen

2. Tanggung jawab terhadap karyawan

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang juga menunjukkan tanggung jawabnya terhadap karyawannya. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya meliputi beberapa hal berikut ini:

a. Keamanan Karyawan

Keamanan karyawan dalam bekerja banyak ditujukan pada lingkungan kerja dan prosedur kerja yang aman, yang tidak berisiko terhadap keselamatan jiwa karyawan. Dengan demikian perusahaan harus membuat aturan, prosedur dan petunjuk pelaksanaan mengenai lingkungan dan fasilitas yang ada di perusahaan.

b. Perlakuan yang Baik dan Manusiawi Dari Karyawan yang Lain

Perusahaan juga harus mengawasi dan memastikan semua karyawannya diperlakukan dengan baik oleh sesama karyawan. Masalah yang timbul antar karyawan ini, pada tahun-tahun terakhir berkisar pada perbedaan suku, agama dan ras, serta pelecehan seksual baik melalui kata-kata maupun tindakan.

c. Kesempatan yang Sama

Dalam hal ini perusahaan tidak boleh mendiskriminasi karyawan yang melamar kerja karena suku, agama, ras, dan jenis kelaminnya.

Konsep persamaan hak ini bukan hanya pada waktu rekrutmen saja tetapi juga pada masa promosi jabatan dan kenaikan gaji.

d. Konflik yang Terjadi dengan PHK Karyawan

Konflik terjadi setiap kali melakukan PHK, karena di satu sisi perusahaan ingin tetap survive dengan memangkas biaya, tapi di sisi lain harus ada karyawan yang dikorbankan. Perusahaan dapat menolong karyawan yang di PHK dengan cara mencarikan mereka pekerjaan baru atau melatih mereka kembali untuk dapat ditempatkan di bagian lain dalam perusahaan.

e. Memuaskan Karyawan

Pada umumnya perusahaan hanya memusatkan pada tiga hal pertama di atas, tetapi sebenarnya perusahaan bisa menyediakan alternatif lain sebagai wujud tanggung jawabnya pada karyawan, misalnya: penyediaan *child-care*, sarana olahraga, menyediakan *training* sesuai kebutuhan, *outing*.

Perusahaan dapat menjamin tanggung jawab ini dengan cara menyusun standar tanggung jawab dan menyediakan mediator untuk menampung keluhan-keluhan karyawan yang valid.

3. Tanggung jawab terhadap pemegang saham

Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik mereka (pemegang saham). Manajer perusahaan

memonitor keputusan-keputusan yang diambil sehingga mereka dapat memberi bunga yang terbaik pada pemilik. Hal-hal yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham antara lain: menekan kompensasi terhadap karyawan untuk mencapai kinerja perusahaan dapat memecahkan masalah dalam hal suku bunga tapi menimbulkan masalah di bidang yang lain. Selain itu tak jarang terjadi bahwa *institutional investors*, yaitu institusi keuangan yang membeli saham dalam jumlah besar menyampaikan keluhannya jika perusahaan dirasa tidak terkelola dengan baik kepada para eksekutif. Meski demikian *institutional investors* tidak bermaksud untuk mendikte kebijakan perusahaan, mereka hanya ingin memastikan bahwa manajer perusahaan membuat keputusan yang tepat untuk pemegang saham. Selain itu, dalam usaha meyakinkan para pemegang saham bahwa dana, yang mereka tanamkan telah digunakan secara tepat. Jika dana yang ditanamkan tidak digunakan dengan tepat, misalnya untuk menutup biaya-biaya yang tidak perlu, keuntungan perusahaan akan turun dan penurunan itu akan mengurangi pendapatan para pemegang saham yang menerima dividen dari *investasi* mereka.

4. Tanggung jawab terhadap kreditor

Tanggung jawab perusahaan terhadap kreditornya adalah memenuhi kewajiban keuangan perusahaan terhadap kreditor. Selain itu perusahaan juga harus

menginformasikan kepada kreditornya apabila perusahaan dalam kondisi keuangan yang buruk sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kreditor seringkali memberikan kelonggaran pembayaran apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Jika perusahaan tidak juga mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dapat dinyatakan bangkrut.

Dalam hal ini, kecurangan yang sering dilakukan perusahaan adalah melakukan manipulasi data keuangan, seperti:

- Melaporkan kondisi keuangan se bagus mungkin untuk mendapatkan dana dari kreditor, padahal kondisi keuangan yang sebenarnya tidak layak menerima pinjaman.
- Melaporkan kondisi keuangan yang terburuk sehingga akan diberi kelonggaran pembayaran, bahkan pembebasan dari kewajiban.

5. Tanggung jawab terhadap lingkungan

Proses produksi, seperti halnya produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bisa jadi membahayakan lingkungan. Karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk kelestarian lingkungan dengan cara mencegah terjadinya:

- Polusi udara
Polusi udara dapat dicegah dengan menggunakan

bahan-bahan yang tidak berbahaya dalam proses produksinya. Dalam hal ini, pemerintah juga bisa membantu pencegahan polusi udara dengan cara menetapkan regulasi dan prosedur produksi dan penanganan limbah, seperti AMDAL.

- Polusi tanah

Sampah atau limbah produksi ada yang bisa di daur ulang ada yang tidak. Untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti plastik, perusahaan lebih baik menghindari penggunaan bahan-bahan yang mengandung plastik.

Meskipun kebanyakan perusahaan setuju untuk melakukan tanggung jawab sosialnya, namun mereka keberatan akan mahalnya biaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk menjalankan tanggung jawabnya, seringkali perusahaan harus mengalami penurunan profitnya dibandingkan perusahaan yang memilih untuk tidak menjalankan tanggung jawabnya. Akibatnya investor seringkali memilih perusahaan yang profitnya tinggi meski tidak memiliki dana untuk lingkungan.

Sebagai dampaknya, perusahaan yang profitnya kecil harus membebankan biaya lingkungan pada item produknya sehingga harganya lebih mahal.

6. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Perusahaan selalu dituntut untuk selalu memberikan

kontribusi yang positif bagi masyarakat sekitar perusahaan. Pada umumnya perusahaan menunjukkan dedikasinya pada masyarakat dengan cara memberikan dana beasiswa, merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi perusahaan, bantuan kemanusiaan bencana alam, dan lain-lain. Salah satu pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah biaya yang dibutuhkan.

C. Penerapan Tanggung Jawab Sosial

Seorang wirausahawan di Canada, Sue Kramer, pemilik *College Health Club* (CHC), sebuah pusat kebugaran, meyakini bahwa ketika CHC melaksanakan tanggung jawab sosial maka akan mengurangi keuntungan yang diperolehnya. Akan tetapi, Sue memilih untuk meningkatkan strategi dalam memenuhi tanggung jawab sosial sebagai cara untuk meningkatkan *value* CHC.

Beberapa cara yang dilakukan Sue terhadap *customer* (*member*), karyawan, lingkungan dan masyarakat,, terinci sebagai berikut:

- **Tanggung Jawab Terhadap *Customer***

Sue menyisihkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan *customer*, untuk mengetahui apakah mereka puas atau tidak dan untuk menampung keluhan-keluhan *customernya*. Dalam bisnis kebugaran, kepuasan konsumen sangat perlu karena orang akan bergabung

dengan sebuah pusat kebugaran berdasarkan referensi teman atau keluarganya. Apabila *customer* tidak puas maka akan menurunkan kemungkinan adanya *customer* baru.

- **Tanggung Jawab Terhadap Karyawan**

Sebagai pemilik usaha, Sue adalah karyawan penuh waktu di tempat kerjanya. Dia memiliki satu karyawan paruh waktu dan memberikan upah yang sesuai dengan standar upah pada bisnis serupa. Dalam merekrut karyawan baru, dia sengaja untuk tidak membedakan ras dan gender. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa Sue menyukai dan menghargai perbedaan, tetapi juga agar dapat menarik *customer* dari kalangan yang beraneka ragam. Prinsipnya, karyawan dari ras dan gender yang berbeda, maka akan menarik semakin banyak *customer* dari berbagai ras dan gender.

- **Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**

Meskipun CHC adalah bisnis di bidang jasa dan tidak ada barang-barang hasil produksi yang dihasilkan, akan tetapi Sue berusaha untuk tetap membuang sampah pada tempatnya serta mendaur ulang sampah-sampah seperti bekas kaleng minuman yang dikonsumsi.

- **Tanggung Jawab Terhadap Komunitas/ Masyarakat**

Sebagai alumni Texas College, Sue memberikan seminar gratis kepada mahasiswa. Sue yakin, apa yang dilakukannya ini bukan hanya untuk memenuhi tanggung

jawab moralnya dalam bidang kesehatan, tetapi juga akan mempromosikan CHC.

Dari contoh di atas, kita mengetahui bahwa seorang *wirausaha / wirausahawan* seperti Sue Kramer, yang memiliki usaha dengan skala yang tidak terlalu besar mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Meski tidak harus dengan dana yang besar, Sue memiliki waktu untuk memikirkan dan melaksanakannya. Dengan pengorbanan waktu dan mungkin dana meskipun tidak besar, tapi hasil yang diperoleh lebih besar, yakni nama baik CHC di masyarakat dan kesetiaan *customer* nya. Dengan menjaga dua hal tersebut, di masa yang akan datang keuntungan secara finansial akan mengikuti seiring dengan bertambahnya *customer* karena nama baik CHC pasti akan menarik perhatian orang.

D. Entrepreneur dan Etika Bisnis

Seorang *entrepreneur* memang identik dengan orang yang berusaha untuk berhasil dalam apapun yang dia usahakan. Keberhasilan merupakan tujuan pokok seorang *entrepreneur*. Ada 4 aspek keberhasilan seorang *entrepreneur* menurut Wickham (2004:241-242), yaitu aspek kinerja perusahaan itu sendiri, aspek yang berhubungan dengan orang-orang yang memiliki ekspektasi dari perusahaan tersebut, aspek yang berhubungan dengan sesuatu yang diharapkan orang-orang dari perusahaan tersebut dan hasil

nyata dari ekspektasi tersebut. Orang-orang yang memiliki ekspektasi terhadap perusahaan adalah karyawan, pemilik, pemegang saham, *supplier*, konsumen dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, seorang *entrepreneur* sebagai pemilik usaha tidak dapat mengabaikan sekian banyak kepentingan lain selain kepentingannya sendiri. Ada empat tingkatan tanggung jawab *entrepreneurial* yang seharusnya dilalui oleh seorang *entrepreneur* dalam menjalankan usahanya yakni:

1. *Economic responsibility*, merupakan lingkup tanggung jawab yang paling dasar dalam penciptaan produk, yakni bagaimana suatu usaha dapat menghasilkan sesuatu barang dan jasa yang menguntungkan.
2. *Legal responsibility*, merupakan tanggung jawab sepenuhnya seorang *entrepreneur* yang bersangkutan dengan hukum yang berlaku di wilayah atau negaranya.
3. *Moral responsibility*, merupakan tanggung jawab moral dan etika yang berhubungan dengan budaya dan adat serta kebiasaan setempat.
4. *Discretionary responsibility*, merupakan tanggung jawab tambahan yang mencerminkan standar moral *entrepreneur* itu sendiri atau yang dapat membedakan perusahaannya dengan pesaing.

Meskipun seorang *entrepreneur* berhasil meraih keuntungan yang tinggi untuk perusahaannya, akan tetapi

apabila tidak melakukan tanggung jawab sosialnya, maka hal itu akan dianggap sebagai suatu kegagalan. Menjalankan tanggung jawab sosial memang merupakan hambatan bagi sebuah bisnis, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, karena hal tersebut identik dengan suatu pemborosan keuangan dan waktu. Akan tetapi, apabila dilihat dari keuntungan jangka panjang, tanggung jawab sosial tersebut dapat memberikan keuntungan dalam hal finansial, stabilitas internal, serta kelangsungan perusahaan tersebut.

Memberikan motivasi kepada karyawan serta memperlakukan karyawan dengan etis dapat meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan. Sehingga produktifitas dapat ditingkatkan. Sedangkan terhadap masyarakat sekitar, perusahaan dapat memperlakukan masyarakat sekitar dengan baik, sehingga di kemudian hari, perusahaan tidak akan mendapatkan kesulitan bila harus berhadapan dengan kepentingan masyarakat sekitarnya.

Pada intinya, meskipun seorang *entrepreneur* selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebagai bagian dari masyarakat, dia tidak bisa mengabaikan begitu saja kepentingan orang lain. Kesuksesan yang sesungguhnya dari seorang *entrepreneur* dinilai melalui dua hal yakni berhubungan dengan bisnis itu sendiri dan orang di sekitar *entrepreneur* itu sendiri.

BAB VI

INDUSTRIALISASI PERTANIAN DI INDONESIA

Kompetensi Inti

Mampu mengidentifikasi industrialisasi pertanian di Indonesia.

Kompetensi dasar

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu.

1. Menjelaskan konsep yang berkaitan dengan sektor pertanian di Indonesia.
2. Menguraikan sejarah singkat pertanian dunia.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan strategi sektor pertaniandi Indonesia.
4. Menyebutkan jenis-jenis pengelolaan tanaman dalam pertanian.
5. Menjelaskan peran agroindustri dalam menunjang ekonomi keluarga petani.
6. Menjelaskan pembangunan ekonomi pedesaan melalui kewirausahaanindustri pertanian.
7. Menguraikan gambaran umum Kabupaten Semarang.

8. Menganalisis kewirausahaan industri di wilayah pedesaan Kabupaten Semarang.

A. Sektor Pertanian di Indonesia

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup (Wikipedia Indonesia, 2013). Pertanian merupakan proses menghasilkan bahan pangan, ternak, dan produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Secara umum, pengertian pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, beternak, budi daya ikan, dan kegiatan kehutanan. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan budidaya jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Apabila menganalisis perkembangan sejarah pertanian, pada awalnya pertanian dilakukan sebagai bentuk usaha manusia untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengumpulkan hasil bumi, berburu binatang, dan menangkap ikan di sekitar tempat hidup mereka. Kegiatan

ini dikenal dengan istilah “ekonomi pengumpul pangan (*food gathering economics*)”. Kegiatan lainnya yang masih terkait dengan cara mempertahankan hidup yaitu bercocok tanam di ladang (*crop cultivation*). Usaha pertanian tersebut kemudian diberi nama sesuai dengan subjek usaha taninya. Sebagai contoh, kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan setengah liar atau liar (hutan), peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata) atau serangga (misalnya lebah), dan perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibi dan semua invertebrata air). Pengelompokan jenis pertanian tersebut dilakukan untuk efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertanian sebagai mata pencaharian manusia pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi, sehingga pengolahan dan pengelolaannya memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama dengan usaha serta mata pencaharian sektor lainnya. Dalam kegiatan pertanian diperlukan pula pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih atau bibit, metode budi daya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, serta pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek tersebut dengan pertimbangan efisiensi guna mencapai keuntungan yang maksimal, maka ia melakukan pertanian yang intensif (*intensive farming*).

Pertanian industri selalu menerapkan kegiatan pertanian yang intensif karena pertanian industri selalu memperhatikan lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), dilakukan pengembangan dengan memperbanyak variasi tanaman, misalnya pertanian organik, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan, serta menerapkan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya. Pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industri. Untuk menjembatani bidang pertanian intensif dengan pertanian berkelanjutan diperlukan konsep baru, yaitu pertanian modern. Selain itu, ada pula pertanian ekstensif yang ekstrem dan tradisional berbentuk pertanian sub sistem, yaitu pertanian yang dilakukan tanpa motif bisnis dan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya.

B. Bentuk dan Pengelompokan Hasil-Hasil Pertanian di Indonesia

1. Bentuk-Bentuk Pertanian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah petani, sehingga sektor ini banyak menampung tenaga kerja dan sebagian besar penduduk tergantung pada sektor tersebut. Ini berarti sektor

pertanian memiliki peranan strategis. Oleh karena itu, sektor pertanian perlu dikembangkan dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Bentuk pertanian di Indonesia antara lain sebagai berikut.

- a. Persawahan. Persawahan adalah bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air, baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan, maupun sawah pasang surut.
- b. Pertanian tegalan. Pertanian tegalan adalah pertanian di daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat dengan sistem irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau, lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditanami tanaman pertanian.
- c. Pertanian pekarangan. Pertanian perkarangan adalah pertanian di lahan yang berada di lingkungan rumah (biasanya dipagari dan berada disekitar rumah) yang dimanfaatkan atau digunakan untuk menanam tanaman pertanian.
- d. Ladang Bepindah. Ladang berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang umumnya dilakukan di lahan hasil pembukaan hutan atau semak. Setelah beberapa kali panen atau ditanami, tanahnya sudah tidak subur, sehingga perlu pindah ke lahan lain

yang lebih subur atau ke lahan yang sudah lama tidak digarap.

2. Pengelompokan Hasil-Hasil Pertanian

Hasil-hasil Pertanian di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Pengelompokan berbagai hasil pertanian dilakukan untuk mempermudah identifikasi. Hasil pertanian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berikut.

- a. Hasil pertanian tanaman pangan: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, dan ketela pohon.
- b. Hasil pertanian tanaman perdagangan: kopi, teh, kelapa, karet, kina, cengkeh, kapas, tembakau, kelapa sawit, dan tebu.

C. Pembagian Pertanian

1. Pertanian tradisional

Pertanian tradisional lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan tidak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani. Oleh karena itu, hasil keuntungan ekonomi petani tidak tinggi, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat keuntungan karena pada masa itu pemenuhan kebutuhan masih menggunakan sistem barter. Perkembangan pertanian pada masa lampau memiliki beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, dan pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya, usaha

pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan:(a) skala kecil; (b) modal yang terbatas: (c) penggunaan teknologi yang masih sederhana: (d) sangat dipengaruhi oleh musim; (e) wilayah pasarnya lokal; (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi); (g) akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar sangat rendah; (h) pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani.

Selain itu, terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani, dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi petani. Hal tersebut menuntut pemerintah untuk lebih serius lagi dalam mengupayakan penyelesaian masalah pertanian di Indonesia, demi terwujudnya pembangunan pertanian yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada masa pertanian tradisional, para petani memanfaatkan pupuk hijau dan kandang untuk menjaga

kesuburan tanah, mengembangbiakkan benih sendiri, dan menjaga keseimbangan alam hayati dengan larangan adat. Mereka mempunyai sistem organisasi sosial yang sangat menjaga keselarasan, seperti organisasi Subak di Bali.

2. Pertanian modern

Pertanian modern adalah pola pertanian yang lebih menitikberatkan pada jumlah produksi, sedangkan kualitas produk, lahan, dan ekosistem yang terlibat tidak diperhitungkan. Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan pada tuntutan pemecahan masalah-masalah yang ada, tetapi juga dihadapkan pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi, yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Selain itu, pembangunan pertanian juga dihadapkan pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi, tetapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi tanggung jawab kita semua apabila menginginkan pertanian yang menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Berikut ini adalah beberapa

rekomendasi, tawaran, saran, masukan, dan juga tuntutan dari hasil pemikiran mahasiswa-mahasiswa pertanian Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Indonesia (FKMPI) terkait strategi pembangunan pertanian di Indonesia.

- a. Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan.
- b. Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh undang-undang.
- c. Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, pengembangan industrialisasi yang berbasis pertanian/pedesaan, serta mempermudah akses-akses terhadap sumber-sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Indonesia harus mampu keluar dari World Trade Organization (WTO) dan segala bentuk perdagangan bebas dunia pada tahun 2014.
- e. Perbaiki infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks

kearifan lokal serta pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil penelitian ilmuwan lokal.

- f. Pewujudan kedaulatan pangan di Indonesia.
- g. Peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian.
- h. Membuat dan memberlakukan undang-undang perlindungan atas hak asasi petani.
- i. Penempatan pejabat dan petugas di setiap instansi maupun institusi pertanian dan perkebunan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing.
- j. Pewujudan reformasi agraria.
- k. Pengembangan muatan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian serta penyusunan konsep jam tayang khusus untuk publikasi dunia pertanian di seluruh media massa yang ada.
- l. Penyelenggaraan bimbingan lanjutan bagi lulusan bidang pertanian yang terintegrasi melalui penumbuhan wirausahawan dalam bidang pertanian (inkubator bisnis) berupa pelatihan dan pemagangan yang berorientasi pada *life skill*, *entrepreneurial skill*, kemandirian usaha, program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda melalui kegiatan magang ke negara-negara yang sektor pertaniannya telah berkembang maju. Selain itu, dilakukan juga peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pertanian,

pengembangan program studi bidang pertanian yang mampu menarik generasi muda, serta program-program lain yang bertujuan untuk menggali potensi, minat, dan bakat generasi muda di bidang pertanian, serta melahirkan generasi muda yang mempunyai sikap ilmiah, profesional, kreatif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi demi kemajuan pertanian Indonesia. Contoh program tersebut antara lain olimpiade pertanian, gerakan cinta pertanian pada anak, *agriyouth camp*, dan lain-lain.

- m. Pemberantasan mafia-mafia pertanian.
- n. Pelibatan mahasiswa dalam program pembangunan pertanian melalui pelaksanaan bimbingan massal pertanian, peningkatan daya saing mahasiswa dalam kewirausahaan, serta pemberian dana pendampingan untuk program-program kemahasiswaan.

Banyak hal yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan dan prioritas utama dalam melakukan program apapun. Hal tersebut tentu tidak boleh hanya menguntungkan satu golongan saja, tetapi juga diarahkan untuk mencapai fondasi yang kuat pada pembangunan nasional. Pembangunan merupakan penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik, sehingga terwujud keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pembangunan pertanian harus

mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu, pembangunan harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian serta usaha pertanian yang kuat dan mapan. Sistem tersebut juga harus mampu berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralisasi.

Pertanian modern yang bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan (pupuk dan pestisida) menimbulkan kekhawatiran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dipandang sebagai suatu krisis pertanian modern. Sementara itu, pertanian tradisional yang bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian yang jauh di bawah kebutuhan manusia. Kedua hal tersebut dilematis dan telah membawa manusia kepada pemikiran untuk tetap mempertahankan penggunaan masukan dari luar sistem pertanian itu, tetapi tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya (Mugnisjah, 2001).

Alternatif penanggulangan krisis pertanian modern tersebut ialah dengan penerapan pertanian organik. Kegunaan budi daya organik menurut Sutanto (2002) adalah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budi daya kimiawi.

Pemanfaatan pupuk organik memiliki keunggulan yang nyata dibanding dengan pupuk kimia. Pupuk organik dengan sendirinya merupakan keluaran dari setiap budi daya pertanian, sehingga merupakan sumber unsur hara makro dan mikro yang dapat dikatakan cuma-cuma. Pupuk organik berdaya ameliorasi ganda dengan bermacam-macam proses yang saling mendukung, bekerja menyuburkan tanah sekaligus mengonservasikan dan menyehatkan ekosistem tanah, serta menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan demikian, penerapan sistem pertanian organik pada gilirannya akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Dunia pertanian modern merupakan dunia mitos keberhasilan modernitas. Keberhasilan diukur dari berapa banyaknya hasil panen yang dihasilkan. Semakin banyak hasilnya, maka semakin dianggap maju. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia di Indonesia merupakan bagian dari revolusi hijau, sebuah proyek ambisius Orde Baru untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern yang dimulai sejak tahun 1970-an.

Gebrakan revolusi hijau di Indonesia memang terlihat pada dekade 1980-an. Saat itu, pemerintah menganjurkan penanaman padi, memaksa pemakaian bibit impor, pupuk kimia, pestisida, dan lain-lainnya. Hasilnya, Indonesia sempat menikmati swasembada beras. Namun, pada

dekade 1990-an, petani mulai kelimpungan menghadapi serangan hama, kesuburan tanah merosot, ketergantungan pemakaian pupuk yang semakin meningkat, pestisida tidak manjur lagi, dan harga gabah dikontrol oleh pemerintah. Revolusi hijau bahkan telah mengubah secara drastis hakikat petani. Dalam sejarah peradaban manusia, petani bekerja mengembangkan budaya tanam dengan memanfaatkan potensi alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Petani merupakan komunitas mandiri. Dengan pertanian modern, petani justru tidak mandiri. Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization—FAO) PBB telah menegaskan hak-hak petani (*farmer's rights*) sebagai penghargaan bagi petani atas kontribusi mereka. Hak-hak petani merupakan pengakuan terhadap petani sebagai pelestari, pemulia, dan penyedia sumber genetik tanaman.

Hak-hak petani dalam deklarasi tersebut mencakup hak atas tanah, hak untuk memiliki, melestarikan, dan mengembangkan sumber keragaman hayati, hak untuk memperoleh makanan yang aman, hak untuk mendapatkan keadilan harga dan dorongan untuk bertani secara berkelanjutan, hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak untuk melestarikan, memuliakan, mengembangkan, saling tukar-menukar dan menjual benih serta tanaman, serta hak untuk memperoleh benihnya kembali secara aman yang kini tersimpan pada bank-bank

benih internasional (Aldisyaifulanwar, 2010). Apa yang dikembangkan oleh para ilmuwan telah membedakan mana yang maju dan terbelakang, modern dan tradisional, serta efisien dan tidak efisien. Namun, bukti menunjukkan bahwa sistem pertanian yang disebut sebagai pertanian yang terbelakang, tradisional, dan tidak efisien itu ternyata lebih bersifat ekologis dan tidak merusak alam.

D. Industrialisasi Pertanian

Industrialisasi pertanian adalah proses kegiatan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para petani untuk terlibat dalam berbagai aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya peningkatan pendapatan petani, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mampu bersaing di pasar global. Industrialisasi pertanian menuntut personel yang terlibat di sektor pertanian tersebut mampu berinovasi secara dinamis, ulet, mampu memanfaatkan sumber daya alam, tenaga, modal, dan teknologi yang ada pada lingkungan fisik dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam arti luas (Anindita, 2012).

Industrialisasi pertanian sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan potensi agraris masyarakat. Pada era otonomi

daerah seperti sekarang ini, kebijakan desentralisasi daerah yang menjadi ranah untuk melimpahkan konsentrasi pemerintah pusat kepada daerah telah menimbulkan ketidakseimbangan kontrol makroekonomi (inflasi, utang, neraca pembayaran, dan sebagainya). Desentralisasi daerah juga telah mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokaldengan model pengembangan yang sering disebut dengan *Local Decentralized Industrialization*, yaitu sebuah proses yang timbul, berkembang, dan kematangannya didasarkan atas kombinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan kemampuan sumber daya alam atau potensi daerah. Melalui model ini, kapasitas *entrepreneurship*, upah tenaga kerja yang kompetitif, serta pengetahuan praktis tentang produk dan pasar merupakan faktor utama berkembangnya industrialisasi lokal.

Dengan demikian, industrialisasi pertanian merupakan perubahan dari pertanian tradisional menuju pertanian modern yang memiliki nilai tambah. Aplikasi dari industrialisasi pertanian ini menuntut perubahan yang signifikan dari modernisasi produksi manufaktur yang merupakan kegiatan untuk mentransformasikan produk dari petani ke tujuan akhir konsumen (yang meliputi kegiatan produksi dan pemrosesan) serta modernisasi distribusi dan koordinasi dalam rantai pasar pertanian. Industri pertanian memerlukan adanya identifikasi

aktivitas nilai tambah yang mendukung investasi melalui riset aspek pemasaran, pengolahan, aplikasi bioteknologi, rancang bangun, dan restrukturisasi sistem distribusi.

E. Permasalahan dan Strategi Sektor Pertanian di Indonesia

1. Permasalahan Sektor Pertanian di Indonesia

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia memiliki peranan penting antara lain sebagai berikut.

- a. Sumber daya alam yang potensial baik dari segi jumlah maupun besarnya.
- b. Pangsa pasarnya dapat menunjang pendapatan nasional.
- c. Pertanian dapat menunjang pangsa pasar, terutama pada sektor ekspor nasional.
- d. Sebagai mata pencaharian pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia terutama yang masih hidup di pedesaan.

Peranan sektor pertanian dalam menyediakan pangan bagi masyarakat sangat penting. Namun, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional, perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia belum menunjukkan hasil yang

maksimal sampai saat ini. Hal tersebut berarti bahwa potensi sektor pertanian Indonesia sangatlah besar, tetapi dalam kenyataannya sebagian besar petani masih banyak yang berada pada golongan masyarakat miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kurang memberdayakan petani secara keseluruhan.

Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang timbul di sektor pertanian berdasarkan beberapa kajian.

- a. Impor tinggi. Tingkat impor Indonesia sangat tinggi, terutama dalam subsektor pertanian tanaman pangan. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang ada di Indonesia sangatlah sempit dan terbagi-bagi ke dalam beberapa subsektor, seperti perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Dalam menyikapi hal ini kita harus positif karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan impor. Setiap negara pasti melakukan impor produk pertanian karena beberapa faktor seperti kondisi iklim dan struktur tanah yang berbeda-beda. Hal tersebut tentunya menyebabkan produk pertanian yang dihasilkan juga berbeda-beda. Sebagai contoh, kegiatan beternak di wilayah Indonesia tidak akan optimal dikarenakan penggembalaan yang kecil. Selain itu, menanam gandum juga tidak akan optimal karena gandum akan tumbuh dengan baik pada iklim subtropis. Namun, wilayah Indonesia akan sangat optimal

untuk menanam tanaman rempah-rempah, sawit, kopi, teh, dan lain-lain. Selain itu, yang menjadi faktor tingginya impor Indonesia adalah lahan pertanian yang tersedia di Indonesia sangat sempit. Dengan luas lahan yang sempit ini sektor pertanian dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 220 juta jiwa. Dari kedua faktor tersebut tentu sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

- b. Petani yang terpinggirkan. Maksudnya, masih banyak petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan hanya menjadi buruh tani. Hal inilah yang menyebabkan petani di Indonesia tergolong miskin. Jika berbicara tentang profesi petani, idealnya profesi petani di suatu negara hanya 5–10 persen saja dari jumlah penduduk negara tersebut. Namun, di Indonesia masyarakat yang bekerja di sektor pertanian mencapai 40 persen (sekitar 42,8 juta jiwa). Dengan jumlah yang relatif banyak dan melebihi titik idealnya, maka penguasaan lahan yang tersedia menjadi sedikit dan terbatas.
- c. Organisasi tani yang kurang berfungsi, terutama koperasi petani. Organisasi petani yang ada di Indonesia sangat kecil dan sederhana. Peralatan teknologi yang dimiliki organisasi petani di Indonesia juga masih sangat minim. Hal ini terjadi

karena manajemen organisasi petani di Indonesia tidak sehat dan lingkungannya pun tidak luas. Pada umumnya, organisasi petani di Indonesia hanya bergerak pada koperasi benih.

- d. Meningkatnya jumlah kebutuhan produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa, sedangkan lahan yang diolah untuk bertani semakin terbatas. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah.
- e. Perkembangan industri yang membuat pertanian yang menggunakan irigasi secara teknis semakin berkurang. Selain itu, tingkat produktivitas pertanian masih belum berkembang karena air yang mengairi lahan pertanian berkurang. Banyak waduk, embung, dan saluran irigasi yang ada memerlukan perbaikan.
- f. Hutan-hutan tropis yang semakin berkurang karena pengaruh pemanasan global, sehingga mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.
- g. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Kemampuan pertanian kita untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri relatif menurun secara drastis. Indonesia berada dalam ancaman rawan pangan sekarang. Hal itu bukan

karena tidak adanya pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah bergantung padapasokan luar negeri.

- h. Kemampuan pertanian, ketergantungan pasokan dari produsen pangan luar negeri yang tidak meningkatkan kemandirian pertanian Indonesia akan menyebabkan Indonesia semakin bergantung pada impor pangan dari luar negeri di kemudian hari.
- i. Permasalahan-permasalahan lainnya, seperti infrastruktur pertanian berupa jalan dan irigasi yang terabaikan sehingga biaya yang harus dikeluarkan pada sektor ini lebih besar. Investasi pada sektor inipun rendah karena hampir semua bank dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia enggan memberikan pinjaman kredit modal kepada petani-petani kecil. Sedangkan dari sisi petani, tidak banyak petani yang mengetahui bank dan lembaga keuangan. Selain itu, akses lembaga keuangan juga masih lemah. Permasalahan utama bangsa Indonesia adalah *inferiority complex* yang berarti percaya bahwa produk bangsa sendiri lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan produk bangsa lain. Masyarakat Indonesia lebih bangga menggunakan produk luar negeri dibandingkan dengan menggunakan produk dalam negerinya.

- j. Tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini dalam membangun sektor pengolahan industri pertanian adalah budaya industri/mengolah/*technopreuner* di Indonesia yang masih rendah. Dukungan untuk industri masih kurang. Hal ini tentunya menjadi kesalahan dan tanggungan negara karena infrastruktur nonfisik masih kurang mendukung.

2. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sektor pertanian di Indonesia menurut Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (2004) antara lain sebagai berikut.

- a. Harus dibuat *road map* (peta jalan) untuk industri berbasis agro dan perkebunan.
- b. Regionalisasi pengembangan komoditas untuk menuju skala ekonomi dan aglomerasi.
- c. Pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan, dan industri kecil menengah pedesaan.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sertasocial capital untuk sektor pertanian guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.
- e. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih proaktif dalam membangun inisiatif dan tindakan

untuk membuat jejaring kerjasama usaha tani sebagai agenda pembangunan daerah.

- f. Pemerintah harus berani dan tegas untuk membuka, menciptakan, mengamankan pasar produk pertanian dan memihak petani.
- g. Dua hal yang terpenting dalam proses pembangunan adalah *leadership* dan manajemen. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan baik dan benar, harus terorganisasi dengan baik dan dengan sistem manajemen yang baik pula. Pembangunan juga harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan bertaqwa yang memiliki *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ) yang baik.
- h. Sektor pertanian adalah sektor yang mencakup subsektor yang meliputi pertanian sawah, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Pembangunan sektor pertanian ini dapat merespons dan menjadi katalis pertumbuhan di sektor-sektor lainnya seperti perbankan, keuangan dan bisnis, perdagangan, pengangkutan/transportasi, jasa-jasa, serta industri pengolahan, terutama industri pengolahan produk pertanian. Faktor lain yang mendukung sektor pertanian menjadi sektor yang potensial adalah kondisi tanah di Indonesia yang subur dengan iklim tropis yang dapat ditanami berbagai macam tumbuhan dan luas lautan Indonesia

yang begitu luas yang mencapai 70 persen luas Indonesia secara keseluruhan.

- i. Menahan laju pertumbuhan penduduk agar jumlah penduduk di Indonesia dapat terkontrol, sehingga dapat menurunkan angka impor produk pangan Indonesia.
- j. Mengembangkan teknologi pertanian untuk menambah produktivitas tanaman pangan.
- k. Melakukan pengurangan pada sektor-sektor lainnya dan memperluas sektor pertanian agar sektor ini dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional.
- l. Mengembangkan sektor-sektor lain yaitu pengolahan industri, perbankan, pertambangan, pariwisata, dan lain-lain, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pekerja pada sektor pertanian hingga pada taraf idealnya yaitu 5 persen.

Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan sebelumnya, terdapat dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Kedua strategi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian dan membuka lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sektor pertanian, seperti

ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Selain itu, dengan adanya keberpihakan ini, akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.

- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor dengan jumlah tenaga kerjayang banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, restoran, serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan listrik merupakan sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan pada sektor ini (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2004).

Struktur perekonomian Indonesia sekarang merupakan refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, masih ada kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan

yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai sekarang ini (Dumairy,1997).

F. Agroindustri dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Petani

Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Secara eksplisit, pengertian agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin (1981), yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang dihasilkan oleh hewan). Proses yang digunakan mencakup perubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Produk agroindustri ini dapat berupa produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleksitas industri pertanian dari produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi, hingga penggunaannya oleh konsumen (Tambunan, 2005).

Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interelasi) antara produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Berdasarkan pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari lima subsistem agrobisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, serta sarana dan pembinaan. Dengan demikian, agroindustri meliputi Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP), Industri Peralatan dan Mesin Pertanian (IPMP), dan Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP).

Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2013).

1. Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) tanaman pangan yang meliputi bahan pangan kaya karbohidrat, palawija, dan tanaman hortikultura.
2. Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) tanaman perkebunan yang meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kakao, vanili, kayu manis, dan lain-lain.
3. Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) tanaman hasil hutan yang mencakup produk kayu olahan dan nonkayu seperti damar, rotan, tengkawang, dan hasil hutan lainnya.

4. Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) perikanan yang meliputi pengolahan dan penyimpanan ikan dan hasil laut segar, pengalengan dan pengolahan, serta hasil ikan dan laut lainnya.
5. Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) peternakan yang meliputi pengolahan daging segar, susu, kulit, dan hasil lainnya.

Industri Peralatan dan Mesin Pertanian (IPMP) dibagi menjadi dua kegiatan sebagai berikut.

- a. Peralatan dan Mesin Pertanian (IPMP) budi daya pertanian yang mencakup alat dan mesin pengolahan lahan (cangkul, bajak, traktor, dan lain sebagainya).
- b. Peralatan dan Mesin Pertanian (IPMP) pengolahan yang meliputi alat dan mesin pengolahan berbagai komoditas pertanian seperti mesin perontok gabah, mesin penggiling padi, mesin pengering, dan lain sebagainya.

Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP) dibagi menjadi tiga kegiatan sebagai berikut.

- 1) Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP) perdagangan yang meliputi kegiatan pengangkutan, pengemasan, dan penyimpanan baik bahan baku maupun produk hasil industri pengolahan pertanian.
- 2) Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP) konsultasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan,

pengawasan mutu, serta evaluasi dan penilaian proyek.

- 3) Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP) komunikasi yang menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer serta alat komunikasi modern lainnya.

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam jenis agroindustri adalah (a) industri pengolahan *input* pertanian yang pada umumnya tidak berlokasi di pedesaan, padat modal, dan berskala besar seperti industri pupuk, industri pestisida, dan sebagainya, dan (b) industri pengolahan hasil pertanian seperti pengolahan pucuk teh hijau atau teh hitam, pengalengan buah, pengolahan minyak kelapa, dan lain-lain. Menurut Suhendra (2004), di banyak negara, sektor pertanian berhasil menjadi prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa.

Dengan pertanian sebagai pusatnya, agroindustri merupakan sebuah sektor ekonomi yang meliputi semua perusahaan, agen, dan institusi yang menyediakan segala kebutuhan pertanian serta mengambil komoditas dari pertanian untuk diolah dan didistribusikan kepada konsumen. Nilai strategis agroindustri terletak pada posisinya sebagai jembatan yang menghubungkan antara sektor pertanian pada kegiatan hulu dan sektor industri pada kegiatan hilir. Pengembangan agroindustri secara cepat dan baik dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja,

pendapatan petani, volume ekspor dan devisa, pangsa pasar domestik dan internasional, nilai tukar produk hasil pertanian, serta penyediaan bahan baku industri.

G. Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Kewirausahaan Industri Pertanian

Peran kewirausahaan dalam pembangunan pedesaan sebenarnya sudah disadari sejak lama. Schumpeter (1934), ahli ekonomi pembangunan, telah memberi perhatian khusus terhadap peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kewirausahaan merupakan agen yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui penemuan dan kombinasi baru. Wilayah yang mampu mendorong penemuan, teknologi, bentuk organisasi, pasar, dan bahan baku baru akan lebih maju secara ekonomi dibandingkan wilayah yang tidak memenuhi kriteria di atas (Hick, 1996). Dengan demikian, peran kewirausahaan dalam pembangunan wilayah tidak dapat diabaikan. Banyak negara Eropa mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama setelah abad ke-18 karena memiliki kewirausahaan yang kuat.

Menurut Schumpeter (1934), melalui penemuan baru seorang wirausaha dapat menghasilkan usaha baru berdasarkan kemampuannya menangkap peluang usaha, sehingga dapat menikmati hasil usahanya secara monopoli untuk sementara waktu. Situasi monopoli inilah yang akan

memberi kesempatan wirausaha menikmati keuntungan yang nantinya dipakai untuk melakukan inovasi. Inovasi ini pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jika suatu wilayah memiliki kewirausahaan yang kuat, wilayah tersebut dapat menjadi yang terdepan di antara wilayah lain dari sisi ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa keunggulan tersebut hanya bersifat sementara karena para pesaing akan masuk dengan produk yang sama dan membuat inovasi yang lain.

Kewirausahaan dipandang sebagai kekuatan kreatif. Mereka selalu mempunyai imajinasi dan menciptakan kesempatan atau memecahkan masalah dengan cara baru, atau seseorang yang menciptakan *nice market* atau membangun strategi guna memenuhi kebutuhan pasar (Garfield, 1986). Para wirausaha tidak hanya berhenti sekadar mengidentifikasi pasar, tetapi juga harus menciptakannya. Dengan demikian, wirausaha adalah sumber perubahan ekonomi dan sumber dinamika dalam masyarakat. Para wirausaha tersebut layaknya orang yang revolusioner dan sekaligus visioner dalam bidang pembangunan ekonomi. Keputusan yang mereka buat tidak hanya didasarkan pada sinyal pasar semata, tetapi juga *instinct* untuk melihat *trend* pasar di masa depan. Para wirausaha sering digambarkan sebagai seseorang yang rasional, utilitarian, atau hedonis, yang menghamburkan uang untuk kesenangan.

Kitzner (1979) melihat bahwa wirausaha mempunyai peran sebagai kekuatan untuk memperbaiki pasar agar tetap seimbang (*equilibrium*) melalui proses penyesuaian harga. Sebaliknya, Schumpeter (1934) melihatnya sebagai kekuatan yang selalu memperbarui pasar (*disequilibrium force*) dengan kekuatan inovasinya, sehingga mendorong pembangunan. Inilah yang oleh Schumpeter disebut "*creative destruction*" karena usaha baru akan menghancurkan usaha yang sudah tua. Gambaran ini tentu tidak selamanya benar. Lebih dari itu, para wirausaha merupakan pemimpin yang berhasil membangun kerajaan bisnis dan selalu bertekad menang dalam medan perang bisnis (Schumpeter, 1934).

Wirausaha perlu dibedakan dengan manager. Seorang wirausaha tidak pernah merasa terganggu ketika menghadapi masalah atau kendala. Bahkan, mereka melihat masalah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai perubahan, dan bila perlu mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. Dalam kaitan dengan inovasi, peraturan pemerintah bisa menjadi pisau bermata dua. Pada satu sisi, peraturan tersebut dapat mendorong inovasi, tetapi di lain sisi dapat mematikan inovasi.

Pendalaman dan Pengayaan Materi

1. Pendalaman Materi

- a. Petunjuk: jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.
- b. Soal:
 - 1) Tuliskan konsep dasar pertanian dan industrialisasi pertanian.
 - 2) Jelaskan permasalahan umum yang dihadapi oleh petani di Indonesia.
 - 3) Strategi-strategi apa saja yang dipakai untuk mengatasi masalah di bidang pertanian di Indonesia?
 - 4) Buktikan dengan contoh yang kongkrit program agroindustri yang dapat menunjang ekonomi keluarga petani di pedesaan.
 - 5) Apa saja manfaat mempelajari kewirausahaan industri di bidang pertanian dalam upaya menunjang pembangunan ekonomi pedesaan?

2. Pengayaan Materi

- a. Lakukan kajian dengan mengambil data di desa Anda terkait dengan:
 - 1) Jumlah penduduk dengan kelompok umur.
 - 2) Mata pencaharian penduduk.
- b. Menurut Anda, apakah pertanian menjadi mata pencaharian yang dominan di desa Anda tersebut? Berikan alasannya.

- c. Apakah para pemuda di desa Anda ada yang menjadi petani? Jelaskan alasannya.
- d. Apakah para petani yang ada di desa Anda memiliki mata pencaharian di bidang selain pertanian? Jelaskan alasannya.
- e. Menurut Anda, apakah ada inovasi di bidang pertanian? Lakukan analisis dengan cermat.

Daftar Pustaka

- Aldi Syaifulanwar. 2010. "Sistem pertanian Modern". Diakses di <http://blogs.unpad.ac.id/aldisyaifulanwar/2010/06/07/sistem-pertanian-modern/> 12 Juni 2014, pk. 10.02.
- Austin, J.E. 1981. *Agroindustrial Project Analysis*. Washington D.C.: John Hopkins University Press.
- Disperindag Kabupaten Semarang. 2009.
- Dispertan Kabupaten Semarang. 2009.
- Discapil Kabupaten Semarang. 2010.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Garfield, F.M., Eugene Klesta, dan Jerry Hirsch. 2000. *Quality Assurance Principles for Analytical Laboratories*. Edisi ke-3. Gaithersburg: AOAC International.
- Hick, P.A. 1995. "An Overview of Issues and Strategies in The Development of Food Processing Industries in Asia and The Pacific". *AP*

- O *Symposium*, 28 September–5 Oktober 1993. Tokyo.
- Mugnisjah, W.Q. 2007. *Teknologi Benih*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Purbayu, B. 2010. *Politik Beras dan Beras Politik: Buntelan Opini Terseleksi tentang Politik Pertanian, Kemandirian, dan Pembangunan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 2004. "Himpunan Berbagai Pikiran Tentang Pembangunan Pertanian Periode 2005–2020". *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*.2(4), 309–323.
- Schumpeter, J.A. 1934. *Theory of Economic Development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Suhendra, E.S. 2004. "Analisis Struktur Sektor Pertanian Indonesia: Analisis Model Input-Output". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.9(2),55–65.
- Sukartawi. 2004. *Agrobisnis: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryana, A. 2006. "Kinerja Pembangunan Pertanian 2006 dan Prospek 2007". Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada Seminar Sehari pada tanggal 20 Desember 2006. Jakarta.
- Susanto, R.D. 2005. "Swasembada Pangan dan Kemiskinan Perdesaan". Paper Mata Kuliah Perencanaan dan Pertumbuhan Ekonomi, Program Studi Ilmu

Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tambunan, M. dan S.H. Priyanto. 2005. "Perubahan Struktur Ekonomi dan Peranan Agroindustri dalam Proses Industrialisasi Pertanian di Indonesia". Dalam Soesastro, H., A. Budiman, N. Triaswati, A. Alisjahbana, dan S. Adiningsih (para editor). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kerjasama Kanisius dan ISEI.

Wikipedia Indonesia. 2013. "Ensiklopedi bebas". Diakses pada hari Minggu, 14 Oktober 2013.

BAB VII

PARADIGMA TRANSFORMASI INDUSTRI PERTANIAN

Kompetensi Inti

Mampu memahami paradigma transformasi pada industri pertanian, terutama yang berkaitan dengan paradigma petani untuk bekerja di luar sektor industri pertanian.

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi transformasi sektor pertanian ke sektor industri selain pertanian.
2. Menjelaskan faktor pendorong transformasi sektor pertanian ke sektor industri.
3. Menjelaskan secara singkat konsep yang terkandung dalam *An Eclectic Theory of Entrepreneurship*.
4. Mengungkapkan alasan partisipasi rumah tangga pertanian dalam aktivitas Industri.
5. Menjelaskan hubungan kemiskinan dan kewirausahaan industri pertanian di pedesaan.

A. Transformasi Sektor Pertanian ke Sektor Industri Selain Pertanian

Kaum *behaviorist* memandang pertanian sebagai sumber segala kemakmuran. Turgot (1727) dalam Suryana (2003) adalah pendukung *laissez faire*. Karyanya *Reflection on the Formation and Distribution of Wealth* menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian. Sebagai *behaviorist*, Turgot mendukung pernyataan bahwa pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Smith dalam Suryana (2003) sebagai tokoh aliran klasik dalam bukunya yang berjudul "*Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" menjelaskan bahwa pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan suatu negara merupakan modal untuk membiayai keperluan hidup rakyat dan hasilnya akan dipakai untuk membeli keperluan hidup yang dibeli dari luar negeri." Adam Smith menjelaskan bahwa sewa tanah merupakan salah satu faktor dalam penetapan harga. Sewa tanah adalah akibat dan bukan merupakan penyebab dari tingginya harga hasil pertanian. Namun, Adam Smith tidak menjelaskan perbedaan antara bunga modal dan laba pengusaha.

Ahli ekonomi lain, Say (1767) dalam Suryana (2003) membagi "*profit de l'entrepreneur de l'industrie*" (laba pengusaha). Upah bagi yang menyerahkan kekayaan untuk keperluan industri (jadi wirausaha) adalah *service capitaux*, sedangkan upah bagi pemilik tanah adalah *service foncier*.

Service industrial adalah upah untuk para manajer dalam mengelola proses produksi. Teori Karl Marx dengan pemikiran Marxis berusaha menelaah proses peralihan yang diharapkan terjadi pada negara yang sedang berkembang untuk keluar dari keterpurukan menuju negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Teori Lewis yang merupakan penyempurnaan dari Teori Fei-Ranis menjelaskan keadaan suatu negara yang *surplus-buruh*. Suatu negara yang memiliki kelebihan buruh maka perekonomiannya miskin sumber daya dan negara dengan sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian maka terdapat pengangguran yang banyak. Selain itu, jika negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka ekonomi pertaniannya akan mengalami stagnasi dan akan menjadikan sektor industri lebih aktif dan dinamis. Dalam keadaan seperti itu, pembangunan yang terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja pertanian yang kontribusinya terhadap *output* nol akan beralih ke sektor industri yang lebih produktif dengan upah yang sama.

Asumsi yang digunakan adalah (1) ekonomi *dualisme* yang terdiri dari sektor pertanian tradisional yang stagnan dan sektor industri yang aktif; (2) *output* dari sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja; (3) pada sektor pertanian, tidak ada akumulasi modal kecuali terjadi reklamasi; (4) penawaran tanah bersifat tetap; (5) kegiatan

pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel; (6) produktivitas marginal buruh nol; (7) *output* sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh saja; (8) pertumbuhan penduduk sebagai fenomena eksogen; (9) upah nyata di sektor pertanian dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata sektor pertanian; (10) pekerja di masing-masing sektor hanya mengonsumsi produk-produk pertanian.

Berdasar asumsi tersebut dalam menganalisis pembangunan ekonomi, *surplus-buruh* dibagi menjadi 3 tahap, yaitu (1) para pengangguran dialihkan dari pertanian ke industri dengan upah institusional yang sama; (2) pekerja pertanian menambah *output* pertanian, tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh; (3) buruh pertanian mendapatkan upah lebih besar daripada perolehan upah institusional.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dapat dilakukan analisis dengan sebagian besar (sekitar 80%) penduduk di negara-negara yang sedang berkembang tinggal di daerah pedesaan. Mereka umumnya bekerja di sektor pertanian (sekitar 66%). Kontribusi sektor pertanian terhadap produk nasional kotor (*Gross Domestic Product—GDP*) hanya 32%. Sektor pertanian di negara berkembang memiliki produktivitas yang rendah, teknologi pertaniannya primitif, keorganisasiannya tidak bagus, serta terbatasnya

input modal fisik dan tenaga kerja yang terdidik atau terampil. Pada umumnya, perekonomian di negara-negara yang sedang berkembang berorientasi pada produksi bahan-bahan pokok sebagai saingan dari kegiatan-kegiatan produk sekunder (industri) dan tersier (jasa). Komoditas pokok ini merupakan produk ekspor yang penting.

Teori ketergantungan merupakan bagian dari “model-model struktural internasional” yang secara esensial memandang negara-negara berkembang sebagai objek yang diatur oleh kekakuan struktur ekonomi dan institusional, serta terperangkap dalam keadaan “ketergantungan” dan “dominasi” dari negara-negara kaya. Ada dua jenis model struktural internasional yaitu model dependensi “neo-kolonial” dan model “paradigma tiruan/palsu”. Model dependensi “neo-kolonial” merupakan tindak lanjut dari hasil analisis perkembangan pemikiran Marxis. Ciri-ciri pemikiran ini adalah menjaga eksistensi dan mengentaskan keterbelakangan dunia ketiga, terutama terhadap evolusi historis mengenai sistem kapitalis internasional yang benar-benar berbeda dalam pola hubungan negara-negara kaya dan negara-negara miskin.

Model paradigma tiruan/palsu yaitu menganalisis tanda-tanda keterbelakangan dunia ketiga akibat kesalahan dan ketidaksesuaian informasi serta komunikasi dari negara maju/donor yang sering kali kurang jelas atau

kekurangan informasi data mengenai kondisi atau latar belakang masing-masing negara yang sedang berkembang. Negara maju/donor memberikan konsep-konsep yang ideal, struktur teoretis yang baik dan model-model ekonometri yang kompleks mengenai pembangunan. Hal tersebut sering kali menimbulkan kekurangsesuaian atau menimbulkan kebijakan-kebijakan yang keliru karena adanya faktor-faktor institusional dan struktural (kepemilikan tanah tak adil, pembagian kredit yang timpang, pengendalian finansial yang tidak tepat, dan sebagainya).

Dalam pembangunan ekonomi pedesaan, faktor kewirausahaan dan faktor lingkungan masyarakat sangat berperan untuk mengatasi permasalahan pedesaan. Karakteristik pedesaan lebih didominasi oleh penduduknya yang sebagian bermata pencaharian di sektor pertanian dan masih berada pada taraf kemiskinan. Oleh karena itu, kewirausahaan industri pedesaan diperlukan untuk mencegah adanya urbanisasi, menciptakan lapangan kerja di pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan industrialisasi di pedesaan. Menurut Islam dalam Mittal (2004), kewirausahaan industri pedesaan sendiri merupakan upaya untuk menangkap peluang usaha ekonomi pedesaan dalam rangka mengubah nilai tambah hasil pertanian dan merupakan usaha penerapan teknologi. Ia berpendapat

bahwa ide kewirausahaan industri pedesaan berangkat dari argumen hasil penelitian tentang fenomena jenis pekerjaan yang berkembang di daerah pedesaan. Pekerjaan merupakan variabel penting dalam mengukur kemiskinan. Hal tersebut didefinisikan sebagai akibat kurangnya pendapatan dari hasil bekerja seseorang untuk hidup layak (umumnya diasumsikan minimal US\$1 per hari).

Terkait dengan lapangan kerja pertanian di pedesaan, selalu terjadi variasi musiman pada intensitas pekerjaan seperti pada pertanian tadah hujan. Hal ini berdampak pada pendapatan yang tidak menentu. Selain itu, terjadinya kemiskinan di pedesaan juga disebabkan oleh nilai tambah hasil pertanian yang masih rendah. Permasalahan tersebut akhirnya mendorong petani pedesaan untuk beralih pekerjaan ke sektor nonpertanian yang sebagian besar lapangan kerjanya tersedia di daerah perkotaan. Peran kewirausahaan diperlukan dalam pengembangan industrialisasi guna mengurangi kemiskinan di pedesaan. Gagasan awal dikembangkannya kewirausahaan industri di pedesaan didasarkan pada beberapa pertimbangan, misalnya masalah daya dukung perkotaan yang terbatas, sumber daya masyarakat desa yang melimpah, dan pengurangan masalah ketergantungan antar wilayah (Andri, 2006).

Data penduduk Indonesia pada 2005 menggambarkan proporsi penduduk yang bertempat

tinggal di pedesaan Indonesia. Jika dibandingkan dengan di perkotaan tidaklah berbeda jauh, yakni 113,7 juta jiwa di pedesaan dan 106,2 juta jiwa di perkotaan (BPS, 2005). Namun, perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan bahwa kawasan pedesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada 2004 mencapai 24,6 juta jiwa. Hal tersebut jauh lebih tinggi daripada di perkotaan yaitu 11,5 juta jiwa.

Data tersebut juga menunjukkan masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja di pedesaan karena aktivitas ekonomi pedesaan masih bertumpu pada sektor pertanian (primer). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2003, pangsa tenaga kerja di pedesaan pada sektor pertanian mencapai 67,7 persen. Padahal secara nasional, meski sektor pertanian menampung 46,3 persen dari 90,8 juta penduduk yang bekerja, kontribusinya dalam pembentukan PDB hanya 15,0 persen. Menguatnya desakan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi nonpertanian, terutama di Pulau Jawa, tidak hanya merusak sistem irigasi yang sudah terbangun, tetapi juga semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di pedesaan dengan meningkatnya rumah tangga petani gurem. Jika hal itu dibiarkan, sangat sulit untuk menurunkan angka kemiskinan di pedesaan dan

mengendalikan migrasi ke kota-kota besar, sehingga akan membebani dan memperburuk permasalahan di perkotaan. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk dilakukannya diversifikasi usaha ekonomi di pedesaan ke arah kegiatan non pertanian (*non-farm activities*) baik berupa industri yang mengolah produk pertanian maupun berupa jasa-jasa penunjang.

Industrialisasi pedesaan yang berbasis pertanian tidak hanya berpotensi mengalihkan surplus tenaga kerja di sektor pertanian primer yang kurang produktif, tetapi juga mempertahankan nilai tambah yang dihasilkan tetap berada di pedesaan. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, upaya diversifikasi lapangan pekerjaan ini secara simultan perlu diiringi dengan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dalam pembangunan pedesaan di tingkat lokal, dan penguatan keterkaitan kota dan desa serta sektor pertanian dengan industri dan jasa penunjangnya.

B. Faktor Pendorong Transformasi Sektor Pertanian ke Sektor Industri

Bagi petani di pedesaan yang bertumpu pada kegiatan agraris, sumber daya tanah merupakan sumber

pendapatan utama. Hal ini karena besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor produksi lainnya (Mubyarto, 1994). Namun, dalam kenyataannya, struktur penguasaan tanah menunjukkan adanya ketimpangan. Hal tersebut ditunjukkan oleh penurunan rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh petani. Jika pada tahun 1963 rata-rata penguasaan lahan mencapai 1,1 ha, rata-rata penguasaan lahan pada 2003 menurun menjadi 0,8 ha. Bahkan di Pulau Jawa, rata-rata penguasaan lahan oleh petani sampai dengan 2003 hanya mencapai 0,4 ha. Data rata-rata luas penguasaan lahan secara terperinci dapat di lihat pada Tabel 7.1

Tabel 7.1. Rata-Rata Penguasaan Lahan (ha) Rumah Tangga Pertanian di Indonesia Tahun 2007–2011

TAHUN	JAWA	LUAR JAWA	INDONESIA
2007	0,70	1,90	1,10
2008	0,60	1,50	1,00
2009	0,50	1,50	0,90
2010	0,50	1,20	0,80
2011	0,40	1,30	0,80

Sumber: Dirjen BPPHP (2008)

Kondisi lain di luar rata-rata penguasaan lahan rumah tangga pertanian yang semakin sempit juga ditunjang oleh permasalahan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. Akibatnya, lahan persawahan semakin

sempit, khususnya sawah pertanian padi. Beberapa kondisi tersebut membuat masyarakat pedesaan berkeinginan untuk beralih mata pencaharian ke sektor ekonomi lain di luar pertanian, seperti sektor industri rumah tangga, jasa, dan perdagangan. Namun, karena peluang bekerja dan berusaha di sektor nonpertanian sangat terbatas, maka tingkat pendapatan tetap rendah, sehingga terjadi perpindahan atau migrasi penduduk ke luar desa.

Faktor lain terkait dengan beralihnya mata pencaharian sektor industri pertanian ke sektor industri selain pertanian yang ikut memperparah kondisi pedesaan adalah adanya konversi penggunaan tanah dari lahan pertanian sawah ke penggunaan lahan nonpertanian. Lahan tersebut digunakan untuk perumahan, industri, dan sarana-prasarana. Sebagai gambaran, selama 1997–2007, lahan sawah dengan sistem irigasi di Pulau Jawa turun dari 1.824.000 ha menjadi 1.577.000, atau mengalami penurunan sebanyak 247.000 ha (BPS, 2008). Hal ini mengindikasikan semakin sempitnya lahan subur persawahan di pedesaan. Pentingnya usaha meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa didasarkan pada kenyataan bahwa peluang untuk mendapatkan pekerjaan di pedesaan sangat kecil dan sektor industri (perkotaan) sulit diharapkan untuk dapat menyerap tenaga kerja dari desa (Mubyarto dan Kartodirdjo, 1998).

Namun, seiring berjalannya waktu, faktor-faktor internal seperti jumlah penduduk yang meningkat dan persediaan tanah yang terbatas, selain faktor-faktor eksternal seperti perubahan-perubahan dalam kebijakan kolonial dan penguasa tradisional memengaruhi ciri khas kehidupan desa tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan dari pekerjaan-pekerjaan pertanian ke non-pertanian (Padmo dalam Linblad (2004). Arthur Lewis (1986) mengatakan bahwa jika pertanian beroperasi dalam skala kecil, tanah pertanian semakin lama semakin sempit dan kelebihan buruh tetap ada di pertanian. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian.

Pekerjaan di luar sektor pertanian yang dikenal sebagai sektor informal tersebut terbukti telah menjadi alternatif penting bagi masyarakat pedesaan di Jawa sejak dasawarsa 1910-an (Padmo, 2004). Studi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization—ILO) pada tahun 2000 menyebutkan alasan petani meninggalkan pekerjaannya adalah karena dua hal pokok, yaitu pendapatan yang terlalu rendah di bidang pertanian, dan tersedianya kesempatan kerja di luar pertanian, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang memiliki tanah cukup. Studi ILO tersebut ditemukan pula di hampir semua negara bahwa pendapatan dari bidang pertanian selalu lebih rendah dari sektor ekonomi lainnya (Karsidi, 2008).

Pekerjaan non pertanian adalah industri rumah tangga, industri jasa, dan *Petty Trade* (pedagang kecil-kecilan). Tampaknya, industri rumah tangga di antara keluarga-keluarga petani di Jawa pada studi tersebut tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, tetapi juga sebagai sumber pendapatan tambahan. Di Jawa Tengah misalnya, industri rumah tangga dapat menyediakan jumlah kebutuhan yang sangat banyak untuk dikirim ke daerah lain di Jawa atau pulau-pulau lain di Indonesia (Padmo dalam Linblad,2004).

Pada dasarnya, sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, sektor non pertanian di pedesaan harus dilihat secara esensial sebagai bagian dari sistem evolusi masyarakat pedesaan. Menurut Hugo dalam Padmo (2004), kegiatan yang biasa dilakukan oleh petani sangat dipengaruhi oleh tersedianya bahan baku dan kemampuan dasar proses produksi. Pada awalnya, sektor nonpertanian merupakan usaha sampingan, terutama bagi petani miskin untuk memperoleh tambahan pendapatan. Ini berarti bahwa industri pedesaan semula diusahakan sebagai pekerjaan sampingan dan sekadar untuk menambah pendapatan, tetapi dalam perkembangannya beberapa diantaranya menjadi usaha pokok keluarga. Masa industri perkebunan pada dasawarsa 1920-an merupakan saat penting bagi perkembangan industri rumah tangga

pedesaan (Padmo, 2004). R.Van Neil dalam Padmo (2004) mengatakan bahwa mata pencaharian pertanian yang diversifikasi ke arah non pertanian seperti usaha kerajinan, tekstil, logam, anyaman (*Plaiting*), dan keranjang (*Basketry*) telah muncul sebelum tahun 1880. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara usaha produksi pertanian dan munculnya produksi non pertanian sejak sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) ada di Indonesia pada masa penjajah Belanda.

Industrialisasi pedesaan bergerak tidak semata-mata karena motif ekonomi. Ia juga dibangun oleh hal lain yang kemudian kita kenal sebagai faktor sosial. Selain faktor kewirausahaan yang masih rendah, faktor lingkungan sektor pertanian itu sendiri mempengaruhi para petani dalam melakukan diversifikasi usaha. Faktor yang mendorong antara lain faktor ekonomi, seperti rendahnya pendapatan dalam memenuhi pengeluaran rumah tangga, faktor psikososio kultural seperti beban keluarga dan status perkawinan ikut memengaruhi keputusan petani dalam melakukan diversifikasi usaha di luar sektor pertanian. (Dutta, 2004; Berg dan Kumbi, 2006; Babatunde dan Qaim, 2007) menjelaskan beberapa faktor ekonomi seperti upah di sektor non pertanian yang rendah, jumlah tanggungan keluarga, dan tingkat pendidikan yang ikut mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja di luar sektor non pertanian (Sumanto, 2009). Faktor inovasi dan pengambilan risiko

seperti informasi, pendidikan, dan pengalaman ikut memberikan andil terhadap probabilitas petani untuk diversifikasi pada sektor non pertanian atau beralih ke sektor industri yang bersifat generatif.

Sebagian besar pemuda di pedesaan yang mengenyam pendidikan tidak tertarik lagi untuk bekerja di sektor pertanian sebagai buruh tani. Anak-anak petani memasuki pekerjaan dan mata pencaharian di sektor industri dan jasa. Sebagian pemuda di pedesaan bekerja sebagai buruh pabrik, ikut bekerja dengan orang lain di sektor industri, perdagangan, dan jasa karena lahan di sektor pertanian terbatas. Selain itu, mereka juga mengambil risiko untuk memulai usaha sendiri setelah memperoleh pengalaman usaha dari orang lain atau untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik (Hartoyo, 2000).

Kebutuhan akan pengalaman mengelola usaha semakin diperlukan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan. Menurut Hisrich & Brush (Staw, 2001), wirausaha yang memiliki usaha maju saat ini bukanlah usaha yang pertama kali dimiliki. Sebelumnya, wirausaha yang berpengalaman mengelola usaha mampu melihat lebih banyak jalan untuk membuka bisnis baru dibanding karyawan dengan jalur karier yang berbeda. Sebagian petani yang mempunyai usaha di sektor non pertanian meneruskan usaha orang tua yang berprofesi sebagai wirausaha di sektor non pertanian tersebut. Staw (2001)

merangkum penelitian tentang wirausaha yang orang tuanya juga merupakan wirausaha. Brockhaus (2002) mencatat empat studi yang menyatakan bahwa seorang wirausaha cenderung memiliki ayah yang juga wirausaha.

Sejarah telah mencatat bahwa industrialisasi di Indonesia pada akhirnya juga menggeser aktivitas ekonomi masyarakat yang semula bertumpu kepada sektor pertanian, tetapi kemudian bersandar kepada sektor industri. Kebijakan pemerintah yang terus mendorong untuk mengembangkan sektor industri (termasuk industri kecil) ini telah menyebabkan kesempatan kerja di sektor industri kecil semakin lama juga semakin terbuka. Namun, adanya kesadaran bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bergulat di sektor pertanian dengan sumber daya ekonomi yang melimpah pada sektor ini, maka sejak awal telah diamati bahwa industrialisasi yang dilaksanakan di Indonesia harus melibatkan sektor pertanian dalam prosesnya. Dengan kata lain, industrialisasi yang dijalankan tersebut harus bertumpu dan berkaitan dengan sektor pertanian, sehingga sektor industri yang sudah tumbuh pesat tidak mematikan sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakatnya (Yustika, 2000).

C. An Eclectic Theory of Entrepreneurship

1. Konsep Dasar An Eclectic Theory of Entrepreneurship

Peran kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas dalam teori ekonomi dan kewirausahaan. Namun, kerangka teori faktor-faktor yang memengaruhi keputusan personal dalam bekerja di sektor industri tertentu masih menjadi bahan diskusi dalam beberapa literatur (Bwisa, 2010; Verheul dkk., 2001; Carree dan Thurik, 1996). Teori ekonomi dan kewirausahaan menjelaskan bahwa *entrepreneurship* (kewirausahaan) merupakan faktor keempat dari fungsi produksi yang memengaruhi "*economic growth*", selain faktor *labour*, *increased capital accumulation*, dan teknologi (Gide dan Rist, 1915; Cantillon, 1755). Berkaitan dengan peran kewirausahaan tersebut, kaum *Physiocrats* dan Adam Smith menjelaskan semua perdagangan dan sirkulasi/distribusi barang dalam suatu negara dilakukan oleh para wirausaha (Gide dan Rist, 1915; Cantillon, 1755). Schumpeter (1934) dalam kajian teorinya tentang peran kewirausahaan ini menjelaskan bahwa wirausaha merupakan inovator yang membuat keseimbangan ekonomi baru dan menciptakan peluang usaha baru (*opportunity*). Kitzner (1979) menjelaskan bahwa pengambilalihan *disequilibrium* (ketidakseimbangan) di bidang ekonomi dibuat oleh para wirausaha karena peran wirausaha melalui proses inovasi

memperkenalkan produk, metode produksi, pasar, dan sumber pasokan baru, atau kombinasi industri yang mempengaruhi ekonomi keluar dari *equilibrium* (keseimbangan) sebelumnya (Schumpeter, 1934). Wirausaha juga yang memperbarui keseimbangan (Schumpeter, 1934) dan mengembalikannya pada keseimbangan baru (Kitzner, 1973).

Ditinjau dari konsep dasarnya, *entrepreneur* (wirausaha) tidak hanya berusaha—*to undertake* (menjalankan, melakukan), tetapi juga *to set about* (memulai), *to begin* (memulai), *to attempt* (mencoba, berusaha) (*The Concise Oxford French Dictionary*, 2011). Peran wirausaha berbeda dengan pemilik modal, manajer, dan profesional. Manajer dan para profesional mengawasi efisiensi proses serta bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha secara rutin. Wirausaha berperan dalam menciptakan peluang serta memanfaatkan peluang dengan sejumlah *return* dan risiko. Dibandingkan dengan pemilik modal, wirausaha tidak memerlukan modal sendiri. Dibandingkan dengan manajer dan profesional, wirausaha menyediakan peluang ekonomi dengan ide-ide, produk, dan cara-cara baru, sedangkan manajer dan profesional melakukan sesuatu menggunakan pengetahuan mereka untuk memfasilitasi transaksi ekonomi (Iyigun dan Owen, 1998).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi sudah menjadi bahan kajian sejak lama. Namun, kerangka teori pengembangan kewirausahaan yang berkaitan dengan masuk keluarnya wirausaha dari sektor industri ke sektor industri lainnya masih menjadi bahan diskusi. Marshall (1920) dan Walras (1954) menyatakan bahwa keputusan masuk dan keluar (*entry/exit*) wirausaha dalam sektor usaha menunjukkan gambaran tentang imbalan dan profil risiko bekerja. Teori permintaan dan penawaran produk atau jasa menjelaskan jika permintaan barang atau jasa lebih tinggi dibandingkan penawaran barang atau jasa, maka harga, peluang keuntungan (*return*), dan kesempatan bekerja akan lebih meningkat. Sebaliknya, jika penawaran lebih tinggi dibandingkan permintaan barang atau jasa, maka hal itu akan menurunkan harga, memberikan risiko kerugian, dan mendorong wirausaha untuk keluar dari usaha di sektor barang atau jasa tersebut. Teori Marshall (1920) dan Walras (1954) tersebut dikembangkan Verheul (2001) dengan pendekatan eklektisisme. Pendekatan eklektisisme pertama kali dikembangkan oleh Dunning (1981) sebagai teori keputusan seorang investor dalam berinvestasi. Analisis kajiannya memakai pendekatan interdisipliner seperti ilmu ekonomi dan psikologi dalam pengambilan keputusan.

Verheul (2001) mengembangkan teori eklektisisme keputusan wirausaha dengan memakai pendekatan ilmu ekonomi serta psikologi dalam pengambilan keputusan dan kewirausahaan. Verheul (2001) dalam "*an eclectic theory of entrepreneurship*" menjelaskan bahwa keputusan masuk dan keluar (*entry/exit*) wirausaha dalam sektor usaha menunjukkan gambaran tentang profil risiko dan imbalan suatu usaha (*risk-reward profil*). Individu dalam pekerjaannya akan dihadapkan pada sejumlah peluang/kesempatan (*chances/ opportunity*), tetapi diiringi dengan sejumlah risiko kegagalan (seperti dalam bentuk kerugian). Ditinjau dari sisi permintaan (*supply side*), keputusan masuknya wirausaha pada sektor industri tertentu membutuhkan faktor penarik (*pull factor*) dan faktor pendorong (*push factor*) (Verheul dkk, 2001).

Faktor penarik merupakan faktor lingkungan eksternal individu yang berupa kesempatan (*opportunity*), sedangkan faktor pendorong merupakan potensi dalam diri personal. Faktor penarik (*pull factor*) dan faktor pendorong (*push factor*) dalam pengembangan peran kewirausahaan juga belum *fit* dan analisisnya dapat berbeda apabila ditinjau dari sektor industri yang berbeda, sehingga menjadi celah untuk dianalisis dalam penelitian ini. Pengembangan teori keputusan personal petani pedesaan untuk bekerja di sektor industri atau sektor selain pertanian juga menarik untuk diteliti. Hal itu disebabkan

fungsi industri yang terkait dengan peran kewirausahaan dapat meningkatkan nilai tambah dalam pengolahan hasil-hasil pertanian yang akan menjadi pendorong bagi para petani untuk menangkap peluang usaha guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Pasar Wirausaha

Dalam mempelajari perkembangan konsep kewirausahaan, salah satu teori yang dapat dianalisis adalah "*an eclectic theory of entrepreneurship*" (Verheul, 2001). Teori ini memberikan penjelasan bahwa masuk dan keluarnya (*entry/exit*) wirausaha dalam menangkap peluang usaha merupakan gambaran tentang profil pendapatan sebagai imbalan dan risiko yang harus ditanggung dalam berwirausaha. Jika banyak wirausaha masuk ke sektor usaha tertentu yang akan memberi sinyal pasar yang baik, maka wirausaha yang sudah ada di dalamnya akan bertahan atau mereka yang ada di luar usaha ingin masuk ke sektor yang memberi sinyal pasar yang baik tersebut. Hal ini terjadi karena pendapatan lebih besar dibanding dengan risiko yang ditanggung. Namun sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dibanding risiko yang ditanggung, para wirausaha kemungkinan memilih keluar dari usaha terkait.

Pengembangan kewirausahaan di pedesaan membutuhkan faktor pendorong (*push*) dan faktor penarik (*pull*) dari seseorang yang berperan dalam keputusan

personal untuk berwirausaha atau memulai usaha baru (Vivarelli, 1991). Perbedaan konsep antara faktor pendorong (*push factor*) dengan faktor penarik (*pull factor*) ini sering kali dikenal dengan perbedaan antara perspektif pada sisi permintaan—perspektif makro yaitu pasar barang; menyangkut daya dukung pasar (Bosma dkk., 2000)—dengan perspektif pada sisi penawaran—perspektif mikro, yaitu pasar tenaga kerja.

Dalam perspektif *demand side* (sisi permintaan) atau yang lebih menekankan pada perspektif makro (pasar barang; menyangkut daya dukung pasar), kewirausahaan menghasilkan peluang (*opportunity*), yaitu peluang permintaan pasar yang berperan sebagai daya tarik individu untuk berwirausaha di sektor tertentu. Semakin banyak peluang permintaan ini, semakin besar ruang yang diciptakan (potensi) untuk kewirausahaan pada sektor tersebut. Pada aspek *demand* (makro) ini, kewirausahaan dipengaruhi oleh struktur industri (sektor industri, *outsourcing*, *networking*). Peluang usaha dalam perspektif makro ini dipengaruhi oleh perkembangan pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Perspektif makro mencoba untuk mengukur dan memusatkan studi atas faktor lingkungan, seperti variabel teknologi, budaya, ekonomi (Noorderhavendkk., 1999; Carree dkk., 2001), dan regulasi pemerintah (OECD, 1998).

Berdasarkan *demand side* (sisi permintaan) pasar kewirausahaan, permintaan terhadap wirausaha di wilayah tertentu ditunjukkan oleh kesempatan yang tersedia untuk berwirausaha. Permintaan dapat dilihat dari perspektif konsumen dan perspektif dunia usaha. Dari perspektif konsumen, keragaman permintaan konsumen mendorong kesempatan wirausaha. Semakin tinggi keragaman permintaan, semakin besar ruang terbuka bagi wirausaha dalam menangkap peluang usaha. Dari perspektif dunia usaha, struktur industri (*outsourcing* dan *networking*) menjadi pendorong berkembangnya wirausaha. Contohnya, perkembangan teknologi digital memungkinkan wirausaha untuk membuka usaha di mana saja karena koordinasi manajemen menjadi sangat mudah. Ada juga orang yang tertarik memilih memindahkan kegiatana operasional usahanya ke wilayah tertentu karena peraturan pemerintahnya mendukung.

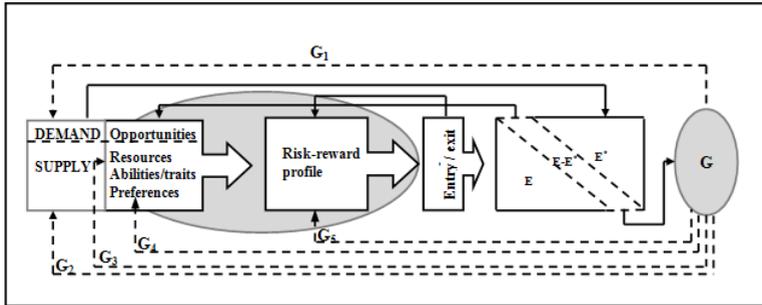
Dalam perspektif *supply side* (sisi penawaran) yang lebih menekankan pada perspektif mikro (pasar tenaga kerja) ini, kewirausahaan lebih menekankan pada kajian faktor pendorong keputusan individu dalam berwirausaha, yang meliputi profil personal petani, faktor latar belakang aktivitas pertanian, profil ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, dan sebagainya. Pendekatan studi empiris pada level mikro ini dilakukan oleh Blanchflower (1998), Wit dan Winden (1991), Bosma dkk. (2000), Janvry dkk.

(2001), Berg dan Kumbi (2006), Babatunde dan Qaim (2007), serta Dutta (2004).

Berdasarkan *supply side* (sisi penawaran), kewirausahaan ditentukan oleh kondisi mikro sosial ekonomi, seperti profil personal, sikap masyarakat setempat terhadap wirausaha, lingkungan budaya, dan lingkungan kelembagaan yang ada di wilayah tersebut. Wilayah dengan penduduk yang mempunyai tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) kondisi alam yang tinggi mungkin tidak menarik sebagai tempat berwirausaha karena daya beli masyarakatnya rendah. Begitu pula jika di tempat tertentu sebagian masyarakatnya memandang rendah terhadap profesi wirausaha, maka ada kecenderungan kewirausahaan tidak berkembang di wilayah tersebut, sehingga yang dominan adalah wirausaha pendatang.

Hubungan kewirausahaan dan peran pemerintah dapat dijelaskan melalui Gambar 7.1 (Verheul 2001).

Gambar 7.1. Kerangka Kerja untuk Menentukan Entrepreneurship



Sumber : Verheul (2001).

Pasar kewirausahaan dapat mencapai *equilibrium* (E) atau *disequilibrium* (EE*). Pasar kewirausahaan dapat mencapai *equilibrium* jika kebutuhan wirausaha di wilayah tertentu dapat dipenuhi dengan penawaran wirausaha lokal. Namun, jika penawaran wirausaha lokal lebih besar dari kebutuhan, atau kebutuhan kewirausahaan tidak bisa dipenuhi dengan pasokan lokal, maka terjadi *entrepreneurship disequilibrium*. Area G adalah upaya pemerintah mengoreksi *disequilibrium* (E-E*) melalui berbagai macam kebijakan dan kelembagaan. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikan *equilibrium*. Garis G₁ adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya usaha baru di wilayah tertentu. Garis G₂ adalah kebijakan pemerintah untuk merangsang tumbuhnya wirausaha di wilayah tertentu pada masa yang akan datang

melalui pelatihan dan pendidikan untuk calon wirausaha atau dengan kebijakan migrasi. Garis G₃ adalah kebijakan pemerintah untuk mengembangkan wirausaha lokal yang ada melalui penyediaan informasi pasar, bimbingan dan penyuluhan, penyediaan modal, serta bantuan modal kepada usaha kecil. Garis G₄ adalah kebijakan pemerintah membentuk wirausaha lokal masa depan dengan proses penyadaran melalui pendidikan dan media massa. Kebijakan ini ditempuh apabila ada indikasi penolakan terhadap profesi wirausaha secara kultural. Garis G₅ adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi kewirausahaan melalui kebijakan makro seperti kebijakan fiskal, subsidi, aturan perburuhan, dan aturan tutup usaha. Wirausaha selalu berperan sebagai petualang yang membangun usaha baru (Gartner, 1988).

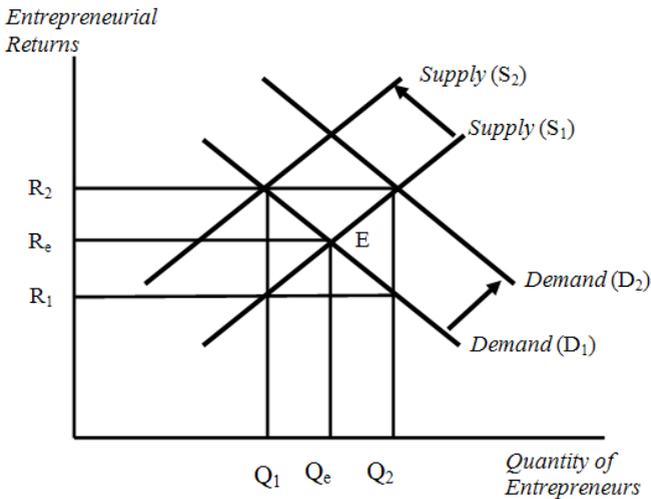
Wirausaha menangkap peluang dan membangun usaha. Kemudian, ia berada di luar usaha, sehingga tidak selamanya wirausaha menjadi pengelola usaha tersebut. Peran wirausaha dalam hal ini terbatas pada pembentukan usaha baru. Peluang usaha yang sudah ditangkap tersebut terus berjalan (tumbuh, dewasa, dan menurun), tetapi wirausaha selanjutnya menjalani peran yang lain. Wirausaha kemudian berpindah peran dari seorang inovator menjadi pemilik usaha pada sektor industri kecil atau manajer senior pada usaha tersebut apabila usaha yang dibangun tersebut berkembang. Analisis

pertumbuhan kewirausahaan dapat diuraikan melalui keseimbangan pasar kewirausahaan.

Gambar 7.2 menggambarkan kondisi keseimbangan dinamis antara permintaan dan penawaran wirausaha. Q_1 adalah jumlah sumber daya yang dibutuhkan wirausaha untuk mencapai tingkat keuntungan (*return*) sebesar (R_1). Perubahan variabel eksogen (kesempatan, deregulasi, teknologi, demografi, dan sebagainya) menciptakan permintaan yang lebih tinggi terhadap wirausaha. Permintaan (*demand*) wirausaha bergerak dari D_1 ke D_2 . Permintaan lebih tinggi dari penawaran (*supply*), sehingga memberikan daya tarik untuk menjadi wirausaha. Pada tingkat yang lebih tinggi, individu memilih untuk menjadi wirausaha, meningkatkan *supply* wirausaha, dan sumber daya untuk aktivitas kewirausahaan.

Supply wirausaha bergerak dari S_1 ke S_2 . Kompetisi ini meningkatkan modal untuk menjadi wirausaha, mengurangi keuntungan wirausaha dalam jangka pendek, mendorong individu untuk menjauhi keputusan pilihan untuk menjadi wirausaha, dan mengurangi tekanan terhadap kelebihan persediaan wirausaha. Dalam jangka panjang, teknologi mendorong ke arah perubahan yang lebih dinamis terhadap daya dukung ekonomi, sehingga menyerap kelebihan persediaan wirausaha tanpa harus melakukan penyesuaian agar tidak terjadi penurunan (*return*).

Gambar 7.2. Kurva Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar Wirausaha(Sumber: Rovk dan Phan (2010))



Dengan logika yang sama, seseorang dapat menjelaskan proses ketika pasar kewirausahaan memberikan keseimbangan atas permintaan dan penawaran wirausaha. Dengan asumsi bahwa jika terjadi penurunan tingkat keuntungan atau menjadi lebih rendah (R_1), maka wirausaha mempunyai keputusan secara personal untuk menjauhi pilihan menjadi wirausaha. Akibatnya, terjadi keseimbangan baru karena terdapat pengurangan perbandingan jumlah wirausaha sebagai sumber daya yang tersedia untuk menjalankan perannya sebagai wirausaha. Dalam kondisi ini, sumber daya yang tersedia seperti investor pada akhirnya akan bersaing

untuk meningkatkan pasar kewirausahaan dengan mendorong jumlah wirausaha pada periode berikutnya, sehingga terjadi keseimbangan baru.

Ditinjau dari aspek *demand* (pasar barang dan jasa), faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk berwirausaha di sektor industri selain sektor pertanian adalah adanya kesempatan berupa permintaan wirausaha di sektor industri, sehingga pasar kewirausahaan mencapai *equilibrium* (E) atau *disequilibrium* (EE*). *Equilibrium* di sektor industri tercapai jika kebutuhan wirausaha di sektor industri dapat dipenuhi, tetapi jika pasokan wirausaha di sektor industri lebih besar dari kebutuhan atau kebutuhan wirausaha tidak bisa dipenuhi, maka terjadi *disequilibrium entrepreneurship* (peningkatan permintaan barang dan jasa dari sektor industri).

Permintaan wirausaha untuk produksi barang dan jasa di sektor industri memberikan peluang wirausaha atau tenaga kerja sektor lain seperti dari sektor pertanian untuk masuk ke dalamnya. Masuknya petani dengan berwirausaha pada sektor industri selain sektor pertanian memberikan gambaran tentang profil pendapatan sebagai imbalan dan risiko yang harus ditanggung dari sektor pertanian dan industri, serta dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa pada sektor industri (faktor lingkungan). Pada *supply side* (sisi penawaran), keterlibatan petani dalam sektor wirausaha di sektor industri tergantung pada

kemampuan individu (faktor personal) yang terdiri dari profil personal petani (umur, pendidikan, status perkawinan, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga), faktor inovasi dan risiko petani, serta faktor lingkungan pertanian yang meliputi faktor aktivitas pertanian, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya petani.

3. Teori Keputusan Wirausaha

Keputusan wirausaha pada sektor industri dapat dianalisis dalam lingkup makro dan mikro. Dalam lingkup makro, keputusan wirausaha dipengaruhi oleh sejumlah kesempatan atau peluang untuk mendapatkan keuntungan (profit). Komponen makro yang dimaksud adalah komponen lingkungan. Dalam lingkup mikro, keputusan wirausaha dalam suatu sektor industri dipengaruhi oleh peluang (*opportunity*) dan kendala (*constraints*). Komponen mikro yang dimaksud adalah faktor individu (personal). Kedua hal tersebut secara tidak langsung memengaruhi keseimbangan pasar (permintaan dan penawaran) barang dan jasa.

a. Keputusan Entry Wirausaha: Pendekatan Makro

Dalam lingkup makro, keputusan masuknya wirausaha (*entry*) dalam memproduksi barang dan jasa memainkan fungsi “transisi menuju keseimbangan (*equilibrium*)”. Keputusan masuknya wirausaha (*entry*) dalam memproduksi barang dan jasa dipengaruhi oleh kesempatan serta upaya untuk menciptakan kesempatan.

Ada dua teori yang dapat menjelaskan kondisi tersebut, yaitu teori yang dikemukakan oleh Schumpeter (1934) dan Kitzner (1979).

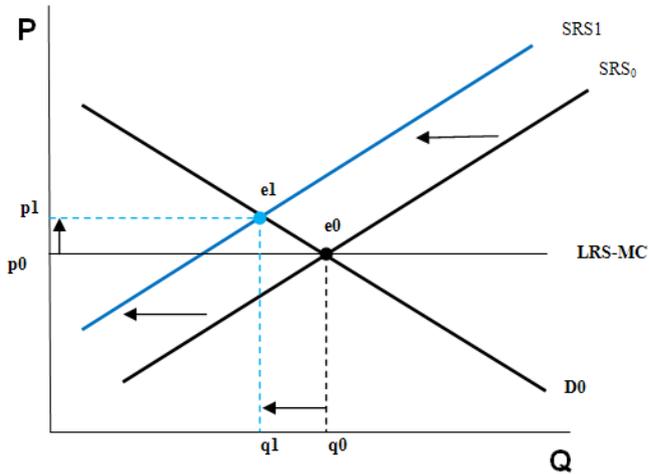
Teori pertama (Schumpeter, 1934) menjelaskan bahwa wirausaha mengganggu *equilibrium* dengan menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi melalui inovasi. Melalui pendekatan teori ini, wirausaha masuk ke sektor industri untuk memproduksi barang dan jasa karena kemampuannya dalam menciptakan inovasi untuk membuka peluang-peluang baru dan menghasilkan pertumbuhan. Pasar dengan kondisi seimbang tidak menarik bagi wirausaha, sehingga memerlukan kegiatan inovasi untuk meningkatkan permintaan. Wirausaha melihat masalah sebagai kesempatan, melakukan berbagai perubahan, dan bila perlu mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut.

Schumpeter (1934) menuliskan bahwa *entrepreneur* adalah "*an active agent of economic progress*". Teori tentang peran dinamis dari para *entrepreneur* disebut sebagai "*the process of creative destruction*" (Lipsey dkk., 1990; Ekelund dan Hebert, 1990). Menurut Schumpeter (1934), proses ini terjadi karena "*monopoly profit*" memberikan *insentif* kepada "*risk taker*" dalam menginvestasikan uangnya melalui *inventions and innovations*. Proses pergantian suatu monopoli dengan monopoli lainnya dilakukan melalui "... *invention of new product or new production techniques called as*

the process of creative destruction" (Ekelund dan Hebert, 1990). Schumpeter (1934) melihat para wirausaha sebagai kekuatan yang selalu memperbarui pasar (*disequilibrium force*) yang mendorong pembangunan, sehingga disebut sebagai "*creative destruction*" karena usaha baru akan memperbaharui usaha yang sudah tua.

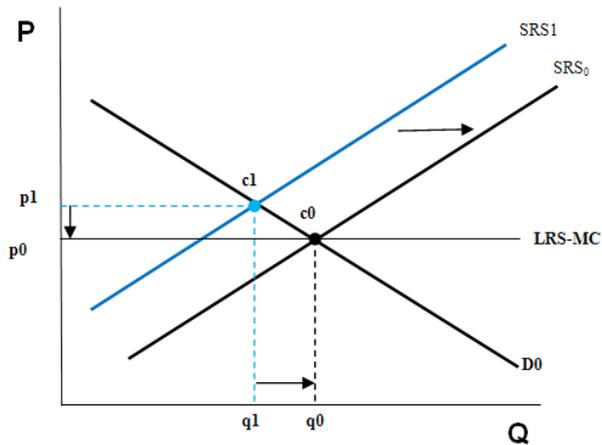
Teori kedua menjelaskan bahwa keputusan masuknya wirausaha dalam memproduksi barang dan jasa dipengaruhi oleh peluang-peluang ekonomi (Kitzner, 1979). Wirausaha akan masuk ke sektor industri dan membuat lebih banyak produk jika harganya dapat melebihi biaya marginal produk. Oleh karena itu, pasokan jangka panjang menjadi elastis sempurna pada tingkat harga yang sama dengan biaya marginal. Kitzner (1979) melihat bahwa para wirausaha mempunyai peran penting, yaitu menjadi kekuatan untuk memperbaiki pasar agar tetap seimbang (*equilibrium*) melalui proses penyesuaian harga dalam jangka panjang.

Gambar 7.3a Ketidakseimbangan Jangka Pendek Pasar Barang dan Jasa



Sumber: Elan (2009: 24).

Gambar 7.3. b Penyesuaian Jangka Panjang Pasar Barang dan Jasa



Sumber: Elan (2009).

Jumlah penawaran yang berkurang dan penawaran barang atau jasa dalam jangka pendek membuat kurva bergeser ke kiri dari SRS_0 untuk SRS_1 (Gambar 7.3a). Pergeseran dalam fungsi penawaran ini membuat keseimbangan awal e_0 bergeser ke keseimbangan baru e_1 , yaitu harga menjadi lebih tinggi (p_1), dan kuantitas menjadi lebih rendah (q_1). Pada harga yang lebih tinggi, ada insentif bagi wirausaha untuk memproduksi karena harga pasar p_1 melebihi biaya marginal (MC). Oleh karena itu, wirausaha membuat produk lebih banyak dalam jangka panjang. Hal ini membuat penawaran kembali meningkat (bergeser ke kanan) secara bertahap kembali ke SRS_0 (Gambar 7.3b) dan kembali ke kondisi keseimbangan awal (e_0). Kunci untuk penyesuaian LR adalah kenaikan harga, sehingga memberi kesempatan (keuntungan) bagi wirausaha baru dan membawa peningkatan penawaran.

b. Keputusan *Entry*Wirausaha: Pendekatan Sisi Permintaan (Perspektif Mikro)

Dalam lingkup mikro, keputusan personal wirausaha untuk masuk ke sektor industri tertentu dipengaruhi oleh *risk-reward profil* (Verheul dkk., 2001). Marshall (1890) dan Walras (1954) yang hasil tulisannya dikembangkan dan dianalisis oleh Verheul dkk. (2001) menyatakan bahwa "*profit and interest*" merupakan "*return to entrepreneurs and capital*", sedangkan Kahneman dan Tversky (1991) menghubungkan keputusan personal dengan teori

ekspektasi (*return* dan risiko). Dalam tinjauan keputusan personal untuk berwirausaha atau memulai usaha baru, ekspektasi sering diukur dengan keberhasilan finansial seperti pengembalian modal, akumulasi modal, peningkatan pasar (*financial expectations, especially of success*), maupun keberhasilan non finansial seperti kebebasan, status sosial, dan aktualisasi diri. Keputusan personal dalam berwirausaha merupakan kesempatan/peluang (*chances/opportunity*) atas keberhasilan. Hal tersebut bahkan mengarah kepada peluang kegagalan (risiko), seperti dalam bentuk kerugian. Keputusan personal yang dibuat dalam situasi ketidakpastian dan kompleksitas akan berdampak pada alternatif pilihan-pilihan maupun pada keputusan lainnya. Pada pilihan dengan banyak alternatif, masing-masing keputusan tersebut mempunyai konsekuensi. Berkaitan dengan konsekuensi tersebut, "*homo economicus*" akan mengidentifikasi semua alternatif pilihan yang mungkin terjadi, mengevaluasi, kemudian mengintegrasikan dengan keputusan lainnya, kemudian menetapkan keputusan yang terbaik.

Analisis keputusan personal dapat juga dilakukan dengan pendekatan teori psikologis. Teori ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai kemampuan terbatas untuk memecahkan permasalahan (Kahneman dan Tversky, 1991). Keterbatasan kemampuan manusia tersebut bisa

dalam bentuk kapasitas pengolahan informasi yang berkaitan dengan keterbatasan memori aktif manusia untuk mengakses serta menjalankan berbagai macam tugas secara serempak. Oleh karena itu, permasalahan dalam keputusan personal yang kompleks seperti ini dapat dianalisis melalui teori psikologis dengan pendekatan kemampuan kognitif manusia karena teori ekonomi tidak dapat menganalisis kajian-kajian terkait dengan keputusan personal, khususnya tentang keterbatasan kemampuan manusia tersebut.

Berdasarkan kedua teori tersebut, logika berfikirnya adalah bahwa ketika mengatasi atau mengelola permasalahan, manusia pada umumnya hanya bersandar pada kemampuannya yang terbatas, sehingga sering kali gagal mengatasi masalah dengan keputusan yang didasarkan pada logika berfikir. Berkaitan dengan alternatif pilihan atas keuntungan dan risiko, manusia dalam memutuskan persoalan akan memilih alternatif dengan cara menghilangkan pilihan yang tidak memiliki nilai tertentu. Manusia akan merumuskan dan mengintegrasikan keputusan yang diambil dengan cara-cara yang berbeda. Seorang "*homo-economicus*" memilih untuk mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan memilih alternatif keputusan. Namun, kelompok manusia yang lain dapat melakukannya dengan cara mengintegrasikan keputusan secara sederhana. Mereka mempertimbangkan

permasalahan keputusan satu per satu dan mengadopsi alternatif kemungkinan-kemungkinan pilihan tersebut ke dalam kerangka yang lebih luas (Kahneman dan Tversky, 1991).

Berkaitan dengan keputusan personal ini, "*an eclectic theory of entrepreneurship*" (Verheul, 2001) tentang masuk dan keluarnya (*entry/exit*) seorang wirausaha pada suatu usaha dapat menjelaskan gambaran tentang profil pendapatan sebagai imbalan dan risiko yang harus ditanggung dalam keputusan atas pilihan berwirausaha. Jika banyak wirausaha yang mengambil keputusan untuk memilih masuk ke sektor usaha tertentu dan kenyataannya memberi sinyal pasar yang baik kepadanya, maka wirausaha yang sudah ada di dalam akan bertahan atau wirausaha yang ada di luar usaha ingin masuk pada sektor yang memberi sinyal pasar yang baik tersebut. Hal ini karena pendapatan lebih besar dibandingkan risiko yang ditanggung. Namun sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dibandingkan risiko yang ditanggung maka para wirausaha akan memutuskan untuk memilih keluar dari usaha yang bersangkutan.

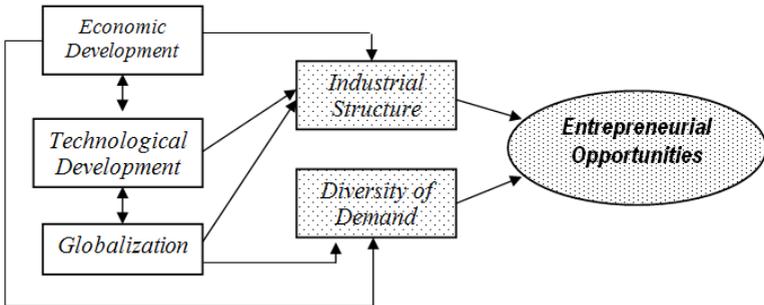
4. Aspek Permintaan (*Demand Side*)

Ditinjau dari sisi permintaan, kesempatan diciptakan oleh karakteristik pasar. Peluang untuk menghasilkan produk baru muncul ketika konsumen mempunyai keinginan dan kebutuhan yang beragam. Kebutuhan

konsumen akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dan perkembangan teknologi. Peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan permintaan atas barang dan jasa. Hal tersebut juga akan mendorong peningkatan ketidakpastian karena adanya permintaan yang lebih beragam. Perkembangan teknologi memberikan peluang perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Oleh karena itu, hal tersebut akan menciptakan peluang permintaan baru yang diharapkan dapat dibangun dengan berbagai kemungkinan untuk menghasilkan barang dan jasa secara lebih efisien, menerapkan suatu proses inovasi, atau mencoba produksi baru melalui penerapan inovasi produk.

Sisi permintaan kewirausahaan juga ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor yang meliputi perkembangan ekonomi, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Faktor ini mempengaruhi struktur industri dan keanekaragaman permintaan pasar yang mendorong ke arah peluang berwirausaha. Gambar 7.5 menunjukkan bahwa permintaan wirausaha ditentukan oleh struktur industri dan *diversity of demand*. Struktur industri dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Pembangunan ekonomi dan globalisasi mempengaruhi *diversifikasi demand*.

Gambar 7.5. Faktor Penarik Kewirausahaan dari Sisi Permintaan



Sumber: Verheul dkk. (2001)

a. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi sering dianggap sebagai daya penggerak atas permintaan wirausaha (Wennekers dan Thurik, 1999) yang juga diharapkan dapat berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran inovasi (OECD, 1996). Faktor wirausaha dan perkembangan teknologi diasumsikan saling berhubungan satu sama lain dengan faktor permintaan. Aplikasi teknologi informasi dengan biaya yang lebih murah dan lebih fleksibel penggunaannya merupakan salah satu perkembangan teknologi yang diterapkan pada proses produksi industri kecil (Piore dan Sabel, 1984; Carlsson, 1989; Loveman dan Sengenberger, 1991). Perkembangan teknologi informasi menciptakan akses yang lebih baik untuk berkomunikasi dan mengembangkan informasi sehingga memudahkan

industri kecil dalam menangkap peluang usaha, meminimalisir risiko, serta meningkatkan inovasi dan daya saing.

Informasi dapat ditransfer melalui surel, mesin faks, dan *cyberspace* (Audretsch dan Thurik, 2000). Kemajuan teknologi mempengaruhi relokasi sumber daya produksi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan wirausaha baru (Casson, 1995). Perkembangan teknologi mendorong daur hidup produk lebih pendek. Sebagai konsekuensinya, keuntungan usaha akan cepat diperoleh. Perkembangan teknologi secara tidak langsung dapat berdampak pada tingkat kewirausahaan melalui pembangunan ekonomi dan globalisasi. Perkembangan teknologi, seperti teknologi komunikasi, informasi, dan internet mengakibatkan komunikasi dan pertukaran informasi tanpa batas. Perkembangan teknologi juga mendorong kearah kemakmuran yang lebih tinggi. Hal tersebut memberikan peluang yang dapat diserap oleh industri kecil untuk menyesuaikan peluang usahanya, sehingga berkembang menjadi industri menengah, bahkan berhasil menjadi industri skala besar.

b. Globalisasi

Globalisasi tidak secara langsung berdampak pada kewirausahaan, baik itu dampak positif maupun negatif. Globalisasi memberi kemudahan penjualan maupun penawaran wirausaha secara terintegrasi antar negara. Globalisasi menghilangkan penghalang perdagangan,

menciptakan peluang baru untuk wirausaha, baik itu industri kecil, menengah, maupun skala besar, sehingga dapat meningkatkan kompetisi dalam pasar internasional yang dapat berdampak negatif pada bisnis. Pada sisi lain, risiko variabilitas penjualan yang disebabkan oleh meningkatnya kompetisi internasional dapat diserap dengan lebih baik oleh wirausaha industri kecil yang mengadopsi teknologi produksi untuk penyesuaian secara cepat atas perubahan permintaan pasar (Carree dan Thurik, 1996).

Globalisasi menciptakan peluang untuk industri kecil dengan ketentuan bahwa wirausaha menggunakan teknologi baru dalam proses produksinya, sedangkan pengembangan teknologi informasi mempengaruhi globalisasi (Audretsch dan Thurik, 2000). Peningkatan kompetisi internasional dan peningkatan pengaruh antar budaya telah membuat wirausaha sadar akan keberadaan lingkungan budaya dan karakteristik personal, sehingga berdampak terhadap jenis produk dan jasa yang mereka tawarkan. Penawaran produk ke manca negara membuat para wirausaha sadar akan ketersediaan barang konsumsi di seluruh dunia dan juga telah menciptakan permintaan 'global' baru dan permintaan konsumen yang lebih berbeda. Hal ini menuntut para wirausaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan pilihan atas kebutuhan produk dan jasa bagi pasar dunia. Dengan kemampuan inovatifnya, para wirausaha dihadapkan pada peluang

usaha yang lebih luas, sehingga peluang untuk wirausaha barupun dapat terus diciptakan (Wennekers, 1997).

c. Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan kewirausahaan. Berdasarkan hasil kajian di bidang ekonomi sejak tahun 1970-an, pendapatan perkapita memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan kewirausahaan di beberapa negara maju (Storey, 1999; Carree, Van Stel, Thurik dan Wennekers, 2001). Argumentasi yang dikemukakan oleh pendukung dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan kewirausahaan (Carree, Van Stel, Thurik dan Wennekers, 2001) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi baru akan diikuti oleh munculnya industri baru dan industri kecil yang dapat menangkap peluang ini apabila mereka memiliki kemampuan inovatif (Acs dan Audretsch, 1987).

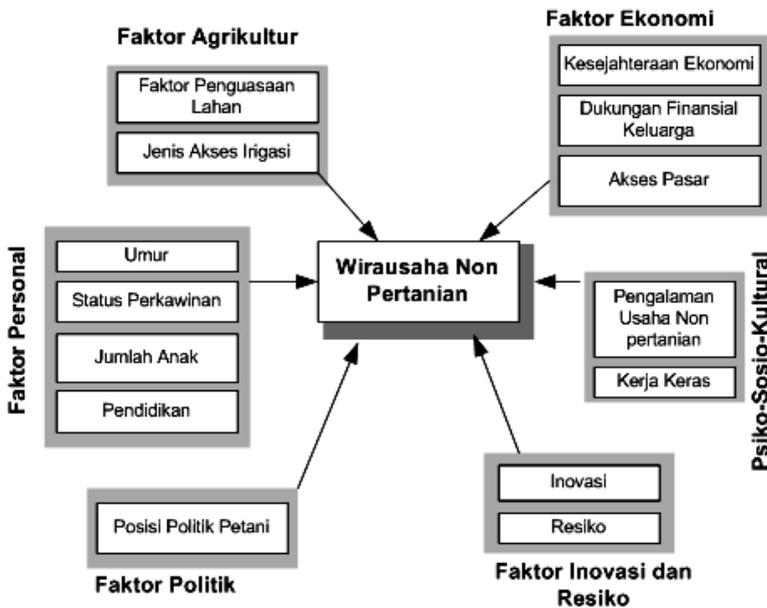
Beberapa pendukung yang mempunyai argumentasi pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap kewirausahaan (Carree, Van Stel, Thurik dan Wennekers, 2001) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dapat meningkatkan tingkat upah serta sistem jaminan sosial masyarakat. Peningkatan upah riil dapat mengakibatkan menurunnya peluang orang untuk menjadi wirausaha dan alternatif pilihan bekerja untuk orang lain jadi lebih menarik (EIM/ENSR, 1996). Oleh karena itu, akan lebih banyak

wirausaha meninggalkan peluang usaha yang sudah ditekuninya selama ini ketika gaji mulai meningkat melalui pembangunan bidang ekonomi (Iyigun dan Owen, 1988).

D. Alasan Partisipasi Rumah Tangga Pertanian dalam Aktivitas Industri

Alasan partisipasi rumah tangga petani dalam aktivitas industri dapat dijelaskan melalui gambar berikut.

Gambar 7.6. Indikator Partisipasi Rumah Tangga Pertanian dalam Aktivitas Industri



1. Faktor Personal

Konsep pengembangan kewirausahaan di pedesaan memiliki cakupan arti yang luas. Kewirausahaan sebagai salah satu faktor produksi memberikan definisi yang meliputi penyelesaian kombinasi sumber daya produksi baru (Schumpeter, 1934), kemampuan wirausaha untuk mengisi inefisiensi pasar melalui kegiatan proses produksi *input* (Leibenstein, 1968), mengelola ketidakpastian (Knight, 1921), dan kemampuan untuk berhubungan dengan *disequilibrium* (Shultz, 1975). Secara singkat, kewirausahaan merupakan fungsi yang melibatkan peluang usaha yang ada di pasar.

Dalam meningkatkan fungsinya sebagai pengelola faktor produksi, kewirausahaan membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Oleh karena itu, kewirausahaan juga dapat berperan dalam pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan atas peluang dan risiko. Termasuk dalam penelitian ini adalah peluang dan risiko untuk diversifikasi sebagai wirausaha di sektor non pertanian dari sektor pertanian.

Faktor lingkungan sering memberikan pengaruh terhadap keputusan petani. Rendahnya pendapatan dalam memenuhi pengeluaran rumah tangga, beban keluarga, dan status perkawinan (Dutta, 2004; Berg dan Kumbi 2006; Babatunde dan Qaim, 2007) mempengaruhi keputusan

petani untuk diversifikasi usaha sebagai wirausaha dalam menambah pendapatan, serta memungkinkan untuk meninggalkan sektor pertanian dan beralih bekerja dalam sektor non pertanian.

2. Faktor Ekonomi

Menurut Meier (1995), transformasi struktural dari ekonomi agraris pedesaan berpendapatan rendah menuju ekonomi industri perkotaan dengan pendapatan perkapita lebih tinggi melibatkan fenomena industrialisasi dan pembangunan pertanian. Lebih lanjut disebutkan bahwa pertanian harus dipandang bukan sekadar sumber surplus untuk mendukung industrialisasi, tetapi juga sebagai sumber dinamis pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan distribusi pendapatan yang lebih baik. Selain itu, kemajuan pertanian merupakan hal yang penting untuk menyediakan pangan bagi tumbuhnya tenaga kerja non pertanian, bahan baku untuk produksi sektor industri, tabungan dan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan sektor ekonomi lainnya, untuk mendapatkan lebih banyak devisa (atau menghemat devisa jika produk primer diimpor), dan memberikan pertumbuhan pasar bagi industri domestik. Hubungan inter sektoral antara pertanian dan industri akan menentukan transformasi struktural pada perekonomian negara berkembang.

Sektor industri diyakini dapat dijadikan sebagai sektor yang mengungguli (*leading sector*) sektor-sektor lainnya dalam suatu perekonomian. Hal ini karena produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri memiliki dasar tukar (*term of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan, serta mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) yang besar dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh sektor lainnya. Sektor industri mempunyai variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya. Selain itu, sektor industri juga memberikan margin keuntungan yang lebih menarik untuk para pelaku bisnis, serta proses produksi dan penanganan produknya dapat lebih dikendalikan oleh manusia dengan tidak terlalu bergantung pada alam (musim atau keadaan cuaca). Karena kelebihan-kelebihan sektor industri inilah, maka industrialisasi dianggap sebagai “obat mujarab” (*panacea*) untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.

Salah satu faktor yang memengaruhi petani untuk meninggalkan pekerjaan pertaniannya adalah keinginan untuk mencari nafkah atau pendapatan yang lebih baik. Masyarakat lebih menyukai bekerja di sektor nonpertanian daripada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan upah yang diperoleh di sektor nonpertanian lebih besar daripada bekerja di sektor pertanian sebagai petani atau buruh tani.

Penelitian Dutta (2004), Janvry dkk. (2005), Berg dan Kumbi (2006), Babatunde dan Qaim (2007) menemukan hasil yang sama bahwa rendahnya tingkat pendapatan ketika bekerja di sektor pertanian merupakan faktor yang memengaruhi seseorang untuk meninggalkan sektor pertanian dan beralih bekerja di sektor non pertanian. Sumanto (2009) menemukan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki korelasi negatif terhadap probabilitas ibu rumah tangga untuk bekerja di sektor nonpertanian. Hasil penelitian Hartoyo dkk. (1999), Ratina (2002), dan Ratnaningtyas (2003) juga mendukung hasil riset lainnya bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap curahan waktu kerja rumah tangga petani pada kegiatan di dalam dan di luar usaha tani padi sawah.

Dalam jangka panjang (*long run*), meningkatnya upah riil dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja pedesaan di pasar kerja. Hal ini merupakan konsekuensi logis, yakni tenaga kerja memperoleh kelebihan karena memiliki *skill* dengan pendidikan yang pernah diikuti. Tingkat upah yang tinggi menimbulkan efek pendapatan (*income effect*) dan efek substitusi (*substitution effect*). Efek pendapatan akan mengurangi jam kerja, sedangkan efek substitusi terhubung dengan kegiatan produksi dan konsumsi dalam rumah tangga yang cenderung akan menaikkan kegiatan tersebut. Barang akan disubstitusikan berdasarkan lamanya proses produksi komoditas dan *good-intensive commodity*

akan disubstitusikan untuk *time-intensive good* dalam rumah tangga yang memadukan komoditas (Nicholson, 2000).

Kedua penyesuaian (*adjustment*) ini akan menyebabkan lamanya tenaga kerja di kegiatan rumah tangga, sehingga dominasi mereka dapat mencurahkan waktu yang lebih banyak untuk pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, efek substitusi didominasi oleh efek pendapatan, sehingga partisipasi meningkat. Efek pendapatan wanita yang telah berkeluarga menjadi kecil karena jumlahnya akan bervariasi dengan jumlah waktu mereka. Secara ekstrem, pendapatan pada tingkat upah yang tinggi tidak akan ada artinya bagi wirausaha yang sudah berkeluarga yang tidak berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi otomatis akan menaikkan pendapatan jika waktunya hanya dipakai untuk bekerja di pasar tenaga kerja.

Peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat dihasilkan juga oleh perubahan mendasar dalam pilihan kemauan untuk bekerja di pasar tenaga kerja (Todaro & Smith, 2003). Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang semakin baik. Adanya pergeseran ini dapat berdampak terhadap perubahan mata pencaharian tenaga kerja partisipasi di pasar kerja. Undang-undang diskriminasi juga membuat pekerja pada pasar kerja lebih atraktif dibandingkan dengan pekerja yang bekerja di rumah. Tingkat pendidikan yang lebih

tinggi akan lebih memungkinkan para tenaga kerja untuk mendapatkan gaji atau upah yang lebih baik.

3. Faktor Agrikultural

Adapun faktor pertanian yang memengaruhi petani di pedesaan meninggalkan pekerjaan pertanian yaitu lahan pertanian yang semakin menyempit, desakan kekuatan pemilik modal terhadap petani kecil, ketidakmungkinan memenuhi kebutuhan keluarga dengan kepemilikan tanah yang kecil (*Small Holding*), dan adanya ketergantungan sektor pertanian pada musim, sedangkan sektor industri tidak.

Karsidi (2003) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil sensus pertanian di Jawa Tengah (BPS, 2003), terdapat kecenderungan penurunan jumlah rumah tangga pertanian selama 10 tahun terakhir, yaitu hanya meningkat 0,47%, atau kenaikan rata-rata pertahun mendekati 0 (nol) atau relatif tetap. Lahan di pedesaan cenderung menyempit karena berubahnya fungsi lahan, yaitu untuk kompleks perumahan. Berdasarkan faktor ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah petani mengalami penurunan karena jumlah lahan sawah yang juga berkurang. Selain itu, hal itu terjadi karena semakin pesatnya perkembangan sektor non pertanian yang hampir berada di setiap pemukiman rumah penduduk pedesaan, sehingga banyak rumah tangga baru, bahkan rumah tangga lama yang terserap di sektor ini.

Luas lahan pertanian juga memengaruhi peluang bagi petani untuk bekerja di sektor nonpertanian. Semakin luas lahan pertanian, semakin rendah peluang petani untuk bekerja di sektor non pertanian. Ini berarti bahwa semakin luasnya lahan pertanian akan memberikan pendapatan keluarga yang lebih tinggi, sehingga petani tidak perlu bersusah payah mencari pekerjaan lain di sektor nonpertanian. Penghasilan yang diharapkan dengan bekerja di sektor non pertanian akan semakin kecil dibanding pendapatan yang didapatkan saat ini di sektor pertanian. Efek ini akan memperkecil kemungkinan untuk bermigrasi (Todaro & Smith, 2003).

Luas lahan pertanian juga memengaruhi efisiensi pengerjaan lahan. Lahan pertanian yang luas akan memberikan skala ekonomis dalam hal pengusahaan bibit, pemberantasan hama, dan juga dalam hal pengerjaan tenaga kerja. Dengan kata lain, nilai produk marginal per tenaga kerja masih positif untuk lahan pertanian yang luas dibandingkan dengan lahan pertanian yang sempit. Ini sejalan dengan teori perubahan struktural dari Lewis (Kuncoro, 2003). Pada sektor yang surplus tenaga kerja dengan produk marginal nol akan terjadi migrasi ke sektor yang kekurangan tenaga kerja dengan produk marginal positif. Dalam kasus penelitian ini, sektor yang produk marginalnya positif adalah sektor-sektor non pertanian yang ditandai dengan masih tingginya rata-rata upah di

sektor tersebut dibandingkan dengan upah sektor pertanian yang hanya cukup untuk memenuhi kehidupan pokok.

Sawah yang tidak luas (*Small Holding*) tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang besar. Keadaan ekonomi seperti ini dialami oleh petani dengan tanah garapan yang tidak terlalu luas yang dimanfaatkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarganya. Biaya hidup yang tidak kecil tersebut tidak dapat tercukupi apabila hanya mengandalkan sawah yang tidak luas. Atas dasar itulah akhirnya keluarga petani bekerja sampingan dengan tenaga kerja keluarga dan satu orang tetangganya.

Alasan lain adalah pertanian tergantung sekali pada musim, sedangkan industri tidak. Hal ini banyak ditemukan pada sistem pertanian yang sangat tergantung sekali pada musim hujan. Pada musim kemarau, biasanya sawah tidak ditanami. Hal ini dikarenakan jika tidak hujan 3 bulan saja, air sungai tidak mengalir dan petani tidak dapat mengairi sawahnya.

4. Faktor Posisi Politik Petani

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993, kebijakan pemerintah selama ini menetapkan bahwa titik berat pembangunan nasional jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, yaitu industri yang

kuat dan ditunjang oleh bidang pertanian yang tangguh. Tumbuhnya kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil di pedesaan telah ikut memacu para petani untuk pindah lapangan kerja. Dengan telah membaiknya tingkat pendidikan di pedesaan misalnya, ada kecenderungan bagi para penduduknya untuk mengenyam pendidikan, sehingga mereka enggan bekerja di sektor pertanian.

Suryana (2006) menyatakan bahwa perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat, baik domestik maupun internasional, akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap dinamika pembangunan pertanian. Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian terhadap arah, kebijakan, dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Dengan demikian, strategi pembangunan pertanian harus lebih fokus pada peningkatan daya saing, mengandalkan modal dan tenaga kerja terampil, serta berbasis pada inovasi teknologi dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal.

Sejak awal 1990-an, seiring dengan menurunnya pangsa pertanian dalam struktur perekonomian, yaitu PDB, pembangunan ekonomi dan kebijakan politik mulai mendiskriminasi sektor pertanian. Fokus pembangunan ekonomi lebih banyak diarahkan pada sektor industri dan jasa, bahkan yang berbasis teknologi tinggi dan *capital intensive*. Namun, ketika krisis ekonomi terjadi, agenda reformasi yang bergulir tanpa arah, proses desentralisasi

ekonomi yang menghasilkan kesengsaraan, dan penderitaan rakyat membuat Indonesia kembali menjadikan sektor pertanian sebagai landasan utama pembangunan ekonomi (Arifin, 2005).

Selama ini, teori ekonomi neo-klasik lebih banyak memberikan perhatiannya pada peran individu dalam kegiatan ekonomi dan mengabaikan peran organisasi atau kelembagaan. Para *entrepreneur* beroperasi melalui perusahaan yang memiliki aturan main tersendiri. Sebagai suatu organisasi, dunia usaha terdiri atas berbagai struktur yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Teori ekonomi organisasi mencoba menjelaskan hal ini melalui suatu pendekatan evolusioner (Bergh, 2004).

Organisasi merupakan elemen krusial dalam struktur ekonomi. Pada dasarnya, pembuatan keputusan dilakukan secara bersama baik di dunia swasta maupun publik. Hal ini berlangsung di dalam organisasi. Organisasi memainkan peranan penting dalam pembuatan keputusan. Ekonomi tradisional mengabaikan organisasi karena mereka percaya bahwa *general equilibrium* terjadi melalui interaksi antar individu.

Peran organisasi ditiadakan atau dengan kata lain dianggap netral. Individu dianggap paling dominan berinteraksi di pasar. Setiap organisasi mempunyai sejarah dan kompleksitas, adaptif, stabil, kaku, menghimpun individu, dan dibentuk oleh individu. Karakteristik dan

dinamika organisasi mempengaruhi pola perubahan pada tingkat makro (Bergh, 2004).

Peranan organisasi ini semakin penting mengingat berkembangnya teknologi transportasi dan telekomunikasi telah menyebabkan jarak bukan lagi masalah utama baik dari sisi waktu maupun biaya. Semakin lama, kualitas transportasi semakin baik dengan biaya yang juga semakin murah. Perkembangan teknologi digital saat ini menyebabkan pengeloaan industri berubah (Stimson, 2002). Banyak usaha dikelola pemiliknya dari jarak jauh dan tidak selalu hadir secara fisik di lokasi usaha. Daerah yang berhasil menyiapkan berbagai fasilitas usaha akan dilirik banyak pengusaha. Tentu saja, setiap wilayah perlu menyiapkan infrastruktur sosial seperti keamanan usaha, sehingga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra.

a. Faktor Psikososio kultural

Menurut Susanto (1978) dalam Ravik Karsidi (2003: 26), manusia dalam suatu proses sosial akan selalu mengalami perubahan, penyesuaian, dan pembentukan diri dengan dunia sekitarnya sesuai dengan idenya. Dalam hal ini, para petani dan penduduk di pedesaan akan selalu mengalami perubahan sebagai suatu proses sosial.

Sedikit atau banyaknya terpaan informasi, baik melalui media massa, kontak pribadi dengan para pemuka masyarakat dan/atau penyuluh dalam komunikasi

industrialisasi pedesaan (khususnya tentang industri kecil) akan ikut mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat dan mengakibatkan terjadinya transformasi pekerjaan mereka dari bidang pertanian ke industri.

Semakin berkurangnya lahan yang dikuasai para petani, sementara jumlah penduduk semakin bertambah, akan menyebabkan sistem pewarisan menjadi sama rata untuk setiap anak. Hal tersebut akan menghasilkan penurunan luas tanah pertanian milik setiap keluarga yang akhirnya akan mengakibatkan kemiskinan di kalangan petani (*agriculture involution*). Ledakan penduduk di negara berkembang yang begitu pesat semakin mempertinggi kemungkinan beralihnya tenaga kerja pertanian tradisional menuju sektor non pertanian yang lebih memberikan jaminan kehidupan sehari-hari. Sebagai kelanjutannya, sektor informal semakin berkembang di daerah-daerah pertanian. Industri-industri di daerah berbasis pertanian, baik industri besar, sedang, kecil, maupun industri rumah tangga yang beragam mulai banyak bermunculan. Dalam situasi kelesuan ekonomi, ternyata sektor-sektor informal lebih banyak memberikan daya tahan hidup atau sebagai “katup pengaman” dalam menampung ledakan penduduk yang masuk ke pasar kerja sementara menunggu kegiatan ekonomi pulih kembali (Simanjuntak, 2003). Diantara deretan angkatan kerja yang bermigrasi ke sektor non pertanian tersebut, menarik sekali untuk diperhatikan

bahwa ternyata sebagian angkatan kerja tersebut adalah para petani wanita rumah tangga yang pada mulanya membantu suami bekerja di sektor pertanian. Peranan petani dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia secara tradisional tidak bisa dianggap remeh.

Faktor lain yang memengaruhi petani di pedesaan meninggalkan pekerjaan pertaniannya karena alasan meneruskan usaha orang lain. Mereka yang termasuk klasifikasi ini pada umumnya bukan berlatar belakang sebagai petani. Orang tua mereka sudah terlebih dahulu bekerja di sektor lain seperti perdagangan dan industri, kemudian ada tuntutan untuk meneruskan usaha orang tua atau bahkan mengembangkannya. Sebagian di antara mereka ada yang berlatar belakang petani, tetapi sekaligus bekerja sambil di sektor nonpertanian. Hal ini terjadi karena meningkatnya tekanan penduduk, semakin terbatasnya pekerjaan pertanian, dan rendahnya upah yang didupatkannya. Sementara itu, peluang bekerja di sektor lain terbuka baginya dan menjanjikan pendapatan yang lebih baik.

Untuk bekerja di sektor nonpertanian, pemuda pedesaan terlebih dahulumenjalani proses sebagai buruh atau ikut bekerja pada pendahulunya, selanjunya baru mencobanya sendiri hingga kemudian lepas sama sekali dari pendahulunya tersebut. Lamanya proses tersebut dapat ditentukan dalam ukuran waktu, tetapi sangat

tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Proses perpindahan dari petani ke pengrajin dapat dikatakan melalui bentuk-bentuk transisi yang cukup lama.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, rumahtangga sebagai konsumen atau produsen harus mampu membuat pilihan dan mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan aktivitas ekonominya. Keputusan yang diambil meliputi keputusan untuk mengalokasikan waktu kerja dan pendapatan dalam melakukan aktivitas produksinya.

5. Faktor Risiko dan Inovasi

Masalah risiko dan ketidakpastian di bidang pertanian bukan merupakan hal baru karena pada kenyataannya, petani telah banyak mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian. Pengambilan keputusan dengan melibatkan faktor risiko atau ketidakpastian tersebut adalah bahwa petani tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam pengambilan keputusan, terdapat banyak kemungkinan yang terjadi. Hal itu bergantung pada faktor-faktor lain di luar kemampuan petani untuk mengontrolnya. Perubahan iklim yang semakin tidak teratur dan ketergantungan pada sawah tadah hujan meningkatkan risiko usaha di sektor pertanian yang dapat memengaruhi petani untuk beralih ke sektor non pertanian.

Risiko produksi terjadi karena variasi hasil yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang sulit diduga, seperti cuaca, penyakit, hama, variasi genetik, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Contohnya antara lain variasi hasil tanaman pangan, bobot sapi ternak, kualitas hasil, pertumbuhan ternak, daya tampung padang penggembalaan, tingkat kematian, dan kebutuhan tenaga kerja. Risiko harga dan pasar biasanya dikaitkan dengan keragaman dan ketidaktentuan harga yang diterima petani dan harga yang harus dibayarkan untuk *input* produksi. Jenis keragaman harga yang dapat diduga yaitu *trend*, siklus, dan variasi harga berdasarkan musim. Tingkat harga dapat berpengaruh pada harapan pedagang, spekulasi, program pemerintah, dan permintaan konsumen.

Risiko usaha dan finansial berkaitan dengan pembiayaan dari usaha yang dijalankan, modal yang dipengaruhinya, dan kewajiban kredit. Risiko usaha menjadi semakin tinggi apabila modal investasi atau pinjaman modal usaha menjadi lebih banyak. Pengeluaran untuk biaya tunai yang semakin tinggi akan meningkatkan risiko tidak tersedianya uang tunai untuk membayar utang dan kewajiban finansial lainnya.

Pengadopsian cara baru mengenai risiko teknologi berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi setelah pengambilan keputusan dan akibat dari cepatnya kemajuan

teknologi. Pengadopsian teknologi baru yang terlalu cepat atau terlalu lambat merupakan risiko yang harus dihadapi. Pembelian suatu alat baru harus memperhitungkan kemajuan teknologi yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dalam waktu yang singkat.

Kemajuan ilmu pengetahuan ternyata menyebabkan sektor pertanian menjadi lebih banyak bersifat padat modal dari pada padat karya. Artinya, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi lebih sedikit dan tergantikan oleh teknologi yang lebih bersifat padat modal. Hal tersebut selanjutnya akan mendorong tenaga kerja di sektor pertanian beralih ke sektor non pertanian (Arief, 2000).

Kemajuan industri selalu terbuka untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg (1400–1460) pertama kali mengembangkan mesin cetak dan pintu revolusi informasi terus-menerus terbuka. Kebijakan yang menggeser penggunaan tanah di Inggris secara tidak langsung juga memberi kontribusi pada pengembangan industri. Pada awal abad ke-13, pemilik tanah feodal membuat probabilitas perubahan pertama, seperti bahan baku tumbuhan dan perubahan hasil panen. Tanpa revolusi pertanian, suatu industri tidak mungkin ada.

Teknologi telah dikembangkan ribuan tahun yang lalu, tetapi revolusi pada akhir abad ke-18 di Inggris menandai dimulainya kemajuan di bidang teknologi yang

lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Menurut Deane (1965), kondisi masyarakat revolusi industri digambarkan berbeda dengan masa sebelum industrialisasi. Pada masa sebelum industrialisasi, masyarakat industri dicirikan mempunyai pendapatan per kapita rendah, stagnasi ekonomi, ketergantungan pada pertanian, tingkat spesialisasi yang rendah, dan integrasi pasar yang sangat kecil. Masyarakat pada masa revolusi industri dicirikan dengan kenaikan pendapatan per kapita yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, ketergantungan yang rendah terhadap pertanian, tingkat spesialisasi yang tinggi, dan pasar yang luas.

Terjadinya monopoli perusahaan multinasional dalam teknologi bibit menyebabkan petani tidak lagi dapat melakukan pengadaan sendiri, harga bibit akan menjadi mahal, petani tergantung terhadap bibit tersebut, dan kemungkinan besar akan menyebabkan tergusurnya petani ke perkotaan (urbanisasi) atau beralih ke pekerjaan lain karena biaya produksi untuk bekerja sebagai petani telah berubah menjadi mahal.

Produktivitas tinggi dalam rumah tangga juga menyebabkan meningkatnya partisipasi angkatan kerja petani. Penggunaan teknologi yang lebih maju untuk barang-barang modal bagi bisnis sepanjang waktu merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan produktivitas waktu dan menaikkan tingkat

upah riil. Sejumlah mesin besar dan peralatannya memungkinkan pekerja untuk menghasilkan *output* dengan waktu yang singkat. Oleh karena itu, adanya barang-barang modal yang bagus dan digunakan oleh rumah tangga akan mempersingkat waktu untuk menyelesaikan produksi dan konsumsinya. Peningkatan barang-barang modal merupakan akibat dari adanya peningkatan produktivitas dalam rumah tangga.

Pendalaman dan Pengayaan Materi

1. Pendalaman Materi

a. **Petunjuk:** Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.

b. **Soal:**

- 1) Apa saja manfaat mempelajari kewirausahaan industri di bidang pertanian dalam upaya menunjang pembangunan ekonomi pedesaan?
- 2) Pada tataran implementasi, banyak sekali petani yang membuka peluang usaha di luar sektor pertanian, paradigma apa yang terjadi berkaitan dengan transformasi industri pertanian? Jelaskan alasannya.
- 3) Salah satu teori yang menjelaskan transformasi wirausaha untuk beralih ke sektor usaha lain adalah "*An Eclectic Theory of Entrepreneurship*". Jelaskan secara singkat mengenai teori tersebut.

- 4) Indikator apa saja yang dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan personal wirausahaberdasarkan aspek permintaan dan penawaran? Sebutkan dan jelaskan.
- 5) Ada beberapa alasan rumah tangga petani melakukan kegiatan di luar industri pertanian. Jelaskan alasan tersebut.
- 6) Ada beberapa strategi pengentasan kemiskinan. Jelaskan dengan menghubungkannya pada pendekatan kewirausahaan industri pertanian, kemudianberilah contohdi pedesaan Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acs, Z.J. dan D.B. Audretsch. 1987. "Innovation, Market Structure, and Firm Size". *Review of Economics and Statistics*. 69(4), 567–574.
- Arief, S. 2000. "Pertanian Indonesia dalam Perspektif Industrialisasi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pendekatan Teoritik Empirik." *Jurnal Studi Indonesia*.7(2)
- Bappeda Kabupaten Semarang. 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Semarang 2011–2015*. Semarang
- BPS. 2006. *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1982–2005*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Carree, M.A. 1997. "Market Dynamics, Evolution and Smallness." Thesis. Amsterdam: Tinbergen Institute.
- Deane, P. 1965. *The First Industrial Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dirjen BPPHP. 2008. *Revitalisasi Pertanian Melalui Agroindustri Pedesaan*. Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian.
- Elan. 2009. "Econometrica: Agregat Demand." *Markets in Action*. 2, 66–72.
- Gartner. 1988. "The Informational Basis of Entrepreneurial Discovery." *Small Business Economics*. Vol. 8/Nomor 6, hlm: 419–430.
- Ghozali, I. 2007. *Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Islam, R. 1987. *Rural Industrialization and Employment in Asia*. New Delhi: ILO ARTEP.
- Janvry, A. de, Elisabeth Sadoulet dan Nong Zhu. 2001. "The Role of Non-Farm Incomes in Reducing Rural Poverty and Inequality in China." *World Development*. 29(3), 467–480.
- Kuncoro. 2003. "Formasi Keterkaitan, Pola Kluster dan Orientasi Pasar: Studi Kasus Sentra Industri Keramik Di Kasongan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta." *Jurnal Empirika*. 16(1)

- Keynes, J.M. 1936. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Mcmillan.
- Mittal, K.C. 2003. *Industrial entrepreneurship*. New Delhi: DEEP&DEEP Publications.
- Patrick, M. 2004. "Informal Sector: Seedbed of Industrial Entrepreneurship". Discussion Paper No.79. Thiruvananthapuram.
- Robbins, S.P. 1998. *Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications*. New Jersey: Prentice Hall.
- Schumpeter, J.A. 1934. *Theory of Economic Development*. Cambridge:Harvard University Press.
- Sri Lestari Hs. 2009. "Kajian Model Penumbuhan Unit Usaha Baru." Deputi Bidang Pengkajian Sumber daya UKMK. Jakarta.
- Sumanto, A. 2009. "Identifikasi Faktor-Faktor Sosial-Ekonomi Migrasi Tenaga Kerja , Kasus Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dari Sektor Pertanianke Sektor Non-Pertanian." *JESP*. 1(2)
- Verheul, I. dkk. 2001. "An Eclectic Theory of Entrepreneurship." Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2001-030/3. <http://www.tinbergen.nl>, 2 Desember 2013, pk. 10.02.
- Wennekers, S. 1997. "The revival of entrepreneurship in the Netherlands". Dalam Welfens, P.J.J. dan C. Graack (para editor). 1997. *Technologieorientierte*

Unternehmensgründungen und Mittelstandspolitik in Europa. Heidelberg: Physica-Verlag.

Zimmerer, T.W. dan Norman M. Scarborough. 1998.
Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Edisi ke-2. New Jersey: Prentice Hall.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRI DI PEDESAAN

Kompetensi Inti

Mampu memahami paradigma transformasi pada industri pertanian, terutama yang berkaitan dengan kerangka konsep pemberdayaan wirausaha sektor pertanian dan industri di pedesaan.

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi arah pengembangan sektor pertanian dan industri.
2. Menjelaskan secara singkat konsep dan model pemberdayaan .
3. Memberikan konsep pemberdayaan wirausaha sektor pertanian dan industri di pedesaan.

A. Arah Pengembangan Sektor Pertanian dan Industri

Pengembangan kewirausahaan sektor industri di perdesaan (agroindustri) sebagai pendukung kewirausahaan di sektor pertanian (agribisnis) diperlukan dengan mempertimbangkan beberapa hal meliputi: pertama, peningkatan jumlah penduduk mempengaruhi ketersediaan lahan pertanian yang semakin terbatas, sehingga penguasaan lahan pertanian oleh petani menjadi sangat sempit. Jika pertanian beroperasi dalam skala kecil, tanah pertanian makin lama makin kecil, dan kelebihan buruh tetap tinggal di pertanian. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian (Departemen Pertanian, 2008).

Kedua, sektor industri pengolahan hasil pertanian meningkatkan nilai tambah dan permintaan produk pertanian. Petani harus meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha, seperti dalam penanganan pasca panen dan pengolahan, karena produk pertanian yang di jual sebagai bahan mentah, akan mendapatkan harga yang rendah. Produk pertanian merupakan produk tidak tahan lama. Hasil produksi yang melimpah, harga jualnya menjadi rendah. Kewirausahaan di bidang pertanian khususnya yang berkaitan dengan pengolahan produk pertanian perlu ditingkatkan sebelum di jual sehingga bisa mendapat harga yang lebih tinggi. Industri pengolahan hasil-hasil pertanian dengan berbasis kewirausahaan selain memberikan nilai

tambah produk pertanian, juga dapat meningkatkan demand produk pertanian, dan kesempatan kerja. Motor penggerak sektor pertanian harus berubah dari usaha tani kepada industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri).

Menurut Departemen Pertanian (2008), untuk mengembangkan sektor pertanian yang modern dan berdaya saing, maka agroindustri harus menjadi lokomotif dan sekaligus penentu kegiatan sub sektor usaha tani dan selanjutnya akan menentukan sub sektor agribisnis hulu. Dalam menunjang pemberdayaan petani di bidang agroindustri ini diperlukan penganekaragaman usaha pertanian. Petani tidak hanya berwirausaha pada proses produksi pertanian saja tetapi mengembangkan usaha pada sektor industri yang berkaitan dengan produk pertanian.

Ketiga, berkaitan dengan penduduk miskin di wilayah pedesaan. Sudah sejak lama Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Berbagai bentuk program telah diterapkan untuk membantu masyarakat. Berbagai skim bantuan juga telah dilaksanakan mulai dari subsidi sarana produksi, bantuan modal langsung, kredit usaha tani, kredit mikro usaha, mitra binaan BUMN dan lain sebagainya yang jumlahnya sangat beragam. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengentaskan kemiskinan, melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah

membuat program yang terbagi dalam empat klaster sebagai berikut. *Pertama*, program kelompok jaring pengaman sosial. Sasaran program ini ditujukan untuk masyarakat yang terdaftar sebagai warga termiskin. Adapun bantuannya berupa hibah, bantuan langsung tunai, dan padat karya. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat. Sasarannya ditujukan bagi warga miskin yang memiliki potensi kerja. Warga miskin ini diberdayakan dengan program kelompok usaha, peningkatan produksi pertanian, dan PNPM. *Ketiga*, pengembangan UMKM. Program ini untuk membantu warga miskin yang memiliki kegiatan usaha. *Keempat*, *supporting program* yang telah berjalan di klaster satu, dua, dan tiga. Berbagai upaya untuk memberdayakan kegiatan ekonomi produktif rakyat miskin atau ekonomi rakyat, tidak mudah dilakukan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Persoalan yang dihadapi bukan sekedar makin terbatasnya sumberdaya, tetapi juga karena keterbatasan mereka sendiri. Sebagian besar usaha pertanian dan industri yang ditekuni oleh masyarakat umumnya masih didominasi usaha berskala kecil, teknologi yang sederhana, sangat dipengaruhi musim, dan hasil-hasil produksinya terbatas hanya untuk konsumsi lokal (Syahyuti, 2003).

Usaha pertanian dan industri di pedesaan secara umum mempunyai skala kecil, organisasi bersifat informal/tidak berbadan usaha, ketiadaan jaminan asset

memberikan keterbatasan kemampuan untuk mengakses sumber-sumber permodalan (Tambunan, 2006). Keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan adalah masalah yang juga cukup serius yang membuat masyarakat miskin menjadi semakin tak berdaya. Namun, demikian, beberapa program terakhir Pemerintah diantaranya adalah penguatan kelembagaan petani seperti melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) atau kelompok usaha belum mampu meningkatkan kemandirian petani. Kelompok usaha tersebut berstatus hukum yang jelas, sehingga para pemilik Modal dan penyedia Modal seperti Perbankan tidak akan lagi memandang sebelah mata terhadap para petani/usaha kecil pedesaan seperti yang dialami selama ini. Namun masyarakat masih berpola pikir lama, yaitu mengharapkan bantuan tersebut dengan terbentuknya bantuan tersebut (Syahyuti, 2007).

Dana Kredit yang diterima digunakan untuk keperluan kenduri, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif keluarga seperti membeli sepeda motor, membeli pakaian baru, memperbaiki rumah. Dana kredit yang diterima tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan adanya kredit itu sendiri. Pembangunan industri, baik industri besar, sedang, maupun industri kecil akan mengalami hambatan di negara yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Modal sosial akan menghasilkan

energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat, yang selanjutnya akan mendorong berkembangnya dunia usaha. Industri besar yang dimiliki para investor lokal maupun asing akan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang memiliki tradisi dan nilai kejujuran (trust), terbuka dan memiliki tingkat empati yang tinggi.

Ditinjau dari aspek manajemen, usaha pertanian dan industri di pedesaan juga mempunyai kelemahan pada bidang organisasi dan manajemen diantaranya adalah berkaitan dengan kelemahan dalam memperoleh akses (peluang) pasar dan memperbesar pangsa pasar. Beberapa usaha di sektor pertanian dan industri di pedesaan hanya memproduksi barang yang bisa/biasa diproduksi bukan yang dibutuhkan pasar. Sebagian usaha pertanian dan industri di pedesaan merupakan usaha turun temurun, bersifat tradisional serta ditandai oleh rendahnya kemampuan manajerial, pengalaman pemilik atau pengelola. Kemampuan untuk mengakses teknologi produksi juga merupakan permasalahan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Usaha yang bersifat tradisional dengan teknologi yang rendah, mudah ditiru menyebabkan posisi tawar yang rendah. UMKM di Indonesia hanya mengandalkan keunggulan pada tenaga kerja yang murah

karena posisi tawar dengan buyer yang rendah (Tambunan, 2006).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (ekonominya) di banyak negara termasuk di Indonesia selain menekankan pentingnya peranan modal alam (natural Capital) dan modal ekonomi (Economic Capital) modern seperti barang-barang modal buatan manusia, teknologi dan manajemen, dan sering mengabaikan pentingnya modal sosial seperti kelembagaan lokal, kearifan lokal, norma-norma dan kebiasaan lokal. Modal sosial saat ini dipandang sebagai komponen penting bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Paradigma pembangunan holistik, yaitu pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi yang sangat memperhatikan aspek spasial, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berbasis komunitas, pembangunan berpusat pada rakyat, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berbasis kelembagaan. Untuk mewujudkan pembangunan yang holistik tersebut diperlukan alternatif strategi, yaitu strategi yang berorientasi pada sumber daya atau Resource Base Strategy, yang meliputi ketersediaan sumber daya, faktor keberhasilan serta proses belajar. Pendekatan ini merupakan strategi pengelolaan sumber daya lokal yang berorientasi pada: kualitas, proses, kinerja, pengembangan, budaya, lingkungan (management by

process) yang berdasarkan pada pembelajaran, kompetensi, keunggulan, berpikir sistematis, dan pengetahuan (knowledge based management).

Pada tingkat ideologis, diperlukan pemberdayaan yang merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up, antara growth strategy dan people centered strategy. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development). Community development adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, *community development* mengandung makna 'membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri', yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya merupakan salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat. Konsep

pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis.

B. Konsep dan Model Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Giarsi (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat. Sedangkan Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi

masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Freire (1992) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan merupakan metode yang berusaha mengubah persepsi termasuk mengubah motivasi atau dorongan seseorang dalam lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi atau dorongan dalam diri seseorang, sebenarnya diperlukan “intervensi” atau “stimulasi” yang berasal dari luar, seperti rangsangan atau “stimulasi” dana bantuan dari pemerintah, lingkungan yang terkait dengannya dan lain-lain. Hal ini karena motivasi seseorang dapat berkembang tidak lepas dari “kemampuan” seseorang yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, pengalaman atau ketrampilan kerja, lingkungan kerja dan budaya yang melekat pada masyarakat tersebut.

Proses membangkitkan keberdayaan itulah menurut Randy dan Riant (2007) dianggap sebagai proses yang tidak instan dan memerlukan beberapa tahap, yaitu: (1) penyadaran, (2) pengkapasitasan, dan (3) pendayaan. Tahap pertama adalah penyadaran, tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Tahap kedua adalah pengkapasitasan yang sering kita sebut sebagai "*capacity building*", atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu lebih dahulu. Memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Tahap ketiga adalah pendayaan, yakni proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

a. Penyadaran

Pada tahap ini sasaran yang akan diberdayakan disuntik dengan pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka berhak untuk mempunyai sesuatu. Jika yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah kelompok miskin, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilaksanakan pada tahap ini ialah memberikan

pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka.

b. Pengkapasitasan (*Capacity Building*)

Pembangunan kapasitas (*Capacity building*), juga disebut sebagai pengembangan kapasitas (*capacity development*), adalah pendekatan konseptual untuk pengembangan yang berfokus pada pemahaman kendala individu, organisasi, dan sistem dalam mewujudkan tujuan-tujuan sekaligus meningkatkan kemampuan yang memungkinkan untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan (UNDP, 2011). Pengembangan kapasitas adalah sebuah proses yang meningkatkan kemampuan orang, organisasi atau sistem untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dinyatakan dan tujuan (Brown *et al*, 2001). Pembangunan kapasitas dapat dilihat sebagai proses untuk menginduksi, atau diatur dalam gerak, perubahan *multi-level* pada tingkat individu, kelompok, organisasi dan sistem yang berusaha untuk memperkuat kemampuan adaptif diri orang dan organisasi sehingga mereka dapat merespon lingkungan yang berubah secara terus-menerus (Morrison, 2001).

Pengembangan kapasitas harus terjadi pada tiga level agar lebih efektif dan berkelanjutan (GTZ-SfDM, 2005):

- 1) Pengembangan kapasitas tingkat individu. Peningkatan kapasitas pada tingkat individu memerlukan pengembangan kondisi yang memungkinkan individu untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada. Hal ini juga melibatkan pembentukan kondisi yang akan memungkinkan individu untuk terlibat dalam "proses belajar dan beradaptasi dengan perubahan". Peningkatan kapasitas pada tingkat individu yaitu keterampilan dan kualifikasi individu, pengetahuan, sikap, etika kerja dan motivasi dari orang yang bekerja dalam organisasi. Pengembangan kapasitas pada level individu dapat dilakukan melalui: pengembangan sumberdaya manusia, khususnya *training*, konsultasi, diskusi (*knowledge sharing*).
- 2) Pengembangan kapasitas tingkat organisasi/ kelembagaan. Lapisan kedua kapasitas adalah tingkat organisasi atau kelembagaan. Pengembangan kapasitas pada tingkat (atau entitas) organisasi, yaitu Karakteristik Organisasi, pengaturan struktur, proses, sumberdaya, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan dan jaringan antar organisasi. Individu membentuk jaringan organisasi dan lembaga, berbagai keterampilan, pengetahuan,

pengalaman, dan nilai-nilai di antara individu dalam kelompok atau menerjemahkan organisasi, dari waktu ke waktu, dalam kapasitas organisasi, yang terdiri dari prosedur, sistem, kebijakan dan budaya. Namun, sementara set kolektif kapasitas individu pada akhirnya diterjemahkan ke dalam kapasitas organisasi dan kelembagaan, yang terakhir jauh melebihi jumlah kapasitas anggotanya. Mengembangkan organisasi atau kapasitas lembaga 'berarti mendorong perubahan dalam sistem kebijakan yang kompleks, sistem, prosedur, peraturan dan budaya organisasi, proses, yang terakhir, endogen dan sukarela, sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi dan lembaga yang melakukan perubahan.

- 3) Tingkat Sistem. Lapisan ketiga di mana pengembangan kapasitas terjadi adalah tingkat sistem. Pada tingkat sistem (atau institusional), seperti misalnya kerangka regulasi, kebijakan dan kondisi kerangka yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan tertentu. Pengembangan kapasitas pada tingkat sistem yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal; aturan dan perundang-undangan, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang

menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran; dan lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja. Tingkat ketiga telah lama diabaikan dalam teori pembangunan dan dianggap eksternalitas untuk proses pengembangan kapasitas, yang secara tradisional berfokus pada individu dan tingkat organisasi. Transformasi dan perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat dan pada saat yang sama, didorong oleh apa yang terjadi di dalam individu dan organisasi yang menyusun masyarakat tersebut.

Pembangunan kapasitas merupakan proses menciptakan "*learning*" organisasi. Peningkatan kapasitas harus disesuaikan dengan situasi tertentu. Kapasitas terdiri dari fase (seperti penilaian, perumusan strategi, implementasi tindakan, pemantauan dan evaluasi, perencanaan kembali) yang terkait erat, namun tidak selalu terjadi dalam urutan linier (Milen, 2001).

Sementara itu, UNDP (2011) memfokuskan pada tiga dimensi yaitu: (1) tenaga kerja (dimensi sumberdaya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan; (2) modal (dimensi fisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung; dan (3) teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan

evaluasi, serta sistim informasi manajemen. Dan United Nations memusatkan perhatiannya kepada: (1) mandat atau struktur legal; (2) struktur kelembagaan; (3) pendekatan manajerial; (4) kemampuan organisasional dan teknis; (5) kemampuan fiskal lokal; dan (6) kegiatan-kegiatan program.

Pengembangan kapasitas adalah upaya untuk memungkinkan orang, organisasi dan sistem untuk menghadapi tantangan dan memenuhi tuntutan. Hal ini merupakan proses yang tidak terbatas, yang dapat berlangsung selamanya karena selalu berubah sesuai kondisi, memaksa organisasi untuk terus mengidentifikasi dan memenuhi tantangan baru. Perkembangan ekonomi baru, perubahan sosial dan budaya, perubahan teknologi, kematangan politik masyarakat menentukan jenis layanan dan kegiatan yang diharapkan dari organisasi sektor publik. Apa yang dianggap sebagai pelayanan yang baik dan cukup hari ini, mungkin tidak relevan dan permintaan lagi besok. Manajemen perlu mengantisipasi perubahan tersebut dan menyesuaikan kapasitas mereka. Siklus pengembangan kapasitas harus terstruktur dan dikelola sebagai proses yang saling berkaitan, berkelanjutan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait: (1) penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas melalui berbagai kegiatan analitis dengan menggunakan berbagai alat dan instrumen; (2) penyusunan rencana jangka menengah

pengembangan kapasitas merupakan tindakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) pelaksanaan program (tahunan) peningkatan kapasitas dapat menggunakan sumber daya sendiri atau sumber daya yang disediakan oleh stakeholder lainnya (seperti pemerintah nasional), dan akhirnya; (4) evaluasi dampak kegiatan peningkatan kapasitas (GTZ-SfDM, 2005)

Pembangunan kapasitas jauh memiliki arti lebih luas daripada kegiatan mengirimkan staf untuk mengikuti program pelatihan. Dalam konteks pengembangan kapasitas, satu hal yang juga harus mempertimbangkan bagaimana peserta pelatihan dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru mereka, misalnya apakah sistem yang bekerja di lembaga masing-masing memungkinkan mereka untuk mencapai kinerja yang baik, seseorang harus menilai Karakteristik Organisasi lembaga dan hubungan dengan institusi lain. Pembangunan kapasitas dapat didefinisikan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk: (i) menganalisis lingkungan mereka, (ii) mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan peluang, (iii) merumuskan strategi untuk menangani masalah ini, isu dan kebutuhan, dan merebut peluang yang relevan, (iv) merancang rencana tindakan, dan (v) merakit dan menggunakan secara efektif sumber daya secara berkelanjutan untuk melaksanakan,

memantau dan mengevaluasi rencana tindakan, dan (vi) menggunakan umpan balik. (ACBF, 2001).

c. Pendayaan (*Empowering*)

Salah satu problem yang dihadapi oleh orang miskin adalah kesulitan mereka dalam mengakses kebutuhan mereka dikarenakan kemampuan yang terbatas. Dalam Teori ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut maka perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya di dalam pasar, karena pasar memiliki fungsi menyediakan barang, mendistribusikan barang dan jasa, melakukan penjatahan dan menetapkan harga melalui mekanisme pasar.

Pada tahap ini yang dilakukan adalah pemberian daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran. Prosedur pada tahap ini cukup sederhana namun kita sering kali tidak cakap menjalankannya, yaitu karena adanya pengabaian terhadap bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran. Pada hakekatnya bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan harus disesuaikan dengan kecakapan penerima.

Pemberian kredit kepada suatu kelompok miskin yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuannya mengelola usaha. Jika perputaran usahanya hanya mampu mencapai Rp 10 juta, maka tidak

bijaksana jika diberikan pinjaman modal sebesar Rp 100 juta.

2. Model Pemberdayaan

Sennet dan Cobb (1972), Conway (1979) dalam Suharto (2005) menyatakan bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketidakberdayaan jaminan ekonomi, kurangnya pengalaman atau akses dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan, dan ketegangan fisik maupun emosional. Usaha pertanian dan industri di pedesaan pada umumnya merupakan usaha rumah tangga, berskala kecil dan menengah. UNDP (Tachiki, 2004) terdapat tujuh bidang utama yang penting terhadap peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah. Tujuh bidang tersebut terdiri dari: akses keuangan, akses pasar, akses promosi, akses infrastruktur, akses jaringan dan akses teknologi. Sementara menurut pertemuan APEC di Ottawa pada bulan September 1997 (Harvie, 2004), terdapat lima bidang utama yang penting terhadap peningkatan kapasitas. Lima bidang tersebut terdiri dari akses ke: pasar, teknologi, sumber daya manusia, pendanaan, dan informasi.

- a. Akses ke pasar. Usaha pertanian dan industri di pedesaan pada umumnya merupakan usaha rumah tangga, berskala kecil dan menengah menghadapi masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan

ukuran dan dalam konteks liberalisasi perdagangan yang cepat, mereka perlu mengembangkan kapasitas untuk memanfaatkan peluang yang timbul dari sistem perdagangan regional yang lebih terbuka.

- b. Akses ke teknologi. Dalam lingkungan ekonomi yang berbasis pengetahuan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi penghubung untuk usaha pertanian dan industri di pedesaan. Namun, ketika usaha tersebut memiliki akses terbatas atau pemahaman tentang teknologi ini, prospek mereka untuk memperoleh dan memanfaatkan keuntungan tersebut berkurang. Peran pemerintah daerah diperlukan (dalam hal perbaikan infrastruktur, biaya, dan pelatihan, serta sebagai informasi yang berkaitan dengan peluang bisnis).
- c. Akses ke sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia untuk usaha kecil di pedesaan memerlukan pendekatan komprehensif termasuk: struktur dan sistem sosial seperti reformasi pendidikan yang luas, dorongan kewirausahaan, akuisisi bisnis keterampilan dan inovasi dalam masyarakat, mekanisme untuk pembelajaran diri dan pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah yang tepat program.
- d. Akses ke pendanaan. Kesempatan untuk mengakses sejumlah kecil keuangan dapat menjadi modal

penting bagi usaha kecil untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang mereka butuhkan. Banyak usaha kecil memiliki kesadaran yang kurang terhadap sumber daya pembiayaan. Program yang tersedia dari bank komersial dan sektor swasta lainnya dan sumber-sumber dana pemerintah mengalami kesulitan mendefinisikan dan mengartikulasikan kebutuhan pembiayaan mereka. Lembaga keuangan harus responsif terhadap kebutuhan mereka dan untuk melanjutkan penyederhanaan dokumentasi perdagangan.

- e. Akses terhadap informasi. Informasi yang akurat dan tepat waktu, misalnya, peluang pasar, bantuan keuangan, akses ke teknologi sangat penting bagi UKM untuk bersaing dan tumbuh dalam lingkungan pasar global. Ini merupakan peran penting pemerintah dan organisasi bisnis yang relevan.

Selain wilayah-wilayah kunci untuk pengembangan kapasitas, yang lain berkaitan dengan pengembangan jaringan bisnis, termasuk pengembangan kerjasama dan aliansi strategis dan inovasi (Harvie, 2004). Jaringan antar perusahaan. Pengusaha yang mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pengusaha lainnya cenderung mengungguli pengusaha yang tidak melakukan hal tersebut. Jaringan adalah sekelompok perusahaan yang menggunakan sumber daya gabungan untuk bekerjasama

pada proyek-proyek bersama. Jaringan bisnis mengambil bentuk yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda. Beberapa terstruktur dan formal, bahkan memiliki legalitas/berbadan hukum. Lainnya bersifat informal, di mana, misalnya, kelompok berbagi ide perusahaan atau mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama yang luas. Beberapa bertujuan berbagi informasi umum sementara yang lain menangani tujuan lebih spesifik (seperti usaha patungan ekspor).

Jaringan mencakup perjanjian dengan badan-badan penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan dan otoritas publik. Jaringan keras lebih terfokus secara komersial, yang melibatkan sejumlah perusahaan terseleksi, kadang-kadang secara formal dan terkait erat melalui joint venture/alianasi strategis. Jaringan dapat memungkinkan percepatan pembelajaran. Jaringan dapat memungkinkan pembagian biaya *overhead* dan eksploitasi ekonomi skala tertentu hadir dalam aktivitas kolektif. Jaringan tidak perlu terkonsentrasi secara geografis.

Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun kontribusi UKM terhadap total kegiatan R & D di negara maju hanya kecil, mereka berkontribusi besar terhadap sistem inovasi dengan memperkenalkan produk-produk baru dan menyesuaikan produk yang ada untuk kebutuhan pelanggan mereka (OECD 2000). UKM memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan perusahaan besar berkaitan dengan kegiatan yang inovatif. Pertama, mereka

kurang birokratis daripada organisasi yang sangat terstruktur, Kedua, banyak kemajuan dalam teknologi yang melibatkan komponen individu, bahan dan teknik rekayasa. Ketiga, lebih mudah untuk mempertahankan minat yang tinggi dalam inovasi di organisasi kecil.

Rothman (1968) dalam Suharto (2005) mengembangkan tiga model yang berguna untuk memahami konsepsi tentang pemberdayaan masyarakat, meliputi: (1) pengembangan masyarakat lokal (*local development*); (2) perencanaan sosial (*social planning*); dan (3) aksi sosial (*social action*). Paradigma ini merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya ketiga model tersebut saling bersentuhan satu sama lain. Setiap komponennya dapat digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

Pemberdayaan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran

dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (Suharto 2005).

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (Suharto 2005).

Uraian di atas menunjukkan bahwa perlu melakukan pemberdayaan serta memperhatikan pendekatan yang paling sesuai untuk mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat lokal pada umumnya mampu memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat karena dengan pemberdayaan lokal secara langsung melakukan intervensi kepada subyek yang akan diberdayakan sehingga memungkinkan efektifitas dalam memberdayakan masyarakat. Selama ini model pemberdayaan telah banyak ditempuh oleh pemerintah maupun kelompok non pemerintah tetapi hasilnya belum maksimal, ini diduga bahwa model yang digunakan belum sesuai dengan obyek yang akan dituju. Sehingga persoalan kemiskinan masih menjadi agenda besar dalam proses pembangunan kita.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat. Kemiskinan biasanya dikenali dari ketidakmampuan sebuah keluarga memenuhi kebutuhan

dasar dan berbagai kaitan yang mencitrakan orang tersebut menjadi miskin. Pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi proses multidimensi dan multisegi yang memobilisasi sumberdaya dan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang teoritis melainkan menjadi alat untuk memutar-balikkan proses pemiskinan.

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengentasan kemiskinan sering dikaitkan dengan beberapa hal berikut (IIC dan Access, 2004):

- a. Tata relasi kekuasaan yang demokratik, transparan dan diakui publik (*good governance*).
- b. Transformasi ekonomi menjadi komunitas yang mandiri, berbasis pada sumberdaya lokal, dan penguatan sumberdaya manusia.
- c. Promosi pengembangan komunitas melalui kekuatan sendiri dan berporos pada proses dibandingkan dengan penyelesaian suatu proyek.
- d. Sebuah proses yang memungkinkan pengambilan keputusan kolektif dan dilanjutkan dengan tindakan kolektif
- e. Partisipasi penuh atau sebuah proses yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tanpa terkecuali) dalam pengembangan agenda komunitas.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*".

Konsep di atas, tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai "*incompatible or antithetical*". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game*" dan "*trade off*" yang bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), "*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*". Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, "*the right kind of growth*", yakni bukan yang vertikal menghasilkan "*trickle-down*", seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni "*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*" (Ranis, 1995).

Secara prinsip, pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Sementara itu, masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, masyarakat sebagai tempat bersama, dan masyarakat sebagai kepentingan bersama (Mayo, 1998) dalam Suharto (2005).

Dalam konteks pembangunan nasional yang telah menetapkan manusia sebagai subyek dan obyek, termasuk di dalam menghadapi perubahan imperatif, diperlukan adanya rasa keberdayaan untuk merumuskan arah kemana perubahan itu akan diupayakan, serta keberdayaan untuk mengelola dampak yang akan timbul dari keberdayaan itu. Ketika keberagaman individu dan pluralitas masyarakat tadi harus menghadapi perubahan dengan tetap menjamin terpeliharanya sendi-sendi kehidupan yang mereka yakini, tentu dipedukan institusi yang mampu merujuk penyamaan persepsi atau pemberian makna yang sama ketika menangkap isyarat perubahan.

Sebagai alternatif pembangunan, *empowerment* memberi tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, secara langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman

langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas dengan asumsi bahwa *civil society* siap memberdayakan isu-isu lokal. Namun Friedmann mengingatkan, bahwa tidak *realistic* apabila kekuatan ekonomi dan struktur luar *civil society* diabaikan, karena pemberdayaan tidak semata-mata dibidang ekonomi tetapi juga secara politik, sehingga masyarakat akan memiliki *bargaining position* secara nasional maupun internasional (Friedmann, 1992). Oleh karena itu, Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasianya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

C. Pemberdayaan Wirausaha di Sektor Pertanian dan Industri di Pedesaan

1. Kerangka Pemberdayaan Wirausaha di Sektor Pertanian dan Industri di Pedesaan

Dalam kerangka pemberdayaan wirausaha di sektor pertanian dan industri di Pedesaan diperlukan upaya sistematis dan operasional yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemberdayaan wirausaha di sektor pertanian dan industri di Pedesaan memerlukan sinergi antara

pengembangan kultur kewirausahaan, pendekatan konsep pembangunan melalui model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat *top-down*, elitis, dan “pemberdayaan” yang lebih bersifat *bottom-up*, berbasis kepentingan kongkret masyarakat (Aziz, 2005). Pendekatan tersebut adalah pendekatan sinergi dengan asumsi bahwa hasil akhir dari suatu program ditentukan oleh banyak faktor seperti modal finansial, modal alam, modal fisik, modal personal (manusia), modal budaya, modal simbolik, modal sosial dan modal kewirausahaan.

Modal juga dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting dalam proses investasi yang tanpa itu tidak mungkin investasi itu dapat berjalan (Coleman, 2000). Pemberdayaan dilaksanakan dengan mengacu pada konsep keberlanjutan: ekologis, sosial-ekonomi, komunitas, dan institusi (Charles, 2001). Keberlanjutan sosial ekonomi mengacu pada tercapainya derajat kesejahteraan sosial ekonomi komunitas ke arah yang lebih baik. Keberlanjutan komunitas mengacu pada stabilitas sistem sosial, terjaminnya peran komunitas dalam pembangunan, adanya akses masyarakat pada sumberdaya dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Keberlanjutan institusi merupakan prasyarat bagi tercapainya tiga dimensi keberlanjutan sebelumnya yang mencakup institusi politik (kapabilitas birokrasi desa), institusi sosial ekonomi (misalnya lembaga keuangan desa dan pasar), dan institusi

sumberdaya yang mengelola sumberdaya. dengan mengutamakan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola modal-modal yang ada dalam diri dan jaringannya.

Pendekatan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kerangka berfikir Woolcock (2001) yang mengintegrasikan tiga tipe modal sosial, yaitu yaitu (1) *social bounding*, yang bekerja pada kelompok-kelompok sosial dan komunitas (2) *social bridging*, yang muncul dan berkembang dalam hubungan antar kelompok-kelompok sosial pada satu komunitas dan (3) *social linking*, yang muncul dan berkembang dalam hubungan antara kelompok-kelompok sosial atau komunitas dengan pemerintah.

Menurut Woolcock (2001), *social bounding* bisa berupa nilai, kultur, persepsi dan tradisi atau adat-istiadat (*custom*). Pengertian *social bounding* adalah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat dalam sistem sosial seperti halnya keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga lain yang masih satu etnik. Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa empati/kebersamaan, mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya. Norma-norma seperti nilai, kultur, persepsi dan tradisi atau adat-istiadat (*custom*) tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Social bridging bisa berupa institusi atau mekanisme. *Social bridging* merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada didalamnya sehingga memutuskan untuk membangun kekuatan dari luar dirinya. Wilayah kerja *social bridging* lebih luas dari *social bounding* karena dapat bekerja lintas kelompok etnik, maupun kelompok kepentingan. *Social bridging* bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi, dan jaringan.

Social linking bisa berupa hubungan atau jaringan sosial. Hubungan sosial dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hubungan antara masyarakat dengan lembaga perbankan atau pemerintah yang dianggap memiliki modal ekonomi yang dapat mendukung kegiatan produksi dan memfasilitasi pemasarannya secara lebih proporsional.

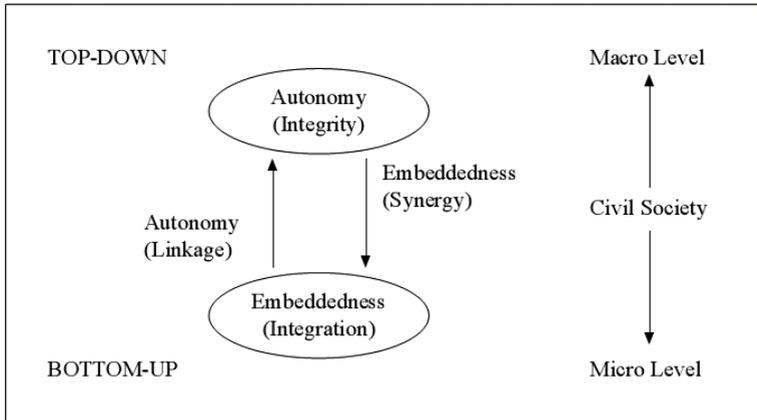
Dalam pembahasan tentang teori modal sosial, Woolcock ((2001) mengembangkan empat model jaringan sosial yang muncul dalam pendekatan pembangunan, yaitu dua model jaringan sosial bersifat *bottom up* dan dua model jaringan sosial yang bersifat *top down*. Dua model jaringan sosial bersifat *bottom up* adalah integrasi (*integrity*) dan jejaring (*linkage*). Integrasi merujuk pada ikatan dalam

komunitas ini sendiri sedangkan jejaring merujuk pada tingkat jangkauan komunitas berhubungan dengan keberadaan sumberdaya sosial yang berasal dari luar komunitas. Dua model jaringan sosial bersifat *top down* yaitu integritas (*integrity*) dan sinergi (*integration/synergy*). Integritas merujuk pada tingkat efisiensi dan efektifitas kelompok-kelompok sosial, koherensi, dan kapasitas kelompok-kelompok sosial, sedangkan sinergi merupakan jaringan eksternal kelompok-kelompok sosial di tingkat atas.

Model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat *top-down* lebih bersifat makro, sedangkan “pemberdayaan” yang lebih bersifat *bottom-up*, berbasis kepentingan kongkret masyarakat lebih bersifat mikro (yaitu dengan pendekatan individual dan rumah tangga). Pada tingkat mikro menciptakan semacam eksternalitas bagi komunitasnya yang bersifat positif, tetapi dilain pihak perlu diingatkan pula adanya eksternalitas negatif yang didapat dari hubungan antar personal (Portes dan Landolt, 1996, dan Fukuyama 1999 dan 2000). Pada tingkat yang lebih luas, yaitu di tingkat meso secara implisit memasukkan hubungan antar group dan memasukkan hubungan vertikal dan horisontal diantara entitas seperti pada perusahaan-perusahaan, sedangkan pada tingkat cakupan makro memasukkan dimensi sosial dan politik,

sehingga membentuk norma-norma kelembagaan secara umum.

Gambar 8.1. Pembangunan *Top Down* dan *Bottom Up*



Sumber : Adaptasi dari Woolcock, 1998

Gambar yang disajikan Woolcock tersebut dapat dijelaskan bahwa sinergi dari jaringan sosial *top down* (*bridging* dan *linking social capital*) berinteraksi dengan jaringan sosial *bottom up* (*bonding social capital*) atau sebaliknya, akan menghasilkan hubungan yang maksimal jika integrasi dalam komunitas didukung oleh kelompok-kelompok sosial yang bekerja secara sinergi dengan pemerintah secara efektif dan efisien. Dari dua interaksi jaringan sosial baik bersifat *top down* maupun *bottom up* tersebut akan menghasilkan derajat hubungan yang berbeda-beda. Kinerja hubungan yang terbaik disebut

beneficient autonomy, yaitu interaksi antar modal sosial model *top down* dengan *bottom up* menghasilkan derajat yang tinggi, sedangkan jika sebaliknya disebut *anarchic individualism*.

2. Studi Kasus di Kabupaten Semarang Jawa Tengah

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Semarang 95.020.674 ha atau 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 24.822,50 ha tanah sawah (26,12%) dan 70.198.125,50 ha (73,88%) tanah kering. Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada 110° 14' 54,75" sampai dengan 110° 39' 3" Bujur Timur dan 7° 30' Lintang Selatan. Pada akhir tahun 2005, jumlah penduduk Kabupaten Semarang mencapai 891.951 jiwa, terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun 2004 yang hanya sebesar 844.889 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 442.265 jiwa laki-laki dan 449.686 jiwa perempuan dengan kepadatan rata-rata 939 jiwa/km². Berdasarkan data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Semarang masih tergolong rendah. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin diperkirakan sebesar 28,80% dari total populasi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak hanya berpusat pada satu wilayah kecamatan, tetapi merata di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang.

Beberapa kecamatan memiliki konsentrasi penduduk miskin yang tinggi, seperti Kecamatan Getasan, Banyubiru, Susukan, Bringin, Pabelan, dan Pringapus. Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah ditempuh menunjukkan bahwa masalah kemiskinan sulit diatasi. Faktor penyebabnya sangat kompleks, mencakup faktor ekonomi dan nonekonomi seperti mentalitas, budaya, lingkungan, keadaan alam, dan struktur sosial serta kehidupan politik. Angka kemiskinan yang masih tinggi sangat berpengaruh terhadap proses pemberdayaan masyarakat (*empowering*) yang merupakan salah satu arah pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Semarang berada pada wilayah pedesaan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang bekerja di sektor pertanian (48,28%). Namun, proporsi sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB masih relatif kecil, yaitu hanya 20,59%. Sebaliknya, sektor industri yang hanya menyerap tenaga kerja 13,20% memiliki sumbangan dalam proporsi terbesar sebesar 40,70%. Sektor lain yang berperan cukup baik terhadap sumbangan PDRB adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang besarnya 17,60%, serta jasa-jasa lain yang besarnya 11,36%. Transformasi sektor pertanian terhadap sektor industri pedesaan di Kabupaten Semarang berkembang pesat. Transformasi yang terjadi bersifat generasional, yakni anak-anak atau

keturunan petani memasuki pekerjaan dan mata pencaharian di sektor industri dan jasa. Sebagian besar pemuda di pedesaan yang mengenyam pendidikan tidak tertarik lagi untuk bekerja di sektor pertanian sebagai buruh tani. Selain itu, mereka tidak memiliki lahan untuk digarap. Apabila mereka memiliki, lahan tersebut terlalu sempit untuk diandalkan.

Dalam 2 (dua) dasawarsa ini, telah terjadi pergeseran peruntukan lahan yang cukup signifikan di daerah pedesaan yang mengalami industrialisasi, yakni dari lahan pertanian bergeser menjadi lahan industri dan fasilitas-fasilitas nonpertanian lain. Peralihan peruntukan lahan adalah terjadinya perubahan struktur jenis pekerjaan di desa dengan banyaknya tenaga kerja yang memasuki dunia industri sebagai buruh pabrik. Hal tersebut sebagai strategi adaptasi angkatan kerja terhadap tekanan perubahan peruntukan lahan dan lajunya pertumbuhan penduduk, sementara kesempatan kerja di pedesaan amat terbatas.

Karakteristik lingkungan pertanian di Kabupaten Semarang ditandai oleh faktor status kepemilikan lahan pertanian oleh petani yang sempit. Luas kepemilikan lahan yang sempit memberikan implikasi kebijakan bahwa wilayah pedesaan yang sudah tidak memberikan peluang peningkatan kesejahteraan petani seperti karena lahan yang terbatas dan tidak memiliki lahan sendiri, maka petani di dorong untuk berwirausaha pada sektor industri selain

sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan mereka, seperti melalui pelatihan, magang dan pengembangan pasar. Pada beberapa wilayah pertanian yang masih memberikan peluang yang baik dalam berwirausaha di sektor pertanian seperti didukung oleh lahan yang subur dan penguasaan lahan petani yang cukup maka pemerintah dapat mendorong petani tetap berwirausaha di sektor pertanian atau berwirasaha di sektor lainnya, serta meningkatkan pemahaman dan *skill* petani bahwa berwirausaha di sektor pertanian bukan saja dipahami sebagai proses produksi tetapi juga perlu ditanamkan jiwa kewirausahaan di sektor pertanian. Pada penguasaan lahan pertanian yang sempit (kurang dari ½ ha) dan bukan lahan pertanian milik sendiri maka petani perlu didorong untuk berwirausaha pada sektor industri selain sektor pertanian, artinya lahan yang ada sudah tidak memberikan peluang lagi dalam mendukung kesejahteraan petani yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini pemerintah perlu mendorong tumbuhnya usaha baru di samping sektor pertanian, seperti di sektor industri selain pertanian yang mendukung kegiatan pertanian. Kebijakan untuk mendorong wirausaha di sektor industri tidak hanya memberikan nilai tambah dari *output* pertanian dan nilai tambah bagi pendapatan tetapi juga dapat menciptakan kesempatan kerja baru di samping penguasaan lahan pertanian yang semakin sempit.

Kabupaten Semarang secara umum merupakan daerah subur. Komoditi utama yang dihasilkan dalam rangka pembangunan pertanian adalah: padi, jagung, dan kedelai. Komoditas hortikultura juga banyak terdapat di Kabupaten Semarang, seperti buah, sayuran dan tanaman hias. Komoditas tanaman buah diantaranya adalah pisang, alpukat, kelengkeng, durian, pisang, salak dan nangka. Komoditas sayuran diantaranya adalah: kubis, tomat, sayuran, daun bawang, wortel, lombok/ cabe dan selederi. Komoditas tanaman hias diantaranya adalah: gladiol, sedap malam, krisan dan aster. Hasil produksi pertanian hanya diperuntukkan di dalam negeri saja sedangkan untuk ekspor belum dapat terpenuhi.

Integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan permintaan produk pertanian. Hasil komoditi buah-buahan dikonsumsi baik segar, dimasak, makanan kaleng, dalam bentuk jus, ditemukan dalam beragam bahan makanan-makanan penutup, salad buah, selai, *yoghurt*, es krim, permen dan sebagai pelengkap hidangan daging. Daging dan jus nanas yang digunakan dalam masakan di seluruh dunia. Di banyak negara tropis, komoditi buah-buahan disiapkan, dan dijual di pinggir jalan sebagai camilan. Komoditi buah-buahan tidak hanya digunakan dalam makanan penutup seperti salad buah, tetapi juga sebagai bahan utama dalam masakan, seperti di hamburger, dan

sebagai pizza. Beberapa komoditi buah-buahan yang digiling digunakan dalam makanan: yoghurt, selai, permen, dan es krim. Jus nanas disajikan sebagai minuman, dan juga sebagai bahan utama dalam koktail seperti colada. Komoditas hortikultura dikonsumsi baik segar, dimasak, makanan kaleng atau digunakan untuk bahan baku jenis industri, yaitu: (a) Industri pangan, sebagai makanan tambahan (*food supplement*), produk yang langsung dikonsumsi dan *flavour*, (b) Industri farmasi dan kesehatan, (c) Industri kosmetika, (d) Industri pertanian, sebagai pupuk, suplemen hidroponik, suplemen untuk media kultur jaringan dan penambah nutrisi pakan ternak.

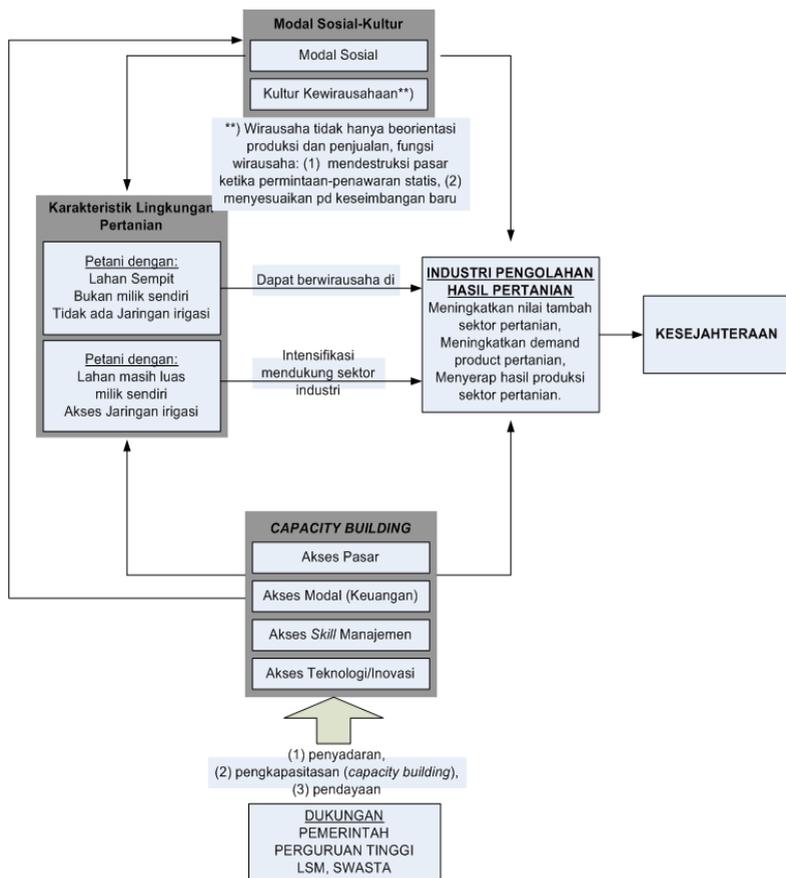
Upaya pemberdayaan petani untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (diukur dari pendapatan petani) dapat dilakukan dengan melibatkan 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) faktor pemberdayaan: kesadaran, pengkapasitasan dan pendayaan, (2) pelibatan peran faktor modal sosial, (3) pengembangan faktor kultur kewirausahaan. Ketiga faktor tersebut juga perlu memperhatikan karakteristik lingkungan pertanian.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani di perdesaan Kab. Semarang, diperlukan sinergi antara industri perdesaan dan industri perkotaan. Berdasarkan Laporan Dinas Pertanian dalam buku Kab. Semarang dalam Angka Tahun 2009, industri di Kab. Semarang yang berada di wilayah perdesaan atau

pinggiran perkotaan (*sub-urban*) merupakan industri yang berbasis pertanian atau industri pengolahan hasil pertanian. Untuk itu Kab. Semarang dalam kebijakan pembangunan pertanian berorientasi pada industri berbasis pertanian. Hal tersebut berdasarkan alasan: 1) bahwa bahan baku untuk industri pertanian yang tersedia di Kab. Semarang melimpah di perdesaan. 2) tenaga kerja yang tersedia di wilayah perdesaan Kab. Semarang dapat diberdayakan dengan memberi peluang kerja untuk mencegah urbanisasi. 3) Industri perkotaan di Kab. Semarang merupakan industri besar sehingga dapat menjadi industri yang menggabungkan berbagai komponen sehingga industri usaha di wilayah perdesaan menghasilkan keuntungan yang optimal.

Dalam rangka sinergi antar industri perdesaan dan perkotaan ini pemerintah Kab. Semarang mempunyai kebijakan ikut meningkatkan inovasi dan kreatifitas melalui pelatihan dan pendidikan terhadap kelompok industri penunjang yang menghasilkan komponen dan *parts* serta hasil-hasil industri antara sebagai penunjang usaha lainnya yang dapat ditumbuhkan di wilayah perdesaan. Kebijakan pengembangan kewirausahaan sektor industri di perdesaan tersebut sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kab. Semarang (BAPEDA Kab. Semarang, 2009).

Gambar 8.2. Model Pemberdayaan Wirausaha di Sektor Pertanian dan Industri



Selain wilayah-wilayah kunci untuk pengembangan kapasitas, yang lain berkaitan dengan pengembangan jaringan bisnis, termasuk pengembangan kerjasama dan

aliansi strategis dan inovasi (Harvie, 2004). Jaringan mencakup perjanjian dengan badan-badan penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan dan otoritas publik. Jaringan keras lebih terfokus secara komersial, yang melibatkan sejumlah perusahaan terseleksi, kadang-kadang secara formal dan terkait erat melalui joint venture/aliansi strategis. Jaringan dapat memungkinkan percepatan pembelajaran. Jaringan dapat memungkinkan pembagian biaya *overhead* dan eksploitasi ekonomi skala tertentu hadir dalam aktivitas kolektif. Jaringan tidak perlu terkonsentrasi secara geografis.

Pendalaman dan Pengayaan Materi

1. Pendalaman Materi

- a. **Petunjuk:** Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.
- b. **Soal:**
 - 1) Bagaimana arah pengembangan sektor pertanian dan industri?
 - 2) Jelaskan secara singkat beberapa konsep dan model pemberdayaan.
 - 3) Buatlah kerangka model pemberdayaan konsep pemberdayaan wirausaha sektor pertanian dan industri di pedesaan dengan mengambil studi kasus di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang?

DAFTAR PUSTAKA

- [BKKBN] Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1992. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jakarta: BKKBN.
- Abu Samah, Asnarulkhadi dan Fariborz Aref . 2009. Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia. *World Rural Observations* 2009; 1.2.:63-68
- Access. 2004. *Pemberdayaan manusia untuk kemiskinan*. Diakses 25 Mei 2011 di <http://www.access-indo.or.id/documents>
- Ahmad Wito. 2000. *Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta : UGM
- Alfiasari . 2008. *Analisis Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Kerdung Jaya, Kec Tanah Sereal Kota Bogor*. Tesis IPB tidak dipublikasikan
- Aziz SR, Abdul. 2005. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus. Dalam Burhan Bungin .ed.. Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Badan Pusat Statistik. BPS. 2001. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Diakses 25 Mei 2011 di <http://www.bps.go.id/publikasi/inkesra/inkesra2010.pdf>

- Bartle. 2003. *Key Words C of Community Development, Empowerment, Participation*: Diakses 25 Mei 2011 di <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>.
- Biro Pusat Statistik. 2009. *Profil Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- Bourdieu. 1986. *The Form of Capital*. In J. Richardson .Ed. *Handbook of Theory and Research for Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- BPS. 2008. *Profil Kemiskinan di Sulawesi Tenggara, Maret 2008*. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
- Brehm, J., dan Rahm, W. 1997. Individual-level evidence for the causes and consequences of social capital. *American Journal of Political Science*; 41[3]: 999–1023.
- Brown, J., Collins. 1995. *Situated cognition and the culture of learning*. *Educational Researcher*, Vol. 18, pp. 32-42.
- Bryant, C, White. L, 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Chambers, R. 1995. *Poverty and Livelihood: Whose Reality Count? Dalam: People From Improverishment to Empowemnet*. New York: Uner Kirdar dan Leonard Silk .Eds., New York University Press.
- Chan, Raymond K.H., Chau Kiu Cheung dan Ito Peng. 2002. Social capital and its relevance to the Japanese-model welfare society. *International Journal Of Social Welfare Issn 1369-6866. Int J Soc Welfare 2004: 13: 315–324*
- Charles. 2001. *Pengantar Kebijakan Publik*, PT Rajawali Press: Jakarta

- Chavez, R., Kemp, L., Harris, E. The social capital: Health relationship in two disadvantaged neighborhoods. *Journal of Health Services Research and Policy*; 9 [Sup. 2-4]: 29-34.
- Cheyne, Christine, Mike OBrien dan Michael Belgrave .1998., *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*, Auckland: Oxford University Press.
- Coleman, J. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- . 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Cook. 1994. Pemberdayaan Cook, S. .1994., The cultural implications of empowerment, *Empowerment in Organizations*, Vol. 2 No. 1, pp. 9-13
- Cramb, R.A. 2005. Social capital and soil conservation: Evidence from the Philippines. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*; 49[2]: 211-226.
- Daiz, H.L., Drumm, R.D., Ramirez-Johnson, J., and Oidjarv, H. 2002. *Social capital, economic development and food security in Perus mountain region*. *International Social Work* 2002; 45[4]: 481-495.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2009. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri – KP 2009. Dirjen Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2000. *Farm Household Livelihood Strategies and Socio Economic Changes in Rural Indonesia*, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, Kiel.

- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara .2008. *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Sulawesi Tenggara 2001-2007*
- Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. P3K. 2007. *Studi Tentang Indikator Kesejahteraan Masyarakat Pesisir*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dreier, Peter.1996. Community Empowerment Strategies: The Limits and Potential of Community Organizing in Urban Neighborhoods. *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research Volume 2, Number 2 May 1996*
- Evans, E. N. 1992. Liberation Theology, Empowerment Theory and Social Work Practice with the oppressed, *International Social Work*, 35, 135-147
- Fafchamps, M. dan Minten, B. 1999. Evidence from agricultural trade. Social Capital Initiatives *Working Paper No. 17*. Washington, D.C.: The World Bank
- Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge: Blackwell Publishers.
- Fukuyama F. 1995. *Trust: the social virtues and the creation of prosperity*. New York, Free Press.
- Fukuyama F. 1997. *Social capital: the problem of measurement*. [cipe.org/mdf1997/Retrieved April 6, 2001 from http://www.socicap.htm](http://www.socicap.htm)
- Fukuyama F. 1999. *Social capital and civil society*. Paper presented at the IMF Conference on Second Generation Reforms, Washington, DC, 8–9 November.
- Furukawa S. 2000. An institutional framework for Japanese crisis management. *Journal of Contingencies and Crisis Management* 8.1.: 3–14.

- Giardi, G.G. 2001. Caught in Nets: A Critical Examination of the Use of the Concept of Network in Community Development Studies, *Community Development Journal* Vol.36 .1.: 63-71, January 2001 , Oxford University Press.
- Girvan Norman. 2006. Caribbean Dependency Thought Revisited, *Canadian Journal of International Studies*, Vol. XXVII, No. 3; 327-350.
- Grootaert, C. 1999. Social capital, household welfare, and poverty in Indonesia, *Local Level Institutions Working Paper No. 6*, Washington D.C.: The World Bank.
- Grootaert, C. dan Narayan, D. 2000. Local institutions, poverty, and household welfare in Bolivia. *Local Level Institutions Working Paper No. 9*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Haddad, Lawrence dan John Maluccio. 2000. *Social Capital and Household Welfare in South Africa: Pathways of Influence*
- IIC dan Access, 2004. *Inter-American Investment Corporation. Annual Report*.
- Isham, J., Kähkönen, S. 1999. What determines the effectiveness of community-based water project? Evidence from Central Java, Indonesia on demand responsiveness. *Service Rules and Social Capital. Social Capital Initiative Working Paper No. 14*. Washington, D.C.: The World Bank
- Kamarni. 2010. *Analisis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*

- Kawachi, I., Kennedy, B.P., Glass, R. 1999. Social capital and self-rated health: A contextual analysis. *American Journal of Public Health*; 89[8]: 1187–93.
- Kawachi, I., Kennedy, B.P., Lochner, K., Prothrow-Stith, D. 1997. Social capital, income inequality, and mortality. *American Journal of Public Health*; 87[9]: 1491–98.
- Krishna, A., Shrader, E. 1999. *Social capital assessment tool. Paper presented at the Conference on Social Capital and Poverty Reduction, The World Bank, Washington, D.C*
- Kusnadi. 2002. *Polemik Kemiskinan Nelayan*, Jogjakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Humaniora, Bandung, 2006.
- Manzilati. 2009. *Tata Kelola Kelembagaan . Institusional Arrangement. Kontrak Usaha Tani Dalam Kerangka Persoalan Keagenan. Principal Agent Problem. dan implikasinya Terhadap Keberlkanjutan Usaha Tani*
- Martin, K.S., Rogers, B.L., Cook, J.T., Joseph, H.M. Social capital is associated with decreased risk of hunger. *Social Science & Medicine* 2004; 58[12]: 2645–2654.
- Mauro, P. 1995. Corruption and growth. *Quarterly Journal of Economics* 110 .3., 681-712.
- Mauro, P. 1998. Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics* 69: 263-279.
- Menkokesra. 2010. *Data dan Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat*. <http://data.menkokesra.go.id/>

- Mubyarto, L., Soetrisno, Dove, M. 1993. *Nelayan Dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mubyarto. 1999. *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*, Mubyarto, Sinar Harapan, Jakarta
- Narayan, D., and L. Pritchett. 1999. Cents and sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania, *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 47, No. 4: 871-897.
- Narayan, D., dan Cassidy, M.F. 2001. A dimensional approach to measuring social capital: Development and validation of a social capital inventory. *Current Sociology* 2001; 49[2]: 59-102.
- Nikijuluw, V.P.H. 2001. Sumberdaya Laut dan Pantai untuk Penanggulangan Kemiskinan. Makalah Seminar Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Melalui Pelestarian Fungsi Sumberdaya Alam. *SOCSEA*, 14 Agustus 2001
- Norman, 1993. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Bumi Aksara: Jakarta
- Ostrom and T.K. Ahn. 2000. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- , 1995. *Making Democracy Work: Civil Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- , Leonardi R., Raffaella Y. N. 1993. Social Capital and Institutional Success. In Elinor
- , D. Narayan. 2000. Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy. *World Bank Research Observer*, 15.2., August, 225-49. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of*

- Social Capital. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Pearse, Andrew and Michael Stiefel. 1979. *Inequality Into Participation: A Research Approach*, Geneva, UNRISD.
- Portes, A. and Landolt, P. 1996. The Downside of Social Capital. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* ISSN: 1750-6204
- Portes, Alejandro. 1998. *Social capital : Its Origins and Applications in Modern Sociology*. New Jersey. Princenton University
- Prijono dan A.M.W Pranarka .eds., 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, hal.44-4
- Putnam, R.D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *American Prospect*, 13, Spring, 35- 42. In *Elinor*
- Randy R. dan Riant Nugraha Dwidjowito. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta : Elex Media Kumpotindo.
- Ranis, Gustav.1995. *Reducing Poverty: Horizontal Flows Instead of Trickle Down, dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk .ed.. People: From Impoverishment ToEmpowennent*. New York: New York University Press.
- Rappaport. 1987. Terms of Empowerment: Toward a theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*. Vol. 15.No.2: 15-16
- Reid, C., Salmen, L. 2002. Qualitative analysis of social capital: The case of agricultural extension in Mali. In: Grootaert, C., van Bastelaer, T., eds. *Understanding and Measuring Social Capital: A*

- Multidisciplinary Tool for Practitioners*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Ridwan. 2008. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir .Studi Kasus Penerapan Program PEMP dan Proyek P4K di Jawa Timur*
- Sakata, S. 2002. *What is social capital? In: Social Capital and International Cooperation*. Tokyo: Japan International Cooperation Agency .in Japanese.
- Satria, Arif. 2002. *Negeri bahari yang melupakan nelayan*. <http://www.beritamaritim.com/berita/01//11.shtml>. [27 Juni 2008].
- Semeru. 2002. *Ukuran Objektif Kesejahteraan Keluarga untuk Penargetan Kemiskinan: Hasil Uji Coba Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat di Indonesia*.
- Serageldin, I. 1998. *Making Development Sustainable dalam Making Development Sustainable : From Concept to Action, Environmentally Sustainable Development Occasional. Paper Series No. 2. The World Bank, Washington DC Shardlow* .
- Subejo dan Supriyanto. 2004.: *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*.SOREm: Dewan Mahasiswa Fak Pertanian, UGM, 16 Mei 2004.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Sutrisno, L. 1999. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan* Kanisius, Yogyakarta.

- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2003. *Kemiskinan Dan Kebijakan Pembangunan*. Aditya. Media. Yogyakarta.
- Usman, S. 1995. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Van Ha, Nguyen, Sashi Kant dan Virginia Madsen. 2004. *The Contribution of Social Capital to Household Welfare in a Paper-Recycling Craft Village in Vietnam*
- Wahyono, Ary, Sudiyono, dan Fadjar Ibnu Thufail, 1993. *Hak Ulayat Laut Desa Para Kecamatan Manganitu, Sangihe Talaud*. Jakarta, Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI
- Widiastuti. 2006. *Program PEMP di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*
- Woolcock, M. 1998. Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. *Theory and Society*, 27 .1.,151-208. *In Elinor*
- Woolcock, Michael. 2001. Microenterprise and social capital: A framework for theory, research, and policy, *The Journal of Socio-Economics, Elsevier, vol. 30.2.*
- Woolcock, Michael. 2001. Microenterprise and social capital:: A framework for theory, research, and policy, *The Journal of Socio-Economics, Elsevier, vol. 30.2.*
- World Bank. 2000. *Making the Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia*. World Bank. April 2000. Draft.

- World Bank. 2001. *The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe – A Regional Strategy Paper*. Washington, DC.
- World Bank. 1993. *World Development Report*. World Bank, Washington DC.
- World Bank. 1997. *World Development Report: The State in a Changing World*. Oxford University Press.
- World Bank. 1999. *World Development Indicators*. World Bank, Washington DC.
- Wu, B. dan Pretty J. Social connectedness in marginal rural China: The case of farmer innovation circles in Zhidan, North Shaanxi. *Agriculture and Human Values*; 21[1]: 81–92.